

**GERAKAN POLITIK KELOMPOK MUSLIM SYT'AH
DI LEBANON
(Studi Kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan Perlawanan Menjadi
Partai Politik Tahun 1992-2009)**

TESIS

**FRIANE AURORA
0806450514**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JANUARI 2010**

**GERAKAN POLITIK KELOMPOK MUSLIM SYPAH
DI LEBANON
(Studi Kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan Perlawanan
Menjadi Partai Politik Tahun 1992-2009)**

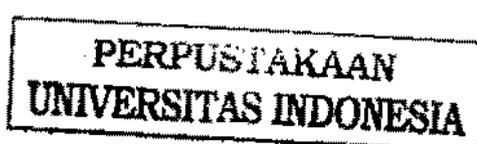
TESIS

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si)
dalam Bidang Politik dan Hubungan Internasional pada Program Studi
Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia**

**FRIANE AURORA
0806450514**



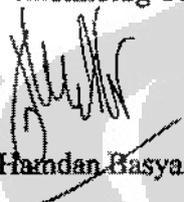
**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JANUARI 2010**



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Friane Aurora
NPM : 0806450514
Kekhususan : Politik Hubungan Internasional
Judul Tesis : "Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah di Lebanon
(studi kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan
Perlawanan Menjadi Partai Politik Tahun 1992-2009)"
Tanggal disetujui : 17 Desember 2009

Pembimbing Tesis


(Drs. Hamdan Basyar, M.Si)



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Friane Aurora

NPM : 0806450514

Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam

Judul Tesis : Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah di Lebanon
(Studi Kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan
Perlawanan Menjadi Partai Politik Tahun 1992-2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si

Pembimbing : Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si

Penguji : Achmad Ramzy Tadjoedin

Pembaca Ahli : Prof. Dr. Amany Lubis, MA

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

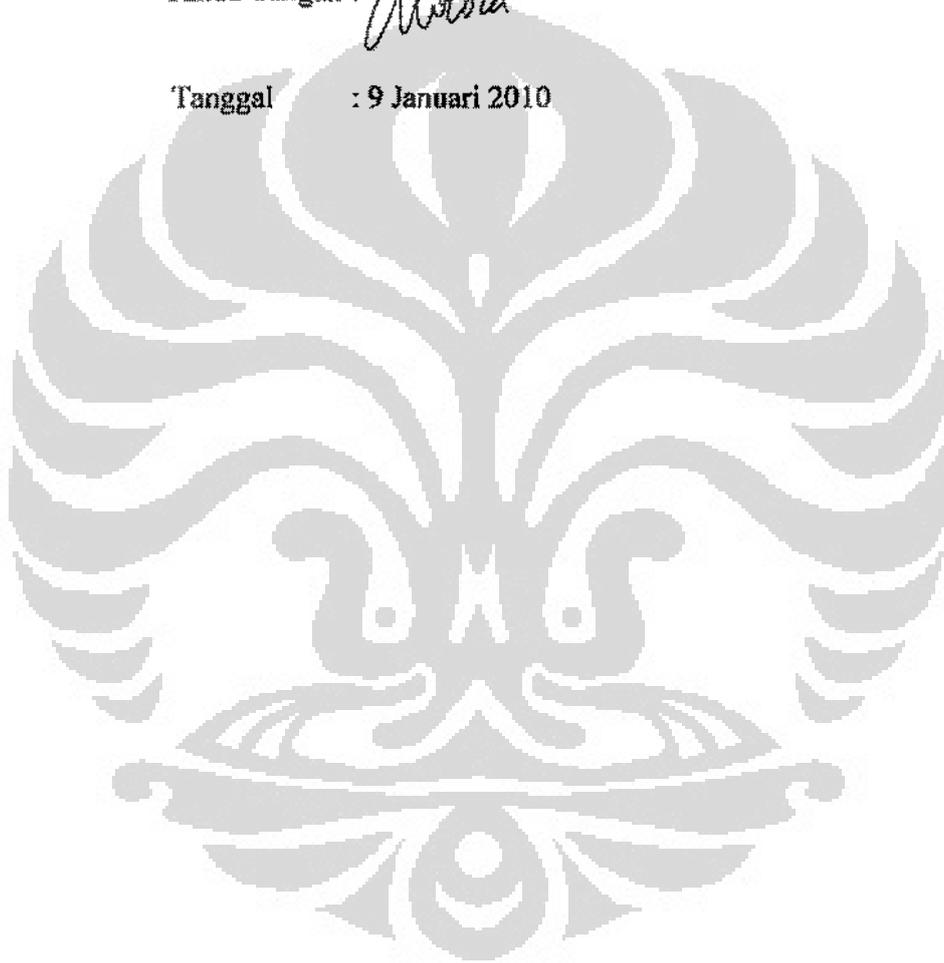
**Tesis ini adalah karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Friane Aurora

NPM : 0806450514

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Januari 2010



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friane Aurora
NPM : 0806450514
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

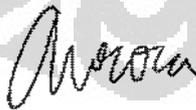
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi’ah di Lebanon (studi kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan Perlawanan Menjadi Partai Politik Tahun 1992-2009)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2010
Yang Menyatakan



(Friane Aurora)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji hanya untuk Allah Yang Maha Menciptakan dan Memelihara Ciptaan-Nya. Hanya dengan karunia, rahmah, dan pertolongan Allah tesis ini dapat penulis selesaikan. Penulis mengangkat judul "Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah di Lebanon dengan Studi Kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan Perlawanan Menjadi Partai Politik Tahun 1992-2009" sebagai judul penelitian tesis ini

Shalawat serta salam penulis haturkan pada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallama atas segala perjuangan dan usaha beliau hingga cahaya iman, Islam, dan dakwah dapat sampai kepada kita saat ini. Bagi seorang muslim Rasulullah merupakan tauladan terbaik karena kesempurnaan akhlaq dan keterjagaannya dari dosa dan kesalahan. Cinta beliau kepada umatnya hingga akhir zaman dan besarnya pengorbanan serta beratnya perjuangan beliau untuk mendakwahkan Islam dan menyampaikan nikmat beriman, berislam, dan berdakwah sehingga kita saat ini dapat menikmati manisnya iman, indahnya Islam, dan nikmatnya dakwah.

Selama mengerjakan tesis ini penulis telah diberi Allah begitu banyak kenikmatan. Di antara sebagian kenikmatan itu adalah beragam do'a dan dukungan untuk penulis. Untuk itu, penulis menghaturkan rasa terima kasih dan do'a semoga kebarokahan dan keridhoan Allah senantiasa diberikan-Nya kepada :

1. Prof. Dr. Mustafa Edwin Nasution, M.A. selaku mantan Ketua Prodi Program Studi Timur Tengah dan Islam serta Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi. selaku Ketua Program Studi PSTTI saat ini atas segala kemudahan dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menjalani studi
2. Bapak Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak menuntun, mengkritisi, memberi masukan, dan memotivasi penulis untuk dapat sungguh-sungguh dan segera menyelesaikan tesis ini. Sungguh betapa besar jasa dan kebaikan serta nasihat-nasihat berharga yang telah Bapak berikan baik selama perkuliahan maupun selama pengerjaan tesis ini baik mengenai materi perkuliahan dan tesis maupun mengenai ilmu kehidupan

3. Bapak Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA, Bapak Zainuddin Djafar, PhD., dan seluruh dosen PSTTI atas berbagai ilmu dan inspirasi serta dukungan yang telah diberikan selama perkuliahan maupun dalam seminar dan sidang tesis serta kebaikan para dosen untuk mengizinkan kami, para mahasiswa mengcopy banyak buku-buku yang sarat ilmu dan manfaat.
4. Bapak Dr. Hanief Saha Ghafur, M.Si atas segala ilmu yang telah Bapak berikan baik dalam perkuliahan metodologi penelitian maupun dalam berbagai masukan mengenai tesis ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Ibu Prof. Dr. Amany Lubis, M.A atas segala dukungan dan masukan selama Sidang Tesis 2 sehingga penulis dapat memperbaiki tesis ini menjadi lebih baik dan penulis termotivasi untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya
6. Almarhum Bapak Drs. Soesiswo Soenarko, M.A. dan Almarhum Bapak Prof. Dr. Badri Yatim, M.A atas segala ilmu yang telah diberikan pada penulis dan membuat penulis memahami arti amanah dan pengabdian sebagai seorang dosen
7. Mbak Herlin, Pak Hidayat, Pak Ferry, Pak Erwin, Mbak Tuti, dan staf administrasi PSTTI lainnya yang telah sangat ramah dan kooperatif membantu kelancaran studi penulis selama di sana.
8. Para pengurus perpustakaan pascasarjana UI atas berbagai kemudahan dan kerjasama selama penulis menjadikan perpustakaan sebagai tempat utama untuk mengerjakan tesis
9. Ucapan dan do'a paling khusus dan istimewa penulis haturkan pada Papi dan Mami di Jambi atas do'a, motivasi, dan dukungan moriil dan materiil yang telah diberikan. Sungguh betapa penulis mencintai dan menyayangi Papi dan Mami serta senantiasa mendo'akan dan mengharapkan kehidupan terbaik di dunia dan akhirat untuk keduanya
10. Kedua adikku, Caca dan Ibil atas kesediaan kalian berdua untuk menyayangi, memahami dan menerima berbagai kekuranganku sebagai seorang kakak yang telah merantau jauh sejak kalian masih kecil
11. Abi Syathori dan Ummi Mashbihah di Daarush Shalihaat atas segala ilmu dan ketulusan serta do'a dan cinta yang telah diberikan selama penulis ada di Jogja

12. Teman-teman Daarush Shalihaat angkatan IV dan Dhiyaush Shalihah terkhusus Lintang, Mbak Dewi, Mbak Galuh, dan Mbak Diana atas curhatan-curhatan dan diskusi panjang yang filosofis, berat, namun mengasyikkan
13. Teman-teman Gerakan Anti Pornografi dan Pornoaksi Yogyakarta yang telah merelakan kepergianku ke Jakarta untuk meneruskan kuliah kembali
14. Lina, Dinda, Nopi, Rezka, Ori, Wandu, Andi, Tria, dan Pak Latif atas kekompakan dan ukhuwah yang indah di Jama'ah Sholahuddin UGM
15. Terkhusus untuk almarhumah Mbak Fitri Yunita sebagai mas'ul pertamaku di JS atas segala ketulusan, cinta, dan ilmu yang telah Mbak berikan sebab tanpa bimbingan dan kepercayaan serta ilmu dakwah yang mbak berikan seorang Rara tidak dapat menjadi seperti saat ini
16. Teman-teman Hubungan Internasional UGM angkatan 2003 terkhusus Ria, Rully, Vivi, Septa, Gonda, dll yang telah memberi dukungan dan do'a selama penulis menyelesaikan studi di PSTTI
17. Bu Heni dan teman-teman pekananku atas do'a, ukhuwah yang indah, dan ilmu kehidupan yang begitu banyak penulis dapatkan dari kalian
18. Sukma, Mbak Heni, dan Mbak Munah, teman-teman kos yang mewarnai hari-hariku dengan curhat, diskusi, dan keceriaan
19. Asatidz di Ma'had 'Aly ibn Abi Thalib Jogja, Ma'had Dzunnurrain Jakarta, dan Ma'had Al-Manar serta teman-teman sekelas di ma'had atas segala ilmu, kebaikan, dan keceriaan yang penulis dapatkan selama kebersamaan kita
20. Terkhusus untuk Mbak Fifi, Mbak Indri, Mbak Nur, Pak Yan, Pak Tori, Pak Yubil, Zul, Pak Nunu, Wawa, dan Pak Didik, teman-teman PHI PSTTI UI angkatan XV dan XVI atas segala ukhuwah dan ilmu serta kebaikan yang telah penulis dapatkan selama kebersamaan kita, terkhusus untuk Mbak Fifi yang telah menemani penulis selama proses penelitian dan penulisan tesis ini

Salemba, Jakarta

Desember 2009

Friane Aurora

ABSTRAK

"Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah di Lebanon (Studi Kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan Perlawanan Menjadi Partai Politik Tahun 1992-2009)"

Friane Aurora

Politik dan Hubungan Internasional

Hizbullah merupakan salah satu Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah yang ada di Lebanon. Pendirian Hizbullah tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan politik Kelompok Muslim Syi'ah yang dipelopori oleh Imam Musa Al Shadr, kondisi sosial politik Lebanon pada tahun 1980-an, agresi Israel ke Lebanon tahun 1982, dan dukungan materiil dan moril Iran kepadanya. Pada awalnya Hizbullah hanya melakukan aktivitas perlawanan dalam perjuangannya membebaskan Lebanon dari penjajahan Israel. Namun, sejak tahun 1992 ia memutuskan untuk menjadi partai politik dengan tetap konsisten menjalankan aktivitas perlawanannya terhadap Israel. Permasalahan mengenai transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan murni menjadi partai politik Lebanon sejak tahun 1992 hingga 2009 inilah yang menjadi objek penelitian ini.

Ada tiga permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu mengenai latar belakang transformasi Hizbullah menjadi partai politik pada tahun 1992, dampak transformasi tersebut terhadap aktivitas perlawanannya dan strategi Hizbullah untuk menyelaraskan aktivitas perlawanan dan politiknya. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan konsep jihad sebagai konsep yang menjadi prinsip gerakan perlawanan dan politik Hizbullah, teori struktur kesempatan politik dan teori mobilisasi sumber daya sebagai bagian dari teori gerakan sosial, serta teori mengenai partai politik. Dan untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut maka digunakan metode studi kasus sebagai metode yang tepat untuk dapat membahas suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kondisi sosial politik Lebanon telah memberi peluang bagi Hizbullah, yang pada awalnya merupakan gerakan perlawanan terhadap penjajahan Israel, untuk menjadi partai politik dan bahwa persiapan yang matang dan sumber daya yang dimiliki Hizbullah menjadi faktor pendukung yang mendorong dilakukan transformasi ini. Hasil kedua adalah bahwa ada dampak positif dan negatif dari transformasi tersebut, sementara hasil ketiga adalah bahwa Hizbullah memiliki strategi untuk dapat menyelaraskan aktivitas perlawanan dan politiknya tersebut.

Kata kunci :

Hizbullah, gerakan perlawanan, partai politik

ABSTRACT

Friane Aurora
Politics and International Relations
Political Movement of Shi'ite Muslim Group in Lebanon
(Case Study Hizbullah Transformation From Resistance Movement to Political Party in 1992 until 2009)

Hizbullah is one of political groups in Shi'ite Muslim groups in Lebanon. The emerged of Hizbullah cannot be separated from the political resurrection among Shi'ite Muslim which was lead by Imam Musa Al Shadr, the alter of socio political condition in Lebanon in the 1980s, the Israeli aggression in South Lebanon in 1982, and material support from Iran. In the beginning of his emerged, Hizbullah only active in the struggle for Lebanon freedom from Israeli occupation. However since 1992 he decided to become a political party to remain consistent running resistance activities against Israel. Issues concerning the transformation of Hizbullah from a pure resistance movement into a political party in Lebanon since 1992 until 2009 which become the object of this research.

There are three issues raised in this thesis, firstly about the reason behind Hizbullah's transformation from resistance movement to political party in 1992. Secondly, about the impact of his transformation to political party on his resistance activities. And thirdly about Hizbullah's strategy to harmonize his political activities with his resistance activities. To be able to answer the questions, then used jihad as a concept that become main principle in Hizbullah's activities, the political opportunity structure and resource mobilization theory as parts of social movement theory, and political party theory. Case study methods choosed as an appropriate method to be able to explain the three research questions in depth. The result of this research is that socio political change in Lebanon has provided an opportunity for Hizbullah's transformation, his mature preparation and his resources has become another supporting factor to Hizbullah's transformation, there are positive and negative impacts of this transformation, and Hizbullah has strategies to harmonize his resistance and political activities.

Keywords :

Hizbullah, resistance movement, political party

التجريد

الحركة السياسية الشيعية في لبنان المجموعة
دراسة حالة من التحول من حزب الله حركة مقاومة
كونه الحزب السياسي سنة 1992-2009

فيرياني أوزورا
السياسة والعلاقات الدولية

حزب الله هو واحد من الحركة السياسية الشيعية في لبنان المجموعة
ويمكن إنشاء حزب الله لا يمكن فصلها عن القيادة السياسي للجماعة الشيعية بقيادة الامام موسى الصدر
القاعدة والاجتماعية والظروف السياسية في لبنان في 1980
العنوان الإسرائيلي على لبنان في عام 1982 والدعم المادي لايران
ومع حزب الله في البداية فقط نشاط المقاومة في نضالها من أجل تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي
ذلك ، منذ عام 1992 ، قرر أن يصبح حزبا سياسيا أن تظل متسقة تشغيل أنشطة المقاومة ضد إسرائيل
القضايا المتعلقة تحول حزب الله من حركة المقاومة الثنية إلى حزب سياسي في لبنان منذ عام 1992 حتى
عام 2009 الذي هو موضوع هذا البحث

هناك ثلاث قضايا المثارة في هذه الأطروحة هو على خلفية تحول حزب الله إلى حزب سياسي في عام
1992 ، وأثر التحول على أنشطة المقاومة والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة أنشطة حزب الله والمعارضة
السياسية

لتكون قادرة على الإجابة على هذا السؤال ،

ثم يستخدم مفهوم الجهاد كمفهوم أن أصبح ميذاً سياسياً وحركة مقاومة حزب الله ،
والهيكل السياسي فرصة نظرية ونظرية تعبئة الموارد كجزء من نظرية الحركة الاجتماعية ،
وإلى أن يكون قائراً على الإجابة على هذه المشاكل ونظريات حول الأحزاب السياسية
هي استخدام أسلوب دراسة الحالة باعتباره الأسلوب المناسب لتكون قادرة على مناقشة حادثة وقعت في
العمق

وننتج هذا البحث هو أنه الاجتماعية والسياسية تتغير الظروف في لبنان ، قد أتاح فرصة لحزب الله ،
الذي كان في الأصل حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ،
النتيجة الثانية هي أن هناك التأثيرات الإيجابية والسلبية لهذا التحول ، لتصبح حزبا سياسيا
ويأن حزب الله لديها استراتيجية لتتسق الأنشطة والمعارضة السياسية

المصطلحات :

حزب الله وحركة المقاومة ، والأحزاب السياسية

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lebanon merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Israel di bagian selatannya. Hal ini menyebabkan ia rawan dari intervensi maupun serangan Israel yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Lebanon merupakan negara demokrasi parlementer yang menerapkan sistem konsosiasional. Dalam sistem demokrasi konsosiasional inilah sektarianisme politik Lebanon diwujudkan dalam beragam partai yang berasal dari berbagai faksi yang ada dalam masyarakatnya. Sistem politik semacam ini juga sering disebut sebagai sistem politik konfessional yang membagi kekuasaan politik berdasarkan kekuatan sosial politik dan kekuasaan masing-masing kelompok masyarakat.

Penduduk Lebanon terbagi atas tiga faksi besar, yakni kelompok Muslim Sunni, kelompok Muslim Syi'ah, dan kelompok Kristen Maronit, serta banyak faksi-faksi kecil dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun ketokohan orang per orang. Oleh karena itu dibentuk sistem politik konfessional yang dianggap dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan faksi-faksi yang ada dengan membagi-bagi kekuasaan politik pada tiga kelompok besar dan kelompok-kelompok kecil masyarakat tersebut. Kekuasaan kepresidenan berada di tangan kelompok Kristen Maronit, kelompok Muslim Sunni menjadi perdana menteri, sedangkan kelompok Muslim Syi'ah hanya menjadi juru bicara parlemen. Anggota parlemen terdiri dari kelompok Kristen dan kelompok Muslim dengan rasio perbandingan 6:5 untuk 99 kursi, sehingga kelompok Kristen memiliki jatah 54 kursi sementara kelompok Muslim memiliki jatah 45 kursi di parlemen. Rasio perbandingan ini didasarkan pada kekuasaan dan pengaruh politik dan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Pemberlakuan sistem seperti ini telah membuat kelompok Syi'ah Lebanon hanya memiliki kekuasaan kecil dalam parlemen Lebanon. Kekuasaan politik yang kecil ini pada akhirnya turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Saat Lebanon terbentuk sampai terjadi perang saudara antar faksi di Lebanon pada tahun 1975 kondisi masyarakat Syi'ah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah yang rendah.

Kondisi ini mulai berubah semenjak tahun 1960-an banyak ulama yang telah menyelesaikan pendidikan agamanya di Najaf, Irak dan Qum, Iran, dua kota penting bagi kaum Syi'ah, kembali dan berusaha menyebarkan dakwah dan memberikan pengajaran agama pada masyarakat Syi'ah Lebanon. Salah satu diantara ulama-ulama tersebut adalah Imam Musa Al Sadr. Beliau adalah seorang ulama Syi'ah yang sejak awal memiliki perhatian pada gerakan sosiopolitik. Salah satu hasil perjuangan beliau adalah dibentuknya Majelis Tinggi Islam Syi'ah (*Highest Islamic Shi'ite Council*) pada tahun 1967. Institusi ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan memperhatikan pelbagai kepentingan muslim Syi'ah di Lebanon.

Kemudian Imam Al-Shadr membentuk Gerakan Kaum Tertindas, sebagai sebuah gerakan yang memiliki misi utama mengurangi kemiskinan penduduk Syi'ah Lebanon. Selanjutnya pada tahun 1974 beliau mendirikan AMAL (*Afwaj al-Muqawama Al-Lubnaniyya*/Barisan Perlawanan Lebanon) sebagai sayap militer gerakan sosial yang telah dibentuk sebelumnya untuk melawan pendudukan Israel atas Lebanon. Namun, aktivitas perjuangan ini tidak bisa beliau lanjutkan lebih lama lagi, sebab pada tanggal 31 Agustus 1978 beliau menghilang saat diundang Muammar Qadafi, untuk menghadiri perayaan kemerdekaan Libya. Dan hingga saat ini nasib beliau belum diketahui. Setelah ditinggalkan Imam Ash Shadr, AMAL terpecah menjadi AMAL Islam di bawah kepemimpinan Hussein Al Musawi dan AMAL yang berideologi nasionalis di bawah kepemimpinan Nabih Berri.

Berbagai krisis yang terjadi di dalam negeri Lebanon ini membuat kelompok-kelompok masyarakat Syi'ah yang berasal dari berbagai wilayah di Lebanon berkumpul dan mengambil berusaha untuk membuat sebuah gerakan perlawanan terhadap Israel yang bersatu dan terorganisir. Beberapa kelompok masyarakat Syi'ah yang menyetujui hasil kesepakatan ini kemudian meleburkan diri dengan sebuah gerakan baru yang dinamakan Hizbullah. Salah satu tujuan pendirian Hizbullah adalah melindungi dan mempertahankan Lebanon dari ancaman Israel yang memasuki Lebanon lewat wilayah bagian selatan Lebanon yang mayoritas dihuni kaum Syi'ah.

Hizbullah mendeklarasikan diri di hadapan masyarakat Lebanon dan masyarakat internasional dengan dideklarasikannya Surat Terbuka pada tanggal 16 Februari 1985 oleh juru bicara resmi partai, al-Sayyed Ibrahim Amine. Deklarasi ini telah membawa Hizbullah memasuki fase baru dari sebuah gerakan perlawanan rahasia menjadi kerja publik. Hizbullah kemudian meneruskan perjuangannya pada upaya melawan pendudukan Israel atas Lebanon. Namun, pada tahun 1988 Hizbullah bertikai dengan AMAL pimpinan Nabih Berri, salah satu sebabnya adalah karena mereka memiliki basis massa yang sama, yakni kaum Syi'ah Lebanon. Pertikaian ini akhirnya dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara AMAL dan Hizbullah pada tanggal 5 November 1989, setelah sebelumnya Perjanjian Taif yang menandai berakhirnya perang saudara lima belas tahun di Lebanon berhasil dicapai pada tanggal 22 Oktober 1989.

Kesepakatan ini dikenal dengan nama Piagam Ta'if yang kemudian menjadi dasar perubahan konstitusi Lebanon sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sistem politik sektarian tetap dipertahankan karena dianggap ideal di tengah kondisi Lebanon yang terdiri atas berbagai macam faksi yang memiliki kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Kelompok Kristen Maronit tetap mendominasi parlemen dan kekuasaan politik Lebanon namun keberadaan konstitusi baru ini telah membuka peluang pada penduduk Syi'ah untuk terlibat lebih aktif dalam proses dan kehidupan politik Lebanon. Salah satu hasilnya adalah munculnya Amal dan Hizbullah, yang sama-sama berbasis massa penduduk Syi'ah, sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 1992.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa latar belakang transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik pada tahun 1992?
2. Apa dampak aktivitas politik Hizbullah terhadap aktivitas perlawanannya selama tahun 1992-2009?
3. Bagaimana strategi Hizbullah menyelaraskan aktivitas politik dengan aktivitas perlawanannya selama tahun 1992-2009?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka digunakan beberapa konsep dan teori antara lain konsep jihad. Jihad dimaknai sebagai usaha sungguh-

sebenarnya dengan mengeluarkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara untuk dapat memahami latar belakang di balik transformasi yang dilakukan Hizbullah maka digunakan teori struktur kesempatan politik dan teori mobilisasi sumber daya. Teori struktur kesempatan politik menyatakan bahwa kemunculan sebuah gerakan merupakan hasil dari terbukanya kesempatan politik sehingga ia dapat masuk ke dalam sistem atau

Selain dibutuhkan teori, untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat maka dipilih pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan ini dipilih sebab objek penelitian merupakan aksi-aksi sosial yang muncul dalam masyarakat sehingga lebih tepat diteliti dengan menggunakan paradigma kualitatif. Sasaran penelitian merupakan gejala-gejala yang saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan secara keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan yang holistik dan sistemik.

Aktivitas politik Hizbullah memiliki dampak positif dan negatif terhadap aktivitas perlawanannya serta memiliki konsekuensi yang harus diperhatikan untuk dapat menyeimbangkan antara keduanya. Dampak positifnya antara lain : eksistensi gerakan perlawanan Hizbullah diakui oleh pemerintah dan mendapatkan legalitas dari parlemen. Dukungan dan legalitas ini membuatnya mampu mempertahankan kepemilikannya atas berbagai persenjataan dan peralatan perang. Di samping itu, keberhasilan perlawanannya mempengaruhi keberhasilannya dalam politik dan keberhasilannya meraih dukungan publik.

Sedangkan konsekuensi yang harus dihadapinya antara lain : Hizbullah harus mampu membagi prioritas dan konsentrasi gerakannya antara perlawanan dan politik, serta dalam bidang-bidang lain yang terkait dengan keduanya, misalnya bidang media dan pelayanan sosial. Pembagian ini tidak hanya dalam hal perhatian dan program, melainkan dalam hal pembagian penempatan para kader dan anggotanya dan juga pembagian dana.

Dan dampak negatifnya antara lain : Amerika Serikat memasukkan Hizbullah ke dalam daftar terorisnya. Hal ini dikarenakan Hizbullah dinilai mengancam kepentingannya di Timur Tengah, terutama karena keberadaan dan kekuatannya mengancam eksistensi aliansinya, yaitu Israel, di kawasan ini. Dampak negatif lain adalah bahwa sebagai masyarakat dan lawan politiknya

merasa terancam dengan kekuatan persenjataan dan kekuatan pejuang yang dimilikinya. Kelompok Kristen dan Sunni khawatir akan kehilangan kekuasaan mereka dalam sistem sosial, politik, dan perekonomian Lebanon yang selama ini telah mereka miliki.

Strategi-strategi tersebut antara lain : memiliki manajemen organisasi dengan struktur yang hierarkis dengan pembagian tugas, tanggungjawab, ruang lingkup program, dan kewenangan yang jelas. Hizbullah memisahkan antara organ yang mengurus aktivitas perlawanannya dengan organ yang mengurus aktivitas politiknya. Hal ini membuat masing-masing organ dapat mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri dan menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional. Strategi lain adalah dengan terus menerus mengadakan berbagai pelayanan sosial, melalui berbagai organisasi sosial yang dimilikinya ataupun berafiliasi dengannya; dengan kepemilikannya atas berbagai media massa dan teknologi komunikasi.

Strategi lain yang dijalankan Hizbullah adalah terdapatnya sumber pendanaan dalam setiap aktivitas yang dijalankannya. Sementara Hizbullah sendiri selalu menyatakan bahwa mereka mendapatkan dana dari iuran anggota, dari zakat dan khums, semacam infaq, masyarakat muslim Lebanon maupun dari luar Lebanon yang mempercayakan pengelolaannya kepada Hizbullah, dan dari berbagai usaha yang dimilikinya, meskipun usaha apa yang dijalankan dan berapa keuntungan yang didapatkan juga tidak ada informasi yang jelas, sebab semuanya dikerjakan secara rahasia dan tidak atas nama Hizbullah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan Pembimbing	
Halaman Pengesahan	
Halaman Bebas Royalti	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis	
Curriculum Vitae	
Kata Pengantar	i
Abstrak Bahasa Indonesia	iv
Abstrak Bahasa Inggris	v
Abstrak Bahasa Arab	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar dan Bagan	xvi
Daftar Tabel	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	12
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. KERANGKA TEORI	
2.1. Konsep Jihad	19
2.1.1. Konsep Jihad Menurut Syi'ah	19
2.1.2. Konsep Jihad Menurut Hizbullah	19
2.2. Teori Gerakan Sosial	21
2.2.1. <i>Political Opportunity Structure (POS)</i>	25
2.2.2. Teori <i>Resource Mobilization</i>	27
2.3. Teori Partai Politik	29
2.4. Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah	37
2.5. Penelitian Sebelumnya	38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	43
3.1.1. Batasan Penelitian	43

3.1.2. Karakteristik Data	44
3.2. Paradigma Penelitian	44
3.3. Metode Penelitian	46
3.4. Sumber Data	49
3.5. Metode Pengumpulan Data	51
3.6. Metode Analisis Data	52
3.7. Tahap-Tahap Penelitian	54

**BAB IV. LATAR BELAKANG BERDIRI DAN AKTIVITAS
GERAKAN PERLAWANAN HIZBULLAH SEJAK
TAHUN 1982-2009** 58

4.1. Sejarah Berdirinya Hizbullah dan Kondisi Sosial Politik Lebanon yang Melatarbelakanginya	58
4.1.1. Kebangkitan Muslim Syi'ah	58
4.1.2. Perang Saudara Lebanon Tahun 1975-1990	64
4.1.3. Pendirian Hizbullah	67
4.1.4. Peran Suriah dan Iran di Lebanon serta Hubungan Keduanya dengan Hizbullah	71
4.1.5. Ringkasan Sejarah Pembentukan Hizbullah	73
4.2. Perlawanan Hizbullah terhadap Israel	74
4.2.1. Perang Hizbullah-Israel Tahun 1982-1989	74
4.2.2. Perang Hizbullah-Israel Tahun 1989-2000	76
4.2.3. Perang Hizbullah-Israel Tahun 2000-2009	83
4.2.4. Pertukaran Tawanan antara Hizbullah dan Israel	86
4.3. Gerakan Perlawanan Hizbullah dari Sudut Pandang Konsep Jihad dan Teori Gerakan Sosial	89

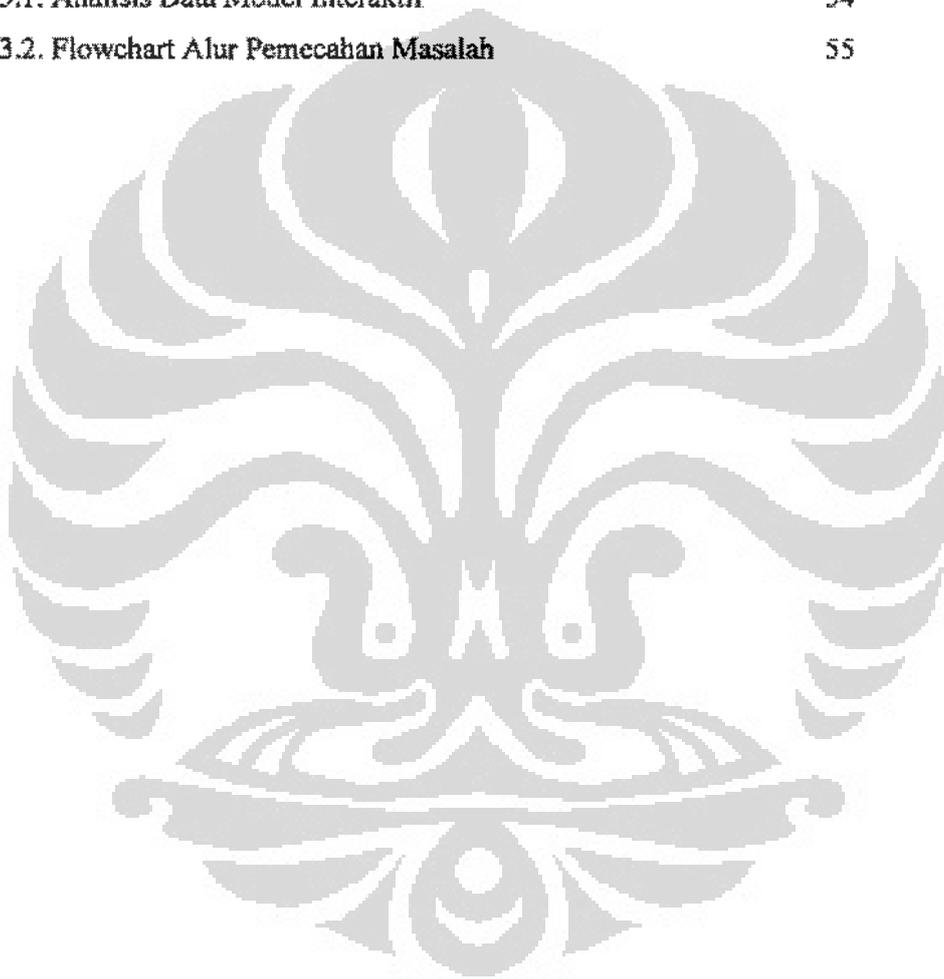
**BAB V. TRANSFORMASI HIZBULLAH DARI GERAKAN
PERLAWANAN MENJADI PARTAI POLITIK
LEBANON PADA TAHUN 1992-2009** 93

5.1. Latar Belakang Sosial Politik Keikutsertaan Hizbullah sebagai Partai Politik pada Pemilihan Parlemen Lebanon 1992	93
5.1.1. Penerapan Sistem dan Budaya Politik Konfessionalisme di Lebanon dan Berkurangnya Kekuasaan Zu'ama di Kalangan Masyarakat Syi'ah Lebanon	94
5.1.2. Perjanjian Taif	98
5.1.3. Pertimbangan Hizbullah untuk Ikut Serta dalam Pemilu 1992	103
5.2. Aktivitas Hizbullah sebagai Partai Politik	107
5.2.1. Keikutsertaan Hizbullah dalam Pemilihan Umum	111

5.2.1.1. Hizbullah dalam Pemilihan Parlemen 1992-2005	111
5.2.1.2. Hizbullah dalam Pemilihan Pemerintahan Kota	119
5.2.2. Aktivitas Politik Hizbullah Tahun 2006-2009	121
5.3. Dampak Keputusan Hizbullah Menjadi Partai Politik terhadap Aktivitas Perlawanannya pada Tahun 1992-2009	126
5.3.1. Dampak Positif	126
5.3.2. Konsekuensi yang Harus Dihadapi Aktivitas Perlawanan Maupun Aktivitas Politiknya	129
5.3.2. Dampak Negatif	130
5.4. Strategi Hizbullah Menyelaraskan Peran dan Fungsinya Sebagai Gerakan Perlawanan dan Partai Politik	131
5.4.1. Struktur dan Manajemen Organisasi	131
5.4.2. Pelayanan Sosial Hizbullah Kepada Rakyat Lebanon	133
5.4.3. Kepemilikan Hizbullah atas Beberapa Media Massa	136
5.4.4. Dialog Antar Umat Beragama dan Antar Faksi di Lebanon	136
5.4.5. Sumber Dana Hizbullah yang Independen	138
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	141
Daftar Pustaka	147

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 1. Distribusi Populasi Umat Beragama Lebanon	2
Bagan 2.1. Penggunaan Teori dalam Analisa Masalah 1	38
Bagan 2.2. Penggunaan Teori dalam Analisa Masalah 2 dan 3	38
Bagan 3.1. Analisis Data Model Interaktif	54
Bagan 3.2. Flowchart Alur Pemecahan Masalah	55



DAFTAR TABEL

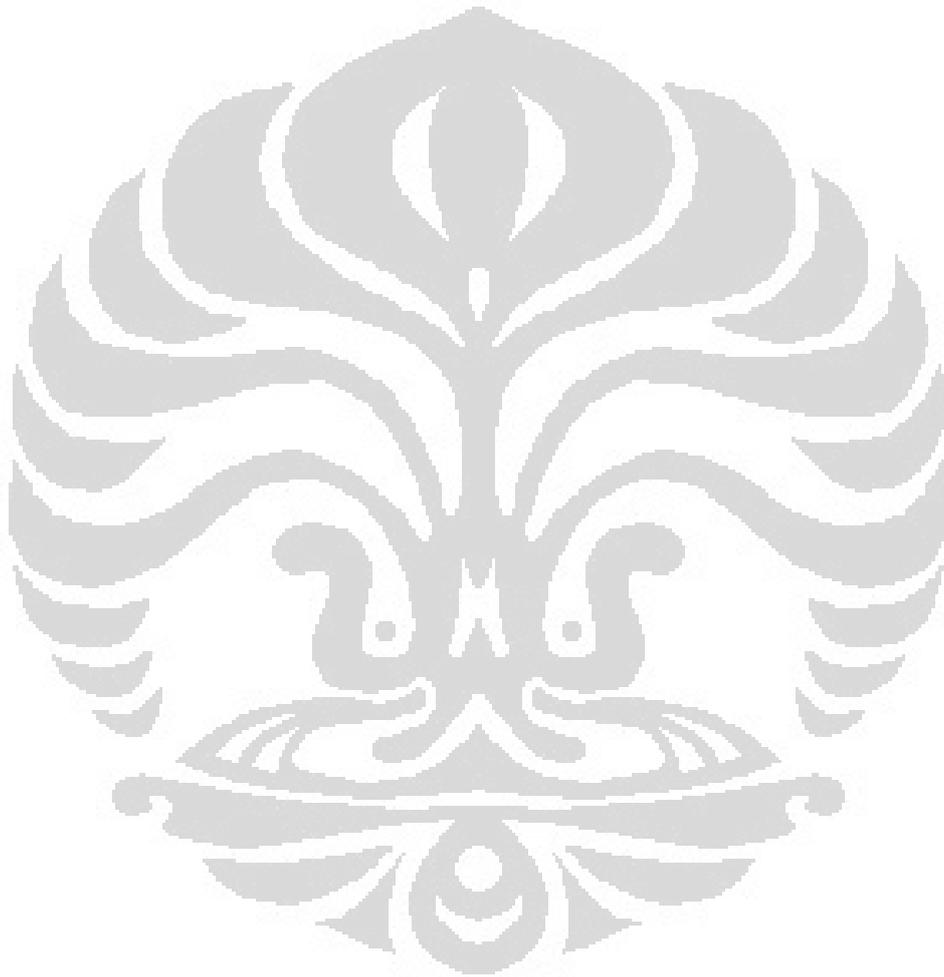
Tabel 3.1. Batasan Penelitian	43
Tabel 3.2. Hubungan Masalah Penelitian dengan Logika Penelitian	56
Tabel 5.1. Distribusi Kursi Parlemen Tahun 1992 dan 1996 untuk Muslim dan Kristen	114
Tabel 5.2. Tabel Perolehan Kursi Parlemen Berdasarkan Partai Peserta Pemilihan Parlemen 1992	115
Tabel 5.3. Perolehan Kursi Parlemen Lebanon pada Pemilihan Parlemen Tahun 1996	116
Tabel 5.4. Perolehan Kursi Parlemen pada Pemilu Parlemen Tahun 2005	118
Tabel 5.5. Alokasi Kursi Parlemen Berdasarkan Daerah Pemilihan dan Pembagian Muslim-Kristen pada Pemilihan Parlemen 2009	123
Tabel 5.6. Alokasi Kursi Parlemen Berdasarkan Pembagian Kristen dan Muslim pada Pemilihan Parlemen 2009	124
Tabel 5.7. Tabel Perolehan Kursi Parlemen Hasil Pemilihan Parlemen 2009	124
Tabel 5.8. Perolehan Kursi Parlemen Hizbullah dan Aliansi non Syi'ahnya juga untuk AMAL dan Kelompok Syi'ah lainnya Tahun 1992-2005	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Konstitusi Lebanon

Lampiran 2. Manifesto Politik Hizbullah Tahun 2009

Lampiran 3. Curriculum Vitae



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lebanon terletak di kawasan Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Suriah di sebelah utara dan timur, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Israel. Total populasi Lebanon berdasarkan estimasi pemerintah Lebanon tahun 2004 sebesar 3.755.034 jiwa. 93,4% di antaranya merupakan bangsa Arab sedangkan sisanya berasal dari bermacam-macam bangsa yang lain. Estimasi jumlah penduduk ini belum termasuk para pengungsi Palestina, penduduk tidak tetap, dan para pekerja imigran yang ada di Lebanon. Sebagian besar penduduk Lebanon tinggal di Beirut dan *Mount Lebanon*, sementara sisanya tersebar di empat propinsi lainnya (sebesar 20,5% di Lebanon Utara, 12,5% di Bekaa, 10,7% di Lebanon Selatan, dan 5,9% di Nabatieh).¹

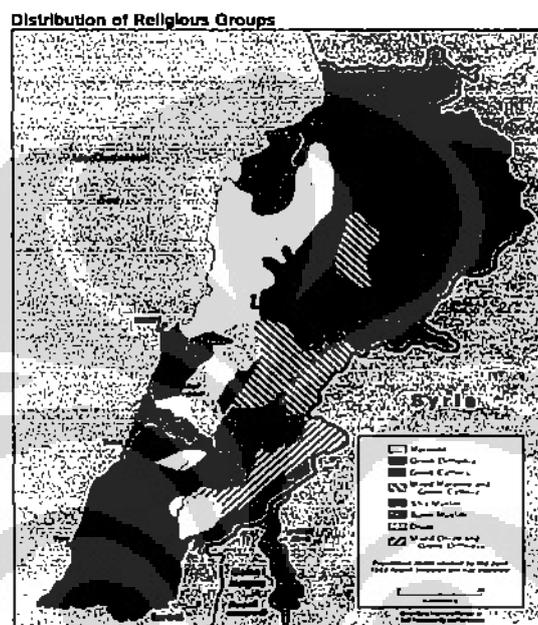
Penduduk Lebanon terdiri dari beragam populasi umat beragama. Terdapat kurang lebih delapan belas kelompok agama yang tercatat di Lebanon, termasuk umat Islam dan Kristen. Mayoritas penduduknya, beragama Islam yang terbagi menjadi kelompok Muslim Sunni, kelompok Muslim Syi'ah, Druze, dan beberapa kelompok muslim lainnya. Sedangkan kelompok Kristen, yang terdiri dari kelompok Kristen Maronit, Katolik Ortodox, dan beberapa sekte lainnya.² Namun, belum ada informasi yang jelas mengenai berapa jumlah total populasi masing-masing kelompok. Hal ini disebabkan karena belum ada sensus penduduk yang dilakukan pemerintah pascasensus tahun 1932 yang menyatakan bahwa masyarakat Kristen merupakan jumlah mayoritas di Lebanon. Hasil sensus tahun 1932 inilah yang dipakai untuk melegitimasi dominasi politik kelompok Kristen dalam pemerintahan Lebanon sejak tahun 1943.

Wilayah Lebanon dibagi menjadi enam propinsi yaitu Beqaa, Beirut, Lebanon Utara, *Mount Liban*, Lebanon Selatan, dan Nabatiye. Konstitusi Lebanon mengikuti konstitusi yang dibuat tahun 1926 dan kemudian disesuaikan dengan

¹ Kementerian Keuangan Lebanon, *Lebanon Country Profile*,
<http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/B2D794D1-FE56-4F1C-BA12-692CBF987B62/0/LebanonCountryProfile2009.pdf>, hal. 1-2

² *Loc.cit.*

Kesepakatan Nasional tahun 1943 dan Perjanjian Taif tahun 1989. Kesepakatan Nasional tahun 1943 direvisi berdasarkan isi perjanjian Taif tersebut dan hasilnya menjadi undang-undang dasar Lebanon. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, perdana menteri, dan kabinet. Sementara kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau *Majelis Al-Nuwab* yang memiliki 128 anggota.



Gambar 1. Distribusi Populasi Umat Beragama Lebanon³

Lebanon merupakan negara demokrasi parlementer yang menerapkan sistem konsosiasional. Dalam sistem demokrasi konsosiasional inilah sektarianisme politik Lebanon diwujudkan dalam beragam partai yang berasal dari berbagai faksi yang ada dalam masyarakatnya. Sistem politik semacam ini juga sering disebut sebagai sistem politik konfessional yang membagi kekuasaan politik berdasarkan kekuatan sosial politik dan kekuasaan masing-masing kelompok masyarakat.⁴

Kekuasaan eksekutif terbagi antara Presiden dan Perdana Menteri serta Kabinet. Sebelum Piagam Taif disepakati pada tahun 1989, berdasarkan Pakta Nasional tahun 1943, Presiden memiliki kekuasaan sangat besar. Ia dapat mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri, Kabinet, maupun anggota

³ <http://www.luptravel.com/worldmaps/lebanon11.html>

⁴ <http://www.arabmediawatch.com/amw/CountryBackgrounds/Lebanon/FactsandFigures/tabid/170/Default.aspx>

parlemen. Namun, setelah Piagam Taif disepakati, kekuasaan Presiden dikurangi sehingga kekuasaan Perdana Menteri dan Presiden menjadi seimbang. Presiden merupakan kepala negara dan simbol pemersatu negara serta komandan tentara nasional, sementara perdana menteri merupakan kepala pemerintahan yang memimpin kabinet. Sejak perang saudara terjadi pada tahun 1975 hingga Piagam Taif disepakati pemilihan parlemen tidak dapat dilaksanakan sehingga hanya pemilihan Presiden yang tetap dapat dilaksanakan pada tahun 1976 (presiden Elias Sarkis) dan 1982 (Presiden Amine Gemayyel).⁵ Parlemen Lebanon terdiri dari 99 anggota sebelum perjanjian Taif, setelah perjanjian Taif jumlah anggota parlemen bertambah menjadi 108 orang, kemudian jumlah anggota parlemen bertambah menjadi 128 orang sesuai undang-undang pemilihan umum tahun 1992.

Lebanon berada di bawah kekuasaan Perancis setelah perjanjian Sykes Picot⁶ yang telah membagi kawasan Timur Tengah ke dalam wilayah-wilayah kecil di bawah kekuasaan Perancis dan Inggris. Setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis pada tanggal 22 November 1943 Lebanon mengalami kesulitan dalam masalah integrasi nasional. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini memiliki kekuasaan di wilayahnya masing-masing sehingga sulit disatukan di bawah sebuah pemerintahan pusat Lebanon. Kondisi ini telah menimbulkan gejolak dan ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi terus menerus di dalam negeri sebagai akibat dari keinginan masing-masing kelompok untuk memperoleh kekuasaan di Lebanon demi kepentingannya masing-masing.

Penduduk Lebanon terbagi atas tiga faksi besar, yakni kelompok Muslim Sunni, kelompok Muslim Syi'ah, dan kelompok Kristen Maronit, serta banyak faksi-faksi kecil dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun ketokohan orang per orang. Oleh karena itu dibentuk sistem politik konfessional yang dianggap dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan faksi-faksi yang ada

⁵ El Khazen, Farid, *Lebanon's First Postwar Parliamentary Election, 1992 : An Imposed Choice*, <http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/elections92-part1.html>

⁶ Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara Perancis dan Inggris yang membagi kawasan Timur Tengah, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, menjadi negara-negara kecil. Lebanon merupakan salah satu negara yang berada di bawah kekuasaan Perancis. Oleh karena pembagian wilayah-wilayah kecil tersebut tidak memperhatikan kesamaan etnis yang tinggal di dalamnya, maka muncul masalah-masalah integrasi nasional akibat dari banyaknya etnis yang tinggal di suatu wilayah dan berkuasa atas daerah tersebut.

dengan membagi-bagi kekuasaan politik pada tiga kelompok besar dan kelompok-kelompok kecil masyarakat tersebut. Kekuasaan kepresidenan berada di tangan kelompok Kristen Maronit, kelompok Muslim Sunni menjadi perdana menteri, sedangkan kelompok Muslim Syi'ah hanya menjadi juru bicara parlemen. Anggota parlemen terdiri dari kelompok Kristen dan kelompok Muslim dengan rasio perbandingan 6:5 untuk 99 kursi, sehingga kelompok Kristen memiliki jatah 54 kursi sementara kelompok Muslim memiliki jatah 45 kursi di parlemen.⁷ Rasio perbandingan ini didasarkan pada kekuasaan dan pengaruh politik dan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat.⁸

Pemberlakuan sistem seperti ini telah membuat kelompok Syi'ah Lebanon hanya memiliki kekuasaan kecil dalam parlemen Lebanon. Kekuasaan politik yang kecil ini pada akhirnya turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Saat Lebanon terbentuk sampai terjadi perang saudara antar faksi di Lebanon pada tahun 1975 kondisi masyarakat Syi'ah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah yang rendah.

Kondisi ini mulai berubah semenjak tahun 1960-an banyak ulama yang telah menyelesaikan pendidikan agamanya di Najaf, Irak dan Qum, Iran, dua kota penting bagi kaum Syi'ah, kembali dan berusaha menyebarkan dakwah dan memberikan pengajaran agama pada masyarakat Syi'ah Lebanon.⁹ Salah satu di antara ulama-ulama tersebut adalah Imam Musa Al Sadr. Dia adalah seorang ulama Syi'ah yang sejak awal memiliki perhatian pada gerakan sosiopolitik. Salah satu hasil perjuangannya adalah terbentuknya Majelis Tinggi Islam Syi'ah (*Highest Islamic Shi'ite Council*) pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendukung dan memperhatikan pelbagai kepentingan muslim Syi'ah di Lebanon.

Imam al-Shadr juga membentuk Gerakan Kaum Tertindas, sebagai sebuah gerakan yang memiliki misi utama mengurangi kemiskinan penduduk Syi'ah Lebanon. Selanjutnya pada tahun 1974 beliau mendirikan AMAL (*Afwaj al-*

⁷ Rasio ini diberlakukan sebelum perjanjian Taif. Sejak Lebanon merdeka tahun 1943 hingga 1992 dengan anggota parlemen Lebanon berjumlah 99 orang, dan rasio ini berubah menjadi 1:1 setelah perjanjian Taif sesuai pertambahan anggota parlemen menjadi 108 orang di mana kelompok Kristen dan Muslim sama-sama mendapat jatah 54 kursi, dan kemudian bertambah lagi sesuai dengan undang-undang pemilihan umum tahun 1992 yang menetapkan bahwa anggota parlemen bertambah menjadi 128 orang dengan ratio 1:1 sehingga kelompok Kristen dan Muslim sama-sama mendapat jatah 64 kursi

⁸ http://www.mideastmonitor.org/issues/0801/0801_2.htm

⁹ Qassem, Naim. 2008. *Blueprint Hizbullah*. Jakarta: Ufuk Press, hal. 15

Muqawama al-Lubnaniyya (Barisan Perlawanan Lebanon) sebagai sayap militer gerakan sosial yang telah dibentuk sebelumnya untuk melawan pendudukan Israel atas Lebanon.¹⁰ Namun, aktivitas perjuangan ini tidak bisa dilanjutkannya lebih lama lagi, sebab pada tanggal 31 Agustus 1978 al-Shadr menghilang ketika diundang Muammar Qadafi, untuk menghadiri perayaan kemerdekaan Libya.¹¹ Setelah ditinggalkan Imam al-Shadr, kepemimpinan dan ideologi gerakan AMAL terpecah menjadi AMAL Islam di bawah kepemimpinan Hussein Al Musawi dan AMAL yang berideologi nasionalis di bawah kepemimpinan Nabih Berri.¹²

Pada tahun 1975 pecah perang saudara di Lebanon. Perang yang berlangsung selama lima belas tahun ini melibatkan faksi-faksi yang ada di Lebanon. Di tengah kecamuk perang saudara Lebanon, pada bulan Maret 1978 Israel masuk ke Kota Shuwar di Lebanon dengan tujuan untuk mengusir para pejuang Palestina dari wilayah tersebut.¹³ Setahun kemudian terjadi Revolusi Islam Iran yang menjadikan ideologi Syi'ah sebagai ideologi negara. Peristiwa ini memberikan energi baru dan mempengaruhi kebangkitan perjuangan kaum Syi'ah di Lebanon.

Berbagai krisis yang terjadi di dalam negeri Lebanon ini membuat kelompok-kelompok masyarakat Syi'ah yang berasal dari berbagai wilayah di Lebanon berkumpul dan berusaha untuk membuat sebuah gerakan perlawanan terhadap Israel yang bersatu dan lebih terorganisir. Beberapa kelompok perjuangan Islam yang menyetujui hasil kesepakatan ini kemudian meleburkan diri dengan sebuah gerakan baru yang dinamakan Hizbullah. Salah satu tujuan pendirian Hizbullah adalah melindungi dan mempertahankan Lebanon dari

¹⁰ Tahun 1974 sebagai tahun kelahiran AMAL didapatkan dari buku Naim Qassem "Blueprint Hizbullah" hal. 17 Sementara dalam buku yang ditulis Rif'at Sayyed Ahmad dengan judul "Denyut Perlawanan dan Rahasia Kekuatan Hizbullah : The Untold Story From Within" hal .116 disebutkan bahwa AMAL dideklarasikan pada tanggal 6 Juli 1975, sementara Gerakan Kaum Tertindas dibentuk tahun 1974

¹¹ *Ibid.*, hal.18

¹² Perpecahan ini muncul sebagai bentuk ketidaksepakatan atas bergabungnya AMAL yang dipimpin Nabih Berri pasca hilangnya Imam al-Shadr ke dalam Korps Penyelamatan yang merupakan aliansi dari Pasukan Lebanon Bashir Al Gemayyel, Gerakan Nasionalis pimpinan Walid Jumlat, dan Perdana Menteri Chefic Al Wazzan yang dibentuk pada tahun 1982, lihat di Naim Qassem hal. 410

¹³ Rif'at Sayyed Ahmad, 2007, *Denyut Perlawanan dan Rahasia Kekuatan Hizbullah : The Untold Story From Within*, Jakarta: Pustaka IIMAN, hal. 105

ancaman Israel yang memasuki Lebanon lewat wilayah bagian selatan Lebanon yang mayoritas dihuni kaum Syi'ah.

Rencana ini mendapat dukungan Iran dengan dikirimkannya 1500 orang Pasukan Garda Revolusi Iran untuk melatih beberapa orang pilihan sehingga memiliki kemampuan militer dan perang yang memadai untuk melindungi Lebanon dari serangan Israel. Di samping itu, Iran juga menyediakan infrastruktur yang diperlukan Hizbullah sebagai gerakan perlawanan Lebanon atas agresi Israel.¹⁴

Hizbullah mendeklarasikan diri di hadapan masyarakat Lebanon dan masyarakat internasional dengan dideklarasikannya Surat Terbuka pada tanggal 16 Februari 1985 oleh juru bicara resmi partai, al-Sayyed Ibrahim Amine. Deklarasi ini telah membawa Hizbullah memasuki fase baru dari sebuah gerakan perlawanan rahasia menjadi kerja publik. Hizbullah kemudian meneruskan perjuangannya pada upaya melawan pendudukan Israel atas Lebanon. Namun, pada tahun 1988 Hizbullah bertikai dengan AMAL pimpinan Nabih Berri. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka memiliki basis massa yang sama yakni kaum Syi'ah Lebanon. Pertikaian ini akhirnya dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara AMAL dan Hizbullah pada tanggal 5 November 1989. Sebelumnya Perjanjian Taif, yang menandai berakhirnya perang saudara lima belas tahun di Lebanon, berhasil disepakati pada tanggal 22 Oktober 1989.¹⁵

Kesepakatan yang dikenal dengan nama Piagam Ta'if ini kemudian menjadi dasar perubahan konstitusi Lebanon sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sistem politik sektarian tetap dipertahankan karena dianggap ideal di tengah kondisi Lebanon yang terdiri atas berbagai macam faksi yang memiliki kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Kelompok Kristen Maronit tetap mendominasi parlemen dan kekuasaan politik Lebanon, namun keberadaan konstitusi baru ini telah membuka peluang pada penduduk Syi'ah untuk terlibat lebih aktif dalam proses dan kehidupan politik Lebanon. Salah satu hasilnya adalah munculnya Amal dan Hizbullah, yang sama-sama berbasis massa penduduk Syi'ah, sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 1992.

¹⁴ Qassem, *op.cit.*, hal. 25

¹⁵ *Ibid.*, hal. 149-150

Perjalanan Hizbullah dalam perpolitikan Lebanon telah berlangsung selama tujuh belas tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Hizbullah telah mengalami berbagai tantangan yang menuntut kerjasama dan pengorganisasian kerja yang baik. Penarikan pasukan Israel dari sabuk keamanannya selama ini yang berada di wilayah Lebanon pada tahun 2000 menjadi kemenangan besar Hizbullah dan meningkatkan popularitas partai ini di hadapan masyarakat Lebanon. Namun perlawanan Hizbullah belum berakhir karena wilayah perkebunan Sheeba yang diklaim sebagai bagian dari Lebanon masih diduduki Israel.

Kemenangan besar kedua Hizbullah diperoleh setelah mampu bertahan selama 33 hari dari serangan Israel ke Lebanon Selatan pada tahun 2006. Serangan ini mampu membuktikan di hadapan masyarakat Lebanon dan dunia bahwa sekalipun aktif dalam politik dan aktivitas sosial, Hizbullah tidak kehilangan kekuatan perlawanannya. Kemenangan ini juga memperkuat posisi dan peran Hizbullah sebagai salah satu gerakan perlawanan yang menjadi bagian penting dalam keamanan Lebanon, khususnya di Lebanon Selatan, dari berbagai kemungkinan serangan Israel selanjutnya.

Sementara dalam bidang politik, khususnya dalam pemilihan parlemen tahun 1992, 1996, dan 2000, Hizbullah memutuskan menjadi oposisi pemerintah. Posisi sebagai oposisi diambil Hizbullah dengan berbagai pertimbangan mendasar sesuai dengan visi misi awal yang tercantum dalam Surat Terbukanya tahun 1985 dan program politiknya dalam tiga pemilihan umum tersebut. Ketika pemilihan umum pemerintahan kota diselenggarakan pada tahun 1998, pemilihan umum pemerintahan kota pertama setelah perang sipil, Hizbullah memutuskan untuk ikut serta dan mampu menduduki posisi strategis di beberapa wilayah yang menjadi basis gerakannya di wilayah Lebanon Selatan. Posisi strategis dalam pemerintahan kota memegang arti penting bagi perjuangan Hizbullah mewujudkan visi dan misinya sebab pada posisi inilah mereka dapat berhubungan langsung dengan masyarakat, memperoleh dukungan, dan mengidentifikasi serta melayani berbagai kebutuhan mereka.

Peran Hizbullah sebagai gerakan perlawanan membuatnya harus menghadapi beragam tuntutan dari luar negeri, khususnya dari Amerika Serikat dan Israel. Mereka menuntut pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata

Hizbullah karena dianggap membahayakan integritas dan keamanan dalam negeri Lebanon, khususnya karena selama gerakan perlawanan Hizbullah terus eksis dan semakin kuat bahkan lebih kuat dari Tentara Nasional Lebanon sendiri, maka keamanan Israel akan terus terancam. Oleh karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka Amerika memasukkan Hizbullah ke dalam daftar kelompok teroris. Dalam kondisi seperti inilah Hizbullah harus bertahan dan mengukuhkan eksistensi serta berusaha mewujudkan visi misi serta menghasilkan karya-karya nyata bagi masyarakat Lebanon secara keseluruhan. Kondisi ini tentu membutuhkan kepercayaan yang tinggi antara pejabat dan anggota Hizbullah di samping komunikasi dan pengorganisasian diri yang matang.

Pertimbangan dan alasan Hizbullah untuk melakukan transformasi gerakannya sebagai gerakan sosial dan gerakan perlawanan menjadi partai politik inilah yang akan penulis angkat dalam tesis ini. Keputusan Hizbullah untuk menjadi partai politik ini selanjutnya akan memiliki arti penting untuk memperkokoh kedudukan dan peran serta pengaruh yang dilakukan Hizbullah di Lebanon. Di samping itu, keputusan ini juga semakin mematenkan dan memperkuat konsep dan keunikan Hizbullah sebagai salah satu gerakan Islam di Timur Tengah yang berbeda dari gerakan-gerakan Islam di negara-negara Timur Tengah yang lain. Perbedaan ini merupakan hasil dari perbedaan situasi dan kondisi serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi Hizbullah yang berbeda dari tantangan, kendala, serta situasi dan kondisi yang dihadapi gerakan-gerakan umat Islam yang lain walaupun sama-sama berada di Timur Tengah.

Keunikan gerakan ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, Hizbullah merupakan gerakan yang menjadikan prinsip-prinsip Syi'ah seperti kepercayaan dan ketaatan pada *wilayatul fakih*¹⁶ sebagai salah satu prinsip gerakannya. Kedua, para pendukung maupun anggota Hizbullah tidak terbatas pada muslim Syi'ah, namun juga Sunni bahkan umat Kristiani.¹⁷ Ketiga, tantangan yang dihadapi Hizbullah adalah kondisi perpecahan dan perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi yang ada di Lebanon. Keempat, gerakan

¹⁶ Merupakan sistem politik berbasis kepemimpinan ulama yang diterapkan di Iran

¹⁷ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari program dan aktivitas sosial politik Hizbullah. Salah satunya adalah dengan keputusannya membentuk aliansi dengan beberapa partai politik lain dalam pemilihan umum yang diikutinya

perlawanannya diorganisir secara rapi dan rahasia, sehingga ia tidak mudah dideteksi pihak musuh dan tidak mudah untuk dihancurkan, namun aktivitasnya sebagai gerakan sosial dan partai politik tetap eksis. Kelima, dengan tujuan utamanya untuk melindungi Lebanon dari ambisi Israel, Hizbullah ikut serta dalam perpolitikan Lebanon dengan menjadi partai politik. Namun dengan keikutsertaannya ini, Hizbullah tidak kehilangan prioritas dan prinsip asal gerakannya.

Keberadaan Hizbullah dengan prinsip dan pola gerakannya yang pada dimotori oleh para ulama Syi'ah yang bertugas mendakwahkan Islam dan mendidik masyarakat muslim Syi'ah untuk menaati ajaran Islam. Sejarah berulang kembali, gerakan politik kaum Muslimin yang berawal dari gerakan dakwah dan sosial semacam ini telah ada dan tercatat dalam sejarah Islam. Di antara gerakan dakwah yang akhirnya berhasil mendirikan dinasti adalah Dinasti al-Murabithun dan al-Muwahhidun di Afrika Utara serta Kerajaan Safawi di Persia.

Al-Murabithun pada awalnya adalah sebuah gerakan keagamaan yang muncul pada abad ke-5 Hijriyah. Gerakan ini dipimpin oleh seorang tokoh agama dari Qairawan bernama Abdullah ibn Yasin. Nama al-Murabithun sendiri diambil dari nama tempat belajar yang dibangun Ibn Yasin di Niger. Ibn Yasin mendakwahkan Islam ke berbagai Suku Sanhaja. Namun tidak hanya berdakwah, ia pun melatih mereka menjadi sebuah kekuatan umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Kemudian Ibn Yasin memperluas wilayah dakwahnya hingga mampu menguasai Suku Judalah, Suku Missufah, Suku Lamtunah, Suku Mahmumah, Suku Tikalatah, dan daerah-daerah di sekitar wilayah suku-suku tersebut juga berhasil dikuasainya. Kemudian gerakan dakwah kemasyarakatan ini mulai bergerak di bidang politik dan militer. Urusan politik dan administrasi keuangan dipegang langsung oleh Ibn Yasin, sementara urusan kemiliteran diserahkan pada Yahya ibn Umar, seorang murid kepercayaan ibn Yasin dari suku Lamtunah.¹⁸

Pada tahun 1055 al-Murabithun semakin memperluas pengaruh dan kekuasaannya dengan semangat keagamaan yang kental di bawah kepemimpinan

¹⁸ Muhsin, Imam, *Peradaban Islam Pra-Modern di Afrika Utara* dalam Siti Maryam, dkk, Ed, 2004, *Sejarah Peradaban Islam : Dari Masa Klasik hingga Modern*, cet.2, Yogyakarta : Penerbit LESFI, hal. 227

Yahya ibn Umar. Kemudian usaha-usaha penyebaran pengaruh dan perluasan wilayah kekuasaan ini diteruskan oleh para pemimpin yang menggantikannya. Akhirnya al-Murabithun menjadi sebuah dinasti di bawah kepemimpinan Yusuf Ibn Tasyfin sebagai raja pertamanya dan Marrakesh sebagai ibukotanya. Kekuasaan dinasti ini dapat bertahan sampai tahun 1147 H.¹⁹

Di wilayah yang sama setelah kekuasaan al-Murabithun menurun, maka muncul dinasti al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun juga pada awalnya berasal dari gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Muhammad ibn Tumart. Ia adalah seorang pencari dan pe cinta ilmu. Dalam perjalanannya menuntut ilmu itu ia bertemu dengan al-Ghazali sehingga pemikirannya pun turut dipengaruhi oleh pemikiran dan pandangan al-Ghazali. Setelah datang ke Maroko, Ibn Tumart mulai mendakwahkan pemikiran dan pandangan-pandangan keagamaannya dengan landasan tauhid yang jelas sehingga ia menyebut para pengikutnya al-Muwahhidun. Setelah berhasil dalam dakwahnya, maka pada tahun 1117 gerakan ini menjadi gerakan politik. Dalam pergerakannya ini, Ibn Tumart dibantu oleh Abdul Mu'min, seorang yang ahli strategi dan militer. Tidak lama kemudian gerakan ini mendapat dukungan dari suku Barbar. Pada tahun 1121 kota Tin Malal dijadikan pusat pengajaran dan dakwahnya sekaligus dijadikan sebagai ibu kota pertama al-Muwahhidun. Setelah Ibn Tumart meninggal dunia, maka ia digantikan oleh Abdul Mu'min yang berhasil mengantarkan generasi ini memperoleh prestasi gemilang. Dinasti al-Muwahhidun berkuasa di Afrika Utara hingga tahun 1236.²⁰

Sedangkan Kerajaan Safawi di Persia muncul di saat Kerajaan Utsmani berada pada puncak kemajuannya. Kerajaan ini berasal dari gerakan keagamaan yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan yang berdiri pada waktu hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Gerakan keagamaan ini didirikan oleh Syekh Ishak Safiuddin. Nama safawi dinisbatkan kepada nama Safiuddin. Ia dianggap sebagai keturunan dari imam Syi'ah Itsna Asy'ariyah yang ketujuh yaitu Musa al-Kadhim. Gerakan ini didirikan dengan ideologi tasawuf dan sangat memegang teguh ajaran agama sehingga salah satu tujuannya adalah untuk memerangi orang-orang yang ingkar. Gerakan ini berkembang dan pengaruhnya

¹⁹ *Ibid.*, hal. 227-228

²⁰ *Ibid.*, hal. 228-229

menyebarkan ke Persia, Suriah, dan Anatolia. Di masing-masing daerah ini Safiuddin menempatkan murid-muridnya sebagai wakil yang diberi gelar “*khalifah*”.²¹

Murid-murid Safiuddin terbentuk menjadi pasukan yang teratur, memegang teguh ajaran agama dan intoleran terhadap pihak yang berbeda paham. Sikap fanatik dan intoleran inilah yang kemudian melahirkan hasrat untuk menguasai pihak lain tersebut. Kecenderungan politik gerakan ini baru mulai terwujud dalam bentuk kongkrit pada masa kepemimpinan Juneid (1447-1460 M). Juneid menambahkan aktivitas politik sebagai agenda gerakan ini. Dan karena hal inilah ia bertrok dengan penguasa setempat, yaitu Kara Koyunlu dari suku bangsa Turki. Setelah kalah dalam konflik tersebut dan diasingkan, Juneid tetap berusaha menghimpun kekuatan dan mencoba kembali merebut kekuasaan atas Ardabil.²²

Yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Safawi adalah cucu dari Juneid, yaitu Ismail ibn Haidar. Ismail menghimpun para pendukung sekaligus pasukannya dari Azerbaijan, Suriah, dan Anatolia. Dan kemudian secara bertahap ia mampu mengambil alih kekuasaan dari para penguasa setempat. Ia memulai berbagai ekspedisi militer ini pada tahun 1501 M dan sepuluh tahun kemudian ia berhasil menguasai seluruh Persia dan bagian timur daerah Bulan Sabit Subur. Puncak kejayaan kerajaan ini berada di tangan Abbas I, raja Safawi ke lima setelah Ismail. Pada masa pemerintahannya, Abbas I mampu meredam berbagai gejolak di dalam negeri dan menciptakan stabilitas negara. Untuk melakukan hal ini maka ia melakukan kebijakan untuk melakukan persekutuan dengan prang-orang Kristen, yakni Inggris untuk melawan kerajaan Utsmani, menjalin hubungan dagang dengan Belanda dan Inggris agar berdagang di Bandar Abbas, dan menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa Eropa untuk dapat menghadapi kekuatan kerajaan Utsmani.²³

1.2. Batasan Masalah

Hizbullah mulai terjun ke dunia politik dengan mendeklarasikan diri sebagai salah satu partai peserta pemilihan parlemen Lebanon pada tahun 1992. Penelitian ini akan melihat prinsip perjuangan Hizbullah beserta aplikasinya

²¹ Siti Maryam, *Peradaban Islam di Persia* dalam Siti Maryam, dkk, Ed, 2004, *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern*, Cet.2, Yogyakarta: Penerbit LESFI hal. 283-284

²² *Ibid.*, hal. 284

²³ *Ibid.*, hal. 284-285

dalam bentuk berbagai aktivitas Hizbullah sebagai partai politik yang bertanggungjawab terhadap konstituennya dan sebagai gerakan perlawanan yang melindungi rakyat Lebanon.

Batasan masalah yang akan diangkat dalam tesis ini adalah yang pertama mengenai latar belakang transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik pada tahun 1992 hingga tahun 2009. Batasan masalah kedua adalah mengenai dampak aktivitas Hizbullah dalam politik terhadap eksistensinya sebagai gerakan perlawanan. Dan batasan masalah ketiga adalah mengenai strategi Hizbullah dalam menyelaraskan peran dan fungsinya sebagai partai politik sekaligus sebagai gerakan perlawanan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis membuat fokus permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai keikutsertaan Gerakan Perlawanan Hizbullah sebagai partai politik Lebanon pada tahun 1992 hingga tahun 2009. Rumusan masalah pertama adalah latar belakang sosial politik dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Gerakan Perlawanan dan Sosial Hizbullah untuk ikut serta sebagai partai politik dan ikut serta dalam pemilihan umum. Rumusan masalah kedua adalah dampak dari keikutsertaan tersebut terhadap aktivitas perlawanannya. Dan rumusan masalah terakhir adalah mengenai strategi Hizbullah untuk menyelaraskan aktivitas politik dengan aktivitas perlawanannya.

Dari rumusan masalah di atas penulis membuat pertanyaan penelitian :

1. Apa latar belakang transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik pada tahun 1992?
2. Apa dampak aktivitas politik Hizbullah terhadap aktivitas perlawanannya selama tahun 1992-2009?
3. Bagaimana strategi Hizbullah menyelaraskan aktivitas politik dengan aktivitas perlawanannya selama tahun 1992-2009?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Hizbullah memiliki beberapa tujuan akademis yaitu :

1. Mengetahui dan memahami latar belakang transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik pada tahun 1992-2009

2. Mengetahui dan memahami dampak positif dan negatif serta konsekuensi dari aktivitas politik terhadap aktivitas perlawanannya selama tahun 1992-2009
3. Mengetahui dan memahami strategi Hizbullah untuk menyelaraskan aktivitas politik dengan aktivitas perlawanannya selama tahun 1992-2009.

1.5. Kerangka Pemikiran

Mempelajari dan membedah keunikan demi keunikan Hizbullah tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan konsep dan teori yang berasal dari Barat. Namun sangat penting dan utama membahas Hizbullah dengan menggunakan perspektif, konsep dan prinsip yang ada dalam Islam khususnya dari pemahaman Syi'ah. Oleh karena itu, ada tiga konsep yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum membahas mengenai strategi dan capaian-capaian Hizbullah sebagai sebuah gerakan perlawanan, gerakan sosial, maupun sebagai partai politik di Lebanon. Tiga konsep itu adalah keyakinan pada Islam sebagai sistem hidup yang lengkap dan universal; kepercayaan pada ulama, yang saat ini berada dalam konsep *wilayatul faqih*; dan konsep jihad. Tiga konsep ini sekaligus merupakan prinsip dasar yang dipakai Hizbullah dalam aktivitasnya.

Beberapa konsep yang paling penting untuk dapat menyingkap fenomena Hizbullah sebagai partai politik yang berawal dari pembentukannya sebagai gerakan perlawanan rakyat Lebanon atas pendudukan Israel di tanah Lebanon merupakan prinsip dasar yang dideklarasikan, digunakan, dan dipegang teguh Hizbullah hingga saat ini yaitu Islam sebagai prinsip hidup. Di dalam konsep utama ini terkandung konsep jihad dan kepercayaannya terhadap *wilayatul faqih* sesuai dengan prinsip Syi'ah yang menjadi landasan gerakannya.

Meskipun sebagian besar anggota Hizbullah, termasuk jajaran pemimpinya merupakan penganut Syiah Itsna Asy'ariyah dan oleh karena itu mereka pun mempercayai dan mengakui kepemimpinan *wilayatul faqih*. Namun, sebagai gerakan yang menghadapi corak masyarakat yang berbeda dengan corak masyarakat Iran, di mana konsep dan sistem *wilayatul faqih* diberlakukan, maka Hizbullah memiliki pola gerakan sendiri yang independen dari ulama yang diakui sebagai pemimpin. Imam Khomeini dan kemudian Imam Ali Khamenei, keduanya merupakan pemegang otoritas agama dan pemimpin Iran, dijadikan sebagai konsultan dalam masalah fiqh pergerakan dan aktivitas yang mereka lakukan agar

tidak keluar dari syari'at dan melanggar larangan Allah. Namun, kedua imam ini tidak ikut campur dalam pola dan strategi gerakan yang dilakukan Hizbullah.

Oleh karena itu, dalam hal strategi gerakan pun Hizbullah berbeda dengan Iran yang menggunakan revolusi sebagai strategi, Hizbullah memilih pendekatan dialog sebagai strategi gerakannya untuk dapat merangkul berbagai elemen atau faksi dalam masyarakat Lebanon dan menyatukan mereka untuk memajukan Lebanon serta melindungi masyarakat Lebanon dari penjajahan dan pembebasan Israel dengan strategi jihad. Dua strategi ini bersesuaian dengan strategi pendahulunya yaitu Imam al-Shadr serta didukung dan dilegitimasi oleh ulama Lebanon, yang juga berperan sebagai rujukan masyarakat Syi'ah Lebanon, Syaikh Husain Fadhlullah.

Untuk memperkaya analisis juga digunakan beberapa teori lain dari bidang sosiologi politik akan digunakan dalam menganalisis Hizbullah yakni teori mengenai partai politik dan gerakan sosial. Konsep partai politik akan dipergunakan untuk melihat dan menganalisis pilihan atau sikap Hizbullah sebagai partai politik dalam menyikapi berbagai perkembangan situasi politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di Lebanon. Hizbullah dengan program *infithah* atau keterbukaannya berkomitmen untuk menjaga batas-batas manuver politik yang dilakukannya tetap dalam batas-batas yang diperbolehkan Islam dan tidak keluar dari batasan tersebut. Di samping itu, semua keputusan dan manuver politik Hizbullah tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan yang telah ditetapkannya di samping tetap memenuhi berbagai janji dan program politiknya pada masyarakat Lebanon secara umum dan khususnya pada konstituennya.

Sementara teori mengenai gerakan sosial yang akan digunakan dalam menganalisa Hizbullah Teori Struktur Kesempatan Politik. Teori ini digunakan dengan alasan karena kemunculan Hizbullah sebagai partai politik berbasis massa penduduk Syi'ah Lebanon, bersaing dengan AMAL yang telah lebih dahulu menjadi partai banyak dipengaruhi oleh perkembangan situasi sosial politik di dalam negeri Lebanon, di Timur Tengah, dan, lebih luas lagi, di dunia. Di samping itu, kemunculan Hizbullah dengan corak, strategi, dan manajemen gerakannya yang khas berasal dari ideologi gerakannya yang dipadukan dengan budaya masyarakat dan budaya politik yang dijalankan di Lebanon.

Selain Teori Struktur Kesempatan Politik, Teori Mobilisasi Sumber Daya, yang juga merupakan bagian dari teori gerakan sosial, digunakan dalam membahas Hizbullah. Pertimbangan yang dipakai adalah karena Hizbullah memiliki berbagai sumber yang menjadi kekuatan gerakannya. Beberapa modal dasar yang menjadi sumber kekuatan Hizbullah itu antara lain organisasi sosial dan politik serta gerakan perlawanan yang rapi, solid, dan dikelola dengan baik. Manajemen organisasi yang baik ini didukung oleh penguasaan atas media massa, baik cetak maupun elektronik. Media massa digunakan sebagai sarana Hizbullah untuk menyuarakan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip dan kebijakannya sehingga dapat membentuk opini publik yang positif terhadap keberadaannya. Faktor lain adalah Hizbullah memiliki kader-kader yang memiliki kapabilitas iman, keilmuan dan integritas moral yang memadai dalam berbagai bidang serta pemimpin yang cakap dan mampu membaca dan memanfaatkan berbagai perkembangan kondisi di dalam maupun di luar negeri dengan baik.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan metode penelitian studi kasus. Penulis memilih paradigma kualitatif untuk melakukan penelitian ini sebab objek penelitian merupakan aksi-aksi atau peristiwa sosial yang muncul dalam masyarakat sehingga lebih tepat diteliti dengan menggunakan paradigma kualitatif dan metode penelitian studi kasus. Sasaran penelitian merupakan gejala-gejala yang saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan secara keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan yang holistik dan sistemik. Masing-masing satuan tidak dapat dipisahkan dalam variabel-variabel ataupun diklasifikasikan. Masing-masing satuan diperlakukan sebagai bagian fungsional dari sistemnya dengan pola hubungan yang khas dan oleh karena itu tidak ada suatu gejala apapun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus dijelaskan oleh dan melalui keberadaan gejala-gejala lain yang berada dalam sistemnya. Dalam memahami gejala-gejala tersebut maka peneliti harus memahami dan menjelaskan keberadaan dan keterkaitan diantara mereka dari perspektif peristiwa yang diteliti dan berdasarkan kondisi saat terjadinya peristiwa tersebut.

Informasi dan data yang akan dikumpulkan dalam bentuk sumber kepustakaan, dokumen, serta berbagai artikel dan pemberitaan. Data kuantitatif

yang berisi angka-angka digunakan untuk memperjelas gambaran kondisi dan situasi dan memperkuat argumen namun bukan menjadi data primer dalam penelitian ini. Informasi dan data yang telah dikumpulkan akan dipilah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam masing-masing bab.

Informasi dan data-data tersebut akan dianalisa dan dijadikan sebagai bukti-bukti yang perlu diinterpretasikan sehingga dapat digunakan untuk mendukung argumen yang dibangun. Informasi dan data tersebut akan diinterpretasikan dan disajikan dengan metode naratif analitis sehingga diharapkan akan dapat menyajikan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam mengenai pilihan Hizbullah sebagai gerakan perlawanan dan partai politik.

Metode naratif digunakan agar informasi dan data dapat disajikan dengan utuh dan diharapkan sesuai dengan situasi dan kondisi dari Hizbullah dengan lingkup pilihan perjuangan, aktivitas, dan gerakannya. Metode analitis digunakan agar dari berbagai informasi yang telah dipaparkan tersebut dapat digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Oleh sebab itu perlu membaca, mencermati, dan menganalisa setiap informasi agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi atau dapat mendekati kebenaran fakta yang terjadi. Hasil dari penelitian ini berupa hubungan-hubungan antar konsep-konsep yang dipakai dengan gejala yang ditemukan.

1.7.Sistematika Pembahasan

Tesis ini akan ditulis dalam enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang diantaranya berisikan latar belakang masalah, batasan, dan rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini. Pada bab kedua dipaparkan mengenai kerangka teori dari tesis ini dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta penerapan konsep dan teori tersebut dalam pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Pada bab ketiga dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menyusun tesis ini.

Di dalam bab keempat dipaparkan mengenai latar belakang berdirinya Hizbullah dan aktivitas perlawanan yang dilakukannya terhadap Israel pada tahun 1992 hingga tahun 2009. Sementara di dalam bab kelima akan dipaparkan hasil analisa mengenai latar belakang keikutsertaan Hizbullah sebagai partai politik dalam pemilihan parlemen tahun 1992. Di dalam bab kelima ini juga dipaparkan

hasil analisa mengenai dampak positif dan negatif serta konsekuensi dari transformasi yang dilakukan Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik dan strategi Hizbullah untuk menyelaraskan kedua aktivitasnya tersebut. Kesimpulan dan saran diletakkan pada bab keenam.



BAB II KERANGKA TEORI

Teori yang akan digunakan dalam menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan pada bab pertama terdiri dari tiga poin. Pertama konsep gerakan perlawanan Hizbullah berasal dari keyakinannya pada Islam yang diterjemahkan menjadi kepatuhan pada *wilayatul faqih* dan kebutuhan manusia akan Jihad. Kedua, teori gerakan sosial yang terdiri dari Teori *Political Opportunity Structure* yang biasanya digunakan untuk menjelaskan latar belakang kondisi sosial politik dalam aktivitas sosial dan politiknya dan Teori *Resource Mobilization* yang menjelaskan mengenai bagaimana Hizbullah berusaha mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk dapat mewujudkan tujuan yang dicita-citakannya. Teori ketiga yang dipakai dalam tesis ini adalah teori mengenai partai politik.

Hizbullah meyakini Islam dan berbagai ajarannya yang meliputi semua aspek kehidupan sebagai sistem hidup yang lengkap dan mampu menjawab semua tantangan dan menyediakan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Hizbullah tanpa keraguan menjadikan Islam dengan segala sistem kepercayaan, ibadah, dan ajaran-ajaran kehidupannya sebagai prinsip dan inspirasi gerakannya. Salah satu manifestasi dari keyakinan ini adalah kebutuhannya terhadap keberadaan dan tuntunan *wilayatul faqih*.

Konsep *wilayatul faqih* yang dikemukakan oleh Imam Khomeini menjadi sistem politik yang diterapkan di Iran pasca Revolusi Islam Iran tahun 1979 setelah mampu meruntuhkan kekuasaan Shah Iran. Inti konsep ini adalah bahwa ulama, sebagai orang yang *faqih* atau yang mengetahui dan memahami bermacam-macam ilmu, terutama ilmu mengenai syari'at Islam dan hukum-hukumnya, merupakan orang yang pantas berkuasa di suatu negara dan menjadi pemimpinnya. Dan oleh karena itu ia berada di puncak pimpinan dan memimpin struktur politik lain, termasuk presiden dan jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hizbullah yang didukung pendiriannya ini oleh Khomeini tentu saja mematuhi kekuasaan ulama ini. Namun, Hizbullah tidak ingin kehilangan corak khasnya yang berada di Lebanon dengan segala tantangan dan kebutuhan yang

tidak sama dengan Iran. Oleh karena itu, Hizbullah tetap menjaga independensinya dalam bertindak dan membuat berbagai kebijakan. *Wilayatul faqih* dalam aktivitas Hizbullah dijadikan sebagai rujukan dan tempat konsultasi atas keabsahan berbagai programnya dan menjaga agar bentuk-bentuk perlawanan, aksi sosial, maupun manuver-manuver politik yang dilakukannya tetap sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak menyalahinya.

2.1. Konsep Jihad

2.1.1. Konsep Jihad menurut Syi'ah

Menurut Moghadam bahwa dalam memahami jihad kelompok Syi'ah dipengaruhi oleh persepsinya mengenai penderitaan, sejarah yang berasal dari ketidakadilan, pemerintahan tirani, dan penghinaan. Sementara dalam Islam, jihad dipahami secara umum sebagai perjuangan di jalan Allah atau mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk perjuangan di jalan Allah. Konsep ini berbeda dalam prinsip maupun metode dengan perjuangan yang tidak berdasarkan atas perintah Allah, misalnya perjuangan yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan harta saja. Menurut Taleqani, salah satu ulama besar Syi'ah di Iran, jihad terdiri dari empat jenis, yaitu : jihad untuk menyebarkan kebenaran, jihad untuk melindungi Islam dan negeri Islam, jihad melawan hawa nafsu, jihad memerangi raja atau penguasa yang dzalim.¹

2.1.2. Konsep Jihad Menurut Hizbullah

Hizbullah sebagai sebuah gerakan Islam berbasis massa Syi'ah banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran para tokoh dan ulama Syi'ah terutama yang berasal dari Iran. Salah satu wujudnya adalah dengan usahanya untuk mengkonsultasikan setiap keputusan maupun programnya pada ulama-ulama tersebut. Setelah didirikannya *wilayatul faqih* di Iran dengan Ayatullah Rohullah Khomeini sebagai otoritas ulama tertinggi maka Hizbullah menyatakan pengakuannya atas otoritas *wilayatul faqih* Iran terhadap gerakannya. Konsep *wilayatul faqih* sendiri merupakan *ijtihad* Khomeini dengan memperhatikan kebutuhan kaum muslim Syi'ah yang membutuhkan otoritas ulama yang mumpuni sebagai rujukan dan pengambil keputusan-keputusan di tubuh umat

¹ Assaf Moghadam, 2007, *Mayhem, Myths, and Martyrdom : The Shi'a Conception of Jihad in Terrorism and Political Violence*, London: Routledge, hal.1-5

setelah lenyapnya Imam kedua belas dalam kepercayaan Syi'ah. Oleh karena itu, konsep ini adalah konsep baru dalam tubuh Syi'ah. Namun, Hizbullah mengakui keberadaan institusi otoritas ulama ini dan menjadikannya rujukan dalam program maupun prinsip gerakannya. Di samping itu, di Lebanon sendiri Hizbullah tetap berkonsultasi dan mendapat dukungan dari ulama Syi'ah Lebanon yang menjadi rujukan di Lebanon yaitu Syekh Husain Fadlullah.

Konsep jihad yang diadopsi Hizbullah selaras dengan konsep jihad dari Ayatullah Khomeini, namun Hizbullah telah menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi Lebanon dimana mereka eksis di dalamnya. Ada empat komponen jihad dalam pemahaman Hizbullah yaitu jihad militer, jihad pribadi, jihad sosial, dan jihad politik. Konsep jihad ini dipengaruhi oleh pemahaman tokoh-tokoh Hizbullah dan ulama-ulama yang menjadi rujukannya atas *nash-nash* Al-Qur'an terutama yang membicarakan mengenai jihad, peristiwa Karbala, dan usaha melawan imperialisme dan kolonialisme Barat.²

Konsep Jihad dalam pandangan Hizbullah didefinisikan Naim Qasim, Wakil Sekretaris Jendral Hizbullah, menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh atau melakukan berbagai upaya untuk melawan musuh. Jihad merupakan pemenuhan yang lengkap dan membutuhkan kesiapan yang lengkap, bukan pemenuhan parsial. Menurut ulama besar Syiah Al-Thabathaba'i dalam tafsir Al Qur'annya bahwa hakikat perjuangan atau jihad seharusnya semata-mata dilakukan karena Allah, bukan karena yang lain.³

Ada empat pilar jihad yang digunakan Hizbullah, pilar pertama adalah kesengsaraan dan kemalangan. Konsep ini berasal dari pemahaman bahwa kehidupan di dunia penuh dengan berbagai cobaan, ujian, dan kesulitan. Namun, Allah telah memberi manusia segala potensi yang diperlukannya untuk dapat menghadapi semua tantangan kehidupan tersebut, baik kelemahan yang ada pada diri manusia itu sendiri maupun kelemahan yang dimiliki musuh yang berada di luar dirinya sehingga manusia dapat mencapai kemenangan yang sesungguhnya.⁴

Pilar kedua adalah bahwa jihad adalah jalan menuju Allah. Tujuan jihad adalah demi Allah yang berarti ia berada di jalan kebenaran yang diberikan Allah.

² *Ibid.*, hal. 5

³ Qassem, *op.cit.*, hal. 47

⁴ *Ibid.*, hal. 51-53

Pengorbanan terhadap pilihan di jalan kebenaran membutuhkan keberanian dan ketegaran. Keberanian dan ketegaran ini hanya akan didapatkan dari usaha yang sungguh-sungguh serta keyakinan dan kepercayaan atas tugas yang diberikan Allah tersebut.

Pilar ketiga adalah bahwa jihad sebenarnya adalah merupakan kepentingan manusia itu sendiri. Sementara memperturutkan hawa nafsu dan membiarkan kejahatan menyebar di tengah masyarakat akan mengakibatkan penderitaan bagi individu dan masyarakat. Dan pilar terakhir adalah bahwa jihad adalah pencerahan. Jihad dipahami sebagai pintu menuju kehidupan, bukan kematian. Karena menegakkan kebenaran merupakan persoalan kehidupan yaitu dengan cara memerdekakan negara dan mengendalikan diri. Jihad merupakan kemenangan sebab ia merupakan kemenangan berupa kehidupan abadi di dalam surga sebagai balasan atau pahala bagi pelaku jihad yang meyakinkannya.

Namun, di atas semua konsep jihad tersebut, karena salah satu prinsip dasar Hizbullah adalah kepercayaannya pada *wilayatul fakih*, maka pelaksanaan jihad harus disetujui oleh otoritas ulama tersebut. *Wilayatul fakih* bertugas untuk menilai situasi dan menentukan apakah jihad yang dilakukan adalah termasuk jihad defensif. Otoritas ulama ini dipercaya untuk menentukan berbagai landasan dan tuntunan untuk melakukan konfrontasi. Hal ini diperlukan sebab sudah sepatutnya para pejuang yang siap berjihad hanya diterjunkan dalam pertempuran yang memang selaras dengan kewajiban dan tujuan jihad.⁵

Jihad sebagai kewajiban untuk membela hak-hak yang dimiliki umat Islam maka jihad membutuhkan kerjasama antara setiap umat dan kesiapannya untuk bergerak di bawah satu komando kepemimpinan sehingga tersusun barisan yang rapi layaknya bangunan yang kokoh. Dari kerapian dan keteraturan pasukan jihad tersebut maka diharapkan terlahir aksi-aksi jihad yang efektif sesuai tujuan jihad yang telah ditetapkan pemimpin gerakan jihad tersebut.

2.2. Teori Gerakan Sosial

Kemunculan gerakan sosial dapat dilihat dengan menggunakan Paradigma ketegangan struktural dan paradigma *resource mobilization*. Tarrow menyebutkan bahwa situasi politik yang penuh perdebatan (*contentious politics*) dapat

⁵ *Ibid.*, hal. 55

menimbulkan perubahan kesempatan dan keterbatasan atau hambatan dalam sistem dan lingkungan politik. Menurut Tarrow, ketika perdebatan muncul di masyarakat dan semakin meluas sehingga menciptakan lingkaran perdebatan yang kemudian diorganisasikan diantara masyarakat yang berdaulat maka akan mendorong terjadinya revolusi. Aksi kolektif berasal dari berbagi pemahaman atas suatu masalah, jaringan sosial yang erat, dan struktur yang menghubungkan masyarakat satu sama lain, serta menggunakan bentuk aksi yang bergaung dan menyebar di masyarakat. Namun, Tarrow meyakini bahwa di atas semua faktor itu, pasang surut kondisi politiklah yang menentukan kemunculan aksi-aksi kolektif dalam masyarakat.⁶

Namun, bagi Mises ketegangan yang berkaitan dengan status sosial, yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan struktural dapat memicu munculnya gerakan sosial.⁷ Paradigma ketegangan struktural memusatkan perhatian pada interrelasi antara sebuah persoalan di dalam masyarakat, yakni ketegangan struktural dengan pembentukan gerakan-gerakan sosial untuk menjawab persoalan tersebut. Ketegangan dipandang sebagai sebuah kondisi yang eksis secara objektif dan juga suatu keadaan tegang antara aktor-aktor sosial. Model ketegangan struktural dirancang untuk menjelaskan bagaimana dan kapan aktor-aktor ini menyatu dan membentuk sebuah gerakan serta bagaimana ketegangan-ketegangan yang ada ditanggapi dan dikomunikasikan.⁸

Gerakan sosial didefinisikan sebagai aksi yang dilakukan secara bersama-sama demi satu tujuan bersama. Gerakan sosial juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat opini dan kepercayaan sekelompok masyarakat yang menunjukkan keinginan dan usaha untuk merubah dan atau distribusi penghargaan dalam masyarakat.⁹ Teori mengenai gerakan sosial bermacam-macam yang satu sama lain saling melengkapi.

Karakteristik gerakan sosial menurut Gerlach dan Hine yaitu *Segmentary*, maksudnya adalah bahwa gerakan sosial terdiri dari kelompok-kelompok

⁶ Sidney Tarrow, 1998, *Power In Movement*, New York: Cambridge University Press, hal. 16

⁷ Robert Mises, 2004, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press, hal. 48

⁸ *Ibid.*, hal. 59

⁹ McCarthy, John D. Zald, and Mayer N, 1977, *Resource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory* dalam *The American Journal of Sociology* Vol.82 No.6, Chicago: University Of Chicago Press, hal. 1217-1218

masyarakat atau sel, yang tumbuh dan mati, bercabang dan menyatu, berkembang ataupun mundur. Karakteristik kedua adalah *polycephalus* adalah bahwa gerakan sosial tidak punya pimpinan pusat atau struktur pengambilan keputusan yang terpusat, ia memiliki banyak pimpinan yang satu sama lain mungkin saja saling berebut kekuasaan, bukan hanya di dalam gerakan, namun juga antara sel-sel gerakan tersebut. Karakteristik ketiga adalah *reticulate* yang maksudnya adalah bahwa gerakan sosial diorganisir di dalam suatu kerangka organisasi dalam mata rantai yang saling berhubungan dan berpartisipasi secara tumpang tindih, membuat kegiatan bersama, dan memiliki tujuan dan lawan bersama.¹⁰

Menurut Bottomore salah satu syarat penting bagi berhasilnya suatu gerakan sosial yakni sampai batas-batas tertentu dalam perkembangannya ia harus menciptakan kelompok-kelompok politik yang lebih terorganisir, merubah atau menguasai organisasi-organisasi politik yang ada, yang dapat terlibat langsung di dalam perjuangan merebut kekuasaan dan memiliki kapasitas untuk menggunakan kekuasaan yang pada akhirnya akan digunakan untuk menata kembali struktur masyarakat.¹¹ Bottomore juga mengemukakan beberapa ciri gerakan sosial, yakni¹² :

1. Sifat yang kurang terorganisir, dimana tidak ada keanggotaan tetap atau keanggotaan yang mudah dikenali, tidak ada kartu anggota
2. Tidak memiliki jalur staf pusat
3. Satu kelompok yang bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin tertentu yang menampakkan dirinya dalam perdebatan politik sehari-hari
4. Berperan dalam kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi
5. Bertindak dalam cara yang lebih menyatu
6. Membangun prasyarat bagi perubahan-perubahan policy atau rezim dengan memperlakukan keabsahan sistem politik yang ada, baik sebagian maupun seluruhnya dengan menciptakan iklim pendapat yang berbeda dan mengajukan alternatif

¹⁰ dalam John Lofland, 1996, *Social Movement Organization : Guide to Research on Insurgent Realities*, New York: Walter de Gruyter Inc, hal. 143

¹¹ Tom Bottomore, 1992, *Sosiologi Politik*, cet.2, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 38

¹² *Ibid.*, hal. 29

Sementara menurut Marshall gerakan sosial memiliki karakteristik: tujuan yang spesifik, organisasi yang formal, dan aktivitasnya berlangsung terus menerus. Gerakan sosial berkerja di luar sistem politik yang berjalan di suatu masyarakat, namun ia sangat mungkin menjadi kelompok kepentingan yang dalam berakar dari masyarakat. Tujuan kelompok ini dapat saja sempit dan spesifik, corak gerakannya dapat revolusioner ataupun reformis, namun mereka merupakan kelompok masyarakat yang aktif menuntut adanya perubahan.¹³

Lebih lanjut Marshall mengelompokkan gerakan sosial berdasarkan target objek perubahan (individu atau masyarakat) dan tujuan perubahan (sebagian atau seluruh aspek). Dari dua aspek ini, gerakan sosial terbagi menjadi gerakan transformatif, reformatif, *redemptive* (bersifat menebus), dan alternatif. Keempat gerakan ini memiliki tujuan untuk : melakukan restrukturisasi masyarakat dengan berusaha memperbaiki beberapa aspek negatif yang ada dalam masyarakat, memimpin anggotanya untuk menghindari jalan hidup yang salah-seperti gerakan sosial yang berbasis keagamaan-, dan gerakan yang hanya bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat maupun kehidupan para anggotanya. Dua tujuan pertama bertujuan untuk mengubah masyarakat (baik secara total ataupun parsial), sementara dua tujuan lain lebih bertujuan untuk mengubah individu-individu yang menjadi anggotanya.¹⁴

Berdasarkan tahapan dan perkembangan gerakan sosial modern, James W dan Zande¹⁵ mengemukakan tipe-tipe gerakan sosial berdasarkan ideologi, antara lain:

1. Gerakan revolusioner, yaitu gerakan yang mengubah masyarakat dengan menentang nilai-nilai fundamental. Gerakan revolusioner mendukung penggantian kerangka nilai yang ada
2. Gerakan reformasi, yaitu gerakan yang berusaha memodifikasi kerangka kerja dari skema nilai yang ada. Ia mengupayakan perubahan-perubahan yang akan mengimplementasikan kerangka-kerangka nilai yang ada secara lebih memadai

¹³ Gordon Marshall, 1998, Social Movement, dalam *A Dictionary of Sociology*. <<http://www.encyclopedia.com>>

¹⁴ *Loc. cit.*

¹⁵ Rafael Raga Maran, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 70-72

3. Gerakan perlawanan, yaitu gerakan yang memblokir atau mengeliminasi perubahan yang sudah dilembagakan sebelumnya. Ia merupakan suatu bentuk gerakan balasan.
4. Gerakan ekspresif, yaitu gerakan yang kurang berkonsentrasi dengan perubahan institusional. Gerakan ini berusaha merenovasi atau memperbaharui orang2 dari dalam, seringkali dnegan menjanjikan suatu pembebasan di masa depan.

2.2.1. *Political Opportunity Structure (POS)*¹⁶

POS atau struktur kesempatan politik berupaya menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul karena perubahan yang terjadi dalam struktur politik yang dipandang sebuah gerakan sosial sebagai kesempatan. POS bukanlah konsep yang kaku dan konstan. Ia mungkin mengalami perubahan sepanjang masa sebagai hasil kontrol para elit baru di dalam sistem atau tercapainya konsolidasi elit lama dengan berbagai modifikasi baru. Oleh karena itu, Kriesi menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal, dan strategi yang dipergunakan oleh para pelaku perubahan. Sementara Brockett menekankan pada beberapa faktor yang berbeda seperti arti akses kelembagaan bagi para pelaku perubahan, kehadiran sekutu, fragmentasi elit, dan tingkat konflik yang mempergunakan cara-cara represif. Sementara Rucht menekankan pada faktor-faktor seperti akses terhadap partai politik, kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, dan struktur aliansi.

Teori POS dikemukakan oleh Charles Tilly dalam bukunya *From Mobilization to Revolution*. Tilly mengajukan pendapat bahwa perkembangan gerakan sosial nasional bersamaan dengan, bahkan saling bergantung dengan berkembangnya konsolidasi nasional di suatu negara (perkembangan sistem dan lingkungan politik). Tilly meyakini bahwa perkembangan gerakan sosial hanya dapat dipelajari dengan mengaitkannya dengan politik, dan gerakan sosial memiliki strategi, struktur, dan hasil yang berbeda-beda di masing-masing negara. Model POS yang dibuat Tilly sangat struktural di mana aktor-aktor gerakan sosial tidak dapat merekayasa situasi dan lingkungan agar sesuai dengan tujuan mereka.

¹⁶ Abdul Wahib Situmorang, 2007. *Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 3-6

Sementara Tarrow mengemukakan bahwa POS sebaiknya tidak dipahami sebagai model atau penyebab utama yang dapat mendorong munculnya gerakan sosial, melainkan ia seharusnya dipahami sebagai serangkaian petunjuk mengenai momen dimana kekacauan politik akan muncul, di dalam serangkaian hubungan sebab akibat yang akan menuntun pada interaksi yang terus menerus dipertahankan dengan pihak-pihak yang berkuasa dan kemudian melahirkan gerakan sosial. Oleh karena itu, Tarrow mendefinisikan kesempatan politik sebagai situasi masyarakat dimana terjadi perjuangan politik yang mendorong masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Perjuangan politik yang berlangsung terus menerus yang melahirkan situasi perdebatan yang intens dan kemudian dimanfaatkan para aktor gerakan sosial untuk membentuk lingkaran perdebatan yang akhirnya diorganisir sehingga mendorong lahirnya gerakan sosial yang menghasilkan revolusi. Kesempatan politik merujuk pada sumber-sumber eksternal yang dimiliki oleh sebuah gerakan.¹⁷

Kekacauan politik akan muncul ketika penduduk biasa, bisa juga didukung oleh elit politik ataupun pejabat negara, memberikan respon pada kesempatan untuk melakukan aksi kolektif, membangun aliansi potensial yang menunjukkan elit dan penguasa yang mudah dijatuhkan, kemudian memicu terbentuknya jaringan sosial dan identitas bersama menjadi sebuah aksi bersama yang mengusung tujuan tertentu. Namun apakah kekacauan politik akan dapat melahirkan gerakan sosial sangat tergantung pada aksi kolektif yang dilakukan masyarakat, konsensus dimobilisasi dengan kesepakatan bersama, dan lokasi serta kekuatan struktur mobilisasi. Kekacauan politik tidak serta merta terjadi dari ide seseorang, namun ia dibentuk secara kultural dan dikomunikasikan secara sosial.¹⁸ Bagi Tarrow menyebutkan bahwa kekacauan politik dihasilkan oleh semakin terbukanya kesempatan politik. Kekacauan mengkristal menjadi gerakan sosial ketika ia mampu membuat jaringan sosial dan disambungkan ke dalam struktur dan dideklarasikan dengan suatu aksi kolektif dengan identitas yang mencerminkan kolektivitas tersebut dan mampu mempertahankan pendirian di hadapan lawannya. Gerakan sosial mampu mengubah kesempatan yang diberikan

¹⁷ Tarrow, *op. cit.*, hal 20

¹⁸ *Ibid.*, hal 20

lingkungan eksternal menjadi sumber kelahiran dan keberlangsungan gerakannya.¹⁹

2.2.2. Teori *Resource Mobilization*

Teori *resource mobilization* muncul pada pertengahan tahun 60-an dan yang menjadi fokus perhatiannya adalah tindakan-tindakan yang pada umumnya rasional, yang dilakukan oleh anggota-anggota sebuah gerakan untuk membuat gerakan tersebut berhasil. Agar efektif, maka tindakan-tindakan tersebut ini harus dilakukan dalam sebuah organisasi gerakan. Teori ini menempatkan rasionalitas cara sebagai nilai tambah, yakni dengan menempatkan analisis tentang pengolaborasian aneka bentuk, strategi, dan taktik organisasi secara sengaja dan sadar dengan tujuan-tujuan yang mau dicapai.

Teori *resource mobilization* adalah teori yang memfokuskan pada kemampuan anggotanya untuk mendapatkan sumber-sumber dan memobilisasi orang-orang untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sumber-sumber yang dimaksud termasuk uang, waktu dan keahlian orang-orang, akses ke media, dan barang-barang material seperti tanah dan peralatan. Dukungan dari pihak eksternal juga berharga bagi sebuah gerakan sosial. Teori ini berasal dari asumsi bahwa partisipan dalam gerakan sosial adalah orang-orang yang rasional. Gerakan sosial dibangun dan dihancurkan, maupun dibangun kembali berdasarkan keputusan rasional mengenai tujuan gerakan, ketersediaan sumber daya, dan biaya mobilisasi yang dilakukan. Di samping itu, teori ini juga mengasumsikan bahwa sejumlah sumber daya ekonomi dan politik juga diperlukan agar gerakan dapat sukses.²⁰

Hal ini berarti ketidakpuasan yang meluas dalam masyarakat saja tidak cukup untuk membuat sebuah aksi kolektif dan gerakan sosial, ia membutuhkan ketersediaan sumber daya yang cukup dan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi untuk menggerakkan massa. Berdasarkan penelitian terhadap lima puluh tiga gerakan protes di Amerika antara tahun 1800-1945, William Gamson menyimpulkan bahwa pengorganisasian dan strategi yang digunakan menentukan keberhasilan dari sebuah gerakan. Pada perkembangan selanjutnya, para tokoh

¹⁹ Tarrow, *ibid.*, hal.23

²⁰ Diana Kendal, 2007, *Sociology in Our Time : The Essential*, 7th edition, Belmont: Wadsworth Cengage Learning, hal. 556

gerakan sosial menyebutkan bahwa ideologi dan legitimasi yang diberikan pada sebuah gerakan juga sama pentingnya dengan sumber daya material yang lain.²¹

Paradigma *resource mobilization* dibangun di atas sejumlah landasan berpikir. Pertama, gerakan-gerakan sosial paling tepat dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris. Kedua, apapun yang menjadi tujuan atau cita-cita sebuah gerakan sosial, strategi-strategi yang dipakai biasanya rasional. Ketiga, aktivitas utama dari organisasi gerakan adalah memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai macam cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, bentuk organisasi dan strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial membuatnya serupa dengan bentuk tindakan terelembaga.

Landasan paradigma *resource mobilization* dalam menganalisis kemunculan sebuah gerakan sosial yang kelima adalah bahwa fenomena perilaku kolektif berhubungan dengan gerakan sosial karena mereka merupakan unsur yang sengaja diciptakan sebagai bagian dari taktik-taktik yang digunakan dalam gerakan sosial. Mereka bukanlah *primordial matter* (bahan mentah darimana gerakan sosial terbentuk) dalam gerakan kemasyarakatan, melainkan sebuah *manufactured product* (insiden yang memang direncanakan oleh sebuah gerakan untuk terjadi sebagai bagian dari strategi dan taktiknya). Keenam, aksi-aksi gerakan sosial berlangsung di dalam struktur yang membatasi tapi tidak sepenuhnya dan tidak secara mekanis pula menentukan bentuk tindakan. Faktor utama dalam perilaku gerakan adalah struktur peluang politik (POS) atau lembaga politik yang bisa memaksa strategi gerakan untuk mengikuti pola yang tergaris dalam struktur. Ketujuh, gerakan-gerakan sosial punya hubungan yang kompleks satu sama lain, sebagai pesaing, sebagai partner koalisi, atau sebagai gerakan tandingan yang saling berlawanan.²²

Pendekatan *resource mobilization* digunakan untuk mengupas dinamika dan strategi pertumbuhan, penurunan, dan perubahan dari suatu gerakan sosial. Pendekatan ini menaruh perhatian utamanya pada dukungan dan tuntutan kondisi sosial di mana gerakan sosial tersebut eksis di masyarakat. Pendekatan ini juga meneliti beragam sumber atau potensi yang dimiliki gerakan yang harus

²¹ Loc. cit.

²² Minsel, *op. cit.*, hal 56-58

dimobilisasi, hubungan atau relasi antara gerakan tersebut dengan gerakan-gerakan lain yang ada di lingkup sosial yang sama, ketergantungan gerakan terhadap dukungan dari luar, serta strategi yang digunakan para tokoh gerakan untuk melakukan kontrol aktivitas gerakan.²³

2.3. Teori Partai Politik

Partai politik berbeda dengan gerakan. Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau bahkan berkeinginan menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibandingkan partai politik, gerakan memiliki tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, bahkan kadang-kadang ideologis. Orientasi inilah yang menjadi ikatan yang kuat diantara anggota-anggotanya dan dapat menimbulkan suatu identitas kelompok yang kuat. Gerakan seringkali tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

Partai politik pertama-tama muncul di Eropa Barat. Hal ini disebabkan meluasnya pemahaman bahwa bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dan diikutsertakan dalam proses politik. Oleh karena itu, partai politik lahir secara spontan dan berkembang sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintahnya. Partai politik dewasa ini dianggap sebagai ciri dari sistem politik yang sudah modern atau yang sedang mengalami modernisasi.²⁴

Menurut Ramlan Surbakti, ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.²⁵

Teori pertama mengatakan bahwa parpol dibentuk legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan

²³ McCarthy, *op. cit.* hal. 1218

²⁴ Miriam Budiarjo, 1994, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 159

²⁵ Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Cet.6, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 113

masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat, contohnya partai Buruh di Inggris. Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi saat suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, seperti penambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru serta munculnya gerakan-gerakan populis.

Perubahan-perubahan yang terjadi menimbulkan tiga krisis, yakni legitimasi, intergrasi, dan partisipasi. Artinya, perubahan-perubahan sosial politik yang terjadi mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa; dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga hal inilah partai politik dibentuk. Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk semacam pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat dan beranggotakan berbagai unsur etnis, daerah, agama, dan pelapisan sosial ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai pengintegrasi bangsa. Dan partai politik kemudian ikut serta dalam pemilu sebagai sarana konstitusional mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan diharapkan dapat pula berperan sebagai saluran partisipasi politik masyarakat.

Dan teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.

Dengan demikian teori ketiga memiliki kesamaan dengan teori kedua bahwa partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi.

Perbedaan teori kedua dan ketiga terletak pada proses pembentukannya. Teori kedua memandang perubahan sosial politik yang terjadi akan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara teori ketiga mengatakan perubahan-perubahan itulah melahirkan partai politik. Lapalombara dan Weiner mensyaratkan bahwa partai bukanlah organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas dan kadang-kadang saja dengan para pendukungnya. Partai politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya di tingkat pusat, namun juga eksis sampai di tingkat daerah. Oleh karena itu, menurut kedua ilmuwan ini, ciri-ciri partai politik adalah berakar pada masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah, dan ikut serta dalam pemilihan umum.²⁶

Namun, menurut Surbakti, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan ke dalam ciri ini, yakni ideologi suatu partai, sebab setiap partai harusnya memiliki ideologi yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas pemersatu, namun juga sebagai tujuan perjuangan partai. Dan kedua, ciri ini tidak berlaku dalam masyarakat yang sedang terjajah di mana partai politik lebih berfungsi sebagai pembina kesadaran nasional dan mengerahkan massa untuk mencapai kemerdekaan.²⁷

Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik untuk dapat menjalankan kebijakan-kebijakan mereka.²⁸ Beberapa definisi partai politik yang dikemukakan beberapa pemikir yang dikutip oleh Budiarjo yaitu pendapat Carl J. Friederich, R. H. Souttau, dan Neuman. Menurut Friederich partai politik adalah sekelompok manusia yang

²⁶ *Ibid.*, hal. 113-115

²⁷ *Ibid.*, hal. 115

²⁸ Budiarjo, *op. cit.*, hal. 161

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Sementara menurut Souttau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Partai politik, menurut Neuman adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.²⁹

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut maka Surbakti menyimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijaksanaan umum yang mereka susun. Alternatif kebijaksanaan umum ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.³⁰

Dalam negara demokratis, partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu:³¹

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat dikurangi. Aspirasi masyarakat yang begitu banyak dan beragam ditampung dan digabungkan, proses ini disebut *interest aggregation*. Setelah digabungkan, kemudian berbagai aspirasi tersebut dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, proses ini disebut perumusan kepentingan (*interest articulation*). Semua kegiatan ini dilakukan oleh partai politik. Partai selanjutnya merumuskannya sebagai suatu kebijakan yang

²⁹ *Ibid.*, hal. 162

³⁰ Surbakti, *op. cit.*, hal. 116

³¹ Budiarjo, *op. cit.*, hal. 163-168

akan diperjuangkan dan disampaikan ke pemerintah. Namun, di sisi lain, partai juga memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut *broker* (perantara) dalam suatu bursa ide-ide.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Di samping itu, sosialisasi politik juga mencakup proses-proses di mana masyarakat menyampaikan norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lain. Oleh karena itu partai perlu terus menerus melakukan politik *image* untuk membangun citra sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan umum sehingga dapat selalu memperoleh dukungan dari masyarakat. Hal ini penting untuk menanamkan solidaritas dan simpati masyarakat pada partai sehingga partai tersebut dapat tetap eksis dalam masyarakat dan sistem politik. Partai politik juga mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui ceramah, kursus, penataran, dan sebagainya.

3. Partai sebagai sarana *recruitment* politik

Partai juga berfungsi untuk mengajak dan mencari orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk dapat turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi dan lain-lain.

4. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Berbagai persaingan dan perbedaan yang terjadi dalam iklim demokrasi dan politik merupakan persoalan wajar dan di sinilah partai politik berperan untuk mengatasi dan menengahi konflik kepentingan yang terjadi.

Sementara menurut Surbakti, fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun partai berdasarkan ideologi tertentu, yakni, dalam sistem demokrasi, adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Ada tiga kegiatan yang

dilakukan partai berkaitan dengan fungsi ini, yakni seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan.³²

Mengenai fungsi partai yang lain, Surbakti, beberapa fungsi selaras dengan pendapat Miriam Budiarmo, menambahkan fungsi partai politik antara lain : fungsi partisipasi politik, pemadu kepentingan, dan fungsi komunikasi politik. Fungsi partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Fungsi komunikasi politik berarti proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat pada pemerintah. Dalam hal ini, partai berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah pada masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat pada pemerintah. Maka partai bertugas menerjemahkan keputusan dan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa-bahasa teknis yang dipahami masyarakat. Fungsi selanjutnya adalah pengendalian konflik dengan cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Dan fungsi terakhir menurut Surbakti adalah fungsi kontrol politik, yakni kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan kontrol dan pengawasan partai harus memiliki tolok ukur yang jelas. Tolok ukur yang dipakai adalah berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan

³² Surbakti, *op. cit.*, hal. 117

yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru. Tolok ukur yang dipakai merupakan kesepakatan bersama yang diambil oleh negara.³³

Budiarjo menyebutkan beberapa klasifikasi politik yang dilakukan para teoritis partai politik yang dilihat dari berbagai aspek. Berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai terbagi menjadi partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, yang biasanya terdiri dari pendukung berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya. Dalam memperjuangkan suatu program atau ide yang biasanya luas dan samar-samar. Sementara partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari para anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan mengadakan penyaringan dan seleksi terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sifat dan orientasi membagi partai menjadi partai lindungan (*patronage party*) dan partai ideologi (*programmatic party*). Partai lindungan umumnya memiliki organisasi sosial yang longgar, sekalipun di tingkat lokal cukup ketat, disiplin yang lemah, dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Karena itu ia hanya giat di saat-saat menjelang pemilu. Partai ideologi biasanya memiliki pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaannya dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Seleksi ketat dilakukan pada calon anggotanya.

Berdasarkan asas dan orientasinya partai politik dibagi menjadi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis adalah partai yang punya program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai tersebut. Partai ini terorganisasikan secara agak longgar dan tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Ada ideologi yang dipakai mungkin, namun hanya sejumlah gagasan umum bukan sejumlah doktrin dan program

³³ *Ibid.*, hal. 118-121

konkrit yang siap dilaksanakan. Partai pragmatis biasanya muncul pada sistem dua partai seperti di AS.

Jenis kedua yaitu partai doktriner adalah partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkrit dan sistematis dalam bentuk program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu namun tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ia telah dirumuskan secara konkrit dan partai terorganisasikan secara ketat. Partai komunis adalah contoh partai doktriner.

Jenis ketiga adalah partai kepentingan merupakan partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai semacam ini sering ditemui pada sistem multipartai.

Berdasarkan basis sosial dan tujuan, Almond menggolongkan partai politik ke dalam empat tipe, yakni partai politik yang beranggotakan berbagai lapisan sosial dalam masyarakat, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, dan partai politik yang para anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu.

Sedangkan berdasarkan tujuannya, Almond membagi partai politik menjadi tiga, yakni partai perwakilan kelompok yakni yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat dengan tujuan memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen, seperti Partai Barisan Nasional di Malaysia. Kedua, partai pembinaan bangsa, yakni partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit. Dan terakhir, partai mobilisasi yakni partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Jenis terakhir ini seringkali eksis dalam sistem kepartaian tunggal.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hal. 122-124

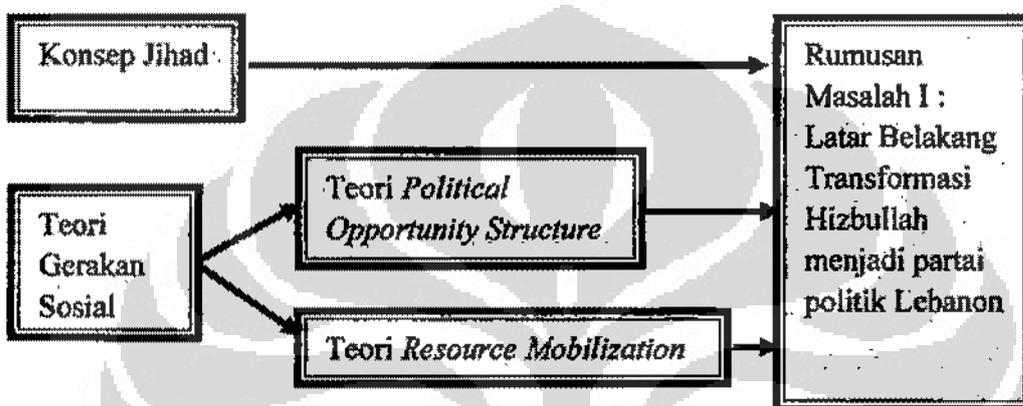
Keberadaan partai politik tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem kepartaian yang diberlakukan di suatu negara. Sistem kepartaian diklasifikasikan Maurice Duverger menjadi sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai. Sistem partai tunggal diberlakukan agar masyarakat dan keterlibatannya dalam politik serta kepentingan-kepentingannya mudah diatur oleh negara. Sistem ini membuat politik tidak kompetitif. Sistem dwipartai partai dibagi dalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dengan demikian maka tanggungjawab dan fungsi partai yang ada telah jelas dan tegas. Sistem ini akan dapat berjalan jika memenuhi tiga syarat, yaitu : komposisi masyarakat yang homogen, konsensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Sistem seperti ini cenderung untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil. Sementara sistem multipartai umumnya berasal dari keanekaragaman masyarakat, dimana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa masih kuat. Sistem multi partai yang digandengkan dengan sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan pada kekuasaan badan kelegislatif sehingga peranan eksekutif menjadi lemah. Di lain pihak, oposisi pun cenderung kurang memainkan peranan yang jelas sebab koalisi yang terjadi senantiasa berubah-ubah.³⁵

2.4. Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah

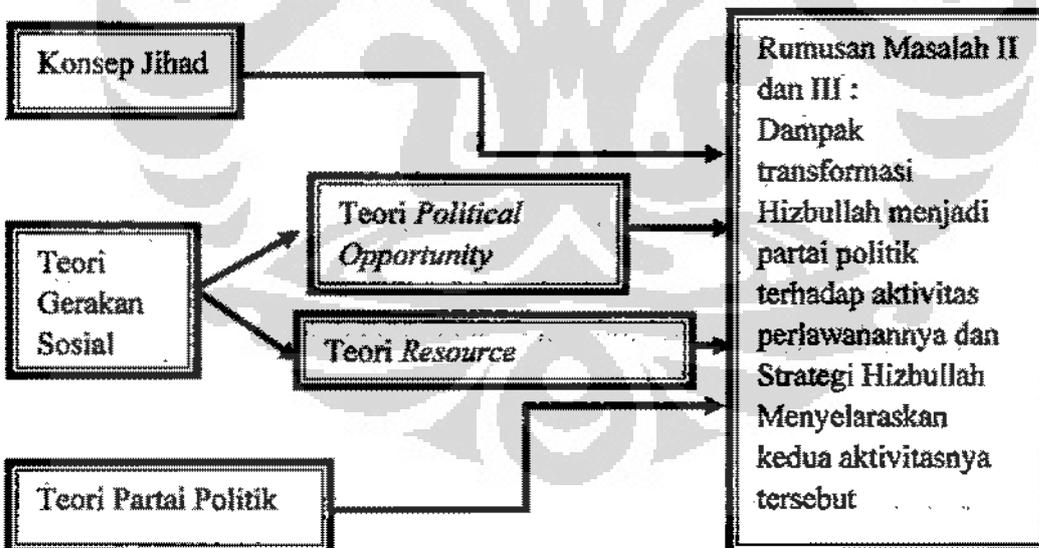
Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mencoba menganalisis data-data yang telah penulis temukan berdasarkan tiga teori utama tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hizbullah untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum Lebanon pada tahun 1992 dianalisa dengan menggunakan konsep jihad, teori *political opportunity structure* dan *resource mobilization* dari teori gerakan sosial. Sementara untuk pertanyaan kedua dan ketiga yakni mengenai dampak aktivitas politiknya terhadap gerakan perlawanannya terhadap Israel dan strategi Hizbullah menyelaraskan aktivitas politik dan aktivitas perlawanannya dianalisa dengan menggunakan konsep jihad, teori *resource mobilization* dan teori *political opportunity structure*, dan teori mengenai partai politik. Dengan menggunakan tiga teori ini fungsi dan peran

³⁵ Budiarjo, *op. cit.*, hal. 163-170

Hizbullah sebagai gerakan perlawanan, gerakan sosial, dan partai politik dipaparkan dan kemudian akan dianalisa peran dan fungsi yang dapat saling memperkuat satu sama lain dan peran serta fungsi yang mendapat perhatian sehingga tidak saling melemahkan, membahayakan pergerakan, ataupun menimbulkan konflik internal Hizbullah maupun antara Hizbullah dengan pihak-pihak lain. Pemakaian teori-teori dalam analisa data dapat digambarkan dalam diagram berikut ini :



Bagan 2.1 Penggunaan Teori dalam Analisa Masalah I



Bagan 2.2 Penggunaan Teori dalam Analisa Masalah II dan III

2.5. Penelitian Sebelumnya

Buku yang membahas mengenai Hizbullah sudah cukup banyak. Antara lain buku yang berjudul *Blueprint Hizbullah* yang ditulis oleh Wakil Sekjen

Hizbullah, Na'im Qassem, dengan judul buku asli Hizbullah *The Story From Within*. Buku ini sangat membantu menyediakan kerangka awal berkenalan dengan Hizbullah dan prinsip-prinsip gerakannya. Sebagai buku yang ditulis oleh pejabat tinggi Hizbullah buku ini sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis dalam menemukan dokumen-dokumen dan peristiwa-peristiwa penting serta dinamika yang dialami Hizbullah semenjak berdirinya.

Buku lain berjudul *Rahasia Ketangguhan Hizbullah* yang ditulis oleh Prof. Ali Qur'ani. Judul buku aslinya adalah *Ta'sir Min al-Janub*. Buku ini berguna untuk mengkonstruksi kerangka berpikir penulis mengenai Hizbullah dari sudut pandang Islam sebagai prinsip utama Hizbullah dalam seluruh keputusan dan gerakannya. Dalam buku ini diulas mengenai prinsip-prinsip Hizbullah dalam kaitannya langsung dengan ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam.

Buku ketiga berjudul *Denyut Perlawanan dan Rahasia Kekuatan Hizbullah: Untold Story From Within* yang ditulis Dr. Rifat Sayyed Ahmad. Buku ini lebih menceritakan mengenai Hassan Nasrallah sebagai pemimpin Hizbullah dan bagaimana pergerakan yang dilakukan Hizbullah sebagai partai politik maupun sebagai gerakan sosial yang melakukan pelayanan sosial pada masyarakat Lebanon di bawah kepemimpinan Nasrallah.

Buku keempat berjudul *Siapa Hizbullah dan Siapa Nasrallah* yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh tiga wartawan Indonesia yang meliput krisis dan konflik yang terjadi di Lebanon sebagai akibat perang Hizbullah-Israel pada tahun 2006. Buku ini menceritakan mengenai perang Hizbullah-Israel dan dampak-dampak serta berbagai kerusakan dan korban yang ditimbulkannya. Buku ini juga memaparkan mengenai rencana Israel dan Amerika Serikat terhadap Lebanon dibalik perang tersebut. Namun, analisis yang bagus mengenai Hizbullah juga dikemukakan di dalamnya yakni bahwa sebelumnya Hizbullah dan Nasrallah telah mengetahui rencana tersebut, dan keputusan untuk memulai konfrontasi yang memang berasal dari Hizbullah merupakan keputusan besar yang telah diperhitungkan dengan matang agar rencana Israel dan Amerika Serikat tersebut belum matang sepenuhnya dan segera dapat dipatahkan oleh Hizbullah.

Gerakan Politik... Friane Aurora, Pascasarjana UI, 2010

Penulis juga mendapatkan satu *electronic book* yang ditulis oleh Joseph Elie Alagha yang berjudul *The Shifts in Hizbullah's Ideology : Religious Ideology, Political Ideology, and Political Program*. Buku ini merupakan disertasi Alagha yang berasal dari Lebanon dan mendapatkan sumber data-datanya langsung dari pusat informasi Hizbullah dan wawancara dengan beberapa tokoh Hizbullah. Alagha membahas mengenai perubahan ideologi Hizbullah yang dibagi dalam tiga fase. Fase pertama merupakan awal lahirnya Hizbullah dan perkembangan di masa-masa awalnya yaitu pada tahun 1978-1992. Pada masa ini Hizbullah memiliki pemahaman yang fundamental mengenai jihad. Fase kedua diawali dengan keterlibatan Hizbullah dalam pemilihan umum sejak tahun 1992. Fase ini ditandai dengan program *infithah* atau keterbukaan Hizbullah untuk menyesuaikan diri dengan terbukanya peluang untuk aktif dalam sistem politik Lebanon pasca Piagam Taif yang menandai berakhirnya perang saudara yang sudah terjadi selama enam belas tahun di Lebanon. Keputusan untuk ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hasil *ijtihad* Hizbullah untuk menyikapi berbagai perkembangan sosial politik yang terjadi di Lebanon.

Fase ketiga dari perkembangan Hizbullah adalah setelah invasi Israel ke Lebanon Selatan pada tahun 2002. Setelah masa ini Hizbullah menghadapi berbagai tantangan yang puncaknya adalah dengan terjadinya perang saudara pada tahun 2008. Pada perang saudara 2008, perselisihan muncul karena ketidakpuasan dari Hizbullah atas undang-undang pemilihan umum yang dinilai semakin menumbuhsuburkan persaingan antar faksi masyarakat dengan sistem politik konfessional yang diterapkannya. Hizbullah mengusulkan agar undang-undang tersebut diganti dengan rancangan undang-undang seperti yang diusulkan Hizbullah. Isi rancangan undang-undang tersebut adalah untuk menuju sistem politik yang mengedepankan persatuan masyarakat demi kepentingan nasional Lebanon atau dalam bahasa singkatnya adalah Lebanon bersatu.

Kelima buku tersebut berasal dari sudut pandang orang-orang yang pro terhadap gerakan Hizbullah. Sementara itu, ada beberapa buku dan artikel yang ditulis oleh para penulis Barat yang memaparkan mengenai Hizbullah secara umum dari sudut pandang mereka sebagai orang yang berada di luar Hizbullah

dan Lebanon. Sebagian tulisan netral dan sebagian tulisan yang lain kontra dan berisi kritikan terhadap Hizbullah dan kebijakan-kebijakannya.

Penelitian mengenai Hizbullah yang lain menjadi tesis di Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia yang berjudul *Aktualisasi Gerakan Islam Politik dalam Politik Lebanon (Studi Kasus Kemenangan Hizbullah atas Israel pada Perang 2006)* yang ditulis oleh Pebri Edy pada tahun 2007. Fokus permasalahan yang diangkat penulisnya adalah mengenai kemenangan Hizbullah dalam perang Hizbullah-Israel tahun 2006, khususnya mengenai sebab-sebab kemenangan Hizbullah beserta strategi yang digunakannya sehingga dapat meraih kemenangan. Pembahasan tesis menggunakan teori konflik, konsep Islamisme, dan teori resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor kekuatan Hizbullah adalah kekuatan moral. Sebagai gerakan perlawanan Muslim Lebanon atas Israel, selain kekuatan fisik, Hizbullah menekankan pentingnya kekuatan moral yang berasal dari keimanan pada Allah. Di tahap awal, Hizbullah menggunakan teknik gerilya, kemudian untuk menguasai opini masyarakat, mereka memanfaatkan media dalam perjuangannya.

Beberapa faktor penunjang kemenangan Hizbullah menurut tesis ini adalah : kerahasiaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan para pejuang. Kedua, kesiapan alternatif, di belakang setiap aksi perlawanan ada organisasi yang solid, yang melakukan aktivitas di segala bidang baik sosial, politik, militer, maupun media massa. Ketiga, kepercayaan yang merupakan faktor utama bagi para pejuang dan pendukung setianya sehingga menghasilkan kekuatan dan kemampuan di tengah krisis kepercayaan yang tengah dialami umat Islam saat ini. Dan keempat kualitas pejuang yang memiliki keimanan paripurna.

Sementara tesis lain ditulis oleh Erik Abild mengenai Hizbullah yang menggunakan konsep *Human Freedom* dalam gerakan sosialnya. Menurut Abild, para aktivis sosial Hizbullah memiliki karakter bebas sebab mereka memaknai aktivitas sosial mereka bukan hanya dari uang yang mampu mereka dapatkan dari pekerjaan mereka itu, melainkan dari perasaan telah mampu memberikan manfaat dan menyenangkan hati masyarakat yang mampu dibantunya. Pemaknaan inilah yang menjadikan mereka mampu bekerja dengan efisien dan efektif serta patuh

pada sistem dan kerangka kerja yang telah ditentukan. Hal ini telah menjadikan mereka menjadi pekerja yang profesional dan ikhlas melaksanakan pekerjaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dan oleh sebab itu penulis tesis ini mampu menghadirkan gambaran bagus mengenai bagaimana pelayanan sosial dilakukan para aktivis sosial Hizbullah.

Di antara berbagai buku dan penelitian mengenai Hizbullah tersebut, maka tesis ini mengkhususkan pembahasan mengenai transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan dan sosial menjadi partai politik Lebanon. Selain berisi sejarah pendirian Hizbullah hingga menjadi partai politik, tesis ini juga berisi pemaparan mengenai berbagai aktivitas Hizbullah sebagai gerakan perlawanan dan partai politik di Lebanon serta analisa mengenai latar belakang terjadinya transformasi ini dengan menggunakan teori struktur kesempatan politik dan teori mobilisasi sumber daya dengan konsep jihad sebagai landasan utama atau prinsip yang melatarbelakangi transformasi tersebut.

Di samping itu, tesis ini juga berisi analisa mengenai dampak transformasi tersebut terhadap gerakan perlawanan dan aktivitas sosial yang sudah dilakukannya selama ini. Masalah ini juga akan dianalisa dengan menggunakan teori struktur kesempatan politik, teori mobilisasi sumber daya, dan teori mengenai partai politik dengan konsep jihad sebagai landasan utama Hizbullah melakukan ketiga fungsi dan peran ini dalam masyarakat Lebanon. Dan analisa terakhir yang akan disajikan adalah mengenai strategi Hizbullah dalam menyelaraskan peran dan fungsinya sebagai gerakan perlawanan, dan partai politik. Perpaduan dari ketiga hasil analisa ini diharapkan akan dapat memberi gambaran mengenai bagaimana bentuk partai politik sejati yang melayani kebutuhan konstituen dan rakyatnya, dan bagaimana fleksibilitas sebuah organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi sesuai kebutuhan masyarakatnya dengan tetap menjaga idealisme dan visi misi awalnya, dan bagaimana memadukan antara idealisme dengan realita masyarakat yang membutuhkan perwujudan aksi-aksi nyata dari idealisme tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1. Batasan Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian Hizbullah di Lebanon dengan judul Studi Kasus Transformasi Hizbullah dari Gerakan Perlawanan dan Gerakan Sosial menjadi Partai Politik di Lebanon. Aktivitas perlawanan dan politik Hizbullah yang menjadi objek penelitian utama adalah tahun 1992 hingga tahun 2009. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai Hizbullah maka kondisi sosial politik Lebanon pasca kemerdekaannya tahun 1943, perang saudara pada tahun 1975, serangan Israel ke Lebanon tahun 1982, hingga disepakatinya Perjanjian Taif oleh pemerintah Lebanon pada tahun 1989 yang menandai berakhirnya perang saudara 15 tahun. Semua kejadian tersebut menjadi informasi penting untuk dapat memahami Hizbullah dalam situasi sosial politik Lebanon. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor sosial politik yang melatar belakangi kemunculan Hizbullah sebagai partai politik peserta pemilihan umum Lebanon tahun 1992, dampak positif dan negatif, serta konsekuensi dari aktivitas politik Hizbullah terhadap aktivitas perlawanannya maupun sebaliknya, dan strategi Hizbullah dalam menyelaraskan fungsi perlawanan dan fungsi politiknya.

Tabel 3.1. Batasan Penelitian

Objek Kasus	Hizbullah sebagai salah satu Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah di Lebanon
Unit Analisis	Transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik selama tahun 1992 hingga tahun 2009
Sub Unit Analisis	Latar belakang transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik dengan mengikuti pemilu parlemen pada tahun 1992, dampak aktivitas politik terhadap aktivitas perlawanannya beserta konsekuensi dari dua aktivitas tersebut, dan strategi Hizbullah menyelaraskan kedua aktivitas tersebut

3.1.2. Karakteristik Data

Karakteristik data yang dikumpulkan dan dianalisa dalam tesis ini adalah data dan informasi mengenai kasus dan peristiwa mengenai aktivitas perlawanan dan politik Hizbullah sejak tahun 1992 hingga tahun 2009. Data-data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang digunakan secara proporsional. Data primer yang digunakan terdiri dari konstitusi Lebanon tahun 1926, Kesepakatan Nasional Lebanon tahun 1943, Perjanjian Taif, Surat Terbuka Hizbullah, serta Program-program Hizbullah dalam pemilihan umum sejak tahun 1992 hingga 2009. Sementara data sekunder berisi berbagai pidato dan pernyataan para pemimpin Hizbullah, artikel, laporan hasil penelitian, maupun berita mengenai Hizbullah. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari internet dan buku.

3.2. Paradigma Penelitian

Paradigma, menurut Neuman merupakan konsep yang mengarahkan peneliti untuk menggunakan teori dan metode dalam melakukan penelitiannya. Paradigma dalam kegiatan ilmiah dimaknai sebagai keseluruhan sistem berpikir, termasuk asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian, pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dipecahkan, dan teknik penelitian yang digunakan.¹ Sementara menurut Bogdan dan Biklen, paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama; konsep; ataupun proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian yang dilakukan.² Tesis ini menggunakan paradigma kualitatif dalam penelitiannya. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Definisi lain mengenai penelitian kualitatif berasal dari Bogdan dan Taylor yang memaknainya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.³ Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya

¹ W. Lawrence Neuman, 1997, *Social Research Methods*, cet.3, Boston: Allyn and Bacon, hal. 62-63

² Lexy J Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 8

³ Dapat dilihat lebih jelas dalam Moleong hal. 3

dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Penelitian kualitatif membantu kita untuk memahami manusia dengan konteks sosial dan budaya di mana ia berada.

Dalam tulisan Weber yang dikutip oleh Neuman menyebutkan bahwa ilmuwan sosial harus mulai memperhatikan aksi sosial, sebab aksi-aksi yang dilakukan oleh manusia secara subjektif berhubungan dengan perilaku manusia yang lain. Aksi sosial bukan hanya merupakan jenis aksi yang penting dalam penjelasan sebab akibat dalam sosiologi, namun ia merupakan objek utama dari sosiologi interpretatif. Studi interpretatif kemudian lebih dikenal sebagai paradigma kualitatif.⁴

Neuman mendefinisikan studi interpretatif, atau paradigma kualitatif, secara umum sebagai analisis sistematis atas aksi-aksi sosial dengan melakukan observasi detail atas individu dalam lingkungan alaminya untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana manusia membuat dan mempertahankan lingkungan sosialnya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman mengenai kehidupan sosial dan menemukan bagaimana individu-individu membangun kehidupan mereka. Objek penelitian kualitatif adalah aksi-aksi sosial yang dilakukan individu ataupun kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kehidupan sosialnya.⁵

Oleh karena itu paradigma ini memandang realita sosial sebagai sesuatu yang berubah-ubah, individu-individu di dalamnya mempertahankan kehidupan sosial mereka dengan cara saling berinteraksi satu sama lain dalam proses komunikasi dan negosiasi yang berlangsung terus menerus. Realita kehidupan sosial berasal dari interaksi sosial dan sistem makna yang dibangun secara sosial. Realita sosial berasal dari bagaimana individu-individu yang berinteraksi di dalamnya memandang dan memaknai peristiwa sosial yang terjadi. Individu dan masyarakat memiliki alasan tersendiri mengenai tindakan yang mereka ambil dalam berhubungan dan berinteraksi dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Tugas peneliti adalah untuk mencari dan memahami alasan tersebut.⁶

Paradigma kualitatif bersifat ideografis dan induktif. Ideografis berarti bahwa paradigma ini memberikan perwakilan simbolik atau deskripsi yang mendalam

⁴ *Op. cit.*, hal. 68

⁵ *Loc. cit.*

⁶ *Ibid.*, hal. 69-70

mengenai suatu masalah. Hal ini berarti laporan penelitian kualitatif berisi deskripsi yang detail dan hanya sedikit abstraksi. Teori yang dipakai dalam penelitian kualitatif adalah teori yang memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman yang dalam dan detail mengenai cara objek penelitiannya berpikir, merasakan dan memandang sesuatu hal.⁷

Peneliti kualitatif memandang fakta sebagai sesuatu yang senantiasa berubah-ubah dan berkaitan erat dengan sistem makna dimana ia berada dan lingkungan sosial dimana ia terjadi. Maka fakta, dalam penelitian kualitatif, bukanlah sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan netral. Fakta yang dikumpulkan merupakan aksi-aksi sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu yang menjadi pelaku dan masyarakat dimana aksi sosial tersebut terjadi. Oleh karena itu peneliti tidak berusaha untuk tidak memihak, atau dengan kata lain peneliti tidak bebas nilai dalam melakukan penelitian dan menyajikan laporan hasil penelitiannya. Hal ini disebabkan peneliti berusaha memahami dan mengungkapkan sudut pandang objek penelitiannya mengenai realita sosial yang dihadapi objek penelitiannya itu.⁸

Penelitian kualitatif dapat bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan. Teori-teori dikernukakan sesuai dengan masalah penelitian, kemudian selama proses pengumpulan dan analisis data dilakukan verifikasi terhadap teori yang ada, mana yang sesuai dan mana yang perlu diperbaiki atau bahkan ditolak.

3.3. Metode Penelitian

Di samping menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode studi kasus tunggal untuk membahas dengan lebih mendalam mengenai Hizbullah. Menurut Abdul Aziz bahwa apabila melakukan penelitian yang terinci mengenai individu atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu, maka kita menggunakan metode studi kasus.⁹ Metode ini memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek yang ditelitinya. Oleh karena itu, penelitian studi kasus dikenal sebagai studi yang

⁷ *Ibid.*, hal. 71-72

⁸ *Ibid.*, hal. 72-73

⁹ Abdul Aziz, *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* dalam Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

bersifat komprehensif, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.

Metode studi kasus digunakan, menurut Neuman, agar peneliti dapat memahami secara spesifik dan mendalam serta mendetail mengenai kasus yang ditelitinya. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data yang banyak mengenai kasus yang diteliti kemudian membenamkan diri ke dalam data-data tersebut hingga terlibat secara emosional dengan objek penelitiannya. Hal ini penting dilakukan agar peneliti dapat melihat pola-pola kehidupan, perilaku, maupun pernyataan dari objek yang ditelitinya.¹⁰

Menurut Black dan Champion, metode studi kasus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:¹¹

1. Studi kasus bersifat luwes dalam metode pengumpulan datanya. Berbagai pilihan metode pengumpulan data, baik wawancara, observasi, kuesioner, maupun kepustakaan dapat digunakan dalam analisis pendalaman dalam berbagai situasi sosial yang spesifik
2. Keluwesan studi kasus membuatnya dapat menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari objek yang diteliti
3. Studi kasus dapat dilaksanakan secara praktis dalam banyak lingkungan sosial, yakni yang sesuai dengan keterjangkauan berbagai unsur penelitian yang diperlukan, biaya penelitian, dan keterbatasan waktu dan tenaga
4. Studi kasus menawarkan kesempatan untuk menguji teori
5. Studi kasus bisa sangat murah, tergantung pada jangkauan penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan

Namun di samping berbagai kelebihan yang dimilikinya, studi kasus juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Studi kasus memiliki kemampuan generalisasi yang terbatas, sebab kasus yang diambil belum tentu representatif untuk menjelaskan kelompok masalah yang lebih besar

¹⁰ *Op. cit.*, hal. 29

¹¹ James A. Black and Dean J. Champion, 1992, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hal. 79-80

2. Studi kasus pada umumnya memakan lebih banyak waktu dibandingkan metode survai

Kelengkapan suatu studi kasus dilihat dari beberapa aspek¹², yaitu:

1. Kasus yang diteliti memiliki batas-batas yang jelas.

Dalam tesis ini batas-batas kasus didapatkan dari batasan masalah yang dibuat. Batasan pertama mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hizbullah untuk menjadi partai politik dilihat dari aspek struktur kesempatan politik, sosial, dan budaya masyarakat yang melandasi pendirian Hizbullah sebagai partai politik. Di samping itu, faktor-faktor kemunculan Hizbullah sebagai partai politik juga akan dilihat dari ketersediaan sumber daya fisik, berupa basis geografis maupun basis massa yang jelas, dan sumber daya non fisik seperti struktur organisasi maupun berbagai sistem yang berlangsung di dalam organisasi. Hal ini berarti analisa data akan difokuskan pada kurun waktu sebelum 1992 di mana cikal bakal Hizbullah mulai muncul dengan dideklarasikan Surat Terbuka yang menandai kemunculan Hizbullah dalam publik Lebanon, kemudian perjanjian Taif tahun 1989 yang membuat fondasi baru bagi perundang-undangan yang berlaku di Lebanon, dan tahun 1992 yang menjadi pemilihan umum pertama Lebanon pasca perang saudara 1975-1990.

Batasan kedua adalah mengenai dampak dari keputusan untuk menjadi partai politik terhadap aktivitas dan program-programnya sebagai gerakan perlawanan dan sosial. Masalah ini akan dilihat dengan menyandingkan peran dan kebutuhan yang dilakukan Hizbullah sebagai gerakan perlawanan dan partai politik di Lebanon. Hal ini berarti analisa data akan dilakukan dengan memperbandingkan antara kebijakan, program, dan aktivitas Hizbullah ketika masih menjadi gerakan perlawanan dan gerakan sosial saja yakni sebelum tahun 1992 dan setelah 1992 ketika Hizbullah telah menjadi partai politik.

Batasan ketiga adalah mengenai strategi Hizbullah untuk menyelaraskan aktivitas, fungsi dan kebutuhannya sebagai gerakan perlawanan, gerakan sosial, dan partai politik. Hal ini berarti penelitian akan difokuskan pada program, kebijakan, dan aktivitas Hizbullah sebagai gerakan perlawanan, gerakan sosial, dan partai politik

¹² Robert K. Yin, 1994, *Case Study Research: Design and Method*, California: SAGE Publication, hal. 80

selama kurun waktu 1992, yakni awal masuknya Hizbullah sebagai partai politik di Lebanon, hingga tahun 2009.

2. Tersedianya bukti-bukti relevan dan meyakinkan

Dalam aspek bukti yang relevan, maka penulis mengambil data-data dari arsip berupa buku yang dibuat oleh wakil Sekjen Hizbullah, Naim Qassem. Buku lain yang digunakan sebagai sumber data tesis ini berasal dari penelitian dan disertasi yang dibuat Joseph Elie Alagha pada tahun 2006 mengenai perkembangan Hizbullah, serta berbagai hasil penelitian dan artikel yang disebarluaskan melalui internet. Dan sumber lain berasal dari buku yang dibuat oleh tiga orang wartawan Indonesia setelah meliput situasi perang Hizbullah-Israel tahun 2006.

3. Mensiasati berbagai keterbatasan yang mungkin timbul dan menghambat ketuntasan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian

Keterbatasan utama penelitian ini adalah dalam pencarian data-data mengenai program, kebijakan, dan aktivitas Hizbullah pasca perang Hizbullah-Israel tahun 2006. Hal ini disebabkan penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan langsung ke Lebanon untuk berinteraksi langsung dan melengkapi data dengan observasi dan wawancara mendalam dengan para pemimpin dan anggota Hizbullah. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada data-data kontemporer yang diperoleh melalui berbagai artikel, buku, laporan hasil penelitian, dan pemberitaan dari perpustakaan dan internet. Untuk menguji keabsahan data maka data yang didapatkan akan dicari dari berbagai artikel dan tulisan yang relevan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisa.

3.4. Sumber Data

Menurut Neuman, data kualitatif merupakan data empiris. Data empiris mencakup kejadian-kejadian nyata, rekaman-rekaman dari apa yang dikatakan oleh individu-individu, baik yang berupa kata-kata, nada suara, maupun sikap. Perilaku yang unik dan spesifik juga termasuk data kualitatif. Data kualitatif juga didapatkan dari studi dokumen dan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian.¹³ Dalam tesis ini sumber data utama adalah sumber data tertulis. Menurut Moleong, sumber data

¹³ Neuman, *op. cit.*, hal. 328

tertulis dapat berupa buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Tesis dan disertasi masuk ke dalam kategori buku dan dapat digunakan sebagai sumber data. Sementara dokumen pribadi merupakan dokumen yang ditulis sendiri oleh seseorang. Ia dapat berupa surat, buku harian, dan berbagai catatan. Sementara dokumen resmi dikeluarkan oleh institusi pemerintah. Ia dapat berupa laporan rapat, buletin resmi, buku peraturan dan tata tertib.¹⁴

Dari sumber data dan metode pengumpulan data yang seperti itu, maka dalam penelitian kualitatif, kepercayaan atas integritas keilmuan dan moral dari peneliti menjadi sangat penting. Walaupun dalam setiap penelitian berkemungkinan untuk munculnya para peneliti yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam penelitiannya, namun, pembaca hasil penelitian kualitatif perlu memberikan kepercayaan mengenai integritas keilmuan dan moral dari peneliti. Oleh karena itu, peneliti kualitatif perlu memastikan dan meyakinkan dirinya sendiri maupun orang lain bahwa penelitiannya benar-benar merefleksikan kejadian sebenarnya dan telah benar-benar mengecek kejadian sebenarnya itu. Salah satu cara untuk melakukan pengecekan mengenai kebenaran peristiwa yang ditelitinya itu adalah dengan membandingkannya dengan penelitian mengenai objek yang sama dan dengan menggunakan sumber data yang beragam mengenai objek yang ditelitinya itu.¹⁵

Sementara itu menurut Yin, sumber data dalam penelitian studi kasus dapat diperoleh dari banyak sumber, antara lain : dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan dari perangkat-perangkat fisik. Yin menyebutkan ada tiga prinsip dalam pengumpulan data yaitu menggunakan berbagai sumber data, membuat *database* dari data-data yang telah dikumpulkan, membuat pola-pola hubungan antar data. Prinsip ketiga ini diperlukan untuk memungkinkan pengamat dari hasil penelitian studi kasus untuk mengikuti alur pengumpulan data yang dilakukan sejak perumusan pertanyaan penelitian hingga penarikan kesimpulan dilakukan. Hal ini terutama jika peneliti melakukan wawancara, dan berbagai observasi dalam

¹⁴ Moleong, *op. cit.*, hal. 113-114

¹⁵ Neuman, *op.cit.*, hal. 333

pengumpulan datanya.¹⁶ Tiga prinsip ini diperlukan untuk membuat membuat penelitian studi kasus yang berkualitas tinggi.¹⁷

Dalam penelitian ini digunakan sumber data dokumen. Dokumen terdiri dari surat, memorandum, dan pengumuman resmi; agenda, notulensi pertemuan, dan laporan tertulis lainnya; dokumen-dokumen administratif, seperti proposal, laporan berkala, dan dokumen-dokumen internal lainnya; penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal mengenai tema atau objek penelitian yang sama; dan kliping-kliping surat kabar dan artikel-artikel di media massa. Dalam penelitian studi kasus salah satu fungsi dokumen untuk memperkuat dan menambahkan berbagai data dan informasi yang telah didapatkan. Contohnya adalah data-data yang didapat dari dokumen membantu kita mendapatkan istilah dan nama-nama dengan ejaan yang benar dari kasus yang diteliti. Selain itu dokumen diperlukan untuk dapat menambahkan data-data yang lebih detail dan spesifik. Dan dokumen juga dapat membantu peneliti untuk membuat kesimpulan dari berbagai data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber data yang lain.¹⁸

Data-data yang telah didapatkan tersebut harus dilihat dengan lebih seksama dan hati-hati. Kehati-hatian ini diperlukan agar peneliti tidak salah dalam menginterpretasikan berbagai dokumen maupun arsip yang didapatkan sebab dokumen dan arsip tidak selalu akurat dan valid. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut terkadang dibuat untuk tujuan dan sasaran pembaca yang spesifik sehingga ia bisa saja dimanipulasi.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Menurut Yin, metode pengumpulan data memiliki sejumlah prinsip yaitu:¹⁹

1. Menggunakan berbagai sumber bukti. Dalam tesis ini yang digunakan adalah studi pustaka karena keterbatasan waktu dan sumber yang ada. Studi pustaka yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan berita yang dibutuhkan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

¹⁶ Yin, *op.cit.*, hal. 98

¹⁷ *Ibid.*, hal. 78-79

¹⁸ *Ibid.* hal. 81

¹⁹ Robert K. Yin, 1997, *Studi Kasus : Desain dan Metodologi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hal. 101-131

2. Data dasar yakni kumpulan informasi dan data dari hasil penelitian sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan cara mengorganisasikan dan mendokumentasikan data yang telah dikumpulkan sehingga peneliti selanjutnya dapat menelusuri dan meninjau kembali bukti tersebut secara langsung, tidak terpaku pada hasil kesimpulan yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian tesis ini.
3. Serangkaian bukti yang dapat mengaitkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, data yang terkumpul, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil. Hal ini dibutuhkan agar peneliti selanjutnya atau pembaca tesis ini dapat mengikuti asal muasal data yang ditemukan sejak pertanyaan penelitian dirumuskan hingga kesimpulan diambil, yakni dengan memahami logika penelitian dan cara penelitian ini dilakukan.

3.6. Metode Analisis Data

Setelah melakukan tahap pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi data baru kemudian dilakukan analisa data. Menurut Neuman, secara umum analisis data merupakan pencarian pola dari data-data yang ada. Setiap satu pola ditemukan maka ia akan dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan.²⁰ Sementara Menurut Yin meskipun memang belum ada teknik yang disusun secara baku, namun peneliti studi kasus dapat melakukan analisa umum yakni dengan menjawab pertanyaan pada apa yang akan dianalisa dan mengapa. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dari berbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa proses yang dilakukan dalam analisis data, yaitu mengorganisasikan data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengklasifikasikannya.²¹

Analisis data dilakukan dalam proses penelitian dan oleh karena itu ia sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data mulai dilakukan hingga proses pengumpulan data selesai dan data akan disajikan dalam bentuk naratif. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode studi kasus, maka analisa yang dilakukan adalah analisa kasus. Kasus yang akan dianalisa adalah mengenai transformasi Hizbullah dari gerakan

²⁰ Neuman, *op. cit.*, hal. 418

²¹ Moleong, *op. cit.*, hal. 103

perlawanan menjadi partai politik di Lebanon pada tahun 1992 dan aktivitas perlawanan serta aktivitas politiknya selama tahun 1992 hingga tahun 2009.

Berdasarkan strategi umum analisis data yang dikemukakan Yin tersebut, maka data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian diklasifikasikan berdasarkan tema dan tahun. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh rangkaian yang utuh berdasarkan kronologis aktivitas perlawanan dan aktivitas politik yang dilakukan Hizbullah dalam rentang waktu yang telah dilakukan yakni selama tahun 1992 hingga tahun 2009. Kronologi peristiwa ini selanjutnya dilihat dengan menggunakan teori-teori yang ada sehingga menghasilkan serangkaian hubungan sebab akibat dan keterkaitan data antar waktu dan antar peristiwa. Keterkaitan data antar waktu dan peristiwa inilah yang kemudian dituliskan dalam laporan hasil penelitian dan menjadi acuan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian.

Sementara menurut Miles dan Huberman, tahap analisis data kualitatif terdiri dari²² :

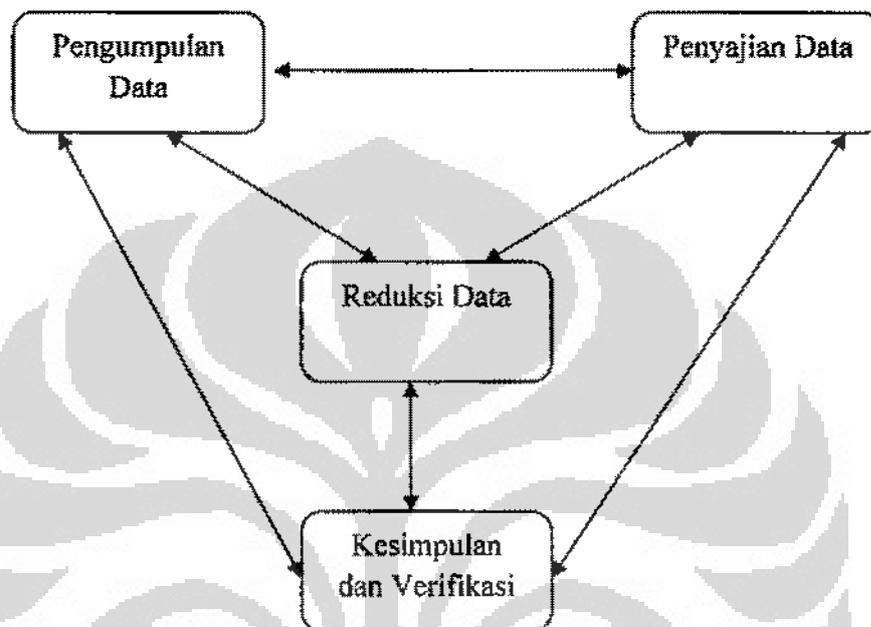
1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh selama pengumpulan data
2. Penyajian Data, yaitu memaparkan berbagai data dan informasi yang telah disusun dalam bentuk narasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari narasi yang telah dibuat
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yakni dengan melakukan pencarian makna dari data-data yang telah dikumpulkan dan disajikan, melihat pola-pola yang menghubungkan antar data kemudian menarik kesimpulan dari pola-pola yang telah ditemukan.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut maka analisis data kualitatif disebut sebagai model interaktif. Model ini menggambarkan proses analisis data yang berlangsung terus menerus selama penelitian, bahkan ketika penulisan hasil penelitian ia masih dilakukan hingga didapatkan data yang memadai untuk dapat membuat hasil penelitian yang memadai. Analisis data dianggap benar-benar selesai setelah seluruh

²² Matthew B. Miles and Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, hsl. 20

pertanyaan penelitian telah dijawab dengan data yang cukup. Skema model interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 3.1 Analisis Data Model Interaktif²³



3.7. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah:

1. Tahap penentuan Topik, Perumusan Pertanyaan Penelitian dan Pencarian Teori yang Relevan

Tahapan ini merupakan tahapan pendahuluan sebelum melakukan penelitian. Tahapan ini dibutuhkan agar dapat diperoleh permasalahan yang menarik untuk dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya dianalisa ketersediaan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian dicari teori-teori yang relevan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah pertanyaan penelitian dan teori yang cocok ditemukan, maka tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, berita, artikel, dan jurnal sesuai dengan topik dan pertanyaan penelitian yang diangkat.

²³ *Loc.cit.*

3. Tahap Pengorganisasian data

Dalam tahap ini setiap data yang telah diperoleh diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok data.

4. Tahap Analisis Data

Oleh karena itu, teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan kelompok-kelompok data disusun sesuai label dan kurun waktu yang dibuat. Label yang dibuat antara lain prinsip dan sistem organisasi Hizbullah, program sosial Hizbullah, kebijakan sosial politik Hizbullah, aktivitas sosial politik Hizbullah, perang Hizbullah-Israel, Hizbullah dalam parlemen, konstitusi Lebanon dan perjanjian Taif, serta kesepakatan Doha. Selanjutnya kelompok-kelompok data itu dicari hubungan yang mengaitkan antara satu kelompok data dengan kelompok data yang lain. dan terakhir hubungan-hubungan tersebut dianalisa dan dipaparkan dalam hasil penelitian.

Bagan 3.2. Flowchart Tahap Penyelesaian Masalah



Tabel 3.2. Hubungan Masalah Penelitian dengan Logika Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Deskripsi Masalah	Data yang Diperlukan	Sumber Data	Pengumpulan Data	Analisis Data
1. Latar Belakang Transformasi Hizbullah dari Gerakan Perlawanan Menjadi Partai Politik pada Tahun 1992	Mengidentifikasi kesempatan politik di balik transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik tahun 1992 dan mobilisasai sumber daya yang dilakukan Hizbullah dalam transformasinya tersebut	Sejarah Lebanon, Sejarah Pergerakan Muslim Syi'ah Lebanon, Kondisi Sosial Politik Lebanon sejak merdeka hingga tahun 1992	Sumber Data Tertulis baik dari Buku maupun Publikasi Internet	Studi Kepustakaan	Analisa Kasus
2. Apa dampak dari aktivitas politik Hizbulah terhadap aktivitas perlawanannya	Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif, serta konsekuensi yang harus diperhatikan Hizbullah setelah menjadi partai politik namun tetap melakukan aktivitas perlawanannya	Aktivitas perlawanan dan aktivitas politik Hizbullah selama tahun 1992 hingga tahun 2009. Khusus untuk aktivitas perlawanan maka ditelusuri sejak awal terbentuknya	Sumber Data Tertulis baik dari Buku maupun Publikasi Internet	Studi Kepustakaan	Analisa Kasus

<p>3. Bagaimana strategi Hizbullah</p> <p>Menyelaraskan Aktivitas Politik dengan Aktivitas Perlawanannya</p>	<p>Mengidentifikasi berbagai strategi yang dilakukan Hizbullah untuk dapat menyelaraskan aktivitas politik dengan aktivitas perlawanannya</p>	<p>Manajemen dan struktur organisasi Hizbullah, kepemilikan Hizbullah atas sejumlah media, pendanaan Hizbullah, dan aktivitas pelayanan sosial Hizbullah</p>	<p>Sumber Data Tertulis baik dari Buku maupun Publikasi Internet</p>	<p>Studi Kepustakaan</p>	<p>Analisa Kasus</p>
--	---	--	--	--------------------------	----------------------

BAB IV

LATAR BELAKANG BERDIRI DAN AKTIVITAS GERAKAN

PERLAWANAN HIZBULLAH SEJAK TAHUN 1982-2009

4.1. Sejarah Berdirinya Hizbullah dan Kondisi Sosial Politik Lebanon yang Melatarbelakanginya

4.1.1. Kebangkitan Muslim Syi'ah Lebanon

Kelompok muslim Lebanon terbagi ke dalam Sunni, Syiah, Druze, dan Ismailis. Kelompok Syi'ah diprediksi sebagai kelompok masyarakat dengan jumlah mayoritas, meskipun belum ada survei penduduk resmi yang dilakukan pemerintah. Survei terakhir yang dilakukan pemerintah adalah pada tahun 1932. Hasil survei ini menyatakan bahwa masyarakat Kristen merupakan mayoritas yakni sebesar 60% dari total penduduk Lebanon. Hasil survei ini juga yang menjadi justifikasi pembagian kekuasaan yang dirumuskan dalam Pakta Nasional tahun 1943. Pembagian kekuasaan ini memberikan legitimasi atas dominasi kekuasaan politik kelompok Kristen di Lebanon dengan menduduki jabatan presiden yang memiliki kekuasaan yang besar. Sementara kelompok Muslim hanya diberi jabatan Perdana Menteri, yang diberikan kepada kelompok Sunni, dengan kewenangan terbatas sebab ia diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden dan jabatan ketua parlemen diberikan pada kelompok Muslim Syi'ah. Kekuasaan presiden yang besar ini menyebabkan parlemen tidak memiliki kekuasaan signifikan untuk dapat mengatur pemerintahan.¹

Pertumbuhan kekuatan kelompok muslim Syi'ah di Lebanon tidak dapat dilepaskan dari kondisi rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang mengakibatkan buruknya kondisi kehidupan mereka sejak Lebanon masih berada dalam kekuasaan Ottoman hingga ia diatur oleh Perancis. Kondisi ini terus berlanjut bahkan hingga Lebanon merdeka dan menjadi negara yang berdaulat pada tahun 1943. Dalam perkembangan selanjutnya, faksi dengan jumlah mayoritas diantara masyarakat Lebanon ini hanya mendapat jabatan sebagai ketua parlemen. Pada awal munculnya parlemen di Lebanon, wakil-wakil kelompok

¹ Charles Winslow, 1996, *Lebanon : War and Politics in a Fragmented Society*, Newyork: Routledge, hal. 298

Syi'ah yang duduk di parlemen adalah para *zu'ama* atau tuan tanah yang hanya memiliki sedikit perhatian pada perbaikan kondisi sosial ekonomi konstituennya.² Meskipun demikian, para wakil masyarakat Syi'ah dalam parlemen Lebanon pada tahun 1920, yang pada saat itu masih berada dalam kekuasaan Perancis, mampu mengeluarkan undang-undang yang mengakui dan menjamin keberadaan kelompok Muslim Syi'ah sebagai salah satu faksi independen di Lebanon, terpisah dari kelompok Muslim Sunni.³

Kemudian pada tahun 1926 Majelis Tinggi Perancis semakin memperkuat status Syi'ah di Lebanon dengan memberikan pengakuan kepada masyarakat Syi'ah sebagai faksi yang independen dan bebas untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing serta membuat pengadilan agamanya sendiri. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan dengan didirikannya Pengadilan Kasasi Ja'fari pada tahun 1928.⁴

Pada akhir tahun 1936 perjanjian antara Perancis dan Lebanon berusaha meyakinkan para tuan tanah Syi'ah bahwa integritas teritorial Lebanon sebagai negara berdaulat telah diputuskan. Dan oleh karena itu, maka mereka harus berjuang lebih keras untuk mendorong distribusi kekuasaan yang lebih adil. Hingga akhir tahun 1930-an, para tuan tanah Syi'ah mendukung kekuasaan Perancis dan kemerdekaan Lebanon serta menentang Nasionalisme Arab dan keinginan kelompok Muslim Sunni untuk bergabung dengan negara Suriah Raya.⁵

Namun, pada perkembangan selanjutnya, politik Lebanon yang selama berada di bawah kekuasaan Perancis dikuasai oleh kelompok Maronit berada di bawah dominasi kelompok Kristen Maronit dan kelompok Muslim Sunni.⁶ Sementara Syi'ah diberi kedudukan sebagai ketua Parlemen dengan kewenangan terbatas. Para tuan tanah mengikuti sistem yang kemudian berjalan ini sehingga mereka menjadi elit politik Lebanon. Namun, keberadaan mereka dalam pemerintahan tidak menghasilkan perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi

² Gary C. Gambill, 2007, *Islamist Groups in Lebanon*. The Middle East Review of International Affairs, <http://www.mafhoum.com/press10/312P1.htm>

³ Wu Bingbing, Shi'ite Collective Identity and the Construction of the Nation-State of Lebanon, <http://www.usna.edu/MiddleEast/AME/Papers/Bingbing%20Wu%20Paper.pdf>, hal.5

⁴ *Loc. cit.*

⁵ *Ibid.*, hal. 6

⁶ Meskipun kelompok Kristen mendapat porsi kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Sunni, yakni dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden yang merupakan jajah kekuasaan kelompok Kristen

masyarakat Syi'ah yang mereka wakili. Masyarakat Syi'ah tetap termarginalkan secara politik, ekonomi, dan pendidikan.

Pada tahun 1948 Israel mendeklarasikan berdirinya negara Israel di atas tanah rakyat Palestina. Peristiwa ini membuat banyak penduduk Palestina yang terusir dari rumah-rumah mereka di wilayah yang dikuasai Israel mengungsi ke negara-negara tetangganya, termasuk ke Lebanon yang berada di bagian utara Israel.⁷ Para pejuang Palestina melancarkan berbagai serangan ke Israel, salah satunya, melalui Lebanon. Maka peperangan antara pejuang Palestina dan Tentara Israel terjadi di wilayah Lebanon, terutama di wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel ke berbagai wilayah Lebanon Selatan yang dijadikan pejuang Palestina sebagai basis perjuangan mereka membuat masyarakat Lebanon Selatan menderita, mayoritas mereka adalah kaum Syi'ah. Kondisi peperangan inilah yang juga menjadi salah satu faktor pendorong munculnya militansi dari kelompok Syi'ah yang harus mempertahankan diri dan tanah serta harta benda mereka dari konflik ini.

Oleh karena perang Israel-Palestina inilah maka masyarakat Syi'ah merasakan kebutuhan untuk memiliki identitas gerakan mereka sendiri. Bersamaan dengan itu sejak awal tahun 1960-an, para ulama muda Syi'ah lulusan sekolah agama di Najaf, Iraq, dan Qum, Iran berdatangan ke Lebanon untuk menyebarkan dakwah. Keberadaan mereka memberi harapan baru bagi masyarakat. Beberapa diantara para ulama memiliki perhatian lebih dalam pergerakan sosial dan politik. Salah satunya adalah Imam Musa Al-Shadr. Imam al-Shadr mendirikan *Harakat al-Mahrumin* (Gerakan Kaum Tertindas) pada pertengahan tahun 1960-an yang memfokuskan perhatiannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Syi'ah dalam sistem politik Lebanon. Dia menggunakan cara-cara damai untuk mendorong terjadinya perbaikan kondisi politik, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Syi'ah. Oleh karena itulah pada akhirnya gerakan ini berakar kuat dalam masyarakat Syi'ah Lebanon.⁸

Pada tahun 1960-an juga, kondisi rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan akhirnya mendorong masyarakat Syi'ah untuk bermigrasi dari desa ke

⁷ Saat ini wilayah Palestina bagian utara dikuasai Israel sehingga diklaim sebagai bagian dari wilayah Israel dan diakui PBB sebagai wilayah Israel

⁸ *Loc. cit.*

kota, khususnya ke Beirut. Gelombang migrasi ini berubah menjadi gelombang pengungsian saat perang Arab-Israel yang terjadi pada tahun 1967. Pada masa ini pasukan Israel masuk ke Lebanon untuk menghalangi masuknya pejuang Palestina dan pasukan Arab ke wilayah utara Israel melalui Lebanon. Israel melakukan berbagai serangannya di wilayah Lebanon Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Syi'ah. Akibatnya mereka semakin memadati wilayah bagian selatan Beirut. Masyarakat Syi'ah yang bermigrasi ini akhirnya terlepas dari kekuasaan para *zu'ama* sebab mereka tidak lagi berada di wilayah kekuasaan para *zu'ama* Syi'ah dan merasakan perlindungan mereka.⁹ Kondisi ini pula yang membuat kecenderungan politik masyarakat Syi'ah berubah, dari yang awalnya pasif dalam politik menjadi aktif dalam aktivitas-aktivitas politik, sebab mereka berkesempatan untuk melihat dan bersinggungan langsung dengan kondisi ketimpangan sosial ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin di wilayah perkotaan, khususnya di ibukota.

Pada masa ini kondisi regional juga sedang didominasi oleh ideologi dan pergerakan Nasionalisme Arab yang pro soviet hingga menghasilkan sosialisme Arab. Ideologi ini menuntut keadilan sosial dan ekonomi serta perubahan radikal terhadap kondisi politik yang dianggap tidak adil bagi seluruh masyarakat. Ideologi inilah yang menarik perhatian masyarakat Syi'ah Lebanon yang selama ini memang termarginalisasi dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi Lebanon. Oleh karena itu, pada masa itu berbagai partai berideologi sosialis, seperti Partai Sosialis Progresif di bawah kepemimpinan Kamal Jumlat, berhasil menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Syi'ah. Partai ini juga yang menjadi sekutu utama pendukung perjuangan Palestina di Lebanon dan mereka juga yang menuntut reformasi politik di Lebanon. Perkembangan regional ini juga turut merombak dominasi *zu'ama* dalam struktur sosial politik masyarakat Syi'ah yang selama ini berjalan.¹⁰

Kekalahan pasukan gabungan negara-negara Arab dalam perang Arab-Israel tahun 1967 dan kematian Jamal Abdunnasir, pemimpin Gerakan Nasionalisme Arab pada tahun 1970, membuat masyarakat Syi'ah perlu

⁹ <http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/warn2/shiism.html>

¹⁰ Bingbing, *op. cit.*, hal. 6-7

merumuskan kembali identitas baru gerakan mereka. Beberapa bagian masyarakat masih tertarik dengan ideologi sosialisme dan nasionalisme yang masih dibawa oleh Partai Sosialis Progresif dan Gerakan Nasional Lebanon yang menjadi aliansinya. Di tengah situasi semacam inilah aktivitas sosial politik Al-Shadr terus berlanjut hingga pada tahun 1969 Majelis Tinggi Syi'ah yang mengurus semua kebutuhan masyarakat Syi'ah Lebanon berhasil didirikan. Melalui berbagai aktivitas sosial politiknya inilah kekuasaan *zu'ama* semakin merosot meskipun tantangan selanjutnya datang dari gerakan ideologi nasionalis dan sosialis yang berusaha menarik perhatian para pemuda Syi'ah. Untuk menjawab tantangan ini, Al-Shadr mendirikan gerakan AMAL yang memiliki sayap militer sendiri untuk membela dan melindungi masyarakat Syi'ah di tengah berbagai konflik bersenjata yang terjadi.¹¹

Pada perang sipil tahun 1975, kelompok Syi'ah yang militan mulai muncul. Kelompok ini dimotori dan dipimpin oleh para ulama Syi'ah. Salah satu diantara ulama Syi'ah yang berpengaruh adalah Syaikh Husain Fadlullah. Fadlullah menyeru masyarakat Syi'ah yang selama ini miskin dan dirampas hak-haknya untuk bangkit dan mengangkat senjata bukan demi membela kelompok tertentu, namun demi membela Islam dan perjuangan umat Islam. Kuliah-kuliah Fadlullah telah membangkitkan militansi dan keberanian para pemuda yang menjadi anggota AMAL. Fadlullah yang aktif dalam aktivitas pendidikan juga mendirikan berbagai institusi pendidikan untuk menyebarkan dakwah dan memberikan pendidikan keislaman kepada masyarakat Lebanon. Hasilnya adalah pemahamannya mengenai Islam dan perjuangan Islam menyebar di kalangan pemuda. Inilah salah satu sebab dia disebut-sebut sebagai salah satu tokoh ideologis yang menginspirasi kemunculan dan prinsip-prinsip gerakan Hizbullah di Lebanon.¹²

Pada tahun 1978 masyarakat Syi'ah kembali menderita akibat penyerangan Israel ke Lebanon Selatan untuk menghancurkan perlawanan pejuang Palestina dari wilayah ini. Penderitaan ini menyebabkan simpati dan dukungan pada partai berideologi sosialis nasionalis mulai berkurang drastis. Hal

¹¹ *Ibid.*, hal. 8-9

¹² Ahmad Nizar Hamzeh, 2004, *In The Path of Hizbullah*, New York: Syracuse University Press, hal. 23

ini disebabkan karena kedua partai tersebut tidak membela dan membantu meringankan penderitaan dan kesulitan yang dialami masyarakat Syi'ah akibat perang Israel-Palestina di wilayah tempat tinggal mereka.¹³ Gerakan perlawanan para ulama Syi'ah Lebanon ini kemudian menjadi semakin menguat pengaruhnya di tengah masyarakat ketika Revolusi Islam Iran terjadi pada tahun 1979. Kemampuan Khomeini memimpin revolusi dan pada akhirnya mendirikan negara Islam Iran dengan sistem kepeimpinan berbasis ulama (*wilayatul faqih*) merupakan salah satu motivasi besar bagi kelompok Syi'ah untuk bangkit dan melakukan perubahan di Lebanon.

Satu tahun sebelum Revolusi Islam Iran, pada tahun 1978, Imam Al-Shadr hilang dalam perjalanannya menghadiri undangan Muammar Qadhafi dalam perayaan kemerdekaan Libya. Setelah ketiadaannya, kepemimpinan AMAL kemudian dipegang oleh Husain Al-Husaini yang berusaha melanjutkan program-program Imam Al-Shadr selama kepemimpinannya. Namun kepemimpinan Al-Husaini di AMAL hanya bertahan hingga tahun 1980, pada tanggal 4 April 1980, Nabih Berri menjadi pemimpin AMAL. Berri memiliki pandangan dan sikap yang berbeda dengan Al-Shadr maupun Al-Husayni. Berri yang berasal dari keluarga tuan tanah memanfaatkan AMAL untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Pada tahun 1982 Israel melakukan penyerangan ke Lebanon untuk dapat menghancurkan kekuatan PLO di wilayah ini. Peristiwa ini telah semakin memperumit situasi perang saudara yang tengah berlangsung, sebab faksi-faksi di Lebanon yang terbagi antara yang anti Palestina mendapat dukungan dana dan persenjataan dari Israel sehingga mereka dimanfaatkan Israel untuk melawan dan mengusir PLO dari Lebanon. Perpecahan faksi-faksi di Lebanon ini juga menjadi membuat Hassan Al-Mussawi, anggota majelis komando AMAL, kemudian membentuk AMAL Islam. AMAL Islam dibentuk karena tidak setuju dengan keputusan Nabih Berri yang berkoalisi dengan Komite Penyelamat Nasional membentuk pemerintah dan berideologi sekuler nasionalis untuk melawan Palestina. AMAL Islam yang mendapat dukungan dari pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Rahullah Khomeini, mendapat bantuan persenjataan dan pelatihan untuk dapat mempertahankan tanah airnya dari pendudukan Israel. Khomeini

¹³ Bingbing, *loc. cit.*

mengirimkan Pasadaran (Pasukan Garda Revolusi Iran) ke Lebanon untuk melatih para pemuda Syi'ah sehingga memiliki kemampuan perang yang memadai untuk melawan Israel.¹⁴

Menurut Deeb, ada tiga peristiwa yang meningkatkan militansi gerakan masyarakat Syi'ah. Peristiwa pertama adalah hilangnya Imam Al-Shadr saat perjalanannya ke Libya¹⁵ untuk menghadiri perayaan kemerdekaan Libya. Peristiwa kedua adalah serangan Israel ke Lebanon pada tahun 1978 dan 1982. Hal ini disebabkan karena masyarakat Lebanon yang paling menderita akibat serangan ini adalah masyarakat Muslim Syi'ah yang berdomisili di Lebanon Selatan. Israel masuk ke wilayah Lebanon melalui Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Palestina yang telah dikuasainya. Dan peristiwa ketiga adalah Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini sekaligus menandai perpindahan kekuasaan rezim Shah Iran ke tangan para ulama melalui konsep *wilayatul faqih* yang diterapkan oleh Khomeini di Iran. Otoritas ulama ini jugalah yang dijadikan rujukan dan tempat konsultasi Hizbullah dalam manuver-manuver perlawanan, sosial, maupun politiknya.¹⁶

4.1.2. Perang Saudara Lebanon tahun 1975-1990

Pada tahun 1975 Israel mencari sekutu di Lebanon dan mempersenjatai mereka untuk memerangi pengungsi Palestina yang menempati bagian selatan Lebanon. Hal ini menjadi pemicu terjadinya konflik bersenjata antara kelompok Kristen yang telah menjadi sekutu Israel dan dipersenjatainya melawan para pejuang Palestina. Konflik bersenjata inilah yang megawali perang saudara Lebanon. Pada fase pertama perang ini, milisi Kristen berhadapan dengan PLO. Namun kemudian konflik ini meluas dan melibatkan berbagai faksi yang ada di Lebanon yang didukung oleh beragam kekuatan Arab, yang terdiri dari Mesir, Suriah, dan Arab Saudi serta pengaruh perang dingin antara Amerika Serikat dan

¹⁴ Gambill, *op. cit.*

¹⁵ Hingga saat ini nasib Imam al-Shadr belum diketahui, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan jika sudah meninggal dunia juga belum diketahui apakah karena dibunuh atau tidak serta siapa yang membunuhnya. Oleh karena itu, hilangnya Imam Al-Shadr ini dikaitkan dengan hilangnya Imam kedua belas dalam kepercayaan Syi'ah Imamiyah yang dimiliki umat Muslim Syi'ah Lebanon, termasuk Hizbullah

¹⁶ Marius Deeb, *Shi'a Movement in Lebanon : Their Formation, Ideology, Social Basis, and Links with Iran and Syria*, Third World Quarterly Journal vol. 10 no. 2, Newyork: Taylor and Francis, Ltd, hal. 685-696

Rusia. Konflik bersenjata terus berkembang dengan terbentuknya aliansi-aliansi yang seringkali berubah-ubah diantara faksi-faksi Lebanon¹⁷. Masing-masing aliansi ini berperang satu sama lain.¹⁸

Ketika kemudian Menahem Begin terpilih menjadi perdana menteri Israel pada tahun 1977, dia membuat kebijakan untuk tetap mendukung perang antara milisi Kristen-pejuang Palestina dengan mengirimkan persenjataan dan memberikan dukungan politik pada milisi Kristen sekutunya. Pada bulan September 1977, Israel mulai masuk ke bagian selatan Lebanon untuk menghancurkan perlawanan rakyat Palestina dengan tetap memanfaatkan kelompok Kristen Maronit Lebanon yang telah dipersenjatai. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 1978 akhirnya Israel memutuskan masuk lebih dalam ke wilayah Lebanon hingga sampai ke sungai Litani. Operasi Litani ini bertujuan untuk menciptakan sabuk keamanan (*security belt*)¹⁹ yang lebih kuat dan luas bagi Israel sehingga tentaranya dapat lebih leluasa menghancurkan pertahanan Palestina dengan cara membatasi ruang gerak mereka.²⁰

Gerakan Israel ini bertujuan untuk menghambat pergerakan dan serangan pejuang Palestina ke wilayah Israel bagian utara. Namun, atas desakan internasional Israel akhirnya menarik diri dari Beirut dan membuat sabuk keamanan yang berada di wilayah Lebanon Selatan. Pasukan Multinasional yang terdiri dari tentara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Italia atas nama pasukan perdamaian PBB masuk ke Lebanon untuk menjamin keamanan selama penarikan pasukan Israel dari pusat Lebanon dan pemindahan milisi Palestina ke Tunisia. Namun, meskipun Beirut tidak lagi diduduki Israel namun pendudukan diperluas di wilayah bagian selatan Lebanon hingga sampai ke wilayah Jezzine.²¹

Pada tahun 1982 Amin Jumayyil diangkat menjadi Presiden Lebanon. Krisis politik dalam negeri terus memanas hingga tahun 1988 Parlemen gagal

¹⁷ Faksi-faksi ini pada saat perang berubah menjadi milisi-milisi bersenjata di bawah kepemimpinan masing-masing *za'im* yang berkuasa

¹⁸ Lebanon Country Profile, <http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/B2D794D1-FE56-4F1C-BA12-692CBF987B62/0/LebanonCountryProfile2009.pdf>, hal. 9

¹⁹ Sabuk keamanan ini berada di dalam wilayah kedaulatan Lebanon, jauh melampaui garis batas antara dua negara yang telah disepakati pemerintah Lebanon dan Israel pada tahun 1949, bahkan mencapai 15% dari total wilayah Lebanon

²⁰ P. Edward Haley and W. Lewis Snider, 1979, *Lebanon in Crisis : Participants and Issues*, New York: Syracuse University Press, hal. 93-99

²¹ *Op. cit.*, hal. 10

memilih Presiden. Konflik berlanjut antara Michel Aoun yang diangkat menjadi Perdana Menteri secara sepihak oleh Presiden Amin Jumayyil, sementara Perdana Menteri Salim Al-Hoss tetap mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri. Kondisi ini menyebabkan Michel Aoun memberontak dan melakukan perlawanan.²²

Perang ini pecah disebabkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal antara lain : struktur sosial masyarakat Lebanon yang terpecah-pecah, kesenjangan sosial ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, pemerintahan yang lemah dan korup, kekakuan sistem politik sektarian yang sulit untuk diubah, dan kegelisahan masyarakat akibat sistem perekonomian bebas tanpa kontrol yang baik dari pemerintah. Di samping itu, situasi dalam negeri Lebanon juga dipengaruhi oleh kondisi regional Timur Tengah yang saat itu bergejolak. Banyaknya pengungsi Palestina yang berdatangan ke Lebanon sebagai akibat pendudukan Israel atas tanah Palestina, serangan Israel ke Lebanon; dan konflik Arab-Israel. Konflik ini dipicu oleh pertentangan dua kelompok besar yakni antara kelompok yang pro dan yang kontra untuk membantu Palestina. Sementara sebab eksternal yang memicu perang ini adalah intervensi Suriah dan negara-negara Arab lain yang mendukung faksi-faksi yang ada di Lebanon. Faksi Kristen Maronit didukung oleh Suriah, sementara faksi Muslim didukung oleh negara-negara Arab yang lain, seperti Mesir dan Arab Saudi.²³

Perpecahan yang terjadi sebenarnya memiliki basis lebih dalam di masyarakat yaitu antara kelompok yang menginginkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih berkeadilan dan kelompok yang menentang perubahan. Ketidakadilan dan ketimpangan pembagian kekuasaan politik yang dilegalisasi oleh Kesepakatan Nasional tahun 1943 yang memberikan porsi kekuasaan politik lebih besar pada kelompok Kristen Maronit sehingga dapat mendominasi politik dan perekonomian Lebanon merupakan sasaran utama dari kelompok-kelompok yang pro perubahan, sedangkan kelompok yang anti perubahan yaitu kelompok Kristen Maronit dan sekutu-sekutunya ingin

²² *Loc. cit.*

²³ Haley and Snider, *op. cit.*, hal 3-4

mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi yang telah mereka nikmati selama ini.²⁴

Konflik ini juga berasal dari perbedaan persepsi mengenai bagaimana Lebanon akan dibangun setelah merdeka dari pendudukan Perancis tahun 1943. Kelompok Kristen Maronit menganggap Lebanon sebagai negara independen dan harus memiliki bentuk negara, sistem politik, sosial, dan ekonominya sendiri. Pandangan ini tidak terlepas dari kekhawatiran kaum Kristen bahwa mereka akan tertindas di tengah mayoritas umat Islam di Arab. Sementara kelompok Muslim menganggap Lebanon sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Arab yang harus memiliki kebudayaan Arab, bahkan kelompok Druze menganggap Lebanon merupakan bagian tak terpisahkan dari Suriah Raya. Kondisi ini mengakibatkan sulit tercapainya kesepakatan bersama mengenai identitas nasional, termasuk dalam berbagai isu penting seperti sistem politik dan ekonomi, hubungan dengan negara-negara lain, serta sikap terhadap Palestina.²⁵

Akibatnya, loyalitas penduduk terhadap kelompoknya lebih kuat dibandingkan loyalitas pada negaranya. Masing-masing kelompok mempertahankan pandangan, kepentingan, keuntungan, dan sikap kelompoknya tanpa mau berkompromi dan menghasilkan solusi yang terbaik untuk kemajuan Lebanon secara nasional.

4.1.3. Pendirian Hizbullah

Pada tahun 1982, beberapa ulama Syi'ah Lebanon berkunjung ke Iran untuk bertemu dengan Imam Khomeini dalam Konferensi Pergerakan Islam di Teheran, sebuah konferensi pertama bagi orang-orang tertindas. Syaikh Muhammad Husain Fadlullah, Syaikh Subhi Al-Tufayli, Syaikh Muhammad Yazbak, dan beberapa ulama syi'ah Lebanon lainnya menghadiri konferensi ini. Dalam pernyataannya, Khomeini meminta para ulama yang hadir untuk kembali ke negerinya masing-masing dan memobilisasi masyarakatnya untuk melakukan perlawanan terhadap Israel dan menjadikan masjid-masjid sebagai basis aktivitas mereka.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hal. 5-6

²⁵ *Ibid.*, hal. 6-7

²⁶ Hamzeh, *op. cit.*, hal. 24

Syaikh Al-Tufayli menggambarkan situasi saat Hizbullah baru berdiri bagaikan arena perkelahian yang penuh dengan debu dan kekacauan. Situasi saat itu penuh dengan kepentingan agama, politik, dan oportunisme yang bercampur baur. Banyak ulama Syi'ah yang ikut terlibat dalam aktivitas politik. Hal ini sejalan dengan seruan Khomeini di atas, yakni untuk menyebarkan semangat Revolusi Islam Iran ke dunia. Banyak ulama muda Syi'ah menjadi pemimpin dari berbagai gerakan perlawanan Islam atas Israel, namun mereka masih bergerak secara spontan dan belum terorganisir dengan baik. Para ulama muda tersebut antara lain Syaikh Subhi Al-Tufayli, Sayyid Abbas Al-Musawi, Sayyid Hasan Nasrullah, Syaikh Na'im Qasim, Syaikh Muhammad Yazbak, Syaikh Ibrahim Amin Al-Sayyid, Imad Mughniyyah, Abu Hassan Khudr Al-Salamah, dan Abdul Hadi Hamadih. Setelah Pasdaran dikirim Imam Khomeini untuk melatih para ulama muda tersebut, maka mereka kemudian menjadi para pemimpin organisasi baru yang akhirnya dibentuk untuk menyatukan gerakan-gerakan mereka sebelumnya. Sejumlah nama diusulkan saat itu, mulai dari AMAL Islam, Gerakan Islam, Jihad Islam, dan Komite Revolusi.

Persoalan pilihan nama belum dapat diselesaikan hingga dibentuklah komite sembilan yang diketuai Syaikh Subhi Al-Tufayli dan Sayyid Al-Musawi untuk meminta pendapat Khomeini mengenai nama yang paling tepat untuk mereka. Khomeini meminta mereka untuk mengambil nama yang memiliki makna persatuan umat Islam seluruhnya, maka dipilihlah Hizbullah sebagai nama organisasi baru yang menyatukan berbagai gerakan perlawanan Syi'ah Lebanon yang selama ini ada.²⁷ Keberadaan Hizbullah merupakan fase kedua dari pembentukan identitas gerakan masyarakat Syi'ah Lebanon, setelah sebelumnya bercorak nasionalis sosialis pada masa awal perang sipil Lebanon terjadi. Nama Hizbullah dipilih agar dapat merangkul umat Islam secara keseluruhan dalam berbagai aktivitas perlawanan yang dilakukannya atas nama Islam dan untuk membela umat Islam.²⁸

Organisasi Hizbullah akhirnya dideklarasikan pada tahun 1985 melalui Surat Terbuka yang dibacakan oleh juru bicara Hizbullah Al-Sayid Ibrahim Amin. Dengan dikeluarkannya surat terbuka ini Hizbullah memasuki fase baru dari

²⁷ *Ibid.*, hal. 24-25

²⁸ Bingbing, *op. cit.*, hal. 9

gerakan perlawanan yang rahasia dan bebas dari interaksi dan intervensi politik menjadi kerja-kerja publik yang bersifat politis. Deklarasi ini merupakan manifestasi dari visi dan kebijakan organisasi ini, sebab tidak ada gerakan jihad yang terpisah sempurna dari interaksi politik, sekaligus merupakan tanggapan atas kebutuhan eksistensi politik resmi dan pengungkapan atas posisi Hizbullah di tengah faksi-faksi lain di Lebanon. Setelah deklarasi, Hizbullah kembali melanjutkan kerja-kerja perlawanan sesuai dengan kondisi yang dihadapinya pada waktu itu.²⁹

Isi surat terbuka tersebut antara lain mengenai posisi Hizbullah di tengah umat Islam dunia dan di Lebanon secara khusus. Hizbullah menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari umat Muslim seluruh dunia yang beriman pada Allah Yang Maha Esa dan Rasulullah Muhammad SAW serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan mengikuti Sunnah serta hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Visi jihad pun dinyatakan secara jelas yaitu bahwa setiap anggota Hizbullah adalah perjuang, dan oleh karena itu sayap militer tidak dapat dipisahkan dari seluruh struktur sosial mereka.³⁰

Dalam deklarasi ini Hizbullah menyatakan bahwa mereka tidak akan menolerir setiap bentuk ketidakadilan, penjajahan, dan penghinaan. Mereka hanya takut pada Allah dan bukan pada yang lain. Israel dengan dukungan Amerika, merupakan musuh utamanya, dan oleh karena itu maka Hizbullah bertekad untuk mempertahankan tanah air mereka, agama mereka, dan harga diri mereka sebagai umat dan bangsa yang berdaulat. Tidak ada cara lain untuk melawan pendudukan selain dengan pengorbanan. Dalam visi jihad ini mereka menyatakan bahwa mereka adalah musuh utama bagi kelompok Phalangis, Amerika Serikat, Israel, atau siapapun yang menyerang mereka sampai terwujud tiga hal, yaitu: kolonialisasi berakhir dan Lebanon merdeka, kelompok Phalangis dihukum dengan adil atas kejahatan mereka kepada umat Islam dan Kristen,³¹ dan para generasi penerus bangsa bebas memilih bentuk negaranya sendiri yang sesuai

²⁹ Na'im Qassem, 2008, *Blueprint Hizbullah*, Jakarta: Ufuk Press, hal. 141-142

³⁰ http://www.standwithus.com/pdfs/flyers/hezbollah_program.pdf, hal. 1

³¹ Pada perang saudara tahun 1975 yang diawali dengan perang antara milisi Kristen yang merupakan kelompok Phalangis yang menjadi sekutu Israel dan pejuang Palestina, yang menjadi korban tidak hanya masyarakat muslim namun juga masyarakat Kristen, sebab kelompok masyarakat Kristen beragama dan hanya kelompok Phalangis dengan Tentara Lebanon Selatan (*South Lebanon Army*) yang menjadi sekutu Israel

dengan keinginan mereka. Hizbullah menawarkan Islam sebagai basis negara sebab hanya Islamlah yang mampu menghentikan imperialisme dan kolonialisme di negeri mereka. Inilah tujuan Lebanon dan merekalah musuh Lebanon.³²

Sementara teman bagi Hizbullah adalah setiap kaum yang tertindas dan setiap negara yang memerangi musuh-musuh yang sama dengannya atau yang membela Hizbullah atas mereka. Hizbullah menyatakan diri sebagai umat Islam, namun ia tidak ingin memaksakan rakyat Lebanon untuk menerima Islam dengan kekerasan seperti yang telah dilakukan oleh kelompok Kristen Maronit. Maka tujuan minimalnya adalah untuk membebaskan Lebanon dari ketergantungan pada dunia Barat dan Timur serta dari penjajahan bangsa asing, dan mendirikan pemerintahan yang diinginkan seluruh rakyat Lebanon. Oleh karena, dalam pandangannya, rezim yang selama ini berkuasa didirikan di atas kesombongan dan ketidakadilan, maka bukan hanya reformasi yang harus dilakukan melainkan perubahan secara menyeluruh dan radikal atas sistem politik yang tidak adil tersebut. Sistem konfessionalisme yang telah memecah-mecah rakyat Lebanon merupakan penyebab dari konflik sipil yang terjadi saat itu, sementara rezim saat ini mengambil keuntungan dari perpecahan tersebut. Akibatnya perdamaian dan kesejahteraan rakyat terabaikan oleh pemerintah.³³

Sikap Hizbullah terhadap Kristen ditegaskan pula dalam Surat Terbuka ini. Ia menyerukan dakwah pada Islam kepada kaum Kristen. Namun, jika tidak mau menerima seruan dakwah ini maka mereka harus berteman baik dengan umat Islam dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti umat Islam. Hizbullah juga menyerukan kaum Kristen untuk menolak segala bentuk perpecahan dan fanatisme yang selama ini merugikan rakyat Lebanon secara keseluruhan.³⁴

Terhadap situasi politik dunia, di mana perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet tengah berlangsung, Hizbullah menyatakan bahwa ia menolak keduanya, menolak komunisme dan kapitalisme sekaligus. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedua sistem tersebut tidak mampu menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kedua sistem itu dibangun di atas kesombongan dan keinginan untuk mendominasi negara-negara lain yang lebih lemah dari mereka.

³² *Ibid.*, hal. 2

³³ *Ibid.*, hal. 3

³⁴ *Ibid.*, hal. 4

Maka Hizbullah juga menolak keberadaan UNIFIL yang berasal dari arogansi tersebut termasuk menolak keberadaan Israel dengan kesombongannya menduduki negeri Palestina dan mengusir rakyat dari tanah airnya. Hizbullah menolak kesepakatan Camp David antara Mesir dan Israel yang hanya semakin melegitimasi penjajahan Israel di tanah air Palestina.³⁵

4.1.4. Peran Suriah dan Iran di Lebanon serta Hubungan Keduanya dengan Hizbullah

Peran penting Suriah dalam pembentukan Hizbullah adalah dengan mengizinkan masuknya tentara Pasdaran (Pasukan Penjaga Revolusi Islam Iran) yang berjumlah 1500 orang untuk melatih dan mempersenjatai para pemuda Syi'ah.³⁶ Para pemuda inilah yang dikemudian hari menjadi para pemimpin dan pejuang perlawanan Hizbullah. Namun Hizbullah bukanlah sekutu yang ideologi, gerakan, pertumbuhan dan popularitasnya dapat dikontrol Suriah. Oleh karena itu, Suriah lebih suka bekerjasama dengan AMAL di bawah kepemimpinan Nabih Berri yang bercorak sekuler dan dapat digunakannya sebagai pion untuk mengendalikan Lebanon.

Peranan Suriah yang lebih besar dilegitimasi dalam perjanjian Taif yang menandai berakhirnya perang saudara Lebanon yang telah berlangsung selama lima belas tahun sejak tahun 1975.³⁷ Hizbullah merupakan salah satu faksi di Lebanon yang pro Suriah dan berusaha mempertahankan keberadaan Suriah di Lebanon. Namun, campur tangan Suriah dalam berbagai persoalan dalam negeri Lebanon ini pula yang menyebabkan munculnya Revolusi Cedar yang menuntut Suriah untuk menghentikan campur tangannya di dalam negeri Lebanon dan membiarkan pemerintah dan rakyat Lebanon mengurus urusan dalam negerinya sendiri secara merdeka dan berdaulat. Dan akhirnya pada tahun 2005 seluruh pasukan Suriah ditarik dari Lebanon sehingga Lebanon kini menjadi sebuah negara yang sepenuhnya berdaulat.

³⁵ *Ibid.*, hal. 4-5

³⁶ Emile El Hokayem, 2007, *Hizballah and Syria : Outgrowing The Proxy Relationship*, Washington: The Washington Quarterly, vol. 30 no. 2, hal. 36

³⁷ Tentara Suriah diizinkan masuk ke Lebanon oleh Liga Arab. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat Lebanon dari agresi Israel dan dari akibat perang saudara yang terjadi sejak tahun 1975

Sementara peran utama Iran dalam pembentukan Hizbullah adalah melalui serangkaian konsultasi dan diskusi antara ulama-ulama yang melakukan tugas dakwah di Lebanon, sekalipun mereka bukan berasal dari Lebanon, dengan Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin Revolusi Islam Iran sekaligus ulama rujukan kaum Syi'ah di Iran.³⁸ Dukungan moril ini ditambah dengan dukungan dana, pelatihan, dan persenjataan yang diberikan Iran pada para pejuang Perlawanan Islam, yang selanjutnya bergabung dengan Hizbullah. Bantuan pelatihan dan persenjataan bersamaan dengan dikirimkannya 1500 tentara Pasdaran ke Lebanon untuk melatih dan mempersenjatai para pemuda Syi'ah baik spiritual maupun material agar mampu melakukan aktivitas perlawanan terhadap Israel secara efektif.³⁹

Kehadiran tentara Pasdaran ini dilengkapi dengan kehadiran politisi Iran, Ali Akbar Mustashami, dan Mustafa Samran yang membantu Hizbullah menyusun strategi perlawanan dan membuat manajemen organisasi yang mampu menyokong aktivitas perlawanannya. Kepentingan utama Iran atas Lebanon adalah untuk menyebarkan semangat revolusi Islamnya dan mendorong terbentuknya negara Islam Lebanon dengan kelompok Muslim Syi'ah sebagai pemimpinnya. Hal ini dikarenakan posisi Lebanon yang dikelilingi negara-negara Arab berideologi Muslim Sunni, sehingga jika Lebanon dapat dijadikan negara Islam Syi'ah maka posisi tawar masyarakat Syi'ah akan semakin meningkat di antara masyarakat muslim dunia.⁴⁰

Namun, Iran dan Lebanon merupakan dua negara dengan budaya dan sistem yang berbeda, sehingga kebangkitan Muslim Syi'ah di Lebanon tidak membuat mereka mengadakan sebuah Revolusi Islam untuk dapat mendirikan negara Islam Lebanon. Salah satu ulama Syi'ah Lebanon yang menganut paham ini adalah Syaikh Muhammad Husain Fadlullah, yang sering dianggap sebagai Bapak Spiritual Hizbullah. Menurut Fadlullah sebuah negara Islam tidak didirikan dengan paksaan, jika rakyat berkehendak mendirikannya barulah ia dapat

³⁸ Iran, Lebanon, maupun Irak memiliki masing-masing ulama marja'nya sendiri yang menjadi rujukan masyarakatnya

³⁹ Joseph Elie Alagha, 2006, *The Shifts in Hizbullah's Ideology*, Leiden: Amsterdam University Press, hal. 33-34 dan dalam Augustus Richard Norton, 1999, *Hizbullah of Lebanon : Ekstrimist Ideals vs Mundane Politics*, New York: Council On Foreign Relations, Inc, hal.11

⁴⁰ Alagha, *Loc. cit.*

didirikan, sementara jika rakyat belum berkehendak, maka tugas kita (kaum Muslim Syi'ah) untuk terus meyakinkan masyarakat hingga mereka sepakat untuk mendirikannya. Paham yang sama juga dianut oleh Hizbullah. Meskipun dalam Surat Terbukanya ia menganggap negara Islam merupakan solusi bagi semua permasalahan di Lebanon, namun dalam perkembangan selanjutnya ia bersikap moderat dalam visinya ini.

4.1.5. Ringkasan Sejarah Pembentukan Hizbullah

Dari pemaparan latar belakang pembentukan Hizbullah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa corak radikal dan militan sekaligus perhatian besar pada politik yang dimiliki Hizbullah sejak awal terbentuknya merupakan hasil perpaduan beberapa faktor antara lain:

1. Kebangkitan masyarakat Muslim Syi'ah untuk memperbaiki kondisi keterbelakangan ekonomi dan politik yang mereka alami akibat pengabaian pemerintah Lebanon atas nasib mereka sebagai bagian dari rakyat Lebanon.
2. Kehadiran para ulama untuk melakukan pengajaran dan dakwah yang telah menyadarkan mereka akan kondisi mereka yang tertindas secara politik dan ekonomi sekaligus melakukan mobilisasi untuk memperjuangkan reformasi sistem politik dan ekonomi yang telah berlaku di Lebanon selama ini. Kehadiran para ulama lulusan institusi pendidikan Muslim Syi'ah di Qum, Iran dan di Najaf, Iraq ini juga memberi jalan bagi terbentuknya hubungan yang erat antara Lebanon dengan Iran dan Iraq yang terus berlangsung hingga saat ini. Hubungan yang erat ini, terutama dengan Iran, merupakan faktor penting dalam pertumbuhan Hizbullah selanjutnya.
3. Kehadiran para pengungsi Palestina dan para pejuang Palestina yang terus menerus berusaha melancarkan serangan mereka ke Israel dari wilayah Lebanon yang mereka tempati. Perlawanan para pejuang Palestina ini dijadikan Israel sebagai pembenaran untuk melakukan berbagai penyerangan ke berbagai wilayah di Lebanon dan untuk membuat sabuk pengaman di wilayah Lebanon yang berhasil mereka duduki untuk dijadikan sebagai penyangga wilayah Israel Utara agar terhindar dari serangan dan perlawanan para pejuang.

4. Perang sipil yang turut memperburuk situasi dalam negeri Lebanon dan menghasilkan penderitaan bagi masyarakat Lebanon sehingga mereka harus berusaha mempertahankan diri dari konflik bersenjata yang terjadi antara berbagai faksi yang ada di Lebanon.
5. Serangan Israel ke Lebanon dimulai dari penaklukan atas desa-desa di wilayah Lebanon Selatan yang mayoritas penduduknya adalah kaum Syi'ah. Selama pendudukan Israel di Lebanon, penduduk Syi'ah adalah yang paling menderita. *Security belt* yang dibuat Israel merupakan 15% dari wilayah Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan bagian utara tanah Palestina yang dikuasainya
6. Keberhasilan Revolusi Islam Iran untuk mendirikan negara Islam berbasis ideologi Syi'ah. Motivasi dan strategi perjuangan kelompok muslim Syi'ah untuk melakukan reformasi sistem politik dan ekonomi agar lebih berkeadilan dan menjamin mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dan untuk mempertahankan diri dari berbagai serangan Israel di wilayah tempat tinggal mereka semakin menguat dengan dukungan Ayatullah Khomeini dan keberhasilan perjuangan masyarakat Syi'ah Iran untuk melakukan revolusi dan mendirikan negara Islam berideologi Syi'ah.
7. Keberadaan Suriah yang turut campur dalam perang sipil ini semakin memperburuk situasi, sebab Suriah berkepentingan untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di Lebanon sebagai bagian dari ide Suriah Raya dengan Lebanon termasuk wilayah kekuasaannya. Keberadaan Suriah yang mendukung beberapa faksi dan milisi yang saling berkonflik tidak terlepas dari kepentingan ini, yakni untuk mempertahankan ketidakstabilan politik dalam negeri sehingga intervensi Suriah mendapat legitimasi pemerintah dan masyarakat.
8. Dukungan Iran baik moril maupun materiil, dalam bentuk legitimasi agama dan bantuan pelatihan dan infrastruktur perlawanan serta bimbingan manajemen organisasi baik dari Pasukan Penjaga Revolusi Islam Iran atau Pasdaran, Ali Akbar Mustashami, dan Mustafa Samran.

4.2. Perlawanan Hizbullah terhadap Israel

4.2.1. Perang Hizbullah-Israel Tahun 1982-1989

Salah satu faktor utama pemicu terbentuknya Hizbullah di kalangan penduduk Syi'ah Lebanon adalah serangan Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Pada saat itu, militansi di kalangan kaum Syi'ah mulai muncul dengan dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh para ulama Syi'ah kepada masyarakat Syi'ah yang saat itu berada dalam kondisi keterbelakangan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Militansi ini diperkuat dengan Revolusi Islam Iran pimpinan Khomeini yang disambut baik oleh para ulama tersebut. Dalam pertemuan antara para ulama Syi'ah dengan Khomeini di Iran, pimpinan Revolusi Islam Iran ini meminta para ulama untuk memobilisasi rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini tidak diberikan oleh pemerintah yang berkuasa.

Pada masa-masa awal terbentuknya Hizbullah, perlawanan terhadap Israel masih belum dilakukan dengan satu komando. Hal ini dikarenakan Hizbullah masih belum memiliki struktur organisasi yang jelas dan mapan. Kepemimpinan Hizbullah dipegang oleh sebuah Dewan yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok perlawanan yang dimotori oleh para ulama, terutama kelompok perlawanan Muslim Syi'ah. Akibatnya berbagai aksi bom syahid dan penyerangan yang dilakukan kepada pasukan Israel seringkali diklaim oleh salah satu faksi yang ada di Lebanon untuk menaikkan citranya di hadapan pemerintah dan faksi-faksi yang lain.

Hizbullah baru mulai memiliki pimpinan utama setelah deklarasi Surat Terbuka pada tahun 1985. Setelah deklarasi ini Dewan tersebut memiliki seorang Juru Bicara Resmi. Sejak saat ini berbagai operasi bom syahid dan penyerangan-penyerangan yang dilakukan terhadap pasukan Israel dilakukan atas nama Hizbullah. Prioritas utama kekuatan militer Hizbullah sejak awal terbentuknya adalah untuk melawan Israel.⁴¹

Maka seluruh sumber daya organisasi dipusatkan dalam aktivitas ini. Berbagai kamp pelatihan militer didirikan di wilayah Beqaa di bawah kontrol Pasharan. Di dalam kamp-kamp ini para calon pejuang perlawanan dilatih secara spiritual dan fisik untuk siap diterjunkan ke medan perang. Kedua kesiapan ini

⁴¹ Qassem, *op. cit.*, hal. 89

sangat ditekankan sebab bagi mereka perlawanan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk ibadah dan kewajiban agama, yaitu berjihad di jalan Allah.⁴²

Pada periode ini keikutsertaan dalam berbagai aktivitas pelatihan di kamp-kamp tersebut merupakan syarat utama keanggotaan organisasi. Para pejuang perlawanan melancarkan serangan-serangannya terhadap Israel secara gerilya dan rahasia tanpa publikasi politik dan media. Bersamaan dengan itu, untuk memenuhi kebutuhan jumlah pejuang, maka diadakan perekrutan umum yang berlangsung secara kultural dan rahasia tanpa kerangka organisasi formal. Di dalam kamp-kamp tersebut juga dibentuk para ahli yang dibutuhkan dalam berbagai sisi kemiliteran, baik dari sisi strategi perang maupun para ahli persenjataan. Keahlian dan kecakapan militer tersebut merupakan ujung tombak keberhasilan berbagai serangan yang dilakukan Hizbullah untuk melawan Israel.

Kerahasiaan merupakan kunci utama keberhasilan dalam perang ini.⁴³ Sebab Israel selain didukung oleh pasukan berjumlah besar dan persenjataan modern juga menggunakan kekuatan intelijen. Maka kerahasiaan menjadi senjata utama untuk melawan penyusupan dan aktivitas intelijen. Selain itu, corak utama perlawanan yang dilakukan Hizbullah sejak awal terbentuknya yang terus dipertahankan dan dipegangteguhny hingga tahun 2009 ini adalah bahwa seluruh kekuatan militernya digunakan hanya dalam rangka melawan pendudukan Israel di tanah air Lebanon. Oleh karena itu, Hizbullah memfokuskan aktivitas perlawanannya terhadap Israel dan menghindari keikutsertaan dalam perang saudara di dalam negeri.

4.2.2. Perang Hizbullah-Israel Tahun 1989-2000

Periode baru perjuangan Hizbullah melawan Israel adalah setelah perjanjian Taif disepakati oleh anggota parlemen Lebanon yang masih hidup pasca perang saudara. Perjanjian Taif dilaksanakan di Taif, Arab Saudi dan dimediasi oleh pemerintah Arab Saudi dan Suriah. Pasca perjanjian Taif disepakati yang salah satu isinya adalah meminta agar para milisi, yang berasal dari berbagai faksi yang saling bertikai selama perang saudara, untuk melucuti senjatanya.

⁴² *Ibid.*, hal. 98

⁴³ *Ibid.*, hal. 101

Pada periode ini, Hizbullah juga tengah menghadapi konflik bersenjata dengan AMAL, sehingga kekuatan perlawanan terhadap Israel agak melemah. Namun, dalam rentang waktu 1988 hingga tahun 1991 Hizbullah tetap melakukan aksi-aksi bom syahidnya. Ada tiga aksi besar yang dijalankan dengan bom mobil, yaitu yang dilaksanakan oleh Haitman Dbouk pada 19 Agustus 1988 di Tal al-Nahhas Distrik Marjeyoun. Aksi kedua dilaksanakan oleh Abdallah Atwi pada tanggal 19 Oktober 1988 di Kfar Kila Distrik Marjeyoun dan yang ketiga dilaksanakan oleh Syeikh Asaad Berro pada tanggal 9 Agustus 1989 di pintu masuk Quleya'ah Distrik Marjeyoun.⁴⁴

Qasim, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyatakan bahwa bagi Hizbullah perjanjian Taif tidak meyakinkan dan belum memenuhi syarat minimal bagi penyelesaian konflik. Hizbullah menyatakan kekecewaannya ini melalui berbagai pernyataan dan demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem politik sektarian yang, menurut Hizbullah, menjadi akar masalah dari konflik yang terjadi. Pendekatan politik dipilih Hizbullah untuk menyatakan berbagai pandangan politiknya mengenai konflik Hizbullah-Amal, termasuk mengenai perjanjian Taif.⁴⁵

Dilema yang dihadapi Hizbullah adalah untuk menerima kehadiran tentara Lebanon di wilayah Selatan untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Sementara selama pemerintahan Amin Jumayyil, yang memerintah pada tahun 1982-1988, tentara melakukan pengeboman-pengeboman di wilayah Selatan. Berbagai pertimbangan mengenai perubahan kebijakan politik pemerintah dan perubahan fungsi Tentara Nasional Lebanon pasca perjanjian Taif, jaminan non intervensi dari Suriah, dan bimbingan serta pengawasan Suriah atas berbagai perkembangan ini akhirnya menuntun Hizbullah untuk menerima hasil perjanjian ini.⁴⁶

Untuk menangani berbagai gejolak di antara anggota Hizbullah mengenai keputusan ini, maka para pimpinan partai mengadakan berbagai pertemuan dan diskusi dengan para kader dan anggota untuk menjelaskan mengenai latar belakang dan pertimbangan dibalik keputusan tersebut dan meyakinkan mereka

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 148

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 149

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 150

bahwa keputusan ini tidak akan membuat Hizbullah berubah dari tujuannya yang semula. Salah satu pertimbangan utamanya adalah bahwa dalam visi Hizbullah ia menolak adanya pemerintahan dalam pemerintahan.⁴⁷

Meskipun Hizbullah tidak dilucuti senjatanya sebagaimana milisi-milisi lain, pimpinan Hizbullah melarang anggotanya untuk menggunakan senjata demi menjaga kestabilan dalam negeri dan menghindari terjadinya pertikaian dalam negeri. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan karena kebutuhan Hizbullah adalah untuk mempertahankan fungsi perlawanannya maka penggunaan senjata harus dibatasi hanya di wilayah-wilayah pendudukan dan konfrontasi saja. Anggota perlawanan diperkenankan menggunakan senjata terbatas untuk melindungi diri dari ancaman serangan Israel saja.⁴⁸

Pemerintah Lebanon memutuskan untuk tidak memasukkan Hizbullah sebagai salah satu milisi yang harus dilucuti senjatanya sebagai implementasi perjanjian Taif. Keputusan ini didasarkan pada berbagai sikap dan posisi serta peran perlawanan yang dilakukan Hizbullah. Hizbullah melakukan perlawanannya atas pendudukan Israel di tanah air Lebanon secara gerilya dan dengan tidak memamerkan persenjataan maupun para pejuang mereka di hadapan publik. Di samping itu operasi perlawanan dilaksanakan terbatas di wilayah-wilayah pendudukan Israel dan di wilayah-wilayah konfrontasi dengan milisi sekutu mereka di dalam negeri yang dipimpin oleh Antoine Lahd. Keputusan ini juga diambil pemerintah karena Hizbullah tidak ikut serta dalam perang sipil yang terjadi dan tidak ngotot mempertahankan kekuatan bersenjata di wilayah-wilayah yang telah dibebaskan. Hizbullah pun berusaha menahan diri untuk tidak menggunakan senjata untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan politik dengan faksi-faksi lain maupun dengan pemerintah. Oleh karena itu, bagi pemerintah Lebanon Hizbullah merupakan salah satu elemen kekuatan pertahanan Lebanon dari serangan Israel.⁴⁹

Pasca perjanjian damai dengan AMAL, yang menghentikan konflik bersenjata antara AMAL dan Hizbullah, maka aktivitas perlawanan kembali intens melawan pendudukan Israel di wilayah Lebanon Selatan. Para pejuang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 151

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 152-153

Perlawanan Hizbullah melakukan penyerangan terus menerus pada pangkalan-pangkalan Israel dan penyergapan atas patroli-patroli yang mereka lakukan. Sebagai contoh pada tanggal 21 September 1992, ketika Hizbullah memutuskan keikutsertaannya dalam pemilihan umum parlemen Lebanon, gerakan perlawanan tetap melakukan aksi bom syahidnya oleh Ibrahim Dahr dengan sasaran konvoi tentara Israel di jalan Jarmaq.⁵⁰ Strategi ini dilakukan terus menerus untuk menekan Israel agar segera keluar dan membebaskan wilayah-wilayah Lebanon yang dikuasainya. Sebagai balasannya, maka pada tanggal 25 Juli 1993 Israel melakukan serangan besar-besaran selama tujuh hari terus menerus. Serangan ini diberi nama *Accountability Operation* atau Operasi Pertanggungjawaban. Operasi ini dilakukan Israel dengan dua tujuan, yaitu untuk melakukan serangan balasan kepada Hizbullah yang telah menekan mereka selama ini dan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah Lebanon melawan dan membubarkan Hizbullah.⁵¹

Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Ehud Barak, bahwa tujuan dari agresi Juli 1993 antara lain:⁵²

1. Melucuti senjata dan menghancurkan infrastruktur Hizbullah sehingga mereka tidak lagi mampu melakukan perlawanan
2. Memutuskan hubungan Hizbullah dengan masyarakat Lebanon sehingga masyarakat menuntut Hizbullah untuk membubarkan diri dan menolak aksi-aksi perlawanan atas Israel dan sekutunya di dalam negeri yang dilakukan Hizbullah
3. Menekan pemerintah Lebanon untuk menghalangi dan menghancurkan aktivitas perlawanan Hizbullah

Dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut, Israel mengerahkan seluruh kekuatannya, mulai dari angkatan darat dan udara hingga angkatan laut. Penyerangan dilakukan Israel di wilayah Selatan, Bekaa dan Bekaa Barat, kamp warga Palestina di al-Bared. Sebagai balasannya maka Hizbullah meluncurkan banyak roket ke arah pemukiman Israel di bagian Utara. Selain terus menerus meluncurkan roketnya ke wilayah pemukiman Israel di bagian utara, Hizbullah

⁵⁰ Alagha, *op. cit.*, hal. 44

⁵¹ Qassem, *op. cit.*, hal. 159

⁵² *Loc. cit.*

juga melakukan berbagai operasi militer dengan melakukan penyerangan ke pangkalan-pangkalan tentara Israel di sepanjang garis batas pendudukan Israel.⁵³

Amerika Serikat dan Israel melalui Suriah meminta Hizbullah agar peluncuran roket ke arah pemukiman mereka dihentikan dengan imbalan penghentian serangan Israel di Lebanon. Hizbullah menerima tawaran ini dan menghentikan penyerangan yang mereka lakukan. Pada tanggal 31 Juli 1993 pukul 06.00 sore kesepakatan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, yang dikenal dengan nama Perjanjian Juli, dilaksanakan.⁵⁴

Namun, pada pertengahan 2004 tentara Israel melakukan penculikan pada Hajj Mustafa Al-Dirani, salah satu kader pimpinan AMAL.⁵⁵ Hal ini menyebabkan Hizbullah melanjutkan perlawanannya. Pada bulan Oktober 1994 pos Israel di Dabshe dibom oleh para pejuang perlawanan. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel menculik Islam. Pada bulan April aksi bom syahid kembali dilakukan. Kali ini dilakukan oleh Salah Gandur dengan sasaran pos Tentara Lebanon Selatan, sekutu Israel di dalam negeri, di Bint Jubail. Sebelum Israel melakukan agresi kembali pada bulan April 1996, pejuang perlawanan Hizbullah kembali melakukan aksi bom syahid pada tanggal 20 Maret 1996 oleh Ali Ashmar di al-Dayse.⁵⁶

Pada tanggal 11 April 1996, Israel kembali mengadakan agresi ke wilayah Lebanon. Operasi ini dikenal dengan nama *Grapes of Wrath Operation* atau Operasi Anggur Kemarahan. Operasi ini diawali dengan melakukan pengeboman di berbagai wilayah di Distrik Selatan dimana markas besar Dewan Hizbullah berada. Operasi ini lebih kejam dan dilakukan dalam wilayah geografis yang lebih luas dan dilakukan selama enam belas hari, lebih lama dari serangan 1993 yang berlangsung tujuh hari. Israel melakukan empat pembantaian dalam operasi ini yaitu pembantaian di Suhmor pada hari kedua, pembantaian ambulans Mansouri

⁵³ *Ibid.*, hal. 160

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 160-161

⁵⁵ Penculikan ini dilakukan Israel setelah mengetahui bahwa Al Dirani merupakan penanggungjawab Ron Arad, pilot Israel yang ditahan milisi AMAL pada tahun 1983 setelah pesawatnya jatuh di daerah Lebanon Selatan. Penculikan Al Dirani bertujuan untuk mengungkap nasib Ron Arad. Selengkapnya mengenai penyelesaian masalah ini dapat dilihat dalam bab ini pada subbab pertukaran tahanan antara Hizbullah dan Israel. Dan serangan balasan Hizbullah merupakan wujud solidaritas pada AMAL sebagai sesama partai berbasis masyarakat Muslim Syi'ah dan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan AMAL di masa depan

⁵⁶ Alagha, *op. cit.* hal. 45-46

pada hari ketiga, pembantaian di Nabatieh Atas pada hari ketujuh; dan yang paling buruk dan terkenal adalah pembantai di Qana yang juga dilakukan pada hari ketujuh. Hizbullah kembali melakukan perlawanan dengan meluncurkan serangan roket Katyusha terus menerus setiap harinya.⁵⁷

Agresi Israel 1996 memiliki beberapa tujuan:⁵⁸

1. Menghancurkan Hizbullah dan menghentikan berbagai operasi perlawanannya
2. Menekan pemerintah Lebanon untuk segera mengambil keputusan menghentikan berbagai aktivitas perlawanan yang dilakukan Hizbullah
3. Memisahkan penduduk di wilayah-wilayah Selatan dari pejuang perlawanan Hizbullah
4. Memenuhi kebutuhan Simon Peres atas sebuah kemenangan untuk mendapatkan jabatan perdana menteri dalam pemilihan umum mendatang
5. Melumpuhkan Lebanon dan menghalangi Suriah mengambil keuntungan dari Lebanon
6. Mengamandemen hasil Perjanjian Juli agar aktivitas perlawanan Hizbullah benar-benar dihentikan sementara Israel leluasa menguasai sebagian wilayah Lebanon yang didudukinya sejak tahun 1982

Setelah agresi Israel yang melakukan banyak pembantaian di dalam negeri, solidaritas nasional terhadap Hizbullah muncul, masyarakat banyak yang menyumbangkan hartanya pada Hizbullah agar dapat membeli lebih banyak roket Katyusha untuk melindungi Lebanon. Di samping itu, banyak partai politik dalam pemerintahan pun sepakat untuk melegitimasi gerakan perlawanan Hizbullah dan tidak akan melucuti senjatanya.⁵⁹

Perlawanan Hizbullah atas agresi Israel tahun 1996 dilakukan dengan dukungan media yang baik. Hizbullah berusaha agar penampilan perlawanan di media massa nasional dan asing benar-benar sesuai dengan fakta yang dihadapi perlawanan. Oleh sebab itu, Hizbullah aktif menyampaikan berbagai pernyataan politik di hadapan media massa atas berbagai perkembangan yang terjadi selama agresi berlangsung dan setelahnya, mengadakan diskusi dengan berbagai partai dan faksi di Lebanon untuk menggalang dukungan bagi perlawanan atas agresi

⁵⁷ Qassem, *op. cit.* hal. 166

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 167-168

⁵⁹ Alugha, *op. cit.*, hal. 46

Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrullah aktif mengadakan berbagai pertemuan dan diskusi dengan pemimpin Suriah untuk menyamakan persepsi dan pandangan serta mencari solusi atas berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi Hizbullah.⁶⁰

Gencatan senjata berhasil disepakati pada tanggal 27 April 1997. Kesepakatan ini diprakarasi oleh Amerika dan Suriah dan dikenal sebagai Perjanjian April. Kali ini perjanjian didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan ditindak lanjuti dengan pembentukan komite yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaannya. Iran pun memainkan peranan penting dalam negosiasi ini melalui menteri luar negerinya. Komite tersebut terdiri dari wakil Suriah, Lebanon, Perancis, Amerika Serikat, dan Israel. Isi perjanjian ini cukup menguntungkan Hizbullah, sebab ia mengakui haknya mempertahankan diri dengan melakukan perlawanan juga menuntut netralitas wilayah-wilayah sipil dan Israel pun diminta untuk menghentikan serangan bomnya ke sasaran-sasaran warga sipil Lebanon dan sebagai imbalannya Hizbullah akan menghentikan serangan Katyushanya di pemukiman-pemukiman Israel.⁶¹

Setelah dua kali gagal mencapai tujuannya dalam dua agresi tersebut, maka Israel kemudian memilih untuk melakukan penyergapan-penyergapan di sekitar wilayah pendudukan. Israel juga melakukan penanaman bom di wilayah Kfour, Nabatiyeh dan mencederai beberapa pejuang Hizbullah. Sebagai kelanjutan taktik tersebut, Israel melakukan Operasi Anshariyah di wilayah Anshariyah pada malam hari tanggal 5 September 1997. Namun, serangan ini telah diperkirakan oleh para pejuang Hizbullah sehingga berhasil dilumpuhkan.⁶²

Pada tahun 1999, menjelang penarikan mundur Israel tahun 2000, pejuang perlawanan intens mengadakan operasi perlawanan untuk menyerang sekutu Israel di dalam negeri yakni kelompok Lahdis. Pada tahun 2000, Ehud Barak mengumumkan maksudnya untuk menarik diri dari Lebanon pada bulan Juli tahun 2000 sebagai realisasi janjinya pada rakyat Israel saat pemilihan umum. Barak sebenarnya masih mengusahakan untuk dicapainya kesepakatan tertentu dengan pemerintah Lebanon yang menguntungkan Israel. Namun, setelah menyadari

⁶⁰ Qassem, *op. cit.*, hal. 168

⁶¹ *Ibid.*, hal. 170-171

⁶² *Ibid.*, hal. 173

keteguhan pemerintah Lebanon, maka Barak memutuskan untuk menarik mundur pasukannya secara tiba-tiba, untuk menghindari pengejaran yang dilakukan para pejuang perlawanan Hizbullah, pada tanggal 27 Mei 2000. Penarikan mundur ini merupakan kemenangan terbesar Hizbullah atas Israel.⁶³

4.2.3. Perang Hizbullah-Israel Tahun 2000-2009

Setelah kemenangan gerakan perlawanan Hizbullah atas Israel pada tahun 2000, yakni dengan ditarik mundurnya seluruh pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon kecuali daerah perkebunan Sheeba dan desa-desa di sekitarnya, tidak serta merta gerakan perlawanan ini dibubarkan. Sikap dan perilaku Israel terhadap Palestina yang selalu berubah-ubah dan selalu tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi Hizbullah untuk tetap siap siaga akan berbagai kemungkinan. Hal ini langsung terbukti menyusul penarikan mundur Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang dikuasainya sejak tahun 1982 kecuali wilayah perkebunan Sheeba yang diklaim Hizbullah masih merupakan wilayah Lebanon. Sikap Israel ini merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan Israel lagi atas resolusi Dewan Keamanan PBB no. 425.⁶⁴

PBB membuat garis biru untuk melegitimasi pendudukan Israel di wilayah Sheeba. Garis biru ini dibuat oleh utusan PBB, Terry Larsen sebagai batas negara antara Israel dan Lebanon dengan memasukkan perkebunan Sheeba ke dalam wilayah kekuasaan Israel. Hizbullah berpendapat bahwa garis biru itu hanya menyesuaikan dengan wilayah penarikan mundur Israel secara tiba-tiba pada bulan Mei 2000 dan bukan merupakan garis batas kedua negara yang diakui secara internasional. Lebanon mempertahankan klaimnya atas wilayah Sheeba.⁶⁵

Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 425 juga menyatakan bahwa setelah penarikan mundur Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang dikuasainya, maka tentara nasional Lebanon harus disebarkan ke wilayah-wilayah yang telah dibebaskan. Penyebaran tentara Lebanon ini diusahakan oleh Israel dan sebagian masyarakat Lebanon. Tujuan penyebaran tentara nasional ini dalam pandangan

⁶³ *Ibid.*, hal. 187-188

⁶⁴ Resolusi ini berisi perintah PBB pada Israel untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah kedaulatan Lebanon yang telah dikuasainya sejak tahun 1982

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 193

Israel dan sebagian masyarakat Lebanon adalah agar Hizbullah dan sekutu-sekutunya tidak lagi melakukan perlawanan dan penyerangan atas wilayah dan tentara Israel, baik di perkebunan Sheeba maupun di wilayah lain.⁶⁶

Namun, baik Hizbullah maupun Presiden Emil Lahud⁶⁷ tetap menganggap perang dengan Israel belum berakhir meskipun pembebasan telah dilakukan di sebagian wilayah Lebanon. Anggapan ini muncul karena pendudukan masih dilakukan Israel di perkebunan Sheeba, penangkapan dan pemenjaraan para pejuang Lebanon serta bahaya ekspansi Zionisme yang masih eksis. Berbagai pengalaman telah menunjukkan bahwa Israel tidak pernah mematuhi resolusi PBB dan berbagai kesepakatan yang ada.⁶⁸

Pembebasan Lebanon bukanlah karena pemenuhan resolusi tersebut, melainkan hasil usaha dan perjuangan para pejuang Lebanon untuk membebaskan tanah airnya dari pendudukan Israel. Oleh karena itu, aktivitas perlawanan tidak oleh dihentikan dan harus selalu berada dalam kondisi siaga penuh. Jika perlawanan tidak dilanjutkan untuk membebaskan wilayah Sheeba maka dunia perlahan-lahan akan melupakan pendudukan Israel di wilayah milik Lebanon ini. Maka setiap reaksi yang mungkin muncul dari aksi yang dilakukan perlawanan harus dilihat sebagai reaksi atas pendudukan Israel dan bukan sebagai akibat dari gerakan perlawanan yang dilakukan Hizbullah.⁶⁹

Perang Hizbullah-Israel pada tahun 2006 dilegitimasi Israel di hadapan dunia internasional dengan alasan pembelaan diri atas penangkapan dua tentaranya oleh Hizbullah. Padahal sebelumnya Hizbullah telah berulang kali melakukan hal yang sama, namun Israel tidak bereaksi dengan melancarkan agresi besar-besaran semacam itu. Oleh karena itu, serangan Israel ini sangat kentat nuansa politisnya. Tujuan utama serangan ini adalah untuk kembali menekan pemerintah dan rakyat Lebanon untuk melucuti persenjataan Hizbullah. Perdana Menteri Lebanon saat itu adalah Fuad Siniora.⁷⁰

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 195

⁶⁷ Emil Lahud merupakan pengganti Elias Hrawi. Ia menjadi presiden Lebanon pada tahun 1998 hingga tahun 2007, kemudian ia digantikan oleh Michel Sleiman pada tahun 2008

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 196-197

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 197-199

⁷⁰ Fuad Siniora mulai menduduki jabatan Perdana Menteri Lebanon pada tahun 2005

Berbagai polemik muncul di dalam negeri. Anggota parlemen dari Hizbullah berusaha mempertahankan kekuatan militer Hizbullah dengan mengajukan berbagai argumen rasional. Di antaranya adalah bahwa Hizbullah merupakan kekuatan efektif untuk memperjuangkan pembebasan Lebanon Selatan seluruhnya dari pendudukan Israel. Di samping itu, Hizbullah juga merupakan kekuatan militer efektif untuk mempertahankan Lebanon Selatan dari ancaman agresi Israel yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Argumen lain adalah bahwa selama ini Hizbullah benar-benar memfokuskan aktivitas perlawanannya untuk melawan Israel dan tidak memasuki konflik sektarian di Lebanon.

Israel menyatakan, dalam *The Daily Star Lebanon*, bahwa intelijen Hizbullah berhasil mengamati aktivitas militernya di sekitar wilayah perbatasan. Hizbullah juga dicurigai berhasil memasukkan mata-matanya ke dalam pasukan Israel dan sistem komunikasinya. Hizbullah berhasil mengetahui aktivitas Brigade 91, pasukan rahasia Israel, dan kekuatan militer darat, laut, dan udaranya, serta kelengkapan persenjataannya.⁷¹

Setelah agresi yang dilakukannya ke Lebanon pada Juli 2006, Israel berencana untuk kembali melancarkan serangannya ke Lebanon. Rencana penyerangan ini merupakan balasan atas kekalahannya dalam perang 33 hari tahun 2006. Pada awal tahun 2009 Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, menyatakan bahwa mereka tidak ingin Hizbullah eksis di Lebanon, apalagi bisa duduk di parlemen, dan pemerintah Lebanon turut mengizinkan dan melegitimasi keberadaan mereka. Oleh karena itu, jika Hizbullah kembali menyerang tentara dan wilayah Israel, khususnya di perbatasan, maka Israel mengancam akan kembali melancarkan serangan yang lebih besar dari agresi 2006.⁷²

Hizbullah mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi penyerangan Israel berikutnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Persiapan ini dilakukan karena kekhawatiran bahwa Israel akan menyerang Lebanon sebelum menyerang Iran. Kekhawatiran ini muncul karena klaim Israel bahwa mereka menemukan pengiriman senjata, yang terdiri dari 400 roket dan persenjataan

⁷¹ Dalila Mahdawi and Carol Rizk, 2009, *Hizbullah "Knows Everything" bout Israel's Border Force*.

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=108693

⁷² Fadi Eyadat, 2009. *Barak: Israel to Target Lebanon if Hezbollah Escalate Tension*. <http://www.haaretz.com/hasen/pages/1130385.html>

kecil, dari Iran ke Lebanon untuk memperkuat Hizbullah. Namun, Hizbullah dan Iran membantah hal ini. Pasca perang 2006 Hizbullah tidak lagi menguasai wilayah selatan yang sebelumnya menjadi basis kekuatannya sebab pasukan UNIFIL masuk dan menjadi penjaga perbatasan Lebanon-Israel.⁷³

4.2.4. Pertukaran Tawanan antara Hizbullah dan Israel

Selain melakukan berbagai penyerangan dan peyergapan pada tentara Israel, Hizbullah juga melakukan berbagai upaya untuk membebaskan para tawanan di penjara Israel dan penjara al-Khiam di wilayah Lebanon Selatan yang dikuasai Israel dan sekutunya. Hizbullah berusaha untuk membebaskan mereka dengan melakukan pertukaran tawanan. Untuk bisa melakukan ini maka Hizbullah melakukan penyerangan dan penahanan atas tentara Israel. Penyerangan pertama pada tahun 1986 dimana Hizbullah berhasil menahan dua anggota pasukan patroli rahasia Israel di Kounin. Informasi mengenai nasib kedua tentara ini di tangan Hizbullah berharga untuk dipertukarkan pada tahun 1991 dengan 91 penduduk Lebanon, termasuk 10 orang perempuan dan 9 pejuang perlawanan.⁷⁴ Pada tanggal 21 Juli 1996, Hizbullah dan Israel mengadakan pertukaran tawanan yang kedua. Jenazah kedua tentara anggota pasukan patroli rahasia Israel yang ditangkap Hizbullah pada penyergapan tahun 1986 ditukarkan dengan 45 tawanan dari penjara al-Khiam termasuk 3 orang perempuan. Sebanyak 123 jenazah penduduk Lebanon juga dikembalikan oleh Israel dalam pertukaran ini.⁷⁵

Pertukaran tawanan ketiga terjadi pada tanggal 26 Juni 1998. Sisa-sisa pasukan Israel pada operasi Anshariyah dipertukarkan dengan 50 tawanan dari penjara Khiam dan 10 tawanan dari penjara Israel serta 40 jenazah penduduk Lebanon. Israel membalas aksi ini dengan melakukan penculikan atas tokoh-tokoh masyarakat Syi'ah. Syaikh Abdulkarim Ubaid merupakan orang pertama yang diculik Israel dari rumahnya di Jibsheat pada tanggal 28 Juli 1989. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1994 Hajj Mustapha Al-Dirani diculik dari rumahnya di Beqaa. Syaikh Ubaid diculik untuk ditukarkan dengan pasukan Israel yang masih

⁷³ Mitchell Prothero and Peter Beaumont, 2009, *Hezbollah Gears Up for New War*, <http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/08/hezbollah-rearms-against-israel>

⁷⁴ Qassem, *op. cit.*, hal. 206

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 207

ditawan Hizbullah. Sementara Al-Dirani diculik untuk dipertukarkan dengan Ron Arad⁷⁶ yang sebelumnya merupakan tawanan AMAL.

Israel memberikan Hizbullah tanggungjawab untuk mencari Arad dengan mengaitkan Al-Dirani dan gerakan perlawanannya dengan Hizbullah. Hizbullah mengambil tanggungjawab ini dengan anggapan bahwa Arad merupakan kunci untuk membebaskan para tawanan yang masih ada di penjara Israel dan al-Khiam. Namun, usaha Hizbullah untuk mencari tahu tentang nasib dan keberadaan Arad tidak berhasil. Keberadaan Arad tetap menjadi misteri hingga saat ini. Bersamaan dengan penarikan mundur tentara Israel dari sebagian besar wilayah Lebanon yang dikuasanya sejak tahun 1982, akhirnya pada tanggal 24 Mei semua tawanan di penjara al-Khiam berhasil dibebaskan, kecuali Syeikh Ubaid dan Al Dirani serta para tawanan yang ada di penjara-penjara Israel.⁷⁷

Berbagai aksi perlawanan yang dilakukan Hizbullah dalam periode pasca penarikan mundur Israel tahun 2000 memiliki dua tujuan, yaitu untuk membebaskan para tahanan yang ada di penjara Israel dan untuk membebaskan beberapa daerah yang masih dikuasai Israel, seperti daerah perkebunan Sheeba dan beberapa desa di sekitarnya. Hizbullah menolak upaya mediasi dalam usaha ini dan memberi alternatif penukaran penuh atau penukaran parsial yang dianggap sesuai olehnya. Oleh karena itu, Hizbullah menggunakan berbagai strategi perlawanan untuk memenuhi dua tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan penangkapan tentara-tentara Israel untuk dipertukarkan dengan para tawanan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.⁷⁸

Pada tanggal 10 Oktober 2000, Hizbullah menahan 3 orang tentara Israel dalam operasi perlawanan di perkebunan Sheeba. PBB dan negara-negara sekutu Israel melancarkan berbagai tekanan agar Hizbullah segera mengembalikan mereka. Namun, tekanan ini diabaikan Hizbullah. Beberapa hari kemudian Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hasan Nasrullah mengumumkan penangkapan atas tentara Israel lain yang berpangkat kolonel bernama Elhanan Tenenbaum.

⁷⁶ Ron Arad merupakan pilot Israel yang pesawatnya mengalami tabrakan di Sidon, Lebanon Selatan pada serangan udara Israel tahun 1986. Ia menjadi tawanan AMAL di bawah tanggungjawab Al-Dirani. Namun menyusul perpecahan AMAL, Al-Dirani keluar dari AMAL dan mendirikan gerakan perlawanannya sendiri dengan membawa serta Arad bersamanya

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 208-209

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 209-210

Hizbullah berharap kali ini semua tawanan yang masih tersisa di penjara Israel dapat berhasil dibebaskan.⁷⁹

Pada awalnya Hizbullah menolak semua upaya mediasi. Namun, akhirnya Jerman diterima sebagai mediator oleh Hizbullah dan Israel. Pada bulan Agustus 2003 Jerman dan Israel menyepakati untuk membebaskan seluruh tahanan Lebanon yang masih tersisa saat itu, 400 orang Palestina, dan orang-orang Arab dari Suriah, Libya, Maroko, dan Sudan. Usulan tersebut termasuk 59 jenazah pejuang yang masih tersisa, penyingkapan nasib 24 orang Lebanon yang hilang, dan penyerahan peta lokasi penanaman ranjau-ranjau darat oleh Israel di wilayah perbatasan.⁸⁰

Akan tetapi, kesepakatan ini tidak berjalan mulus. Terjadi berbagai gejolak di dalam negeri Israel menyusul pengungkapan hasil negosiasi ini oleh Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, kepada pers sehingga keputusan ini tertunda pelaksanaannya. Pada tanggal 25 Januari 2004 Nasrullah mengumumkan bahwa kesepakatan pertukaran tawanan berhasil dicapai antara Hizbullah dan Israel dengan perubahan rincian menjadi 400 tahanan Palestina, 23 tahanan Lebanon⁸¹, 5 orang Suriah, 3 orang Maroko, 3 orang Sudan, 1 orang Libya, dan 1 orang Jerman, informasi mengenai nasib 24 orang yang hilang dan 59 jenazah pejuang Lebanon. Pertukaran tahanan berhasil dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Januari 2004.⁸² Inilah kemenangan kedua bagi Hizbullah setelah pada tahun 2000 Israel menarik mundur pasukannya dari sebagian besar wilayah pendudukannya.

Strategi ini terbukti cukup efektif, hingga Israel, yang berambisi untuk menghentikan aktivitas perlawanan Hizbullah, mulai belajar dari kegagalan-kegagalannya di masa lalu. Pada tanggal 12 Juli tahun 2006, Hizbullah kembali menangkap dua orang tentara Israel, yaitu Eldad Regev dan Ehud Golwasser untuk dipertukarkan dengan tahanan yang masih tersisa di penjara Israel.⁸³ Namun, ternyata peristiwa ini berakhir dengan agresi Israel ke Lebanon pada

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 210-211

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 212-213

⁸¹ Termasuk Syeikh Obeid yang diculik Israel pada tahun 1989 dan Al Dirani yang diculik Israel pada tahun 1994. Keduanya dibebaskan Israel pada tanggal 29 Januari 2004, lebih lengkap dapat dilihat dalam artikel di <http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/01/29/prisoner.exchange/index.html>

⁸² Qassem, *op. cit.*, hal. 213

⁸³ Roni Sofer, 2008, *Arab Media Say Hizbullah-Israel Prisoner Exchange Deal Expected in Coming Days*, <http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3556246,00.html>

tanggal 13 Juli 2006. Hizbullah kembali mengadakan serangkaian negosiasi dengan Israel, dengan mediasi dari Jerman, untuk mengadakan pertukaran tawanan.⁸⁴

Pertukaran tawanan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama Hizbullah mengirimkan jenazah-jenazah pasukan Israel pada perang 2006, dan Israel mengirimkan jenazah penduduk Lebanon maupun rakyat Palestina yang menjadi korban pada perang 2006. Satu hari setelahnya Hizbullah mengirimkan jenazah dua tentara Israel yang ditahannya pada tanggal 16 Juli 2006 dan Israel mengirimkan Samir Kuntar⁸⁵ dan empat pejuang Hizbullah. Pada fase kedua, satu bulan setelah fase pertama dilaksanakan, ratusan tawanan Palestina yang ada di penjara Israel dipulangkan ke desa mereka.⁸⁶ Jumlah jenazah rakyat Lebanon dan Palestina, yang menjadi korban dalam perang tahun 2006, yang dikirimkan ke Lebanon sebanyak 199 jenazah. Pertukaran tawanan ini dilaksanakan pada tahun 2008.⁸⁷

Sejak pertukaran tawanan tahun 2008, Hizbullah dan Israel mulai terlibat dalam perang psikologis lewat kata-kata. Hizbullah dan Israel saling mengancam dan menyerang satu sama lain lewat berbagai media. Khususnya lewat media massa cetak dan elektronik yang dimiliki Hizbullah, termasuk berbagai website Hizbullah. Sementara Israel melancarkan berbagai serangan melalui berbagai media massa cetak maupun elektroniknya, termasuk berbagai website. Berita dari Israel yang paling sering dikutip dalam pemberitaan media massa barat mengenai kondisi terkini Hizbullah *versus* Israel.

4.3. Gerakan Perlawanan Hizbullah dari Sudut Pandang Konsep Jihad dan Teori Gerakan Sosial

Prinsip jihad yang melandasi seluruh aktivitas perlawanan Hizbullah merupakan rahasia utama dari konsistensi perjuangannya melawan Israel. Tanpa keyakinan akan kebenaran Islam dan kewajiban membela harga diri dan

⁸⁴ Farid Gaban, dkk, 2006, *Apa dan Siapa Hizbullah dan Nasrallah*, Jakarta: Misbah, hal. 13-14

⁸⁵ Samir Kuntar adalah milisi dari kelompok Druze yang ditahan oleh Israel sejak tahun 1979 setelah melakukan penyerangan terhadap tentara Israel

⁸⁶ Yoav Stern, 2008, *Lebanon : Hezbollah Prisoner Swap Marks Failure for Israel*, <http://www.haaretz.com/hasen/spages/997914.html>

⁸⁷ Jim Teeple, 2008, *Israel-Hezbollah Swap Prisoner*. <http://www1.voanews.com/english/news/a-13-2008-07-16-voa5-66756152.html>

kehormatan umat Islam dan bangsa di mana kaum muslimin hidup, maka Hizbullah akan kehilangan semangat dan motivasi perjuangannya. Namun, dengan ditopang oleh konsistensi *wilayatul faqih* di Iran untuk terus memberikan dukungan moral, spiritual, motivasi, dan dana serta persenjataan, maka Hizbullah dapat eksis dalam aktivitas perjuangannya. Dan konsistensi pada prinsip jihad inilah yang menjadi salah satu daya tarik dan standar Hizbullah dalam melakukan rekrutmen. Hanya orang-orang yang telah melakukan *jihadul akbar* (jihad melawan hawa nafsu pribadinya) yang bersedia dan mampu melakukan *jihadul asghar* (perang dan aktivitas perlawanan). Sebab pengorbanan jiwa serta harta benda hanya dapat dilakukan jika memiliki visi misi hidup yang lurus mengharap ridho Allah. Pemahaman dan keyakinan yang komprehensif akan kebenaran Islam dan visi hidup yang jelas yang menjadi landasan perjuangan dan perlawanan Hizbullah hingga ia mampu meraih berbagai keberhasilan dalam perjuangannya, mewujudkan beberapa tujuannya, dan menghadapi berbagai tantangan yang merupakan keniscayaan dalam sebuah perjuangan.

Berbagai aktivitas perlawanan yang telah dilakukan Hizbullah, dapat digolongkan sebagai gerakan sosial yang terus berkembang. Menurut Zald dan Mc Carthy gerakan sosial merupakan aksi yang dilakukan bersama-sama demi satu tujuan bersama.⁸⁸ Dalam kerangka kerja perlawanan Hizbullah, maka seluruh aktivitas perlawanan dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama di bawah sebuah komando dan mengatur berbagai aktivitasnya tersebut. Seluruh pejuang perlawanan pun telah dibekali dalam kamp-kamp pelatihan yang tidak hanya menekankan pada kemampuan fisik dan penguasaan strategi perang, medan dan persenjataan saja, namun sangat menekankan pada kelurusan niat dan kebulatan tekad serta pemahaman yang baik mengenai misi perlawanan. Dalam aktivitas perlawanan Hizbullah, setiap perjuangan yang dilakukannya adalah dalam kerangka jihad dan pengorbanan, sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para imam yang diyakininya.

Sedangkan berdasarkan karakteristik gerakan sosial dari Gerlach dan Hine, maupun Bottomore⁸⁹, maka Gerakan Perlawanan Hizbullah memenuhi karakteristik-karakteristik yang mereka buat, yakni pada masa awal terbentuknya,

⁸⁸ Lihat bab II dari tesis ini pada halaman 21

⁸⁹ Lihat bab II, hal. 21

Hizbullah terdiri atas berbagai kelompok perlawanan yang melakukan aktivitas perlawanannya sendiri-sendiri bukan di bawah satu komando yang sama. Baru setelah Hizbullah memiliki Dewan yang terdiri dari wakil berbagai kelompok perlawanan yang tergabung dalam Hizbullah pada tahun 1985, gerakan perlawanannya diorganisir secara terpusat di bawah komando Dewan tersebut. Karakteristik lain adalah bahwa gerakan perlawanan Hizbullah merupakan bagian dari suatu sistem organisasi yang lebih besar, membuat kegiatan bersama, dan memiliki tujuan serta lawan bersama.

Sementara menurut Marshal gerakan sosial memiliki karakteristik mempunyai tujuan yang spesifik, organisasi formal, dan aktivitasnya berlangsung terus menerus.⁹⁰ Di samping itu bergerak di luar sistem politik yang ada dalam masyarakat, namun ia mampu memiliki basis yang kuat dan dalam di masyarakat dan mereka aktif menuntut adanya perubahan dalam masyarakat. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka corak aktivitas perlawanan Hizbullah pasca deklarasi Surat Terbuka tahun 1985 dan pembuatan kerangka dan struktur organisasi yang lebih mapan memenuhi karakteristik sebagai gerakan sosial. Sejak awal tujuan aktivitas perlawanan Hizbullah adalah membebaskan Lebanon dari penjajahan Israel, dan sebagai konsekuensi perjuangannya maka ia pun berusaha untuk membebaskan tawanan rakyat Lebanon yang ditahan Israel dalam setiap perang Hizbullah-Israel terjadi maupun yang memang sengaja diculiknya. Hizbullah berakar kuat dalam masyarakat Syi'ah khususnya di wilayah Selatan yang merasa terjamin keselamatannya dan harga dirinya dari arogansi Israel dengan keberadaan gerakan perlawanan.

James dan Zande mengklasifikasikan gerakan perlawanan ke dalam empat tipe,⁹¹ yaitu gerakan revolusioner, gerakan reformasi, gerakan perlawanan, dan gerakan ekspresif. Hizbullah merupakan sebuah gerakan yang memenuhi keempat tipe tersebut. Dengan cakupan aktivitasnya yang cukup komprehensif, Hizbullah menjalankan aktivitas dakwah, rekrutmen, dan pelatihan yang berusaha mendidik dan mengubah pandangan masyarakat hingga memobilisasi masyarakat untuk mengadakan perbaikan dalam kehidupannya. Berbagai aktivitas tersebut

⁹⁰ Lihat bab II, hal. 22

⁹¹ Lihat bab II, hal. 23

menjadikan Hizbullah dapat digolongkan sebagai gerakan revolusioner yang berusaha mengganti kerangka nilai yang ada di masyarakat.

Sementara kerangka kerja Hizbullah sebagai partai politik, yang nanti akan dipaparkan dan dianalisa dalam bab V, merupakan bentuk upaya Hizbullah untuk menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kemasyarakatan yang ingin dilakukannya setelah perdamaian dapat diwujudkan setelah perang saudara selama 15 tahun. Ini dilakukan Hizbullah melalui program *infithahnya* dan usahanya mengadakan berbagai dialog mengenai pentingnya kesatuan nasional Lebanon. Hizbullah juga merupakan gerakan perlawanan yang berusaha untuk mengeliminasi perubahan yang ada, yakni dalam bentuk pendudukan wilayah Lebanon oleh Israel, akibat agresi Israel ke Lebanon tahun 1982 dan menjadikan Lebanon Selatan sebagai daerah sabuk pengaman bagi tanah pendudukan Israel di Palestina bagian utara dari serangan pejuang Palestina yang ada di Lebanon. Di samping itu, Hizbullah juga merupakan gerakan ekspresif yang berkonsentrasi pada upaya pembentukan individu-individu yang sesuai dengan prinsip gerakan dan keyakinannya melalui berbagai institusi pendidikan, dialog-dialog yang diadakan, pernyataan dan siaran di berbagai media massa yang dimilikinya, maupun melalui aktivitas dakwah yang dilakukan para ulama Syi'ah, baik yang tergabung dalam Hizbullah maupun yang tidak tergabung di dalamnya, dalam majelis-majelis ilmu mereka.

BAB V

TRANSFORMASI HIZBULLAH DARI GERAKAN PERLAWANAN MENJADI PARTAI POLITIK TAHUN 1992-2009

5.1. Latar Belakang Sosial Politik Keikutsertaan Hizbullah sebagai Partai Politik pada Pemilihan Parlemen Lebanon 1992

Krisis yang terjadi di dunia Arab secara umum seperti kekalahan pasukan gabungan Arab dari tentara Israel pada perang enam hari tahun 1967, ketimpangan pembangunan sosial ekonomi, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan disorientasi masyarakat akibat westernisasi menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Arab semakin tajam. Sedangkan di Lebanon kompleksitas berbagai persoalan regional tersebut diperburuk dengan ketimpangan pembagian kekuasaan politik yang dilegalkan dalam konstitusi tahun 1926 dan Pakta Nasional tahun 1943. Kekuasaan kepresidenan, yang memiliki wewenang yang luas di dalamnya, dipegang oleh kelompok Kristen Maronit dan kursi perdana menteri diberikan pada Muslim Sunni, sementara posisi ketua parlemen, yang hanya memiliki kewenangan terbatas, diberikan kepada kelompok Muslim Syi'ah.

Para anggota parlemen juga dibagi-bagi berdasarkan pengaruh sosial ekonomi yang dimiliki masing-masing faksi yang ada di Lebanon, khususnya antara kelompok Kristen dan kelompok Muslim. Ratio pembagian 99 kursi parlemen Lebanon antara Kristen dan Muslim (termasuk di dalamnya Druze) adalah 6:5, sehingga kelompok Kristen memiliki jatah 54 kursi, sementara kelompok Muslim hanya mendapat jatah 45 kursi. Ratio ini dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932, di mana kelompok Kristen merupakan kelompok dengan jumlah penduduk paling banyak, di susul kelompok Muslim dan kelompok-kelompok lain. Ratio ini semakin memperkuat dominasi politik kelompok Kristen. Sementara kelompok Muslim Syi'ah dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi setiap tahunnya hanya menjadi ketua parlemen dengan kewenangan terbatas.¹

Kondisi ini telah memunculkan gerakan Muslim Lebanon yang militan, khususnya di kalangan Syi'ah. Namun, setelah perjanjian Taif disepakati dan menandai berakhirnya perang sipil Lebanon yang telah berlangsung selama lima

¹ Ahmad Nizar Hamzeh, 2000, *Lebanon's Islamist and Local Politics : A New Reality*, Third World Quarterly, vol. 21 No. 5, Newyork: Taylor and Francis Ltd, hal. 739-742

belas tahun, maka gerakan-gerakan Islam ini menghadapi kondisi politik praktis yang membutuhkan reaksi berbeda dari aktivitas perlawanan yang selama ini mereka lakukan. Pada saat itu, Hizbullah memiliki pilihan untuk dapat memperluas pengaruh dan gerakannya di Lebanon, yaitu dengan bertransformasi menjadi partai politik. Dengan menjadi partai politik dan ikut serta dalam pemilihan umum Hizbullah memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat memanfaatkan situasi keterbukaan politik Lebanon pasca perang sipil tersebut demi mewujudkan tujuan-tujuannya.

5.1.1. Penerapan Sistem dan Budaya Politik Konfessionalisme di Lebanon dan Berkurangnya Kekuasaan *Zu'ama* di Kalangan Masyarakat Syi'ah Lebanon

Budaya politik, menurut Almond dimaknai sebagai sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai politik yang mempengaruhi perilaku politik suatu negara. Termasuk di dalamnya persatuan nasional, pola-pola pembagian kekuasaan, cara pemerintah dan masyarakatnya menyelesaikan konflik, cara masyarakat berpartisipasi dalam politik, dan ketaatan pada pemerintah.²

Lebanon merupakan negara republik yang menerapkan sistem demokrasi parlementer konsosiasional³ sebagai sistem politiknya. Negara ini juga menerapkan sistem pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menerapkan sistem *checks and balances*. Kebebasan publik diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Termasuk di dalamnya kebebasan beragama dan kebebasan mengemukakan pendapat, serta menghormati keadilan sosial dan persamaan hak-hak dan kewajiban warga negara tanpa diskriminasi. Sistem politik Lebanon dibangun di atas prinsip pemisahan, keseimbangan, dan kerjasama diantara berbagai cabang pemerintahan.⁴

Di dalam konstitusi 1926 disebutkan bahwa penghapusan sistem konfessionalisme merupakan tujuan nasional. Rencana penghapusan ini akan

² Gabriel A. Almond, 1983, *Communism and Political Culture Theory*, New York: PhD. Program in Political Science of The City of University of New York, hal. 1

³ Demokrasi parlementer konsosiasional merupakan bagian dari sistem demokrasi berbasis pembagian kekuasaan. Dalam demokrasi konsosiasional pembagian kekuasaan dilakukan oleh faksi-faksi yang ada dalam masyarakat berdasarkan dukungan dan pengaruh sosial, ekonomi, dan politik masing-masing kelompok dalam masyarakat.

⁴ Hal ini disebutkan dalam konstitusi pertama Lebanon tahun 1926, lihat selengkapnya di <http://www.clhrc.com/unresagreements/Lebanese%20constituti.pdf>

dilaksanakan secara bertahap. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa tanah Lebanon adalah untuk semua masyarakat Lebanon. Setiap penduduk Lebanon memiliki hak untuk hidup di bagian manapun di tanah Lebanon dan memiliki kedaulatan hukum di manapun ia bertempat tinggal. Tidak ada pemisahan masyarakat berdasarkan kepemilikan, tidak ada fragmentasi, rintangan, ataupun kolonisasi. Tidak ada legitimasi konstitusi bagi otoritas apapun yang bertentangan dengan kesepakatan masyarakat untuk hidup berdampingan (*the pact of communal coexistence*).⁵

Hak-hak sebagai warga negara Lebanon juga diatur dalam konstitusi 1926. Setiap warga negara Lebanon sama di mata hukum, mereka memiliki hak-hak sipil dan politik yang dilindungi undang-undang selaras dengan kewajiban dan tugas mereka sebagai warga negara tanpa dibeda-bedakan. Kebebasan beragama dan hak-hak individual juga dijamin oleh undang-undang ini. Hak mendapatkan pendidikan dijamin oleh undang-undang dan setiap komunitas agama berhak untuk mendirikan institusi pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan disesuaikan dengan aturan-aturan umum pemerintah mengenai pendidikan. Setiap warga negara juga berhak untuk diangkat menjadi pejabat publik berdasarkan pertimbangan jasanya pada masyarakat dan kemampuannya dalam bidang yang menjadi keahliannya. Kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul dilindungi oleh undang-undang.⁶

Pemilihan presiden dilaksanakan enam tahun sekali oleh minimal dua pertiga dari anggota parlemen. Selain berperan sebagai kepala negara, presiden juga merupakan kepala departemen pertahanan, panglima tentara nasional Lebanon, dan menjadi pemimpin sidang kabinet jika ia mengahadirinya, meskipun ia tidak punya hak suara dalam keputusan yang diambil dalam sidang tersebut.

Parlemen terdiri dari satu kamar dengan jumlah anggota 128 orang. Pembagian kekuasaan dalam parlemen selain didasarkan atas keterwakilan masing-masing faksi juga didasarkan pada keterwakilan masing-masing propinsi berdasarkan luas wilayah dan jumlah populasi mereka. Pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dilangsungkan sekali dalam empat tahun. Sejak piagam Taif disepakati, pemilihan parlemen telah berlangsung sebanyak lima kali

⁵ *Loc. cit.*

⁶ *Loc. cit.*

yakni pada tahun 1992, 1996, 2000, 2005, dan 2009. Sementara pemilihan pemerintahan kota diadakan kembali, pasca perang sipil, pada tahun 1998 dan 2004. Lebanon memiliki 919 pemerintahan kota dengan jumlah anggota yang dipilih sebesar 10.818 orang.⁷

Salah satu budaya politik masyarakat Syi'ah Lebanon adalah keberadaan para tuan tanah (*zu'ama*) sebagai elit politik dan ekonomi. Status *za'im* (bentuk tunggal dari *zu'ama*) tergantung dari seberapa luas tanah yang dimilikinya atau dari seberapa besar kekuasaan sosial dan politiknya dalam kelompok masyarakat di mana mereka berada. *Za'im* memiliki kekuasaan politik yang bersifat hierarkis dan turun temurun. *Za'im* adalah pemimpin komunitas yang mempunyai kekuatan ekonomi, politik, dan berpendidikan lebih tinggi sehingga ia menjadi tokoh dalam komunitas tersebut. Berbagai kelebihan ini membuat masyarakat tergantung pada *za'im*, mereka seringkali mengkonsultasikan berbagai permasalahan keluarga dan masyarakatnya pada *za'im* tersebut.⁸

Pola hubungan antara masyarakat dan *zu'ama* ini disebut sebagai pola patron klien, di mana *zu'ama* menjadi patron yang menggunakan pengaruh dan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi masyarakat yang berstatus lebih rendah darinya (klien) dan masyarakat merupakan klien yang membalas perlakuan baik patron tersebut dengan dukungan, kepatuhan, dan pelayanan. Oleh karena itu, banyak orang yang berambisi untuk menjadi anggota parlemen Lebanon ataupun menjadi pejabat pemerintahan yang meminta dukungan dari *zu'ama* sehingga ia dapat menduduki jabatan tersebut.⁹

Zu'ama memiliki berbagai peran dan pengaruh dalam masa perang maupun damai. Perang saudara tahun 1958 dan 1979 diawali dengan pertentangan antar *zu'ama*. Pada masa ini *zu'ama* menjadi pemimpin milisi bersenjata dan masyarakat pendukungnya menjadi pasukan milisi tersebut. Sementara pada masa damai *zu'ama* berubah menjadi para pemimpin partai politik dengan

⁷ Hamzeh, *op. cit.* hal 740-742

⁸ Untuk melihat peran *zu'ama* dalam masyarakat Lebanon dengan lebih komprehensif dapat ditemukan dalam tesis Riza Muhammad Widyarsa di Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia

⁹ Riza Muhammad Widyarsa, 2007, *Pola Hubungan Patron Client dalam Gerakan Politik Masyarakat Arab, Studi Kasus Zu'ama di Lebanon (1943-2006)*, Jakarta: Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, hal. 8

masyarakatnya sebagai para konstituen utamanya. Oleh karena itu, parlemen maupun pejabat pemerintah Lebanon terdiri dari para *zu'ama* yang saling bersaing memperebutkan pengaruh politik untuk mempertahankan posisi mereka. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan Lebanon, baik di parlemen, kabinet, maupun pemerintahan kota, didominasi oleh wakil dari *zu'ama* tertentu sehingga pejabat pemerintah yang benar-benar murni memperoleh jabatannya berdasarkan kemampuan dan keahlian mereka hanya sedikit sekali.¹⁰

Kamil Al-Asad merupakan *za'im* yang paling berpengaruh di Jabai Amil yang terletak di wilayah Lebanon Selatan. Wilayah ini adalah tempat tinggal bagi mayoritas masyarakat Syi'ah. Al-Asad memiliki rival dari *zu'ama* lain di wilayah-wilayah di mana mayoritas masyarakat Syi'ah hidup di sana. Di antara *zu'ama* tersebut adalah klan Al-Khalils di Tyre, klan Al-Zains di Nabatiyeh, dan klan Usairan di Al-Zaharani. Imam Al-Shadr berusaha dengan berbagai cara dan program untuk menyaingi pengaruh dari klan Al-Asad yang telah mendominasi sebagian besar masyarakat Syi'ah selama bertahun-tahun.¹¹

Para *zu'ama* Syi'ah ini berhasil mendapatkan kekuasaan politik dengan menjadi anggota parlemen dan bersaing memperebutkan jatah ketua parlemen yang memang menjadi bagian kelompok Syi'ah berdasarkan pembagian kekuasaan politik Pakta Nasional tahun 1943. Namun, keberadaan mereka dalam pemerintahan Lebanon tidak membuat kondisi masyarakat Syi'ah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah berubah menjadi lebih baik.

Minimnya infrastruktur di wilayah tempat tinggal mereka di Lebanon Selatan ditambah sulitnya mencari pekerjaan di sana menyebabkan banyak warga Syi'ah yang meninggalkan desa mereka dan bermigrasi ke Beirut. Migrasi ini membuat ketergantungan mereka pada para *zu'ama* terlepas sehingga mereka otoritas dan pengaruh para *zu'ama* Syi'ah pun menjadi berkurang. Bahkan generasi kedua dari warga yang bermigrasi ke Beirut sudah sama sekali tidak tertarik dengan keberadaan dan kekuasaan para *zu'ama*.

Kebangkitan kesadaran dan gerakan sosial politik masyarakat Syi'ah pada tahun 60-an menyebabkan para pemimpin pergerakan masyarakat Syi'ah saat itu

¹⁰ *Ibid.*, hal. 83-121

¹¹ Deeb, *op. cit.*, hal. 683 Sementara menurut Widyawarsa, diantara *zu'ama* Syi'ah yang terkenal adalah keluarag Haidar, Hamadib, dan Al Husaini

menganggap bahwa masyarakat harus merubah ketergantungan mereka pada para *zu'ama* Syi'ah yang ternyata tidak memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai usaha baik melalui ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah yang mereka berikan pada masyarakat maupun melalui berbagai pelayanan dan organisasi sosial yang mereka buat untuk membantu masyarakat. Salah satu gerakan yang paling terkenal adalah Gerakan Kaum Tertindas yang didirikan oleh Imam Al-Shadr pada tahun 1960-an dan kemudian melahirkan AMAL (*Afwaj al-Muqowama*) dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh dan kekuasaan dari para *zu'ama* Syi'ah. Dan kemudian pada tahun 1980-an bersamaan dengan kebutuhan untuk mempertahankan diri dari serangan Israel, berbagai kelompok perlawanan Syi'ah yang dipimpin para ulama kemudian membentuk Hizbullah.

Berkurangnya kontrol *zu'ama* terhadap warga Syi'ah dan semakin naiknya tingkat pendidikan mereka menyebabkan mereka berhasil melepaskan diri dari pengaruh *zu'ama* sama sekali dalam kehidupannya. Khususnya setelah Hizbullah menjadi partai politik dan masuk ke dalam sistem pemerintahan Lebanon dan mendapat dukungan besar di wilayah Tyre, Beeqa, dan sebagian wilayah Baalbek.¹² Pada saat perjanjian Taif terjadi, kekuasaan *zu'ama* terbukti semakin mengecil dan menjadi faktor pendukung kemunculan AMAL dan Hizbullah sebagai partai politik berbasis massa masyarakat Syi'ah. Semua peran *zu'ama* Syi'ah telah berhasil digantikan oleh AMAL dan Hizbullah saat ini.

5.1.2. Perjanjian Ta'if

Kesepakatan ini dibuat untuk dapat mengakomodasi pembagian kekuasaan yang lebih adil bagi berbagai faksi yang ada di Lebanon, khususnya bagi tiga faksi dengan jumlah mayoritas di Lebanon, yaitu kelompok Muslim Syi'ah, kelompok Kristen Maronit, dan kelompok Muslim Sunni. Kesepakatan ini dibuat di Taif, Arab Saudi dan diratifikasi di Lebanon pada tanggal 4 November 1989. Isi kesepakatan ini berusaha untuk memperbaiki berbagai ketimpangan yang menimbulkan perpecahan akibat pembagian kekuasaan yang tidak adil dalam Pakta Nasional tahun 1943. Perjanjian Taif merupakan dokumen kesepakatan yang menjadi basis penghentian perang sipil Lebanon yang telah berlangsung

¹² Widyawarsa, *op. cit.*, hal. 126

selama lima belas tahun. Dokumen ini juga berisi program-program untuk memperbaiki kondisi dalam negeri Lebanon pasca perang sipil. Namun, menurut Barclay, dokumen ini mencerminkan kepentingan Suriah dibandingkan kepentingan masyarakat Lebanon.

Dicapainya perjanjian Taif ini, merupakan hasil usaha panjang Suriah untuk melakukan mediasi atas perang sipil Lebanon, yang diperburuk dengan agresi Israel tahun 1976 dan 1982. Pada tahun 1983, diadakan perundingan di Genewa dengan menghadirkan ketua dari faksi-faksi yang berperang. Namun, satu-satunya kesepakatan yang dapat dicapai dalam perundingan ini adalah mengenai identitas Lebanon sebagai bagian dari bangsa Arab. Perundingan ini kemudian diusahakan lagi pada tahun 1984 namun tidak mampu menghasilkan kesepakatan apapun.¹³

Pada tahun 1985, Suriah mulai berperan dan mengadakan perundingan yang dikenal sebagai *Tripartite Agreement* (Kesepakatan Tiga Pihak), yakni antara wakil kelompok Kristen dari *Christian Lebanese Forces*, wakil kelompok Muslim Syi'ah AMAL, dan wakil kelompok Druze dari *Progressive Socialist Party*. Perundingan yang diadakan di Damaskus ini menghasilkan kesepakatan mengenai reformasi politik dan hubungan khusus dengan Suriah sebagai usaha untuk menghentikan perang sipil. Namun, konflik elit politik yang terjadi antara Presiden Amin Jumayyil dan Samir Geagea melawan *Lebanese Forces* pimpinan Elie Hubeyka akhirnya membatalkan dan memandulkan kesepakatan ini.¹⁴

Konflik terus memanas dengan berakhirnya kekuasaan Amine Gemayyel. Namun, kegagalan parlemen memilih presiden yang baru menyebabkan krisis politik yang berujung penunjukan sepihak Jenderal Michel Aoun menjadi perdana menteri oleh Jumayyil. Kepemimpinan Aoun hanya diakui oleh kelompok Kristen, sedangkan kelompok Muslim mengakui Salim Al-Hoss sebagai perdana menteri yang sah. Kekuasaan eksekutif terbagi antara kekuasaan militer Aoun dan kekuasaan sipil Al-Hoss. Pendukung dari kedua perdana menteri ini terus berkonflik dan saling mengklaim legalitas kekuasaan mereka.

¹³ Pada tahun ini juga pasukan Israel ditarik mundur dari daerah yang telah dikuasainya pada tahun 1976 sampai batas sabuk pengaman, yang masih berada di wilayah Lebanon yang diduduki Israel

¹⁴ Hassan Krayem, *The Lebanese Civil War and The Taif Agreement*, <http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/conflict-resolution.html>

Pada tahun 1989 Aoun mendeklarasikan perang pembebasan yang menjadikan Suriah sebagai sasaran dengan tujuan untuk membatasi peran Suriah dalam masalah dalam negeri Lebanon. Pada perkembangan selanjutnya Aoun dan Samir Geagea, yang memimpin *Lebanese Forces* setelah berhasil mengalahkan Hubeyka, yang sama-sama berasal dari kelompok Kristen Maronit, berkonflik dan terlibat dalam perang saudara yang akibatnya mengurangi kekuasaan dan dominasi mereka di Lebanon. Bersamaan dengan terjadinya konflik antara dua milisi Kristen Maronit ini, konflik bersenjata juga terjadi antara AMAL dan Hizbullah memperbutkan pengaruh masyarakat di Lebanon Selatan.¹⁵

Dalam kondisi konflik intra faksi inilah diadakan perundingan Taif antara anggota parlemen Lebanon yang masih hidup dan menghasilkan kesepakatan Taif (resminya disebut Dokumen Perjanjian Nasional). Masyarakat Lebanon yang menginginkan perdamaian mendukung kesepakatan ini, sementara Hizbullah dan Aoun menolak hasil kesepakatan ini. Alasan Hizbullah menolak adalah karena kesepakatan ini tidak mendorong persatuan nasional dan semakin memperkuat budaya politik konfessionalisme yang selama ini berlaku dan menghasilkan ketidakadilan.¹⁶

Isi perjanjian ini terdiri dari dua poin besar, yaitu struktur politik dan kedaulatan negara Lebanon. Kedaulatan negara Lebanon tergantung dari identitas dan kesatuan nasionalnya, sekaligus manajemen internalnya, baik melalui reformasi politik, administrasi birokrasi, maupun reformasi yang lain. Masyarakat Lebanon sangat menginginkan perdamaian segera terwujud, namun berbagai faksi yang ada di Lebanon pun tidak dapat memisahkan diri dari situasi regional negaranya. Maka diperlukan kesepakatan yang dapat mempertahankan eksistensi Lebanon sekaligus mencari formula politik baru yang tepat untuk dapat menghentikan perang. Formula politik yang dirumuskan haruslah dapat memberikan stabilitas minimal yang dibutuhkan pemerintah Lebanon untuk memperbaiki kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam negerinya pasca perang sipil yang sudah berlangsung selama lima belas tahun.¹⁷

¹⁵ *Loc. cit.*

¹⁶ *Loc. cit.*

¹⁷ *Loc. cit.*

Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian dan penyebab konflik dirumuskan dalam kesepakatan ini. Isu pertama adalah mengenai identitas Lebanon sebagai negara yang independen, berdaulat, merdeka, dan tanah air bagi penduduknya. Isu kedua adalah mengenai pentingnya kesatuan Lebanon. Isu ketiga adalah mengenai sistem politik demokrasi parlementer yang berlaku dengan prinsip pemisahan, keselarasan, dan kerjasama antara berbagai institusi pemerintahan. Isu keempat adalah mengenai pemberlakuan sistem ekonomi liberal yang berlandaskan inisiatif pelaku pasar dan hak-hak individu. Namun, pemerintah tetap harus bertanggungjawab dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang seimbang dan merata di seluruh wilayah Lebanon yang menjamin keadilan sosial. Namun, perjanjian ini juga memberi ruang fleksibilitas solusi atas dua masalah, yakni masalah kedaulatan Lebanon atas Israel dan Suriah serta mengenai reformasi politik dan implementasinya.¹⁸

Kedaulatan Lebanon dari Israel tergantung dengan kepatuhan Israel untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB no. 425 yang memerintahkan Israel untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari seluruh wilayah Lebanon dengan tanpa syarat. Sementara kedaulatan Lebanon atas Suriah tergantung dari pengimplementasian kesepakatan Taif yang menyatakan penundaan penarikan mundur pasukan Suriah, yang ditugaskan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian Lebanon, dari Lebanon sampai situasi dalam negeri Lebanon stabil.¹⁹

Sementara dalam isu kedua, di dalam kesepakatan ini terdapat 31 poin amandemen konstitusi yang diratifikasi oleh parlemen Lebanon pada tanggal 21 Agustus 1990 dan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Elias Hrawi pada tanggal 21 September 1990. Amandemen konstitusi ini tidak serta merta menghilangkan sistem konfessionalisme, namun menekankan pada pentingnya kompromi dan kerjasama antar berbagai faksi yang ada dalam masyarakat dengan menawarkan formula pembagian kekuasaan yang lebih adil. Meskipun menyatakan bahwa penghapusan sistem politik konfessionalisme merupakan tujuan nasional yang akan dilakukan secara bertahap, namun kesepakatan ini tidak mencantumkan batas waktu maupun jadwal untuk mewujudkan tujuan ini.²⁰

¹⁸ *Loc. cit.*

¹⁹ *Loc. cit.*

²⁰ *Loc. cit.*

Formula baru pembagian kekuasaan yang lebih adil adalah dengan mengurangi kekuasaan prerogatif presiden dengan memberikan kekuasaan ini pada kabinet. Presiden yang berasal dari kelompok Kristen Maronit berperan sebagai kepala negara dan simbol persatuan, sedangkan perdana menteri, yang berasal dari kelompok Muslim Sunni, berperan sebagai kepala pemerintahan sehingga ia memimpin kabinet. Sementara ketua Parlemen, yang berasal dari kelompok Muslim Syi'ah, semakin kuat posisinya dengan bertambahnya masa jabatan menjadi empat tahun. Sebelum perjanjian ini jumlah anggota parlemen adalah 99 orang, dengan perbandingan antara wakil Kristen dan Muslim sebesar 6:5 sehingga kelompok Kristen memiliki jatah 54 kursi sementara kelompok Muslim hanya memiliki jatah 45 kursi. Namun dalam perjanjian Taif, jumlah anggota parlemen bertambah menjadi 108 orang dengan ratio perbandingan 1:1, sehingga masing-masing kelompok Kristen dan Muslim mendapat jatah 54 kursi. Jumlah ini akhirnya ditambah lagi hingga menjadi 128 orang melalui undang-undang pemilihan umum 1992 dengan ratio 1:1, sehingga kelompok Kristen dan Muslim sama-sama mendapat jatah 64 kursi dalam parlemen.²¹

Namun, pada implementasinya, isi perjanjian ini tidak dijalankan dengan sempurna. Formula pembagian kekuasaan yang lebih berimbang antara tiga kekuasaan menghasilkan tiga pimpinan dalam negeri Lebanon, yakni pemimpin negara, pemimpin pemerintahan dan kabinet, serta pemimpin parlemen. Masing-masing dari ketiga pihak ini berusaha untuk memperbesar kekuasaannya dan situasi ini memunculkan kembali konflik dan perpecahan antar faksi Lebanon. Alih-alih mampu menghilangkan budaya konfessionalisme dalam masyarakat, pengimplementasian perjanjian ini justru semakin memperuncing perbedaan masing-masing faksi. Hal ini dikarenakan tidak ada kerangka dan tahapan yang jelas dalam perjanjian ini mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghilangkan budaya konfessionalisme menuju kesatuan Lebanon yang utuh sebagai sebuah negara yang berdaulat.

²¹ Alagha, *op. cit.*, hal. 42

5.1.3. Pertimbangan Hizbullah untuk Ikut Serta dalam Pemilihan Umum 1992

1. Kesempatan Politik untuk Masuk ke dalam Sistem Politik Lebanon

Dengan berakhirnya perjanjian Taif, maka Lebanon memasuki babak baru untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi, dan sosialnya pasca perang saudara. Salah satu isi perjanjian ini adalah bahwa milisi-milisi yang ada selama perang saudara dilucuti senjatanya dan diberi kesempatan untuk kembali menjadi partai politik seperti sebelum perang saudara terjadi. Meskipun Hizbullah tidak dimasukkan dalam kategori milisi yang harus dilucuti senjatanya, namun Hizbullah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat membentuk partai politik. Kesempatan inilah yang ditangkap oleh pimpinan partai dan menjadi bahan diskusi panjang sebelum dikeluarkan deklarasi mengenai keikutsertaan Hizbullah sebagai partai politik dalam pemilihan parlemen tahun 1992 beserta program politiknya.

Sistem politik Lebanon yang sektarian membuat Hizbullah yang memang memiliki basis massa Syi'ah dapat memanfaatkan penambahan jumlah perwakilan parlemen untuk kelompok Muslim Syi'ah sesuai dengan isi perjanjian sebelum perjanjian Taif anggota parlemen berjumlah 99 orang dengan ratio pembagian kursi untuk kelompok Muslim dan Kristen 5:6 dan setelah perjanjian Taif jumlah anggota parlemen menjadi 108 orang dengan ratio perbandingan Kristen dan Muslim 1:1, sehingga masing-masing kelompok mendapat jatah 54 kursi. Namun, pada saat pemilihan parlemen 1992, pemerintah mengambil kebijakan untuk menambah lagi jumlah anggota parlemen hingga mencapai 128 orang dengan ratio perbandingan 1:1, sehingga masing-masing kelompok Muslim dan Kristen mendapat jatah 64 kursi. Bertambahnya jatah kursi ini membuat kesempatan berbagai faksi di Lebanon untuk masuk ke dalam parlemen menjadi semakin terbuka.

Latar belakang lain adalah karena Hizbullah membutuhkan aktivitas politik untuk dapat melayani masyarakat, khususnya masyarakat Syi'ah darimana ia berasal, dalam lingkup lebih luas dan menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka yang selama ini tidak didengarkan dan dipenuhi pemerintah. Hizbullah juga memerlukan perwakilan dalam parlemen untuk dapat mengawasi berbagai

kebijakan yang dibuat dan diputuskan oleh pemerintah agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kepentingan gerakan perlawanan.

Di samping itu, mengingat klausul dalam perjanjian Taif yang menyebutkan mengenai pelucutan senjata seluruh milisi yang ada maka Hizbullah membutuhkan pengakuan dan legitimasi hukum yang lebih kuat untuk dapat mempertahankan kepemilikannya atas berbagai persenjataan, pengiriman persenjataan kepadanya dari berbagai negara pendukungnya, khususnya dari Iran, dan penggunaan senjata tersebut sesuai tujuannya. Selain itu, Hizbullah juga membutuhkan legalisasi atas berbagai aktivitas perlawanan yang dilakukannya di hadapan publik dan dunia internasional sehingga ia dapat dilindungi negara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Lebanon dalam berbagai aktivitas perlawanannya tersebut.

2. Ketersediaan Berbagai Sumber Daya yang Dibutuhkan untuk Ikut Serta dalam Pemilihan Umum Lebanon sebagai Partai Politik

Hizbullah telah mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkannya untuk dapat masuk ke dalam sistem politik Lebanon. di antara sumber daya yang dimiliki Hizbullah yang paling utama adalah basis massa yang jelas, yaitu masyarakat Syi'ah yang mempercayai dan mendukung perjuangannya. Meskipun dukungan masyarakat Syi'ah terpecah antara Hizbullah dan AMAL, namun konsistensi, pelayanan sosial, dan kejelasan arah perjuangannya membuat Hizbullah optimis untuk ikut serta sebagai partai politik dalam pemilihan umum parlemen tahun 1992. Hizbullah juga memiliki pengikut setia yang siap berkorban dalam pencapaian tujuan-tujuannya, yaitu mereka yang telah berhasil dilatih oleh Paskad dalam kamp-kamp pelatihan dalam masa-masa awal Hizbullah berdiri.²²

Di samping itu, kemapanan organisasi yang ditopang oleh kepemimpinan yang mampu melihat dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada merupakan modal besar bagi Hizbullah. Visi dan misi partai yang jelas ditopang dengan

²² Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Surat Terbukanya tahun 1985 bahwa misi utama Hizbullah adalah membebaskan Lebanon dari pendudukan Israel. Di samping itu, Surat Terbuka ini juga berisikan beberapa sikap Hizbullah terhadap berbagai permasalahan sosial politik yang dihadapi masyarakat. Sementara Hizbullah yang selama masa-masa awal terbentuknya sebelum perjanjian Taif hidup bersama masyarakat sangat mengerti kebutuhan masyarakatnya, maka ia pun menyediakan beberapa pelayanan sosial, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun lembaga sosial ekonom lainnya untuk dapat membantu rakyat memperoleh pelayanan yang baik

adanya sumber daya yang memiliki kemampuan politik memadai, serta tim dan strategi kampanye yang bagus merupakan beberapa sumber daya penting yang harus dimiliki oleh setiap partai politik untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan dan program-programnya.

Penguasaan atas media massa baik cetak maupun elektronik juga merupakan sumber daya utama dalam wilayah politik.²³ Kemampuan propaganda dan pembentukan opini publik yang positif dan mendorong masyarakat untuk mendukung partai hanya dapat diwujudkan oleh pemberitaan yang positif, komprehensif, dan objektif mengenai partai. Namun, sebagaimana kelaziman yang ada di berbagai negara, media tidak bebas nilai dan seringkali dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu, maka kepemilikan atas media massa merupakan hal mutlak dan penting bagi keberhasilan partai dalam perang propaganda dan perang opini publik selama masa kampanye dan pemilihan umum.

Di samping itu, Hizbullah juga memiliki pendanaan yang jelas, terutama dari iuran anggota, zakat, dan khums²⁴ yang dikumpulkan dari umat Syi'ah yang mendukungnya. Sumber dana lain didapatkan Hizbullah dari bisnis yang dijalankan organisasi ini melalui para kadernya baik di dalam negeri Lebanon maupun di luar negeri. Sumber dana eksternal, persenjataan, dan perlengkapan perang juga didapatkan Hizbullah dari Iran. Iran juga membantu Hizbullah untuk merancang berbagai organisasi sosial untuk melayani masyarakatnya.

3. Analisa Konsekuensi Aktivitas Politik terhadap Eksistensi Perlawanan Hizbullah

Aktivitas perlawanan dan kerja-kerja publik dalam wilayah politik merupakan dua pekerjaan yang memiliki kebutuhan berbeda. Aktivitas perlawanan rawan disusupi mata-mata dan intelijen musuh untuk memantau kemampuan dan sumber daya gerakan dalam melakukan perlawanannya. Sementara kerja-kerja publik di wilayah politik membutuhkan kemampuan

²³ Hizbullah memiliki berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, ia memiliki televisi Al Manar yang tidak hanya dapat dinikmati penduduk Lebanon, namun memiliki pemancar di beberapa wilayah Eropa dan Asia. Ia juga memiliki radio Al Nuur dan surat kabar Al Ahd yang kemudian berubah nama menjadi Al I'tiqod. Di dalam negeri Hizbullah memiliki *Hizbullah Information Centre* yang menyediakan berbagai dokumen lengkap seputar Hizbullah

²⁴ Khums merupakan semacam infaq yang ada dalam ajaran Syi'ah yakni sejumlah seperlima dari harta yang dimiliki dan keuntungan yang didapatkan dalam usaha yang dilakukan muslim Syi'ah

retorika dan diplomasi yang baik ditopang dengan serangkaian kesabaran dan kesediaan melakukan negosiasi-negosiasi dan kompromi dengan berbagai partai politik maupun faksi-faksi yang ada dalam masyarakat. Dua kebutuhan yang berbeda ini membutuhkan manajemen organisasi yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya tanpa saling melemahkan dan meniadakan fungsinya satu sama lain.

Diantara konsekuensi yang dapat timbul berasal dari internal Hizbullah maupun dari pihak eksternal. Dari segi internal, perpecahan dapat terjadi dalam tubuh Hizbullah sebagai akibat perbedaan pandangan yang tidak dapat dikompromikan. Oleh karena itu, setiap anggota perlu memiliki pemahaman dan keyakinan yang sama yang melahirkan kesepakatan bersama untuk menyukseskan program perlawanan dan program politik Hizbullah sekaligus. Maka komunikasi yang lancar antara pimpinan dan anggota Hizbullah mutlak diperlukan. Dan menurut Qasim, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, di masa-masa awal pimpinan Hizbullah memutuskan keikutsertaannya menjadi partai politik dalam pemilu 1992 jajaran pemimpin Hizbullah telah mengadakan serangkaian diskusi dan dialog dengan anggota partai untuk menjelaskan dan mensosialisasikan mengenai keputusan tersebut.

4. Dukungan dari Ayatullah Khomeini dan Para Ulama Syiah Lebanon

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qasim menyatakan bahwa pilihan untuk ikut serta menjadi partai politik pada pemilu 1992 bukanlah pilihan yang mudah bagi Hizbullah. Serangkaian diskusi diadakan dengan beragam pertimbangan diberikan oleh banyak pihak, mulai dari pertimbangan hukum syar'i berkaitan dengan partisipasi dalam sistem politik yang sekuler, dampak partisipasi terhadap pengakuan atas sistem sekuler yang tidak disetujui Hizbullah, dampak positif dan negatif dari partisipasi, serta dampaknya terhadap tujuan dan aktivitas perlawanan.

Serangkaian diskusi yang diadakan setelah itu berupaya untuk mencari jawaban dan solusi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengenai hukum syar'i berkaitan dengan partisipasi dalam sistem yang sekuler, maka sesuai kepercayaannya dan kepatuhannya kepada *wilayatul faqih*, yang pada saat itu dipegang maka partai mengkonsultasikan persoalan ini dengan Ayatullah Ali

Khamenei yang akhirnya memberi legitimasi untuk masuk ke wilayah politik dan menjadi partai politik sekaligus strategi untuk menghadapi rezim yang berkuasa di Lebanon saat itu.²⁵

Maka bagi Hizbullah, partisipasi dalam pemilihan parlemen merupakan bentuk kesediaan berbagi peran dan tanggungjawab dalam sistem politik yang ada, sebab parlemen merupakan salah satu pilar dalam sistem tersebut. Namun, partisipasi ini bukan merupakan komitmen untuk mempertahankan sistem tersebut dan mengakui berbagai cacat dan kelemahannya. Parlemen digunakan sebagai tempat mengemukakan pandangan-pandangan Hizbullah dan mempertahankannya dengan kebebasan untuk menerima atau menolak pandangan yang berbeda.²⁶

Ada cukup ruang untuk berekspresi dan mengoperasionalkan kebijakannya, meskipun belum tentu benar-benar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa pihak-pihak yang ada di luar sistem tidak memiliki saluran yang efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik mereka. Dengan demikian, partisipasi sebagai partai politik merupakan instrumen untuk mengadakan perubahan dan memiliki jangkauan aktivitas yang lebih luas dan panjang.²⁷

5.2. Aktivitas Hizbullah sebagai Partai Politik

Berbagai prinsip Hizbullah ada dalam Surat Terbuka yang dideklarasikannya pada tahun 1985. Sejak mendeklarasikan keberadaannya di hadapan publik, Hizbullah memfokuskan diri dalam berbagai aktivitas perlawanan untuk membebaskan wilayah Lebanon yang dikuasai Israel pasca serangannya ke Lebanon tahun 1982. Hizbullah menjauhkan dirinya dari konflik sektarianisme yang saat itu berlangsung di Lebanon hingga akhirnya pada tahun 1988-1990 ia harus menghadapi konflik bersenjata dengan AMAL sebagai hasil pergesekan kepentingan dan perebutan pengaruh masyarakat Syi'ah yang menjadi basis massa dan pendukung utama kedua gerakan tersebut. Pasca perjanjian Taif Hizbullah menyatakan penolakan dan ketidaksetujuannya atas isi perjanjian tersebut. Namun, seiring berbagai perkembangan yang muncul akhirnya Hizbullah menerima dan mematuhi perjanjian tersebut dan mengambil peluang dan

²⁵ Naim Qassem, 2008, *Blueprint Hizbullah*, Jakarta: Ufuk Press, hal. 273-274

²⁶ *Ibid.*, hal. 275

²⁷ *Ibid.*, hal. 275-276

tanggungjawab lebih besar dengan menjadi partai politik dan keikutsertaannya dalam pemilihan parlemen pertama Lebanon pasca perang saudara lima belas tahun.

Program dan kepentingan utama Hizbullah sebagai partai politik adalah untuk mempertahankan dan melegitimasi kekuatan militernya dan untuk membentuk pemerintahan bersatu tanpa berdasarkan faksi-faksi yang selama ini diberlakukan dalam sistem pembagian kekuasaan politik Lebanon. dalam usaha mempertahankan kekuatan militernya, Hizbullah mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya; baik melalui para wakilnya di parlemen, kabinet, maupun pemerintahan kota; propaganda dan pembentukan opini publik yang pro dan mendukung aktivitas perlawanannya melalui media massa yang dimilikinya; maupun melalui serangkaian pertemuan dan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan faksi-faksi yang ada di Lebanon, dan dalam berbagai forum regional dan internasional. Sementara dalam usaha menghapuskan sistem politik konfessionalisme, Hizbullah telah melakukan usaha-usaha damai seperti dialog dan diskusi dengan banyak tokoh masyarakat dan faksi-faksi di Lebanon, usul yang diajukan pada pemerintah, maupun unjuk rasa damai.

Menurut Hizbullah, kedua program utamanya tersebut merupakan hal paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat serta ditujukan untuk perbaikan pemerintahan. Selama ini masyarakat menderita dan selalu berada dalam keadaan tidak aman akibat penjajahan Israel atas sebagian negeri Lebanon, padahal penjajahan atas sebagian negeri merupakan simbol dari keterjajahan seluruh negeri tersebut. Oleh karena itu, Hizbullah menetapkan misi utamanya tersebut tidak dapat dicapai dengan mengandalkan kepentingan pihak-pihak di luar negeri Lebanon. Bagi Hizbullah kemerdekaan Lebanon hanya dapat dicapai dengan perjuangan dan perlawanan tanpa henti pada Israel hingga seluruh wilayah Lebanon terbebaskan.

Sementara menurut Hizbullah kesatuan nasional mutlak diperlukan untuk dapat mengimplementasi program-program pembangunan, ekonomi, dan sosial yang adil dan merata. Selama ini sebagian besar rakyat, khususnya masyarakat Syi'ah, menderita akibat pengabaian pemerintah atas kebutuhan mereka sementara sebagian kecil rakyat merasakan kekayaan dan kesejahteraan hidup.

Ketidakadilan ini merupakan hasil dari budaya politik konfessionalisme berbasis faksi-faksi yang memecahbelah kesatuan Lebanon dan menyebabkan ketidakutuhan pemerintah menjalankan berbagai program pembangunannya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Budaya konfessionalisme merupakan akar masalah dari ketidakadilan dan ketidakmerataan program pembangunan yang dijalankan pemerintah selama ini sebagai akibat dari loyalitas wakil-wakil rakyat di pemerintahan yang lebih kepada faksi yang diwakilinya daripada loyalitas nasionalnya kepada Lebanon sebagai sebuah negara yang utuh.

Kedua tujuan utama aktivitas politiknya ini merupakan basis bagi terwujudnya tujuan-tujuan dan berbagai program di bidang politik, sosial, dan ekonominya yang telah dideklarasikan dalam setiap kampanye menjelang pemilu yang diikutinya. Hingga saat ini Hizbullah telah mengikuti lima pemilihan parlemen, yaitu pada tahun 1992, 1996, 2000, 2005, dan 2009; dan dua kali pemilihan pemerintahan kota yaitu pada tahun 1998 dan 2004. Dalam kurun waktu 1992 hingga tahun 2005 Hizbullah menjadi oposisi atas pemerintahan yang berkuasa dan tidak menempatkan satupun anggotanya dalam kabinet. Namun, pasca penarikan mundur seluruh pasukan Suriah dari Lebanon tahun 2005, Hizbullah bersedia menempatkan wakilnya dalam jajaran kabinet dan menjadi partai politik pemerintah. Kekecewaannya atas pemerintahan yang berkuasa yang dianggapnya tidak berusaha membangun kesatuan nasional Lebanon membuatnya menjadi partai oposisi kembali pada pemilihan presiden berikutnya. Meskipun menjadi oposisi, Hizbullah tetap menempatkan wakilnya dalam kabinet.

Dalam menjalankan berbagai kampanyenya Hizbullah memiliki tim kampanye yang banyak dan tersebar luas di masyarakat. Lewat propaganda media dan berbagai pelayanan sosial yang dilakukannya Hizbullah menyebarluaskan program dan paham politiknya ke tengah masyarakat. Anggota Hizbullah sendiri ada yang dapat dengan mudah diidentifikasi di tengah masyarakat, khususnya bagi anggota Hizbullah yang bergerak dalam wilayah publik seperti pelayanan sosial dan media, namun sebagaimana komitmen awalnya terhadap aktivitas perlawanan, maka para pejuang perlawanan bukanlah orang yang dapat diidentifikasi dengan mudah. Oleh karena itu, jumlah pejuang perlawanan dan persenjataan yang dimiliki Hizbullah tidak dapat dipastikan dan dirinci dengan

pasti, melainkan hanya spekulasi-spekulasi saja dengan mengumpulkan berbagai informasi yang didapatkan seputar aktivitas perlawanan yang telah dilakukannya. Kerahasiaan, bahkan setelah Hizbullah melancarkan program *infithah* (keterbukaan) untuk dapat mengakomodir kepentingan nasional Lebanon dalam berbagai program dan aktivitas politiknya, masih selalu menjadi prinsip paling penting dan dipegang teguh oleh para pemimpin dan pejuang perlawanan.

Qassem memaparkan pandangan Hizbullah mengenai aktivitasnya dalam politik terutama dalam mimbar parlemen, yaitu²⁸ :

1. Parlemen merupakan mimbar politik yang dapat digunakan untuk menyuarakan keprihatinan dan perlawanan, sehingga dapat menarik perhatian publik terhadap aksi-aksi perlawanan
2. Keprihatinan terhadap permasalahan ekonomi dan sosial dapat diwujudkan dengan berusaha mempengaruhi pengalokasian anggaran untuk sejumlah kementerian yang relevan dengan hal tersebut, baik menyangkut masalah sosial, kesehatan, dan pembangunan
3. Mampu menyesuaikan diri dengan berbagai legislasi yang dikeluarkan menjadi undang-undang oleh parlemen sebab partai telah mengetahuinya lebih dulu sehingga proses adaptasi dapat dilakukan lebih awal
4. Kerja-kerja parlemen memungkinkan partai menjalin relasi politik yang luas. Relasi ini dapat melahirkan saling pengertian, mengklarifikasi berbagai persepsi keliru, serta memungkinkan negosiasi dan kompromi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat
5. Pengakuan atas kerja-kerja para wakilnya di parlemen dapat mendorong pemerintah melegitimasi kehadiran perlawanan di Lebanon dan mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perlawanan
6. Kerja-kerja di parlemen memungkinkan para wakil Hizbullah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam di dalam sistem politik yang ada

²⁸ Qassem, *op. cit.*, hal. 276-277

5.2.1. Keikutsertaan Hizbullah dalam Pemilihan Umum

5.2.1.1. Hizbullah dalam Pemilihan Parlemen 1992-2005

Mengawali keikutsertaannya dalam pemilihan parlemen yang direncanakan akan diadakan pemerintah Lebanon tahun 1992, pada tanggal 3 Januari 1991 Hizbullah, dibacakan oleh Sayyid Abbas Al Musawi, mengumumkan deklarasi prinsip politiknya yang sekaligus merupakan deklarasi program *infithah* (keterbukaan) untuk ikut serta dalam sistem politik Lebanon. deklarasi ini ditujukan Hizbullah kepada seluruh masyarakat Lebanon, baik Sunni, Syi'ah, Kristen, maupun kelompok beragama lain. Hizbullah meminta pemerintah Lebanon menjamin kebebasan rakyat dalam bidang politik, intelektual, ideologi, dan media.

Di samping itu, dalam deklarasi ini, Hizbullah juga meminta pemerintah membedakan antara kelompok-kelompok milisi yang ada dan menjadi objek dari kesepakatan Taif untuk dilucuti senjatanya dengan Gerakan Perlawanan Islam Hizbullah yang merupakan hak kemanusiaan rakyat Lebanon sehingga seharusnya didukung, dilegalkan, dan mendapatkan legitimasi dari pemerintah.²⁹ Hizbullah juga menyampaikan beberapa prinsip mengenai keinginannya untuk masuk ke dalam sistem politik Lebanon melalui deklarasi politik ini, yaitu³⁰ :

1. Keberlanjutan misi perlawanan melawan penjajahan Israel terhadap Lebanon
2. Penghentian semua perselisihan internal yang selama ini berlangsung dan membuka diskusi seluas-luasnya dalam berbagai masalah sosial politik dengan kawan sekaligus lawan politik
3. Memulai lebanonisasi Hizbullah dengan membuka hubungan baik dan dialog dengan berbagai faksi dan partai politik Lebanon, khususnya dengan kelompok Kristen. Hal ini merupakan wujud program *Infithah* Hizbullah dengan mengadakan dialog dengan berbagai faksi dan partai politik yang ada untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi Lebanon, mendorong persatuan nasional, dan membuat sebuah negara Lebanon yang bersatu dan solid atas dasar saling menghormati

²⁹ Alagha, *op. cit.*, hal. 150

³⁰ *Ibid.*, hal. 150-151

4. Memprioritaskan usaha-usaha yang konstruktif untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang menyentuh langsung sisi-sisi kehidupan rakyat Lebanon

Keputusan untuk ikut serta pertama kali dalam pemilihan parlemen dibahas dan dibicarakan oleh 12 orang perwakilan dari pejabat-pejabat terpenting Hizbullah yang dipilih Dewan Syuronya. Pada awalnya mereka sulit untuk memutuskan mengenai keikutsertaannya dalam pemilihan umum ini. Mereka mengadakan serangkaian diskusi dan konsultasi dengan Ayatullah Ali Khamenei sebagai otoritas ulama yang mereka akui sebagai rujukan dalam masalah-masalah hukum.³¹

Di samping membuka berbagai peluang, Hizbullah juga mempertimbangkan berbagai kesulitan yang akan dihadapi setelah menjadi partai politik. Beberapa kesulitan tersebut yaitu : sulitnya untuk mendapatkan kursi yang signifikan untuk dapat membuat perubahan dari dalam sistem karena pembagian kursi parlemen dilakukan berdasarkan partai politik yang ada. Kelompok Muslim Syi'ah harus membagi jatah 64 kursi bagi kelompok Muslim Lebanon untuk kelompok Sunni dan Syi'ah, serta Druze. Kesulitan lain yang mungkin dihadapi adalah pembuatan dan pelaksanaan undang-undang yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, meskipun perwakilan Hizbullah tetap menolaknya. Dan kekhawatiran lain adalah dengan beratnya tanggungjawab Hizbullah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan konstituennya dan menyediakan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan mereka, maka perhatian pada aktivitas perlawanan dan pembebasan sebagian wilayah Lebanon dari penjajahan Israel terabaikan dan tidak lagi menjadi prioritas.

Namun, Hizbullah berusaha mengeliminir berbagai kekhawatiran dan kesulitan yang ada. Ia berkeyakinan bahwa aktivitas politik dan perlawanan sekaligus bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan saling mendukung satu sama lain. Sepuluh dari dua belas orang anggota majelis Syuro melihat keikutsertaan dalam pemilu bukan hanya keinginan namun lebih merupakan kebutuhan. Diantara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk menyampaikan kebutuhan rakyat dan berbagai kepentingan mereka kepada

³¹ Qassem, *op. cit.*, hal. 273

pemerintah dan kebutuhan untuk memiliki pengalaman politik dan pengelolaan pemerintahan. Keterlibatan dalam parlemen merupakan pelengkap bagi beragam peran Hizbullah yang lain, sebab menurutnya memilih melaksanakan satu peran saja dan meninggalkan peran lain merupakan suatu kekeliruan. Padahal Islam merupakan petunjuk dalam semua aspek kehidupan. Sehingga menentang partisipasi dalam suatu bidang kehidupan, padahal mampu, merupakan salah satu bentuk pengisolasian praktek Islam dari aspek-aspek kehidupan yang lain sehingga bidang-bidang lain berkemungkinan berada di tangan pihak-pihak yang tidak sejalan bahkan menentang ajaran Islam.

Setelah melalui serangkaian pembahasan dan konsultasi, akhirnya pada tanggal 3 Juli 1992 Sekjen Hassan Nasrallah mengumumkan keikutsertaan Hizbullah dalam pemilihan umum parlemen sebagai partai politik. Pada waktu yang sama Hizbullah juga mendeklarasikan program politiknya dalam pemilihan umum ini. Kampanye Hizbullah diprioritaskan untuk mensosialisasikan berbagai program politik, sosial, dan ekonominya pada masyarakat dan bukan pada para kandidat yang dicalonkannya dalam pemilu.³² Hal ini berbeda dengan kelaziman yang dilakukan partai-partai politik Lebanon selama ini yang lebih menekankan fokus kampanye pada kandidat-kandidat yang dicalonkannya. Pokok-pokok program tersebut terdiri dari³³:

1. Pembebasan Lebanon dari penjajahan kaum Zionis
2. Penghapusan sistem politik konfessionalisme
3. Melakukan amandemen undang-undang pemilu agar lebih dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat
4. Menjamin kebebasan berpolitik dan kebebasan media
5. Membuat undang-undang kewarganegaraan berbasis meritokrasi
6. Mengembalikan para pengungsi Lebanon ke tempat tinggal mereka
7. Mengadakan reformasi di berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, administrasi, dan pembangunan

³² *Ibid.*, hal. 279-280

³³ *Alagha, op. cit.*, hal. 43

Tabel 5.1. Distribusi Kursi Parlemen Tahun 1992 dan 1996 untuk Muslim dan Kristen

Kristen	Maronite	34
	Greek Orthodox	14
	Greek Catholics	8
	Armenian Orthodox	5
	Armenian Catholics	1
	Anglicans	1
	Others	1
Total		64
Muslim	Sunni	27
	Syi'ah	27
	Druze	6
	Alawite	4
Total		64

Sumber : Abdo Baklani, Guilain Denoeux, and Robert Springborg. 1999. *Legislative Politics in The Arab World : The Resurgence of Democratic Institutions*. Colorado : Lynne Rienner Publisher Inc. hal. 97

Pemilu Lebanon pertama pasca perjanjian Taif ini diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 1992. Pada pemilu ini, Hizbullah berhasil memperoleh 12 kursi di parlemen, sebanyak 8 kursi diisi oleh anggota Hizbullah sendiri, dan empat kursi yang lain diisi oleh simpatisan Hizbullah, 2 kursi untuk Muslim Sunni dan 2 kursi lain untuk Kristen (Maronit dan Katolik Yunani).³⁴ Keputusan semacam ini merupakan bentuk koalisi yang dilakukan Hizbullah untuk memperluas jangkauan aktivitas politik dan pelayanan publiknya.

Hizbullah mengadakan eksperimen dengan melibatkan pihak-pihak luar Hizbullah dan memberikan kepercayaan pada mereka untuk mewakilinya di parlemen selama mereka sepakat dan sejalan dengan tujuan serta peraturan partai. Semangat keterbukaan ini dianggap penting untuk ditampilkan ke hadapan publik sehingga diharapkan dapat membangun koalisi yang solid di masa mendatang dengan partai-partai lain. Di samping itu, keputusan ini merupakan basis untuk dapat membentuk sebuah pemerintahan bersatu yang tidak lagi diatur berdasarkan faksi-faksi yang ada dalam masyarakat.

³⁴ *Loc. cit.*

Tabel 5.2. Tabel Perolehan Kursi Parlemen Berdasarkan Partai Peserta Pemilihan Parlemen 1992

Faksi Peserta Pemilihan Parlemen	Jumlah Kursi
Northern Bloc	21
National Struggle Bloc	19
Loyalty to Resistance Bloc /Hizbullah	12
Walid Jumlat Bloc	12
Freedom and Change Bloc	10
Armenian Bloc	6
Syrian People's Party	6
Bekaa-South Bloc	4
Second Bloc of Zahle	4
Zahle Bloc	3
Jbeil Bloc	3
Fares Boeiz Bloc	3
Islamic Bloc	3
Aley Bloc	2
Michel Murr Bloc	2
National Pact	2
Party of Future	2
Independents	14
Total	128

Sumber : http://195.65.105.150/parline-e/reports/arc/2179_92.htm

Setelah memiliki pengalaman pertama ikut serta dalam pemilihan 1992, maka keikutsertaan dalam pemilihan-pemilihan parlemen selanjutnya sudah dapat diterima dan dijalankan dengan lebih baik oleh seluruh anggota Hizbullah. Hizbullah telah belajar dan terbukti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan strategi gerakannya dari yang awalnya hanya fokus pada aktivitas perlawanan terhadap Israel saja menjadi fokus pada aktivitas perlawanan sekaligus politik melalui kerja-kerja parlemen dan pelayanan publik. Dalam situasi pasca perlawanan atas agresi Israel tahun 1996 yang berlangsung selama 16 hari, Hizbullah mengeluarkan programnya untuk pemilihan umum parlemen pada tahun itu juga. Isi program tersebut antara lain³⁵:

1. Melawan agresi Israel
2. Mencapai kemakmuran negara yang adil dan merata

³⁵ *Ibid.*, hal. 46

3. Menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyatnya yang tertindas secara ekonomi dengan melakukan program pembangunan yang merata
4. Reformasi pendidikan dan politik
5. Reformasi di bidang sosial dan kesehatan
6. Melindungi kebebasan publik
7. Perbaiki kebijakan luar negeri Lebanon

Pada pemilihan ini Hizbullah berhasil memperoleh 9 kursi, tujuh kursi diisi oleh kadernya, dan dua kursi lain diisi oleh kandidat non partai dari Sunni dan Kristen Maronit. Diantara semua wakil Hizbullah di parlemen hasil pemilu kali ini hanya satu orang yang berasal dari kalangan ulama, yaitu Syaikh Ibrahim Al Amin yang juga merupakan ketua fraksi Hizbullah, sementara selebihnya adalah masyarakat dari kalangan non ulama.

Tabel 5.3. Perolehan Kursi Parlemen Lebanon pada Pemilihan Parlemen Tahun 1996

Partai Peserta Pemilihan Parlemen	Jumlah Kursi
Freedom and Development Party	21
Party of National Union	16
Resistance Front	12
Party of The Loyalty to The Resistance (Hizbullah)	9
Party of Beirut Decision	8
Party of Development and Change	8
Party of Armenian Deputies	7
Party of North Metn	5
Party of Kesrouan Deputies	5
Syrian People's Party	5
Independents	23
Others	9
Total	128

Sumber : http://195.65.105.150/parline-e/reports/arc/2179_96.htm

Sementara dalam pemilu parlemen tahun 2000, Hizbullah mengeluarkan program kampanyenya, yaitu³⁶ :

1. Perlawanan dan pembebasan, yakni untuk wilayah Perkebunan Sheeba dan sekitarnya yang masih diduduki Israel
2. Membangun kembali hubungan luar negeri Lebanon dengan negara-negara lain dengan perbaikan kebijakan luar negeri
3. Mengadakan reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dalam negeri
4. Membangun kembali berbagai institusi politik dan lembaga pemerintahan
5. Memperhatikan pendidikan dan kebudayaan
6. Memperhatikan pelayanan kesehatan dan sosial pada masyarakat
7. Memperhatikan permasalahan lingkungan hidup

Dalam pemilihan tahun 2000 ini, Hizbullah kembali berhasil memperoleh 12 kursi parlemen, sembilan kursi diisi oleh kader Hizbullah, dua kursi untuk Sunni dan satu kursi untuk Kristen Maronit. Dalam pemilihan kali ini semua wakil Hizbullah di parlemen adalah bukan dari kalangan ulama.

Lima tahun kemudian Hizbullah kembali ikut serta dalam pemilihan parlemen. Dalam pemilu kali ini Hizbullah berusaha mengkritisi dan mengajukan usulan perbaikan peraturan mengenai pemilihan umum yang menjamin perwakilan dari 18 faksi di Lebanon untuk mendapatkan perwakilan dengan jumlah proporsional dalam parlemen. Namun, pemerintah Lebanon mengumumkan bahwa pemilu akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemilu tahun 2000. Dalam pemilu parlemen tahun 2005 ini, Naim Qassem mengumumkan program politik Hizbullah, yaitu³⁷ :

1. Mempertahankan gerakan perlawanannya
2. Bekerjasama dengan misi PBB untuk melakukan investigasi atas pembunuhan Hariri
3. Mempertahankan hubungan baik Lebanon dengan Suriah
4. Menolak segala bentuk intervensi asing atas permasalahan dalam negeri Lebanon
5. Bekerja keras untuk memperoleh dukungan publik yang lebih luas
6. Menegaskan pentingnya dialog nasional

³⁶ *Ibid.*, hal. 51-52

³⁷ *Ibid.*, hal. 60

7. Menekankan pentingnya program yang komprehensif dalam bidang sosial dan ekonomi

Dalam pemilu kali ini koalisi pemilu yang terjadi terbagi menjadi dua koalisi. Koalisi 14 Maret yang dipimpin Saad Hariri, anak mantan presiden Rafiq Hariri yang baru saja terbunuh, dan koalisi 8 Maret yang Hizbullah dan AMAL tergabung di dalamnya. Koalisi 14 Maret adalah kelompok penentang keberadaan Suriah di dalam negeri Lebanon, sementara koalisi 8 Maret adalah kelompok pro Suriah.³⁸ Hizbullah berhasil mendapatkan 13 kursi sementara AMAL mendapatkan 14 kursi dan merupakan koalisi 8 Maret yang pro-Suriah.

Tabel 5.4. Perolehan Kursi Parlemen pada Pemilu Parlemen Tahun 2005

Parliamentary Bloc	Number of seats
Hariri's Bloc	36
Qornet Shehwane	7
Hizbullah's Bloc	13
Berri's Bloc	14
Jumlatt's Bloc	16
Aoun's Bloc	14
Syrian Social Nationalist Party	2
Murr's Bloc	2
Baath's Bloc	1
Kataëb	1
Skaff's Bloc	5
Lebanese Forces	6
Tripoli Coalition	3
Renewal Democratic Movement	1
Democratic Left Movement	1
Independent	6
Total	128

Sumber : European Union Election Observation Mission. *Final Report : 2005 Parliamentary Election in Lebanon*. http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/lebanon/final_report_en.pdf hal. 61-64

Setelah menyelesaikan perjuangannya dalam pemilihan parlemen tahun 2005, pemerintah Lebanon kembali menghadapi perkembangan politik baru. Peristiwa pembunuhan Perdana Menteri Rafiq Al Hariri membuat Hizbullah

³⁸ *Ibid.*, hal. 61

dicurigai Barat dan sebagai faksi Lebanon. Rafiq Hariri meninggal dunia dalam pembunuhan tersebut dan posisinya digantikan oleh Saad Hariri, anaknya. Hizbullah dicurigai sebagai tokoh di balik pembunuhan tersebut.³⁹

Di samping itu, pada tanggal 14 Februari tahun 2005 pula rakyat Lebanon turun ke jalan dan berdemonstrasi menuntut Suriah untuk segera menarik mundur seluruh pasukannya dari Lebanon. Gelombang demonstrasi anti Suriah ini dikenal dengan nama Revolusi Cedar. Sebelumnya, pada tanggal 8 Maret 2005, Hizbullah dan berbagai faksi yang pro Suriah telah mengadakan demonstrasi yang menuntut Suriah untuk tidak meninggalkan Lebanon. Peristiwa ini membuat pemerintahan terbagi ke dalam dua blok. Satu blok anti Suriah, yang dikenal dengan koalisi 14 Maret yang diwakili oleh pemerintah yang berkuasa, dan blok lain, yang dikenal dengan koalisi 8 Maret diwakili oleh Hizbullah, dan sekutu-sekutunya.⁴⁰

Suriah akhirnya memenuhi tuntutan pemerintah dan rakyat Lebanon tersebut. Ia menarik seluruh pasukannya pada bulan Maret 2005. Penarikan mundur Suriah ini membuat Hizbullah merubah strategi politiknya. Selama Suriah ada di Lebanon, Hizbullah memutuskan untuk tidak menempatkan kadernya dalam kabinet. Namun, setelah penarikan mundur tersebut, Hizbullah meminta pemerintah yang berkuasa untuk menempatkan kadernya dalam kabinet. Inilah pertama kalinya Hizbullah ikut serta dalam lembaga legislatif Lebanon.⁴¹

5.2.1.2. Hizbullah dalam Pemilihan Pemerintahan Kota

Pemilihan pemerintahan daerah Lebanon pada tahun 1998 merupakan pemilihan pemerintahan daerah pertama yang dilaksanakan pasca perjanjian Taif disepakati. Pemilihan pemerintahan daerah tahun 1998 ini juga yang pertama diikuti oleh Hizbullah. Hizbullah telah berhasil mendapatkan sembilan kursi dari 128 kursi parlemen pada pemilihan tahun 1992 dan duabelas kursi pada pemilihan parlemen dari 128 kursi pada tahun 1996. Dalam pemilihan pemerintahan kota budaya klan dan sektarianisme berbasis keluarga yang berpengaruh di desa-desa lebih mendominasi persaingan antar kandidat dibandingkan dengan persaingan antar kandidat berdasarkan basis kepartaiannya. Nuansa persaingan antar

³⁹ Mordechai Kedar, 2009, *Elections in Lebanon: Hizballah Take Over?* <http://www.biu.ac.il/SOC/besa/perspectives76.html>, hal. 2

⁴⁰ Alagha, *op. cit.* hal. 293

⁴¹ *Ibid.*, hal. 173

Hizbullah dan AMAL lebih kental dalam pemilihan ini untuk memperebutkan pengaruh di daerah-daerah mayoritas Syi'ah berada. Kemenangan kandidat dalam pemilihan ini selain dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga atau klan yang berpengaruh di tempat ia mencalonkan diri juga tergantung dari pelayanan sosial yang mampu diberikannya.

Oleh karena itu, Hizbullah yang sejak awal terbentuknya memang berkomitmen untuk memberikan pelayanan sosial sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban agama berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan sosial mereka kepada masyarakat di masa depan. Dalam siaran televisi maupun wawancara surat kabar Hassan Nasrallah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kandidat-kandidat Hizbullah merupakan figur yang tepat untuk menduduki kursi pemerintahan kota karena mereka memiliki komitmen dan kemampuan untuk meningkatkan kemajuan kota dan pemerintahan jika mereka terpilih.⁴²

Dalam pemilihan pemerintah kota ini pula Hizbullah harus membuktikan kemampuan manajerialnya untuk menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan ideologi dan persaingan pengaruh antar klan serta keberadaan tokoh-tokoh masyarakat (sisa-sisa sistem zu'ama yang masih ada). Hizbullah menjawab tantangan ini dengan melakukan manajemen kampanye dan menyediakan pelayanan sosial yang baik dan merata pada masyarakat, tidak terbatas pada masyarakat Syi'ah saja, dan komitmen keislaman yang memadai dan menjadi jaminan moral bagi kandidat yang didukungnya.⁴³

Hizbullah mempersiapkan program politiknya untuk menghadapi pemilu pemerintahan kota tahun 2004 sejak dua tahun sebelumnya. Langkah ini diambil menyusul berbagai perkembangan terbaru setelah Israel menarik mundur seluruh pasukannya dari sebagian besar wilayah Lebanon yang didudukinya sejak 1982, kecuali daerah Perkebunan Sheeba dan sekitarnya. Dalam program kampanyenya kali ini Hizbullah menggunakan dua slogan, yaitu bahwa Hizbullah bertanggungjawab untuk menghentikan segala bentuk penindasan terhadap masyarakat dan membela harga diri mereka dan slogan kedua adalah bahwa usaha menghentikan segala bentuk penindasan dan diskriminasi tersebut dilakukan

⁴² Judith Palmer Harik, 2004, *Hizbullah : The Changing Face of Terrorism*, New York: Palgrave MacMillan, hal. 95-98

⁴³ *Ibid.*, hal. 109

dengan berusaha membuat berbagai program yang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang tertindas.⁴⁴

Pada tahun 2004 Hizbullah kembali mengikuti pemilihan pemerintahan kota. Muhammad Saïd Al Khansa adalah tokoh yang didukung Hizbullah dalam pemilihan pemerintahan kota dan menang di wilayah Ghubayri. Pada pemilihan pemerintah kota tahun 2004 Hizbullah berhasil menang di wilayah Beqaa. Hal ini merupakan hasil keberhasilannya dalam kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Jerman untuk membebaskan tahanan yang masih ada di dalam penjara Israel. Sebanyak 400 tahanan Palestina dan 23 tahanan Lebanon berhasil dibebaskan dalam kesepakatan ini.⁴⁵

5.2.2. Aktivitas Politik Hizbullah Tahun 2006-2009

Selama tahun 2006 selain menghadapi serangan besar-besaran Israel selama 33 hari sejak 13 Juli 2006, Hizbullah kemudian juga menghadapi berbagai tekanan internasional untuk melucuti senjatanya. Berbagai tekanan tersebut di jawab Hizbullah dengan melakukan serangkaian siaran televisi untuk membela aktivitas perlawanan yang mereka lakukan selama ini. Hassan Nasrallah dalam berbagai siaran tersebut juga menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Lebanon atas penderitaan mereka selama agresi tersebut dan berjanji untuk membantu merekonstruksi kembali berbagai kerusakan yang terjadi dan mengembalikan jenazah rakyat Lebanon yang menjadi korban agresi dan ditahan oleh Israel.

Pada bulan Desember 2006, Hizbullah memobilisasi massa pendukungnya untuk berdemonstrasi di Beirut hingga pemerintah mendengarkan dan memenuhi tuntutan mereka. Demonstrasi ini menuntut pemerintah yang berkuasa melepaskan jabatannya karena terbukti tidak mampu merealisasikan janji-janji dan melaksanakan berbagai program dan berbagai pencapaian yang signifikan selama masa pemerintahannya.⁴⁶ Puncak dari ketegangan antara Hizbullah dengan pemerintah adalah pada tahun 2008 dimana pemerintah memutuskan untuk menghancurkan jaringan telekomunikasi milik Hizbullah yang terutama

⁴⁴ Alagha, *op. cit.*, hal. 54-55

⁴⁵ Augustus Richard Norton, 2007, *Hizbullah: A Short History*, New Jersey: Princeton University Press, hal. 105-107

⁴⁶ Michel Slackman, 2007, *Hezbollah Calls for Rally to Grip Beirut*, <http://www.nytimes.com/2006/12/01/world/middleeast/01lebanon.html>

dipergunakannya selama perang dengan Israel pada tahun 2006. Keputusan ini membuat Hizbullah kembali mengerahkan massanya menuntut dicabutnya keputusan tersebut. Aksi kali ini berlangsung anarkis disertai dengan konflik bersenjata dengan milisi dari lawan politik Hizbullah.⁴⁷

Kondisi ini menyebabkan pemilihan presiden yang dijadwalkan awal tahun 2008 tertunda hingga pertengahan 2008. Hal ini menyebabkan Lebanon berada dalam kondisi ketiadaan presiden sejak November 2007, saat berakhirnya periode pemerintahan Presiden Michel Sleiman. Nasrallah menyatakan bahwa Hizbullah siap bernegosiasi dengan pemerintahan jika lawan politiknya mau meninggalkan Beirut dan pemerintah mencabut kembali keputusannya untuk memutus jaringan telekomunikasi milik Hizbullah. Nasrallah menegaskan bahwa tanpa pemenuhan dua syarat tersebut maka Hizbullah akan tetap melawan pemerintah dan tidak akan mengakui Presiden yang mereka pilih. Nasrallah memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memutuskan jaringan telekomunikasi, yang merupakan infrastruktur vital bagi Hizbullah, sebagai deklarasi tantangan perang pemerintah, yang didukung oleh kepentingan Barat dan Israel, terhadap Hizbullah.⁴⁸

Konflik Hizbullah-pemerintah ini berakhir dengan tercapainya kesepakatan Doha. Menurut kesepakatan ini maka parlemen diberi waktu 24 jam ke depan untuk memilih presiden. Poin kedua dalam kesepakatan ini adalah bahwa pemerintah diperintahkan untuk segera membentuk kabinet pemerintahan bersatu yang terdiri dari 30 orang, 16 kementerian diberikan pada kelompok mayoritas, sementara 11 kementerian diberikan pada kelompok oposisi, sementara 3 kementerian lain diberikan untuk orang yang ditunjuk langsung oleh presiden. Sementara isi perjanjian selanjutnya adalah mengenai pembagian distrik untuk pemilihan parlemen tahun 2009 dan rencana untuk mengadakan dialog nasional yang akan menjamin keamanan rakyat Lebanon dari segala konflik bersenjata dan demi kedaulatan negara Lebanon dari segala bentuk intervensi.⁴⁹

⁴⁷ Nada Bakri, 2008, *Clashes in General Strike in Lebanon*, <http://www.nytimes.com/2008/05/08/world/middleeast/08lebanon.html>

⁴⁸ Nada Bakri, 2008, *Shiite-Sunni Clashes Intensify in Beirut*, <http://www.nytimes.com/2008/05/09/world/middleeast/09lebanon.html>

⁴⁹ <http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=44023>

Tabel 5.5. Alokasi Kursi Parlemen Berdasarkan Daerah Pemilihan dan Pembagian Muslim-Kristen pada Pemilihan Parlemen 2009

Akkar	Sunni - 3 Greek Orthodox - 2 Alawite - 1 Maronite - 1
Miniye-Danniye	Sunni - 3
Tripoli	Sunni - 5 Alawite - 1 Greek Orthodox - 1 Maronite - 1
Zghorta	Maronite - 3
Koura	Greek Orthodox - 3
Becharre	Maronite - 2
Batroun	Maronite - 2
Jbeil	Maronite - 2 Shiite - 1
Keserwan	Maronite - 5
Metn	Maronite - 4 Greek Orthodox - 2 Armenian Orthodox - 1 Greek Catholic - 1
Baabda	Maronite - 3 Shiite - 2 Druze - 1
Aley	Druze - 2 Maronite - 2 Greek Orthodox - 1
Chouf	Maronite - 3 Druze - 2 Sunni - 2 Greek Catholic - 1
Beirut I	Armenian Catholic - 1 Armenian Orthodox - 1 Greek Catholic - 1 Greek Orthodox - 1 Maronite - 1
Beirut II	Armenian Orthodox - 2 Shiite - 1 Sunni - 1
Beirut III	Sunni - 5 Druze - 1 Evangelical - 1 Greek Orthodox - 1 Minorities - 1 Shiite - 1
Baalbek/ Hermel	Shiite - 6 Sunni - 2 Greek Catholic - 1 Maronite - 1
Zahle	Greek Catholic - 2 Armenian Orthodox - 1 Greek Orthodox - 1 Maronite - 1 Shiite - 1 Sunni - 1
Western Bekaa/ Rashaya	Sunni - 2 Druze - 1 Greek Orthodox - 1 Maronite - 1 Shiite - 1
Saida	Sunni - 2
Zahrany	Shiite - 2 Greek Catholic - 1
Jezzine	Maronite - 2 Greek Catholic - 1
Tyr	Shiite - 4
Nabatiye	Shiite - 3
Marjeyoun/ Hassbaya	Shiite - 2 Druze - 1 Greek Orthodox - 1 Sunni - 1
Bint Jbeil	Shiite - 3

Sumber : <http://www.elections.gov.lb/Electoral-Districts/List-of-Districts-And-Seat-Allocation.aspx>

Tabel 5.6. Alokasi Kursi Parlemen Berdasarkan Pembagian Kristen dan Muslim pada Pemilihan Parlemen 2009⁵⁰

Kristen	Maronite	34
	Greek Orthodox	14
	Greek Catholics	8
	Armenian Orthodox	5
	Armenian Catholics	1
	Evangelical	1
	Minorities	1
Total		64
Muslim	Sunni	27
	Syi'ah	27
	Druze	8
	Alawite	2
Total		64

Tabel 5.7. Tabel Perolehan Kursi Parlemen Hasil Pemilihan Parlemen 2009

Koalisi 14 Maret	The Future Movement Bloc	29
	The Democratic Gathering Bloc	11
	The Lebanese Forces Party	5
	The Kataeb Party	5
	The Jamaa al-Islamiya Party	1
	Rangavar Party	1
	Henshag Party	2
	The Democratic Left Party	1
	National Liberal Party	1
	Independen	15
Total		71
Koalisi 8 Maret	The Loyalty of Resistance Bloc (Hizbullah)	13
	The Liberation and Development Bloc	13
	The Free Patriotic Movement	19
	The Marada Bloc	4
	The Lebanese Democratic Party	2
	The Tashnaq Party	2
	The Syrian Social Nationalist Party	2
The Baath Party	2	
Total		57

Sumber : *March 14 and March 8 Members of Parliamentary*
<http://nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=97943>

Hizbullah mengumumkan program pemilihan umumnya pada Pemilihan Parlemen tahun 2009 pada tanggal 6 April 2009. Program ini diumumkan oleh

⁵⁰ Diolah dari tabel 5.5

Mohammad Raad, salah satu wakil Hizbullah dalam parlemen Lebanon. Hizbullah memandang pemilihan umum kali ini sangat penting karena merupakan kesempatan untuk memperbaharui kehidupan politik, memperbaiki pilihan politik dan meyakinkan rakyat Lebanon pada komitmen Hizbullah pada Lebanon, sebagai negara yang berdaulat, bukan sebagai medan pertempuran. Raad juga menyatakan komitmen Hizbullah untuk mematuhi Perjanjian Taif, Kesepakatan Doha, dan pembagian kekuasaan.⁵¹

Sebelumnya, pada tanggal 1 April 2009, Hassan Nasrallah, Sekjen Hizbullah mengumumkan kandidat-kandidat yang akan diperjuangkannya pada pemilu parlemen tahun ini. Nasrallah juga menyatakan bahwa target utama Hizbullah dalam pemilu kali ini adalah untuk dapat menempatkan sebanyak-banyaknya wakil dari kelompok oposisi nasional dalam parlemen, namun ia menyatakan bahwa Hizbullah tidak akan menambah jumlah wakilnya dalam parlemen.⁵²

Hasil pemilihan parlemen tahun 2009 adalah kemenangan bagi koalisi 14 Maret dan kekalahan bagi kelompok oposisi dimana Hizbullah tergabung di dalamnya. Namun, seluruh kandidat Hizbullah berhasil mendapatkan 14 kursi parlemen. Koalisi 14 Maret berhasil mendapatkan 71 kursi dari 128 kursi parlemen, sementara koalisi 8 Maret atau kelompok oposisi berhasil mendapatkan 57 kursi dari 128 kursi parlemen.⁵³ Dan pembagian kursi ini berdasarkan partai politik yang menjadi anggota koalisi yang ada. Belum diketahui apakah pembagian kursi pada pemilihan parlemen tahun 2009 ini tetap sesuai dengan pembagian jatah kursi parlemen berdasarkan ratio 1:1 antara kelompok Muslim dan Kristen.

Tabel 5.8. Perolehan Kursi Parlemen Hizbullah dan Aliansi non Syi'ahnya juga untuk AMAL dan Kelompok Syi'ah lainnya Tahun 1992-2005

	Hizbullah	Sunni	Katolik	Maronit	AMAL	<i>Others (secular parties and traditional elites)</i>	Total
1992	8	2	1	1	9	10	31
1996	7	1	-	1	8	12	29

⁵¹ <http://english.moqawama.org/essaydetailsf.php?eid=8199&fid=28>

⁵² *Loc.cit.*

⁵³ A.Massoud Derhally, 2009, *Lebanese Rival, Including Hizbullah Agree on Shape A Cabinet*, <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601104&sid=aso1zwZ7Anc4>

2000	9	2	-	1	6	12	30
2005	11	2	-	1	11	5	30

Sumber : Augustus R. Norton, 2007, *Hizbullah : A Short History*. New Jersey : Princetown University Press hal.103

5.3. Dampak Keputusan Hizbullah Menjadi Partai Politik terhadap Aktivitas Perlawanannya pada Tahun 1992-2009 Maupun Sebaliknya

5.3.1. Dampak Positif

1. Eksistensi Gerakan Perlawanan Hizbullah Diakui dan Didukung Pemerintah Lebanon

Dalam situasi siaga penuh atas kemungkinan serangan Israel, Hizbullah ikut serta dalam pemilihan umum parlemen tahun 1992. Namun, aktivitas politik ini tidak mempengaruhi aktivitas perlawanan Hizbullah secara signifikan. Aksi-aksi penyerangan, penyergapan, dan bom syahid atas konvoi pasukan maupun pos-pos penjagaan Israel di sekitar sabuk pengamanannya di wilayah Lebanon Selatan tetap intens dilakukan. Pada masa ini merupakan momentum bagi Hizbullah untuk menunjukkan ke hadapan rakyat akan kekuatan dan kemampuannya melindungi dan membebaskan Lebanon dari penjajahan Israel serta kemampuannya untuk memajemen aktivitasnya dalam perlawanan dan politik.

Setelah mendapatkan kepercayaan rakyat

Lebanon dalam aktivitas perlawanannya terhadap penjajahan Israel dan legitimasi dari pemerintah, Hizbullah membuat *Al-Saraya Al Lubnaniyya Li Muqowamat Al-Ihtilal Al-Isra'eli* atau *Multi Confessional Lebanese Brigades to Fighting The Israeli Occupation*. Pasukan ini dibentuk dengan ideologi nasionalisme sekuler sebagai salah satu usaha Hizbullah memperluas perjuangan perlawanan terhadap Israel pada seluruh masyarakat Lebanon. Namun, meskipun dibentuk oleh Hizbullah, tidak ada satupun anggotanya yang menjadi anggota pasukan ini.⁵⁴

Aktivitas perlawanan Hizbullah terus dilakukan dengan menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan pemerintah. Beberapa serangan bom syahid kembali dilakukan oleh Hizbullah hingga tahun 2000. Akhirnya pada bulan Mei tahun 2000 Israel menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah Lebanon, kecuali

⁵⁴ Alagha, *op. cit.*, hal. 46

dari perkebunan Sheeba yang hingga tahun 2009 masih menjadi daerah sengketa antara Lebanon dan Israel.

Kemenangan Hizbullah atas Israel yang ditandai dengan penarikan mundur seluruh pasukan Israel secara tiba-tiba pada bulan Mei 2000 menaikkan popularitas dan simpati masyarakat pada Hizbullah. Pada periode 1992 hingga tahun 2000 Hizbullah mulai masuk ke kondisi baru dalam aktivitas politik yang lebih stabil pasca pembebasan. Namun, selama kaum Zionis masih ada di muka bumi maka perlawanan tidak boleh lengah, sebab sewaktu-waktu pasukan Israel bisa mengkhianati kesepakatan damai dan melakukan serangan. Di samping itu, Hizbullah merasa bertanggungjawab untuk menyelamatkan penduduk Lebanon, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang menjadi tahanan di penjara Israel, termasuk anggota perlawanannya. Oleh karena itu serangkaian aktivitas perlawanan dalam bentuk penculikan tentara Israel di wilayah perbatasan dilakukan untuk ditukarkan dengan tahanan-tahanan tersebut.

Hizbullah tidak hanya mengusahakan pembebasan tahanan Israel yang merupakan warga negara Lebanon saja, melainkan di dalam tuntutananya ia juga meminta pembebasan tahanan rakyat Palestina dan warga negara-negara Arab yang lain yang juga menjadi tahanan Israel. Posisi tawar Hizbullah semakin meningkat dengan dukungan nyata dari pemerintah Lebanon dalam berbagai negosiasi yang dilakukannya dengan Israel. Dalam periode ini Hizbullah berhasil melakukan "lebanonisasi" aktivitas perlawanannya dengan mengajak dan mengikutsertakan berbagai pihak dalam aktivitas perlawanannya, mulai dari rakyat sipil, partai politik, kelompok umat beragama, maupun pemerintah. Rencana ekspansi militer Israel itu juga disusun seiring dengan meningkatnya krisis politik dalam negeri Libanon setelah Hizbullah menyatakan menarik mundur para perwakilan eksekutifnya dari pemerintah Libanon setelah petinggi pemerintah Libanon gagal membentuk pemerintahan nasional bersatu.⁵⁵

⁵⁵ <http://www.eramuslim.com/berita/dunia/times-israel-akan-serang-hizbullah-tahun-2007.htm>

2. Gerakan Perlawanan dapat Mempertahankan Kepemilikan Senjata dan Berbagai Infrastruktur serta Perlengkapan Perang yang Dimilikinya

Keberhasilan pertama dalam perlindungan Hizbullah terhadap berbagai persenjataannya adalah pada saat semua milisi Lebanon harus dilucuti senjatanya seiring dengan berakhirnya perang saudara 15 tahun. Sementara Hizbullah berhasil memperoleh pengakuan pemerintah Lebanon sebagai gerakan perlawanan yang legal untuk ada di Lebanon dan legal untuk memiliki persenjataan. Keberhasilan kedua terutama setelah gejolak politik antara Hizbullah dan aliansinya dengan pemerintah Lebanon pada tahun 2007-2008 yang diakhiri dengan tercapainya Kesepakatan Doha⁵⁶. Hizbullah berhasil mempertahankan jaringan telekomunikasinya yang sangat penting bagi seluruh aktivitas politik dan perlawanannya menjadi sasaran pemerintah untuk ditutup karena berbagai tekanan Barat dan Israel mengenai pentingnya pelucutan senjata atas Hizbullah pasca perang Hizbullah-Israel tahun 2006.

3. Keberhasilan Perlawanan Hizbullah terhadap Israel Membuatnya Sukses dalam Pemilihan Parlemen Tahun 1996 dan Tahun 2000

Keberhasilan pertahanannya atas agresi Israel tahun 1996, digunakan Hizbullah untuk menarik simpati dan dukungan publik. Slogan yang berisi pentingnya perlawanan untuk mempertahankan harga diri bangsa terbukti cukup populer untuk meraih simpati masyarakat sehingga Hizbullah kembali dapat memperoleh 9 kursi di parlemen dengan 3 kursi untuk pendukungnya dari kelompok Muslim Sunni dan Kristen. Sementara penarikan mundur seluruh pasukan Israel dari wilayah Lebanon kecuali wilayah perkebunan Sheeba membuat gerakan perlawanan memperoleh simpati dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Dukungan ini semakin menguat setelah berbagai keberhasilannya mengadakan pertukaran tawanan rakyat Lebanon dari penjara-penjara Israel.

⁵⁶ Mengenai kesepakatan Doha silahkan melihat kembali pembahasan sebelumnya dalam bab ini mengenai aktivitas politik Hizbullah tahun 2006-2009

4. Hizbullah Mampu Menarik Perhatian Publik Lebanon untuk Mendukung Gerakan Perlawanannya

Sejak mulai ikut serta dalam aktivitas politik hingga tahun 2005 Hizbullah dapat menggunakan aksi-aksi perlawanannya untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat Lebanon. Program kampanye dan aksi-aksi perlawanan yang didukung dengan pelayanan sosial yang profesional dan terorganisir dengan baik mampu membuatnya populer di tengah masyarakat.

5.3.2. Konsekuensi yang Harus Dihadapi Gerakan Perlawanan maupun Partai Politik

1. Hizbullah Harus Mampu Membagi Perhatian dan Para Kadernya dalam Aktivitas Perlawanan dan Politik serta Bidang-bidang Lain yang Mendukung Keduanya

Manajemen organisasi dan pembagian kerja yang baik sangat dibutuhkan agar aktivitas perlawanan dan politik dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung. Sejak tahun 1992 hingga tahun 2009 Hizbullah mampu menjaga ritme aktivitas perlawanan dan aktivitas politiknya agar tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkannya. Berbagai permasalahan kemudian muncul menuntut kemampuan Hizbullah untuk tetap konsisten dengan garis perjuangan dan tujuan yang telah ditetapkannya sekaligus membutuhkan kesolidan organisasi yang baik. Untuk melakukan semua hal ini maka saling percaya dan saling memahami antara sesama jajaran pimpinan dan antara anggota dengan pimpinannya sangat diperlukan untuk menjaga kesolidan internal.

2. Hizbullah Harus Mampu Menjaga Kesolidan Anggota dan Membangun Kepercayaan Mereka akan Kebenaran Langkah dan Keputusan yang Diambilnya

Berbagai tekanan yang dihadapi Hizbullah dari pemerintah maupun Barat membuat Hizbullah harus memiliki pola komunikasi yang baik dengan anggotanya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka besar kemungkinan akan terjadi perpecahan di tubuh Hizbullah yang akan sangat merugikan konsentrasi aktivitas perlawanan dan politiknya. Oleh karena itu struktur organisasi dan kepemimpinan yang jelas diiringi dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas akan dapat menghindarkan Hizbullah dari kemungkinan perpecahan internal.

3. Hizbullah Harus Mampu Mempertanggungjawabkan Setiap Aktivitas Perlawanan yang Dilakukannya ke Hadapan Publik dan Mengantisipasi Akibat dari Aksi-aksi Perlawanannya terhadap Rakyat Lebanon

Agresi Israel tahun 2006 yang telah membuat rakyat Lebanon kembali menderita dan Israel menjustifikasi serangan besar-besarnya saat itu dengan alasan membalas penculikan yang dilakukan Hizbullah atas dua orang tentaranya. Padahal aktivitas penculikan untuk kemudian ditukarkan dengan tawanan-tawanan rakyat Lebanon yang masih ada di penjara-penjara Israel sudah dilakukan berulang kali sebelumnya dan tidak ditanggapi Israel dengan serangan sebesar itu. Perang propaganda yang dilancarkan Amerika, yang merupakan sekutu dan pelindung Israel, dan Israel menuntut pemerintah dan rakyat Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah dengan alasan aktivitas perlawanannya membahayakan pemerintah dan rakyat sipil.

5.3.3. Dampak Negatif

1. Hizbullah Dimasukkan ke dalam Daftar Teroris Amerika

Aktivitas perlawanan dan kepemilikan senjata dan berbagai infrastruktur perang lainnya membuat Hizbullah menjadi ancaman bagi eksistensi Israel di Timur Tengah. Gerakan Perlawanan Hizbullah yang masih eksis hingga hari ini dikhawatirkan akan semakin kuat dan akan mengancam kekuatan dan kedudukan Israel atas wilayah pendudukannya baik di perkebunan Sheeba maupun di Palestina. Hizbullah sering dikaitkan Barat, khususnya Amerika dengan Hamas, Gerakan Pembebasan Palestina yang didukung dan dibantu baik dana maupun persenjataan oleh Hizbullah.

2. Sebagian Masyarakat dan Lawan Politiknya Merasa Terancam dengan Kekuatan Militer yang Dimiliki Hizbullah

Kekuatan militer Hizbullah yang jauh melampaui kekuatan Tentara Nasional Lebanon membuatnya menjadi ancaman bagi eksistensi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan pihak Barat berupaya untuk membujuk Hizbullah melepaskan senjatanya dan jika ingin tetap bergerak di bidang militer maka mengintegrasikan dirinya menjadi bagian dari Tentara Nasional Lebanon. Hizbullah menolak permintaan semacam ini karena sejak awal ia menegaskan bahwa kekuatan militer dan sayap militer Perlawanan Islam yang

dimilikinya adalah untuk membebaskan seluruh wilayah Lebanon, termasuk perkebunan Sheeba dari penjajahan Israel. Dan perlawanan akan kehilangan efektivitas dan strategi serta corak kerahasiaannya dalam menghadapi Israel. Di samping itu, pengintegrasian Perlawanan Islam ke dalam Tentara Nasional Lebanon menyebabkan ia rawan disusupi intelijen Barat dan Israel, sesuatu hal yang akan melemahkan kekuatannya dalam aktivitas perlawanan.

3. Hizbullah Selalu Ditekan baik Oleh Barat Maupun oleh Lawan Politiknya untuk Menyerahkan Kekuatan Militernya pada Pemerintah dan Sepenuhnya Menjadi Partai Politik

Diantara permintaan Barat dan Pemerintah Lebanon kepada Hizbullah adalah agar ia sepenuhnya terlibat dalam politik dan meninggalkan aktivitas perlawanannya. Tawaran ini sangat bertentangan dengan visi dan misi gerakannya. Oleh karena itu Hizbullah tetap teguh mempertahankan eksistensi perlawanan dan kepemilikannya atas berbagai persenjataan. Ia juga berusaha meyakinkan pemerintah dan masyarakat bahwa eksistensi perlawanan merupakan hal yang sangat penting bagi Lebanon dari berbagai intervensi dan ancaman Israel yang memang berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan. Sebab bukan mustahil serangan Israel tahun 1982 hingga ia menduduki hampir separuh wilayah Lebanon akan diulanginya lagi bila Lebanon dinilai tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya.

5.4. Strategi Hizbullah Menyelaraskan Peran Dan Fungsinya sebagai Gerakan Perlawanan dan Partai Politik

5.4.1. Struktur dan Manajemen Organisasi

Setelah mendeklarasikan diri pada tahun 1985, struktur organisasi Hizbullah kemudian dirumuskan. Awalnya kepemimpinan Hizbullah berada di tangan Dewan (*Al-Syura*) yang masing-masing merupakan perwakilan berbagai unsur masyarakat yang membentuk organisasi ini. Pada perkembangan selanjutnya jumlah anggota Dewan ini dikurangi menjadi sembilan orang yang dipilih untuk jabatan satu tahun. Pemilihan anggota Dewan dilakukan oleh kader inti yang minimal menduduki jabatan kepala bagian. Setelah itu, Dewan akan memilih Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan berbagai tanggungjawab dan

kebijakan yang telah mereka ambil. Syaikh Subhi At Tufayli dipilih sebagai Sekretaris Jenderal pertama pada 11 November 1989.⁵⁷

Kemudian dilakukan berbagai penyesuaian kebijakan hingga masa jabatan Sekretaris Jenderal menjadi tiga tahun dan jumlah Dewan dikurangi menjadi tujuh orang. Pada bulan Mei 1991, Dewan memilih Al Sayyed abbas Al Musawi sebagai Sekretaris Jenderal kedua. Namun sembilan bulan kemudian ia meninggal dunia pada bulan Februari 1992. Maka Dewan memilih Hassan Nasrallah sebagai penggantinya hingga masa jabatan habis. Nasrallah telah menjadi pemimpin Hizbullah sejak tahun 1992.⁵⁸ Pada perkembangan selanjutnya Hassan Nasrallah terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah dalam konferensi tahunan Hizbullah pada bulan November 2009.⁵⁹

Dalam tubuh Hizbullah juga dibentuk majelis dewan beranggotakan lima orang yang memimpin lima majelis yaitu majelis jihad; majelis politik; majelis eksekutif; majelis parlementer; dan majelis yudisial. Masing-masing anggota majelis dewan memimpin salah satu majelis. Majelis politik bertanggungjawab terhadap portfolio politik yang akan dikeluarkan Hizbullah dan terus menerus berhubungan dengan masyarakat pendukungnya, berbagai faksi di Lebanon dan partai-partai yang ada di negara ini. Sementara majelis jihad bertanggungjawab terhadap aktivitas perlawanan yang meliputi pengawasan, perekrutan, pelatihan, penyediaan perlengkapan, keamanan, dan berbagai upaya lain yang terkait dengan perlawanan. Majelis parlementer terdiri dari anggota parlemen partai Hizbullah yang mengawasi komitmen koalisi yang dibentuknya dalam parlemen terhadap kesepakatan koalisi yang telah diambil. Majelis ini bertugas meneliti legislasi yang dibawa ke parlemen serta menindaklanjuti berbagai kebutuhan warga negara, termasuk hubungan Hizbullah dengan pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan yang lain. Majelis ini menjalankan kebijakan Hizbullah melalui berbagai fungsinya sebagai anggota parlemen wakil partai.⁶⁰

Pembaharuan terus berlangsung dalam struktur organisasi Hizbullah menyesuaikan dengan perkembangan perlawanan terhadap Israel, kondisi politik

⁵⁷ Qassem, *op. cit.*, hal. 90

⁵⁸ *Loc. cit.*

⁵⁹ <http://www.middle-east-online.com/english/?id=35794>

⁶⁰ Qassem, *op. cit.*, hal. 91

Lebanon, serta kebutuhan masyarakat Lebanon. hasilnya adalah Hizbullah kembali mengumumkan Manifesto Politiknya pada tahun 2009.

5.4.2. Pelayanan Sosial Hizbullah kepada Rakyat Lebanon

Hizbullah juga menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial bekerjasama dengan berbagai organisasi sosial yang ada untuk melayani para pengungsi yang menyelamatkan diri dari rumah-rumah mereka yang diserang Israel. Pelayanan sosial dilakukan untuk membangun tempat tinggal sementara dan memberi makanan kepada para pengungsi, membangun fasilitas kesehatan yang mereka butuhkan dan menjaga keamanan ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka setelah kesepakatan gencatan senjata berhasil dicapai. Hizbullah juga berinisiatif untuk mengambil tanggungjawab membangun kembali rumah-rumah yang dihancurkan oleh Israel.⁶¹

Diantara beberapa organisasi sosial yang berafiliasi dengan Hizbullah yaitu⁶² :

1. *Al Shahid* yang merupakan organisasi yang bertugas mengurus keluarga para pejuang perlawanan yang meninggal dunia dan yang ditawan oleh Israel. Organisasi ini kira-kira telah ada sejak tahun 1982. Organisasi ini memiliki rumah sakit, sekolah, dan berbagai pelayanan sosial lainnya untuk mengurus keluarga para pejuang perlawanan yang meninggal dunia dan yang ditawan Israel.
2. *Al Hay'a Al Suhiyya*, yang merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum. Organisasi ini kira-kira berdiri pada tahun 1984 dan hingga tahun 2006 memiliki dan mnegurusi 46 pusat kesehatan dan rumah sakit.
3. *Al Qard Al Hassan* merupakan organisasi yang memberikan pinjaman berskala kecil kepada rakyat untuk membuka usaha-usaha kecil. Organisasi ini kira-kira telah berdiri sejak tahun 1984.
4. *Jihad Al Binaa* resmi berdiri pada tahun 1988. Organisasi ini berpusat di Beirut-Haret dan memiliki cabang di Beirut di wilayah Rowais Al Radoof, di

⁶¹ *Ibid.*, hal. 169

⁶² Erik Abild, 2007, *Hizbullah : A Contextual Study Focusing on Human Freedom*. <http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/abild/Abild.pdf>

wilayah Baalbek yakni di Rass Al Ayn, di Bekaa Barat yakni di Mashghara-Al Bayadir, dan di wilayah Selatan di Nabatieh dekat Alsarai.⁶³

Tugas dari organisasi ini antara lain : membangun kembali berbagai kerusakan gedung dan bangunan pasca agresi Israel ke Lebanon, terutama mendirikan kembali berbagai institusi pelayanan publik seperti sekolah dan rumah sakit; menggali dan membuat sumur-sumur air, mendirikan menara air, membuat jaringan distribusi air, membuat kanal irigasi, dan membuat sistem sanitasi masyarakat; membangun kembali rumah-rumah bagi korban perang dan tuna wisma; membantu petani mengolah tanah pertanian mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertaniannya; membuat pembangkit listrik di desa-desa; membantu para pengungsi mendapatkan tempat tinggal sementara; membangun institusi pendidikan dan pelatihan kerja untuk fakir miskin. Dalam melakukan tugas-tugas ini, Jihad Al Binaa bekerjasama dengan pemerintah dan berbagai LSM internasional serta mengumpulkan dana dari para dermawan dan sumbangan anggota.⁶⁴

5. *Al Imdad* kira-kira didirikan pada tahun 1987. Organisasi ini menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial dalam berbagai bentuk untuk masyarakat miskin dan tertinggal di Lebanon.
6. *The Consultation Centre for Studies Document* kira-kira didirikan pada tahun 1988. Organisasi ini melakukan berbagai proyek penelitian terutama dalam bidang sosial.
7. *Al Jarha* didirikan tahun 1989 dan berpusat di Beirut bagian selatan dan melayani sekitar 300 orang termasuk perempuan dan anak-anak. Aktivitas organisasi ini serupa dengan Al Shahid yakni melakukan pelayanan kepada keluarga para pejuang perlawanan yang meninggal dunia dan terluka dalam aksi-aksi perlawanan.⁶⁵
8. *Al Muassasa Al Tarbawiyya* didirikan kira-kira pada tahun 1991. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan yang memiliki 9 sekolah dengan sekitar

⁶³ Borre Ludvigsen, 1998, *Jihad Al Binaa Developmental Association*, <http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/jihad-el-binna/index.html>

⁶⁴ Ludvigsen, *Ibid.*

⁶⁵ Reem Haddad, 2002, *Al Jarha Association*, <http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/jarha/index.html>

5000 anak didik. Kurikulum di sekolah ini mengacu pada kurikulum pendidikan nasional dengan tambahan penekanan pada kurikulum agama.

Keunikan organisasi-organisasi ini menurut Abild bukan hanya terletak pada kekomprehensifan aktivitas pelayanan yang dilakukannya, melainkan dalam keefektifan kerja dan kejujuran para pengurusnya dalam setiap aktivitas sosial yang mereka lakukan. Di samping itu, para pengurus dan aktivis sosial yang bekerja di dalamnya memiliki motivasi ibadah dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga gaji yang kecil tidak menghalangi semangat mereka dalam melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat. Motivasi beribadah ini ditopang dengan perasaan bangga dan senang karena telah memberikan manfaat pada sesama manusia yang membutuhkan bantuannya.⁶⁶

Semua organisasi sosial yang berafiliasi dengan Hizbullah memiliki tiga karakter dalam aktivitasnya, yaitu efektivitas, kepemimpinan, dan profesionalitas; partisipasi, kesetiaan, dan fokus pelayanan; serta kerjasama antara berbagai organisasi sosial yang saling mendukung satu sama lain. Semua organisasi sosial tersebut memiliki struktur organisasi yang hierarkis dengan kepemimpinan yang jelas dan mereka menjalankan seluruh aktivitas sosialnya tanpa campur tangan pemerintah.⁶⁷

Organisasi ini terdiri dari masyarakat sipil yang tertarik dan memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk terjun di dalamnya. Di samping itu, organisasi-organisasi tersebut memfokuskan pelayanannya pada hal-hal yang dibutuhkan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Semua organisasi tersebut memiliki fokus kerja yang khusus dan memiliki lingkup kerja yang khusus pula. Dalam hal kerjasama antara berbagai organisasi sosial yang ada, Abild mendeskripsikan sebagai berikut. Jika seorang aktivis sosial mendengar atau menemukan keluarga yang membutuhkan, maka mereka mendatangnya untuk mengidentifikasi bantuan apa yang dibutuhkan. Kemudian mereka akan membahas mengenai apa saja bantuan yang dapat diberikan oleh organisasi yang mana kepada keluarga tersebut.⁶⁸

⁶⁶ Abild, *op. cit.*, hal. 30

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 31

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 32

5.4.3. Kepemilikan Hizbullah atas Beberapa Media Massa

Hizbullah merupakan partai politik yang didukung oleh berbagai media massa yang dimilikinya. Diantara media massa yang dimiliki Hizbullah adalah : televisi al-Manar, radio al-Nur, dan majalah al-Intiqad.⁶⁹ Ketiga media ini menjadi sarana Hizbullah menyuarakan berbagai opininya ke hadapan publik. Media ini juga sangat penting artinya terutama dalam mengkalifikasi dan menjawab berbagai tuduhan yang ditujukan Barat dan Israel pasca agresi 2006. Keberadaan media ini juga penting sekali ketika terjadi pertentangan antara Hizbullah dan pemerintah pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Kepemilikan atas berbagai media massa ini membuat Hizbullah mampu menyuarakan kebijakan, kepentingan, dan berbagai seruannya dari perspektifnya sendiri.⁷⁰

Al-Manar mulai mengadakan siarannya pada tanggal 3 Juni 1991. Ia digunakan sebagai alat propaganda dalam perang psikologis melawan Israel. Pusat kegiatan al-Manar adalah di daerah Harat Huraik di bagian selatan Beirut. Pada bulan September 1996 pemerintah Lebanon mengeluarkan peraturan mengenai stasiun televisi dan hanya mengizinkan 5 stasiun televisi untuk beroperasi di Lebanon. al-Manar tidak termasuk dalam 5 stasiun tersebut, namun ia menolak menghentikan siarannya. Kemudian perwakilan Hizbullah dikirimkan untuk bertemu dan melobby presiden Suriah Bashar al-Asad agar al-Manar diijinkan mengadakan siaran dan meminta presiden untuk melobby pemerintah Lebanon. Akhirnya atas permintaan khusus Presiden Lebanon yang al-Manar berhasil mendapatkan izin siaran.⁷¹

5.4.4. Dialog Antar Umat Beragama dan Antar Faksi di Lebanon

Dalam usahanya untuk mewujudkan pemerintahan bersatu yang dapat memajukan Lebanon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lebanon maka Hizbullah aktif ikut serta dalam dialog dan membangun kesepakatan dengan berbagai faksi yang ada di Lebanon. Pendekatan dialog inilah salah satunya yang membedakan Hizbullah dengan Iran, meskipun sama-sama berideologi Syi'ah Itsna Asy'ariyah, yang menggunakan strategi revolusi untuk mewujudkan tujuan

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 29

⁷⁰ Ricky Hollander, 2006, Backgrounder : Hizbullah's Media Weapon, http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=56&x_article=1205

⁷¹ Avi Jorisch, 2004, *Al Manar : Hizbullah Television*, www.meforum.org/583/al-manar-hizbullah-tv-24-7

mereka. Hal ini pula yang membuktikan keotonoman dan independensi Hizbullah dari Ayatullah Khomeini dan kemudian Ayatullah Ali Khamenei meskipun Hizbullah sering berkonsultasi dan meminta pendapat keduanya dalam aktivitas perlawanan maupun politik Hizbullah

Hizbullah mulai aktif mengadakan berbagai dialog dengan para pemimpin kelompok dan pemimpin agama Kristen. Usaha ini dimulai dengan kunjungan anggota parlemen Hizbullah, Syaikh Khudr Tlays dan Sayyid Nawwaf al-Musawi ke kediaman pemimpin kelompok Kristen Maronit. Hasilnya adalah bahwa perlu diadakan dialog yang lebih terbuka dengan kelompok Kristen dan kebutuhan bersama untuk melakukan reformasi sistem politik, kebudayaan, dan hubungan antar umat beragama.⁷² Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 1 Desember 1992. Para pimpinan partai mengambil langkah ini sebagai usaha untuk membuka saluran-saluran komunikasi dengan semua pihak, kecuali dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan Israel. Tujuan dari pertemuan ini bukanlah untuk mencapai kesatuan dalam satu tujuan, melainkan untuk mencari titik temu untuk dapat bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dan mencari solusi damai dari setiap pertikaian Muslim-Kristen yang terjadi.⁷³

Sebagai reaksi dari kelompok Kristen, maka pada tanggal 22 Januari 1993, delegasi gereja, Imam Roland Abou Joudeh mengunjungi Sekjen Hassan Nasrallah. Dan dialog ini selanjutnya dijalani melalui sejumlah komite gabungan yang dibentuk untuk tujuan kerjasama. Hizbullah tidak hanya mengadakan dialog dengan salah satu sayap Kristen saja, melainkan dengan seluruh kelompok Kristen yang ada di Lebanon. dalam berbagai dialog tersebut, Hizbullah menegaskan keinginannya untuk bekerjasama dan membangun saling pengertian antar umat beragama untuk menghindari konflik dan perpecahan umat beragama di Lebanon sehingga masing-masing kelompok dapat saling bekerjasama untuk menjalani kehidupannya di lingkungan yang damai dan toleran.⁷⁴

Di samping menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan kelompok umat beragama lain, Hizbullah juga menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai faksi dan partai yang ada di Lebanon. pada tanggal 18

⁷² Alagha, *op. cit.*, hal. 44

⁷³ Qassem, *op. cit.*, hal. 300

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 301

Agustus 1997, Hizbullah dan 27 partai Lebanon mengadakan konvensi seluruh faksi di hotel Le Bristol. Tujuan konvensi ini adalah untuk membangkitkan kembali gerakan politik di Lebanon, mengembangkannya, dan mengerahkan dukungannya terhadap aktivitas perlawanan yang berlangsung di Lebanon Selatan.⁷⁵ Qassem menyatakan bahwa konvensi semacam ini masih terus diselenggarakan hingga tahun 2005, namun informasi mengenai konvensi-konvensi selanjutnya belum berhasil didapatkan karena minimnya pemberitaan dan publikasi dari pemerintah maupun Hizbullah sendiri mengenai program ini.

5.4.5. Sumber Dana Hizbullah yang Independen

Hizbullah menyatakan bahwa ia memiliki berbagai sumber pendanaan. Sumber utamanya adalah dari dana-dana sosial umat Islam, yakni dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang Sunni dan Syi'ah, serta dari *khums* orang-orang Syi'ah di Lebanon maupun dari luar Lebanon.⁷⁶ Sumber dana lain adalah dari bisnis yang dijalankannya secara rahasia (tidak atas nama Hizbullah) di wilayah Beirut. Sedangkan untuk membiayai aktivitas perlawanannya Hizbullah mendapatkan dana dan kiriman persenjataan dari Iran.⁷⁷

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bagaimana Hizbullah telah mempertimbangkan dengan matang keikutsertaannya dalam pemilihan parlemen Lebanon tahun 1992. Di samping memiliki pertimbangan eksternal yakni dalam hal kesempatan politik yang tersedia saat itu, Hizbullah juga memiliki pertimbangan internal yang semakin memperkokoh landasan keikutsertaannya itu. Sementara jika dikemudian hari Hizbullah mendapat keuntungan dari transformasi yang dilakukannya dari gerakan perlawanan murni menjadi partai politik sekaligus gerakan perlawanan, maka keuntungan atau dampak positif tersebut merupakan sesuatu yang telah diprediksi Hizbullah dan berada dalam kerangka perencanaan yang telah disusunnya.

Sementara mengenai konsekuensi dan dampak negatif yang ditimbulkan dari transformasi tersebut, maka itupun berada dalam kerangka perencanaan dan telah diantisipasi Hizbullah sejak awal. Hal ini tercermin dari serangkaian strategi

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 120

⁷⁶ Jorisch, *op. cit.*

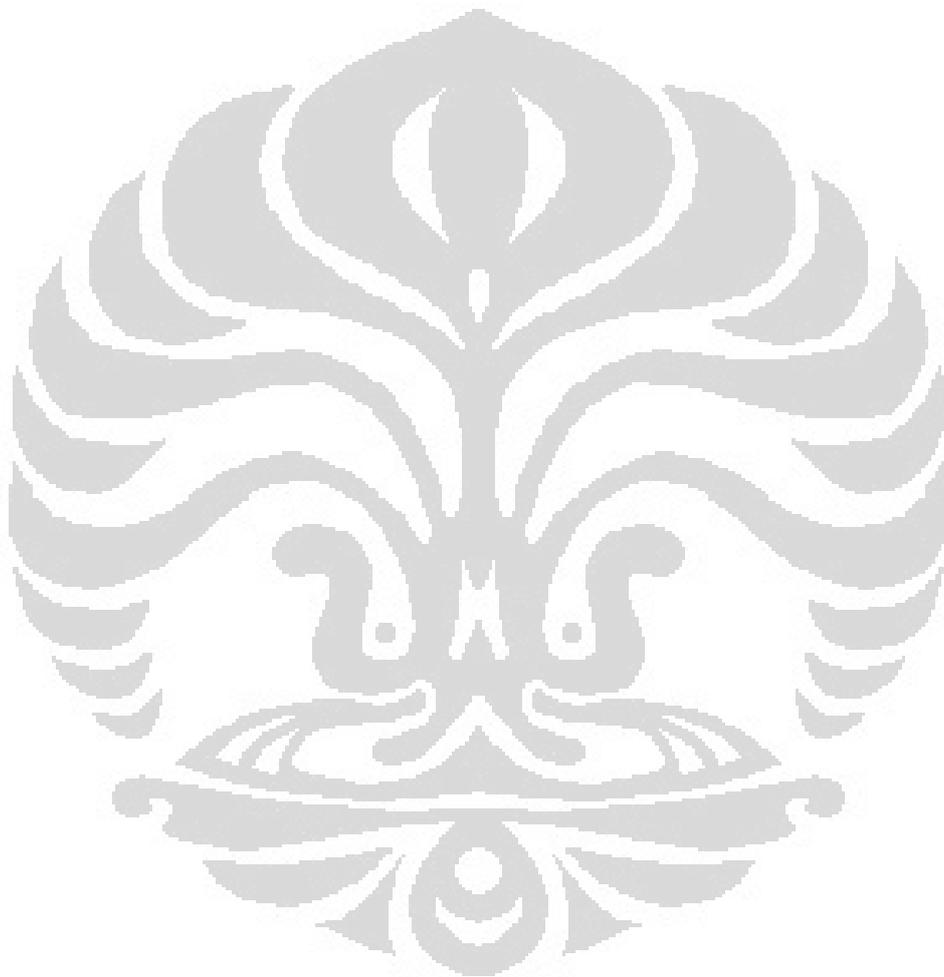
⁷⁷ Dapat dilihat kembali dalam Bab IV Tesis ini hal 72

Hizbullah untuk dapat menyelaraskan gerakan perlawanan dan aktivitas politiknya. Hal ini juga tercermin dari kemampuannya bertahan dan tetap konsisten dengan prinsip dan strategi pergerakan yang telah ditetapkannya sejak awal, yakni prinsip jihad dan prinsip kerjasama dengan seluruh unsur dalam masyarakat Lebanon untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan negara Lebanon. sementara strategi pergerakannya adalah dialog dan kompromi dengan berbagai faksi di dalam negeri, serta dengan negara-negara lain yang mendukung dan sejalan dengan prinsip perjuangannya, namun tegas dan kukuh dalam perlawanannya terhadap Israel dan dalam tekadnya untuk membebaskan seluruh Lebanon dari penjajahan Israel dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk melepaskan diri dari penjajahan Israel.

Serangkaian strategi tersebut juga telah membuktikan bahwa Hizbullah merupakan gerakan sosial yang memiliki pengorganisasian yang baik dan mapan sekaligus komprehensif dalam aktivitas gerakannya yang mencakup semua segi kehidupan bermasyarakat sehingga ia tangguh menghadapi berbagai tantangan dari dalam dan luar dan. Dan hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai bagian dari pergerakan politik umat Islam secara umum, terutama sebagai bagian dari gerakan politik kelompok Muslim Syi'ah di Lebanon. Keberhasilan konsep perjuangan yang ditunjang dengan keteraturan strategi dan organisasinya inilah yang patut dijadikan contoh bagi pergerakan-pergerakan Islam yang ada agar dapat bertahan dan memberikan manfaat dan pengaruh signifikan bagi masyarakatnya.

Fenomena Hizbullah sebagai gerakan politik umat Islam, khususnya kelompok Muslim Syi'ah di Lebanon merupakan sebuah gerakan yang semakin memperkaya konsep gerakan sosial dan partai politik. Oleh karena itu, sangat tepat jika fenomena Hizbullah sebagai sebuah gerakan politik kelompok Muslim Syi'ah diteliti dan dibahas dengan mengkombinasikan konsep Islam, khususnya konsep Jihad, dengan konsep gerakan sosial dan partai politik secara umum. Hal ini membuktikan kekhasan gerakan umat Islam yang berakar dari landasan ketuhanan dan ajaran serta sistem hidup komprehensif yang dimilikinya. Dan kekhasan ini merupakan sesuatu yang sudah ada dalam tubuh umat ini sejak ia terbentuk yakni dengan logika ketuhanan dan perjuangan yang melampaui batas

dunia ini, sebab ia berhubungan langsung dengan kehidupan di akhirat sebagai kelanjutan dari fase kehidupannya setelah meninggalkan dunia ini.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pembahasan mengenai transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan menjadi partai politik pada tahun 1992 hingga tahun 2009 merupakan fokus utama dalam tesis ini. Ada tiga rumusan masalah yang berusaha dijawab dalam tesis ini, yaitu : pertama mengenai latar belakang keikutsertaan Hizbullah sebagai partai politik dalam pemilu parlemen tahun 1992. Pemilu ini merupakan pemilu pertama yang diadakan pasca berakhirnya perang saudara 15 tahun sejak tahun 1975 hingga tahun 1989/1990. Permasalahan ke dua adalah mengenai dampak positif, negatif, dan konsekuensi dari aktivitas politik Hizbullah terhadap aktivitas perlawanannya. Dan permasalahan ketiga adalah mengenai strategi Hizbullah dalam menyelaraskan aktivitas perlawanan dan aktivitas politiknya.

Dengan melakukan penelitian sesuai proses penelitian yang telah dijelaskan dalam bab III dan dengan menggunakan kerangka teori sesuai dengan yang telah dipaparkan dalam bab II, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Faktor terbukanya kesempatan politik merupakan salah satu faktor pendorong keikutsertaan Hizbullah dalam pemilu parlemen tahun 1992 sebagai partai politik. Faktor kesempatan politik ini dapat dilihat dalam dua hal yakni hasil dan perkembangan sosial politik pasca perjanjian Taif dan karena keberadaan budaya politik konfessionalisme serta semakin melemahnya kekuasaan *zu'ama* dalam masyarakat Syi'ah Lebanon.

Perjanjian Taif merupakan kesepakatan yang menandai berakhirnya perang saudara 15 tahun di Lebanon yang berlangsung sejak tahun 1975 dan memberikan dasar-dasar bagi sedikit reformasi dalam sistem pembagian kekuasaan politik Lebanon, yakni dengan memperbesar jumlah anggota parlemen dari 99 orang menjadi 108 orang, sehingga membuka kesempatan bagi masuknya aktor-aktor dari partai-partai politik baru ke dalamnya. Kesepakatan ini juga melakukan reformasi pembagian kekuasaan dengan mengurangi kekuasaan presiden dan mendistribusikannya ke perdana menteri dan ketua parlemen.

Sementara melemahnya kekuasaan *zu'ama* merupakan hasil dari migrasi yang dilakukan masyarakat Syi'ah dari desa-desa mereka di wilayah Lebanon Selatan ke wilayah perkotaan, khususnya ke bagian selatan Beirut untuk mencari pekerjaan. Migrasi ini terjadi sebagai akibat tidak teredianya lapangan pekerjaan di desa-desa mereka dan minimnya infrastruktur di pedesaan karena kurang mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Pemerintah Lebanon sangat memperhatikan pembangunan di wilayah perkotaan sehingga mengabaikan pembangunan di wilayah pedesaan. Akibatnya masyarakat di wilayah pedesaan merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Kondisi ini memunculkan militansi mereka.

2. Faktor ketersediaan sumber daya dan kemampuan memobilisasi berbagai sumber daya yang ada merupakan faktor pendorong lain keikutsertaan Hizbullah dalam pemilu parlemen tahun 1992.

Sejak awal terbentuknya Hizbullah memiliki fokus gerakan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel di tanah Lebanon dan oleh karena itu ia menghindari masuk ke dalam perselisihan di dalam negeri. Hal ini membuatnya populer di kalangan masyarakat Syi'ah karena ia telah membela dan melindungi mereka dari serangan Israel. Di samping itu, dukungan ulama-ulama Syi'ah di Lebanon juga dimilikinya sebagai akibat keputusannya menjadikan Islam sebagai prinsip gerakan, dan ia pun menganggap aktivitas perlawanan yang dilakukannya sebagai bagian dari jihad yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk membela agama dan kehormatan masyarakat dan tanah airnya dari segala bentuk penjajahan. sejak akhir tahun. Para ulama ini menjalankan dakwah dan pendidikan di berbagai institusi sosial pendidikan yang mereka miliki. Dan oleh karena itu Hizbullah mendapatkan para kadernya dari murid para ulama yang mau, tertarik, dan siap bergabung dengannya.

Sumber daya lain yang dimilikinya adalah berbagai organisasi sosial yang melakukan berbagai pelayanan sosial atas nama Hizbullah. Dalam melakukan pelayanan sosial Hizbullah bekerjasama dengan berbagai LSM internasional dan merekrut masyarakat sipil baik dari kalangan Syi'ah maupun dari kelompok agama lain untuk bergabung dan menjadi aktivis sosial di organisasinya. Pelayanan sosial ini juga salah

satu faktor yang menjadikannya populer di kalangan masyarakat di beberapa wilayah, khususnya di Lebanon Selatan dan di Beirut.

Di samping itu, sejak akhir tahun 1980-an pun ia telah memiliki media massa yang terdiri dari satu stasiun televisi, satu stasiun radio, dan satu surat kabar, serta berbagai situs internet dalam berbagai aktivitas politik, perlawanan, media, dan sosialnya. Kepemilikan atas media membuat Hizbullah memiliki saluran komunikasi untuk melancarkan berbagai seruan, usaha pembentukan opini publik, dan mensosialisasikan berbagai programnya, serta menjaring dukungan masyarakat dalam berbagai aktivitas dan programnya. Semua pemberitaan negatif dari media massa lawan politiknya maupun media massa Barat dapat dihadapinya dengan baik.

Namun, di balik semua itu adalah bahwa Hizbullah memiliki manajemen organisasi dengan pembagian kerja yang berjalan efektif dan lancar. Masing-masing organ dalam organisasi Hizbullah memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas dan memiliki pola komunikasi yang jelas pula antara satu bagian dengan bagian yang lain. Profesionalitas, kejujuran, kesungguhan, dan motivasi beribadah merupakan ruh dari aktivitas para anggota Hizbullah di dalam berbagai organ yang ada. Dan keberadaan kader yang memiliki keahlian, kemampuan, dan kapasitas moral yang baik inilah yang menjadi basis utama kekuatan Hizbullah.

3. Aktivitas politik Hizbullah memiliki dampak positif dan negatif terhadap aktivitas perlawanannya serta memiliki konsekuensi yang harus diperhatikan untuk dapat menyeimbangkan antara keduanya.

Dampak positifnya antara lain : eksistensi gerakan perlawanan Hizbullah diakui oleh pemerintah dan mendapatkan legalitas dari parlemen. Dukungan dan legalitas ini membuatnya mampu mempertahankan kepemilikannya atas berbagai persenjataan dan peralatan perang. Di samping itu, keberhasilan perlawanannya mempengaruhi keberhasilannya dalam usaha meraih dukungan publik. Hal ini dapat terlihat ketika sebelum tahun 2004 Hizbullah berulang kali berhasil bertahan dari serangan Israel yang puncaknya adalah ditarik mundurnya Israel dari seluruh wilayah Lebanon, kecuali dari perkebunan Sheeba dan beberapa desa di sekitarnya.

Sedangkan konsekuensi yang harus dihadapinya antara lain : Hizbullah harus mampu membagi prioritas dan konsentrasi gerakannya antara perlawanan dan politik,

serta dalam bidang-bidang lain yang terkait dengan keduanya, misalnya bidang media dan pelayanan sosial. Pembagian ini tidak hanya dalam hal perhatian dan program, melainkan dalam hal pembagian penempatan para kader dan anggotanya dan juga pembagian dana. Dan hal ini bukan merupakan hal yang mudah. Namun, Hizbullah mampu melakukannya sehingga ia mampu untuk tetap eksis baik sebagai gerakan perlawanan maupun sebagai partai politik hingga saat ini. Tantangan lain yang dihadapi Hizbullah adalah untuk menjaga kesolidan anggotanya. Sebab semakin luas wilayah aktivitas dan semakin besar tanggung jawab membutuhkan kepercayaan dan pemahaman yang baik dari para anggota pada pemimpinnya maupun dari pemimpin pada para anggotanya. Dan hal yang juga harus diperhatikan adalah bahwa Hizbullah harus siap mempertanggungjawabkan setiap aktivitas perlawanan dan politiknya ke hadapan publik, yaitu masyarakat Lebanon dan masyarakat internasional.

Dan dampak negatifnya antara lain : Amerika Serikat memasukkan Hizbullah ke dalam daftar terorisnya. Hal ini dikarenakan Hizbullah dinilai mengancam kepentingannya di Timur Tengah, terutama karena keberadaan dan kekuatannya mengancam eksistensi aliansinya, yaitu Israel, di kawasan ini. Dampak negatif lain adalah bahwa sebagai masyarakat dan lawan politiknya merasa terancam dengan kekuatan persenjataan dan kekuatan pejuang yang dimilikinya. Kelompok Kristen dan Sunni khawatir akan kehilangan kekuasaan mereka dalam sistem sosial, politik, dan perekonomian Lebanon yang selama ini telah mereka miliki. Popularitas, profesionalitas, konsistensi, dan kemampuan Hizbullah baik dalam hal militer, persenjataan, maupun pelayanan sosial yang dilakukannya jauh melampaui apa yang dimiliki dan dilakukan pemerintah Lebanon pada masyarakatnya, khususnya masyarakat Syi'ah, selama ini. Dan dampak terakhir adalah bahwa Hizbullah selama ini mendapat tekanan politik dari pemerintah Lebanon maupun dari Amerika Serikat untuk menyerahkan berbagai persenjataannya dan menghentikan aktivitas perlawanannya terhadap Israel. Tuntutan ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Hizbullah sejak awal berdirinya dan menjatuhkan harga dirinya sebagai bagian dari bangsa Lebanon untuk dapat membebaskan diri dari penjajahan Israel.

4. Kesimpulan terakhir adalah bahwa Hizbullah memiliki berbagai strategi untuk menyelaraskan aktivitas perlawanan dan politiknya.

Strategi-strategi tersebut antara lain : memiliki manajemen organisasi dengan struktur yang hierarkis dengan pembagian tugas, tanggungjawab, ruang lingkup program, dan kewenangan yang jelas. Hizbullah memisahkan antara organ yang mengurus aktivitas perlawanannya dengan organ yang mengurus aktivitas politiknya. Hal ini membuat masing-masing organ dapat mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri dan menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional.

Strategi lain adalah dengan terus menerus mengadakan berbagai pelayanan sosial, melalui berbagai organisasi sosial yang dimilikinya ataupun berafiliasi dengannya; dengan kepemilikannya atas berbagai media massa dan teknologi komunikasi. Di samping itu, Hizbullah juga melakukan berbagai dialog untuk membangun hubungan baik dengan kelompok agama dan partai politik lain, meskipun informasi mengenai aktivitas ini hanya sedikit yang tersedia.

Strategi lain yang dijalankan Hizbullah adalah terdapatnya sumber pendanaan dalam setiap aktivitas yang dijalankannya. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang masih samar didapatkan, baik mengenai bantuan dana dari Iran yang dididapkannya belum didapatkan nominal dan wujud pasti dari bantuan tersebut sebab informasi yang ada masih berupa dugaan dan perkiraan. Sementara Hizbullah sendiri selalu menyatakan bahwa mereka mendapatkan dana dari iuran anggota, dari zakat dan khums, semacam infaq, masyarakat muslim Lebanon maupun dari luar Lebanon yang mempercayakan pengelolaannya kepada Hizbullah. Sumber pendanaan lain berasal dari hasil berbagai usaha yang dimilikinya, meskipun usaha apa yang dijalankan dan berapa keuntungan yang didapatkan juga tidak ada informasi yang jelas, sebab semuanya dikerjakan secara rahasia dan tidak atas nama Hizbullah.

5.1.Saran

1. Saran untuk Peneliti Hizbullah Selanjutnya

Jika penelitian ini ingin dilanjutkan maka akan sangat baik untuk terjun langsung ke Lebanon, mengunjungi pusat informasi Hizbullah, mengunjungi perkampungan kelompok Syi'ah dan merasakan hidup bersama mereka sehingga dapat lebih menjiwai dan memahami Hizbullah dalam konteks lingkungan sosialnya. Di

samping itu, perlu juga dilakukan berbagai pertemuan dan diskusi dengan para wakil Hizbullah di parlemen, pemerintahan kota, dan kabinet sehingga dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian-capaian mereka selama menjalani amanah tersebut, dan berbagai kendala yang mereka hadapi di dalamnya. Pertemuan dan diskusi dengan para pemimpin Hizbullah juga diperlukan, termasuk dengan komandan pejuang perlawanannya untuk mengetahui secara langsung mengenai suka duka dan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam aktivitas mereka.

2. Saran kepada Pemerintah Lebanon untuk Menyikapi Perkembangan Terakhir Hubungan Pemerintah Lebanon dan Hizbullah

Sedangkan saran mengenai pemecahan masalah atas ketegangan yang terjadi antara Hizbullah dengan pemerintah sejak tahun 2005 yang merupakan konsekuensi yang harus dihadapinya sejak memutuskan untuk terjun ke dalam pemerintahan Lebanon sebagai partai politik namun tetap teguh menjalankan aktivitas perlawanannya. Ketegangan ini akhirnya memuncak selama tahun 2007 dan 2008. Konflik ini sebaiknya diselesaikan melalui dialog antara pihak-pihak yang bertikai, dan Barat serta masyarakat internasional seharusnya tidak turut campur dalam masalah dalam negeri Lebanon, sebab itu adalah kewenangan dan urusan dalam negeri Lebanon yang harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Semua pihak yang bertikai tahu persis bagaimana kondisi sosial politik masyarakat dan kebutuhan Lebanon sebab mereka tinggal dan hidup di sana.

3. Saran untuk Pemerintah Indonesia untuk Menyikapi Perkembangan Terakhir Hubungan antara Hizbullah dan Pemerintah Lebanon

Saran untuk pemerintah Indonesia menyikapi keberadaan Hizbullah haruslah didasarkan atas prinsip menghormati pilihan dan kedaulatan suatu bangsa. Maka pemerintah pun harus aktif menjalin kerjasama dengan pemerintah Lebanon untuk dapat mendukung pemerintah dan rakyat Lebanon memperbaiki kondisi dalam negeri mereka dan mengukuhkan identitas nasional mereka serta mempertahankan kedaulatan negara mereka dari segala bentuk penjajahan baik berupa penjajahan atas tanah air maupun penjajahan atas kemerdekaan bersikap dan mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abild, Erik. 2007. *Hizbullah : A Contextual Study Focusing on Human Freedom*.
<http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/abild/Abild.pdf>
- Ahmad, Rifat Sayyed. 2006. *"Denyut Perlawanan dan Rahasia Kekuatan Hizbullah : The Untold Story From Within"*. Jakarta : Pustaka IIMAN
- Alagha, Joseph Elie. 2006. *The Shifts in Hizbullah's Ideology*. : Amsterdam University Press
- Almond, Gabriel A. 1983 *Communism and Political Culture Theory*. New York : PhD. Program in Political Science of The City of University of New
- Baklini, Abdo, Guilain Denoeux, and Robert Springborg. 1999. *Legislative Politics in The Arab World : The Resurgence of Democratic Institutions*. Colorado : Lynne Rienner Publisher Inc
- Black, James A dan Dean J. Champion. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Bottomore, Tom. 1992. *Sosiologi Politik*. cet.2. Jakarta : Rineka Cipta
- Deeb, Marius. *Shi'a Movement in Lebanon : Their Formation, Ideology, Social Basis, and Links with Iran and Syria*. Third World Quarterly Journal vol. 10 no. 2: Taylor and Francis, Ltd
- El Hokayem, Emile. 2007. *Hizballah and Syria : Outgrowing The Proxy Relationship*. Washington : The Washington Quarterly vol. 30 no. 2
- Gaban, Farid.dkk. 2006. *Apa dan Siapa Hizbullah dan Nasrallah*. Jakarta : Misbah hal
- Hamzeh, Ahmad Nizar. 2000. *Lebanon's Islamist and Local Politics : A New Reality*. Third World Quarterly vol. 21 No. 5. Newyork : Taylor and Francis Ltd
- _____. 2004. *In The Path of Hizbullah*. New York : Syracuss University Press
- Haley, P. Edward dan Snider, W. Lewis. 1979. *Lebanon in Crisis : Participants and Issues*. New York : Syracuse University Press

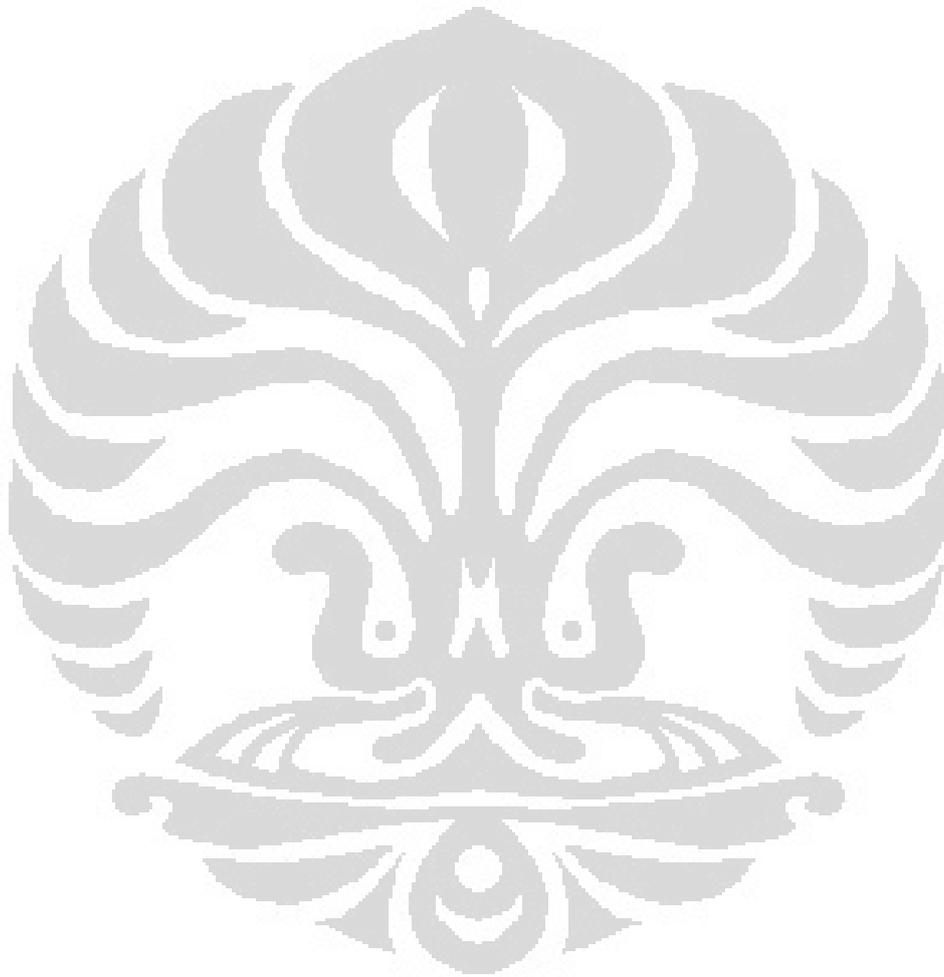
- Harik, Judith Palmer. 2004. *Hizbullah : The Changing Face of Terrorism*. New York : Palgrave MacMillan
- Kendal, Diana. 2007. *Sociology in Our Time : The Essential*. Cet.7. Belmont : Wadsworth Cengage Learning
- Lofland, John. 1996. *Social Movement Organization : Guide to Research on Insurgent Realities*, New York : Aldine De Gruyter
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. cet.2. Jakarta : Rineka Cipta
- Marshall, Gordon. 1998. *A Dictionary of Sociology*.
<http://www.encyclopedia.com>
- Maryam, Siti. dkk. Ed. 2004. *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern*. cet.2. Yogyakarta: Penerbit LESFI
- McCarthy, John D dan Mayer N.Zald. 1977. *Resource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory*. *The American Journal of Sociology* Vol.82 No.6, Chicago : University Of Chicago Press
- Miriam Budiarto, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta : INSIST Press
- Moghadam, Assaf. 2007. *Mayhem, Myths, and Martyrdom : The Shi'a Conception of Jihad in Terrorism and Political Violence*. London : Routledge
- Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods*. Cet.3. Boston : Allyn and Bacon
- Norton, Augustus Richard. 2007. *Hizbullah : A Short History*. New Jersey : Princeton University Press
- _____. 1999. *Hizbullah of Lebanon : Ekstrimist Ideals vs Mundane Politics*. New York : Council On Foreign Relations, Inc
- Qassem, Naim. 2008. *Blueprint Hizbullah*. Jakarta : Ufuk Press
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007. *Gerakan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Cet.6. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

- Tarrow, Sidney. 1998. *Power In Movement*. New York : Cambridge University Press
- Widyarsa, Riza Muhammad, 2007, *Pola Hubungan Patron Client dalam Gerakan Politik Masyarakat Arab, Studi Kasus Zu'ama di Lebanon (1943-2006)*. Jakarta : Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia
- Winslow, Charles 1996, *Lebanon : War and Politics in a Fragmented Society*, Newyork : Routledge
- Yin, Robert K. 1994. *Case Study Research : Design and Method*. California : SAGE Publication
- _____. 1997. *Studi Kasus : Desain dan Metodologi*. cet.2. Jakarta : PT. RajaGrafindo Pustaka
- Publikasi Elektronik**
- Bakri, Nada. 2008. *Clashes in General Strike in Lebanon*.
<http://www.nytimes.com/2008/05/08/world/middleeast/08lebanon.html>
- _____. 2008. *Shiite-Sunny Clashes Intensify in Beirut*.
<http://www.nytimes.com/2008/05/09/world/middleeast/09lebanon.html>
- Bingbing, Wu. *Shi'ite Collective Identity and the Construction of the Nation-State of Lebanon*. <http://www.usna.edu/MiddleEast/AME/Papers/Bingbing%20Wu%20Paper.pdf>
- Derhally, A.Massoud. 2009. *Lebanese Rival, Including Hizbullah Agree on Shape A Cabinet*. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601104&sid=aso1zwZ7Anc4>
- European Union Election Observation Mission. *Final Report : 2005 Parliamentary Election in Lebanon*. http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/lebanon/final_report_en.pdf
- Eyadat, Fadi. 2009. *Barak : Israel to Target Lebanon if Hezbollah Escalate Tension*. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1130385.html>
- Gambill, Gary C. 2007. *Islamist Groups in Lebanon*. The Middle East Review of International Affairs : <http://www.mafhoum.com/press10/312P1.htm>

- Goenaga, Amaia. 2005. *Electoral Profile : Lebanon Parliamentary Election 29 May-20 June 2005*. http://www.observatorioelectoral.es/en/ImgBase/EP-Lebanon_parliamentary_2005.pdf
- Haddad, Reem. 2002. *Al Jarha Association*.
<http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/jarha/index.html>
- Hollander, Ricky, 2006, *Backgrounder : Hizbullah's Media Weapon*.
http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=56&x_article=1205
- Jorisch, Avi. 2004. *Al Manar : Hizbullah Television*.
<http://www.meforum.org/583/al-manar-hizbullah-tv-24-7>
- Kedar, Mordechai. 2009. *Elections in Lebanon : Hizbullah Take Over?*
<http://www.biu.ac.il/SOC/besa/perspectives76.html>
- Khazen, Farid. *Lebanon's First Postwar Parliamentary Election, 1992 : An Imposed Choice*. <http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/elections92-part1.html>
- Krayem, Hassan. *The Lebanese Civil War and The Taif Agreement*.
<http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/conflict-resolution.html>
- Ludvigsen, Borre. 1998. *Jihad Al Binaa Developmental Association*.
<http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/jihad-el-binna/index.html>
- Mahdawi, Dalila and Rizk, Carol. 2009. *Hizbullah "Knows Everything" bout Israel's Border Force*.
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=108693
- Prothero, Mitchell and Beaumont, Peter. 2009. *Hezbollah Gears Up for New War*.
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/08/hezbollah-rearms-against-israel>
- Sofer, Roni. 2008. *Arab Media Say Hizbullah-Israel Prisoner Exchange Deal Expected in Coming Days*.
<http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3556246,00.html>

- Slackman, Michel. 2007. *Hezbollah Calls for Rally to Grip Beirut*.
<http://www.nytimes.com/2006/12/01/world/middleeast/01lebanon.html>
- Stern, Yoav. 2008. *Lebanon : Hezbollah Prisoner Swap Marks Failure for Israel*.
<http://www.haaretz.com/hasen/spages/997914.html>
- Teepie, Jim. 2008. *Israel-Hezbollah Swap Prisoner*.
<http://www1.voanews.com/english/news/a-13-2008-07-16-voa5-66756152.html>
- Lebanon Country Profile*, <http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/B2D794D1-FE56-4F1C-BA12-692CBF987B62/0/LebanonCountryProfile2009.pdf>
- March 14 and March 8 Members of Parliamentary*
<http://nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=97943>
- http://195.65.105.150/parline-e/reports/arc/2179_92.htm
- http://195.65.105.150/parline-e/reports/arc/2179_96.htm
- <http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=79981&language=en>
- <http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=113379&language=en>
- <http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/warn2/shiism.html>
- <http://www.arabmediawatch.com/amw/CountryBackgrounds/Lebanon/FactsandFigures/tabid/170/Default.aspx>
- <http://www.clhrf.com/unresagreements/Lebanese%20constituti.pdf>
- <http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/01/29/prisoner.exchange/index.html>
- <http://english.moqawama.org/essaydetailsf.php?eid=8199&fid=28>
- <http://www.elections.gov.lb/Electoral-Districts/List-of-Districts-And-Seat-Allocation.aspx>
- <http://www.erasmusfm.com/berita/dunia/times-israel-akan-serang-hizbullaha-tahun-2007.htm>
- <http://www.luptravel.com/worldmaps/lebanon11.html>
- http://www.mideastmonitor.org/issues/0801/0801_2.htm
- <http://www.middle-east-online.com/english/?id=35794>
- <http://www.middle-east-online.com/english/?id=35794>
- <http://www.mfa.gov.il/NR/exeres/9EE216D7-82EF-4274-B80D-6BBD1803E8A7.frameless.htm?NRMODE=Published>

<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/United+Nations+Security+Council+Resolution+1701+11-Aug-2006.htm>
http://www.standwithus.com/pdfs/flyers/hezbollah_program.pdf
<http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/region-liban-taef-en>
<http://www.muslimedia.com/ARCHIVES/movement00/hizb-orig1.htm>
<http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=44023>



The Lebanese Constitution
Promulgated May 23, 1926

Preamble

- a. Lebanon is a sovereign, free, and independent country. It is a final homeland for all its citizens. It is unified in its territory, people, and institutions within the boundaries defined in this constitution and recognized internationally.
- b. Lebanon is Arab in its identity and in its association. It is a founding and active member of the League of Arab States and abides by its pacts and covenants. Lebanon is also a founding and active member of the United Nations Organization and abides by its covenants and by the Universal Declaration of Human Rights. The Government shall embody these principles in all fields and areas without exception.
- c. Lebanon is a parliamentary democratic republic based on respect for public liberties, especially the freedom of opinion and belief, and respect for social justice and equality of rights and duties among all citizens without discrimination.
- d. The people are the source of authority and sovereignty; they shall exercise these powers through the constitutional institutions.
- e. The political system is established on the principle of separation, balance, and cooperation amongst the various branches of Government.
- f. The economic system is free and ensures private initiative and the right to private property.
- g. The even development among regions on the educational, social, and economic levels shall be a basic pillar of the unity of the state and the stability of the system.
- h. The abolition of political confessionalism is a basic national goal and shall be achieved according to a gradual plan.
- i. Lebanese territory is one for all Lebanese. Every Lebanese has the right to live in any part of it and to enjoy the sovereignty of law wherever he resides. There is no segregation of the people on the basis of any type of belonging, and no fragmentation, partition, or colonization. There is no constitutional legitimacy for any authority which contradicts the 'pact of communal coexistence'. This Constitutional Law shall be published in the Official Gazette.

[Part] A. Fundamental Provisions

[Chapter] I. On the State and its Territories

Article I [Territory]

Lebanon is an independent, indivisible, and sovereign state. Its frontiers are those which now bound it:

On the North: From the mouth of al-Kabir River, along a line following the course of this river to its point of junction with Khalid Valley opposite al-Qamar Bridge.

On the East: The summit line separating the Khalid Valley and al-Asi River (Orontes) and passing by the villages of Mu'aysarah, Harbanah, Hayt, Ibish, Faysan to the height of the two villages of Brina and Matraba. This line follows the northern boundary of the Ba'albak District at the northeastern and south eastern directions, thence the eastern boundaries of the districts of Ba'albak, Biqa', Hasbayya, and Rashayya.

On the South: The present southern boundaries of the districts of Sûr (Tyre) and Marji`yun.

On the West: The Mediterranean.

Article 2 [Territorial Integrity]

No part of the Lebanese territory may be alienated or ceded.

Article 3 [Administrative Areas]

The boundaries of the administrative areas may not be modified except by law.

Article 4 [Republic, Capital]

Greater Lebanon is a Republic the capital of which is Beirut.

Article 5 [Flag]

The Lebanese flag is composed of three horizontal stripes, a white stripe between two red ones. The width of the white stripe is equal to that of both red stripes. In the center of and occupying one third of the white stripe is a green Cedar tree with its top touching the upper red stripe and its base touching the lower red stripe.

[Chapter] II. The Rights and Duties of the Citizen

Article 6 [Nationality]

Lebanese nationality and the manner in which it is acquired, retained, and lost is to be determined in accordance with the law.

Article 7 [Equality]

All Lebanese are equal before the law. They equally enjoy civil and political rights and equally are bound by public obligations and duties without any distinction.

Article 8 [Personal Liberty, nulla poena sine lege]

Individual liberty is guaranteed and protected by law. No one may be arrested, imprisoned, or kept in custody except according to the provisions of the law. No offense may be established or penalty imposed except by law.

Article 9 [Conscience, Belief]

There shall be absolute freedom of conscience. The state in rendering homage to the Most High shall respect all religions and creeds and guarantees, under its protection, the free exercise of all religious rites provided that public order is not disturbed. It also guarantees that the personal status and religious interests of the population, to whatever religious sect they belong, is respected.

Article 10 [Education, Confessional Schools]

Education is free insofar as it is not contrary to public order and morals and does not interfere with the dignity of any of the religions or creeds. There shall be no violation of the right of religious communities to have their own schools provided they follow the general rules issued by the state regulating public instruction.

Article 11 [Official National Language]

Arabic is the official national language. A law determines the cases in which the French language may be used.

Article 12 [Public Office]

Every Lebanese has the right to hold public office, no preference being made except on the basis of merit and competence, according to the conditions established by law. A special statute guarantees the rights of state officials in the departments to which they belong.

Article 13 [Expression, Press, Assembly, Association]

The freedom to express one's opinion orally or in writing, the freedom of the press, the freedom of assembly, and the freedom of association are guaranteed within the limits established by law.

Article 14 [Home]

The citizen's place of residence is inviolable. No one may enter it except in the circumstances and manners prescribed by law.

Article 15 [Property]

Rights of ownership are protected by law. No one's property may be expropriated except for reasons of public utility in cases established by law and after fair compensation has been paid beforehand.

[Part] B. Powers

[Chapter] I. General Provisions

Article 16 [Legislative Power, One Chamber]

Legislative power is vested in a single body, the Chamber of Deputies.

Article 17 [Executive Power, Council of Ministers]

Executive power is entrusted to the Council of Ministers to be exercised in accordance with the conditions laid down in this constitution.

Article 18 [Bills]

The Parliament and the Council of Ministers have the right to propose laws. No law shall be promulgated until it has been adopted by the Chamber.

Article 19 [Constitutional Council]

A Constitutional Council is established to supervise the constitutionality of laws and to arbitrate conflicts that arise from parliamentary and presidential elections. The President, the President of the Parliament, the Prime Minister, along with any ten Members of Parliament, have the right to consult this Council on matters that relate to the constitutionality of laws. The officially recognized heads of religious communities have the right to consult this Council only on laws relating to personal status, the freedom of belief and religious practice, and the freedom of religious education. The rules governing the organization, operation, composition, and modes of appeal of the Council are decided by a special law.

Article 20 [Judicial Power]

Judicial power is to be exercised by the tribunals of various levels and jurisdictions. It functions within the limits of an order established by the law and offering the necessary guarantees to judges and litigants. The limits and conditions for the protection of the judges are determined by law. The judges are independent in the exercise of their duties. The decisions and judgments of all courts are rendered and executed in the name of the Lebanese People.

Article 21 [Electoral Rights]

Every Lebanese citizen who has completed his twenty-first year is an elector provided he fulfills the conditions laid down in the electoral law.

[Chapter] II. The Legislative Power

Article 22 [Senate]

With the election of the first Parliament on a national, non-confessional basis, a Senate is established in which all the religious communities are represented. Its authority is limited to major national issues.

Article 23 [Eligibility to the Senate]

{abolished 1927}

Article 24 [Electoral Laws]

(1) The Chamber of Deputies is composed of elected members; their number and the method of their election is determined by the electoral laws in effect. Until such time as the Chamber enacts new electoral laws on a non-confessional basis, the distribution of seats is according to the following principles:

- a. Equal representation between Christians and Muslims.
- b. Proportional representation among the confessional groups within each religious community.
- c. Proportional representation among geographic regions.

(2) Exceptionally, and for one time only, the seats that are currently vacant, as well as the new seats that have been established by law, are to be filled by appointment, all at once, and by a majority of two thirds of the Government of National Unity. This is to establish equality between Christians and Muslims as stipulated in the Document of National Accord [The Taif Agreement]. The electoral laws will specify the details regarding the implementation of this clause.

Article 25 [Dissolution]

Should the Chamber of Deputies be dissolved, the Decision of dissolution must provide for the holding of new elections in accordance with Article 24 and within a period not exceeding three months.

Article 26 [Location of Government and Parliament]

The Government and the Chamber of Deputies shall be located in Beirut.

Article 27 [Representation]

A member of the Chamber represents the whole nation. No restriction or stipulation may be imposed upon his mandate by his electors.

Article 28 [No Incompatibility]

A Deputy may also occupy a ministerial position. Ministers, all or in part, may be selected from among the members of the Chamber or from persons outside the Chamber.

Article 29 [Incompatibility by Law]

Cases in which persons are disqualified from becoming Deputies are determined by law.

Article 30 [Validating Elections]

The Deputies alone have competence to judge the validity of their mandate. No Deputy's mandate may be invalidated except by a majority of two thirds of the votes of the entire membership. This clause is automatically cancelled as soon as the Constitutional Council is established and as soon as the laws relating to it are implemented.

Article 31 [Illegal Sessions]

Meetings of the Chamber outside those set for legal sessions are unlawful and ipso facto null and void.

Article 32 [Ordinary Sessions]

The Chamber meets each year in two ordinary sessions. The first session opens on the first Tuesday following 15 March and continues until the end of May. The second session begins on the first Tuesday following 15 Oct; its meetings is reserved for the discussion of and voting on the budget before any other work. This session lasts until the end of the year.

Article 33 [Extraordinary Sessions]

The ordinary sessions begin and end automatically on the dates fixed in Article 32. The President of the Republic in consultation with the Prime Minister may summon the Chamber to extraordinary sessions by a Decree specifying the dates of the opening and closing of the extraordinary sessions as well as the agenda. The President of the Republic is required to convoke the Chamber if an absolute majority of the total membership so requests.

Article 34 [Quorum]

The Chamber is not validly constituted unless the majority of the total membership is present. Decisions are to be taken by a majority vote. Should the votes be equal, the question under consideration is deemed rejected.

Article 35 [Publicity]

The meetings of the Chamber are public. However, at the request of the Government or of five Deputies, the Chamber may sit in secret sessions. It may then decide whether to resume the discussion of the same question in public.

Article 36 [Voting Process]

Votes are to be cast verbally or by the members standing, except for elections when the ballot is secret. With respect to laws in general and on questions of confidence, the vote is always taken by roll call and the responses are made in an audible voice.

Article 37 [Vote of No-Confidence]

Every Deputy has the absolute right to raise the question of no-confidence in the government during ordinary or extraordinary sessions. Discussion of and voting on such a proposal may not take place until at least five days after submission to the secretariat of the Chamber and its communication to the ministers concerned.

Article 38 [Reintroduction of Bills]

No Bill that has been rejected by the Chamber may be reintroduced during the same session.

Article 39 [Indemnity]

No member of the Chamber may be prosecuted because of ideas and opinions expressed during the period of his mandate.

Article 40 [Immunity]

No member of the Chamber may, during the sessions, be prosecuted or arrested for a criminal offense without the permission of the Chamber, except when he is caught in the act.

Article 41 [Re-election]

Should a seat in the Chamber become vacant, the election of a successor begins within two months. The mandate of the new member does not exceed that of the old member whose place he is taking; however, should the seat in the Chamber become vacant during the last six months of its mandate, no successor may be elected.

Article 42 [General Elections]

General elections for the renewal of the Chamber shall take place within a sixty day period preceeding the expiration of its mandate.

Article 43 [Rules of Procedure]

The Chamber draws up its own internal rules and procedures.

Article 44 [First Session]

(1) Each time a new Chamber is elected, the Chamber meets under the presidency of the oldest member and the secretariat or the two youngest. It will then elect separately, by a secret ballot and by an absolute majority of the votes cast, the President and the Vice President of the Chamber to hold office for the length of the Chamber's term. At the third ballot, a relative majority is sufficient. Should the votes be equal, the oldest candidate is considered elected.

(2) Every time a new Chamber or Deputies is elected, as well as in the October session or each year, the Chamber elects two Secretaries by secret ballot according to the majority stipulated in the first part of this article.

(3) The Chamber may, once only, two years after the election of its President and his Deputy, and in the first session it holds, withdraw its confidence from the President of the Chamber or his Deputy by a Decision of two thirds of the Chamber, based on a petition signed by at least ten Deputies. The Chamber, at such point, must hold an immediate session to fill the vacant post.

Article 45 [Presence]

Members of the Chamber may only vote when they are present at the meeting. Voting by proxy shall not be permitted.

Article 46 [Parliamentary Order]

The Chamber has the exclusive right to maintain order in its meetings through its President.

Article 47 [Petitions]

Petitions to the Chamber may not be presented except in writing. They may not be presented verbally or at the bar of the Chamber.

Article 48 [Remuneration]

The remuneration of members of the Chamber is determined by law.

[Chapter] III. The Executive Power

[Section] 1. The President of the Republic

Article 49 [Presidential Powers]

(1) The President of the Republic is the head of the state and the symbol of the nation's unity. He shall safeguard the constitution and Lebanon's independence, unity, and territorial integrity. The President shall preside over the Supreme Defense Council and be the Commander-in-Chief of the Armed Forces which fall under the authority of the Council of Ministers.

(2) The President of the Republic shall be elected by secret ballot and by a two-thirds majority of the Chamber of Deputies. After a first ballot, an absolute majority shall be sufficient. The President's term is for six years. He may not be re-elected until six years after the expiration of his last mandate. No one may be elected to the Presidency of the Republic unless he fulfills the conditions of eligibility for the Chamber of Deputies.

(3) It is also not possible to elect judges, Grade One civil servants, or their equivalents in all public institutions to the Presidency during their term or office or within two years following the date of their resignation or their leaving office for whatever reason.

Article 50 [Oath]

Upon assuming office, the President of the Republic shall take an oath of fidelity before the Parliament to the Lebanese Nation and the constitution in the following terms:

"I swear by Almighty God to observe the Constitution and the laws of the Lebanese Nation and to maintain the independence of Lebanon and its territorial integrity."

Article 51 [Promulgation of Laws]

The President of the Republic promulgates the laws after they have been approved by the Chamber in accordance with the time limits specified by the constitution. He asks for the publication of these laws, and he may not modify these laws or exempt anyone from complying with their provisions.

Article 52 [Negotiation of International Treaties]

The President of the Republic negotiates international treaties in coordination with the Prime Minister. These treaties are not considered ratified except after agreement of the Council of Ministers. They are to be made known to the Chamber whenever the national interest and security of the state permit. However, treaties involving the finances of the state, commercial treaties, and in general treaties that cannot be renounced every year are not considered ratified until they have been approved by the Chamber.

Article 53 [List of Additional Presidential Powers]

1. The President presides over the Council of Ministers when he wishes without participating in voting.

2. The President designates the Prime Minister in consultation with the President of the Chamber of Deputies based on parliamentary consultations which are binding and the content of which the President formally discloses to the Prime Minister.

3. The President alone issues the Decree which designates the Prime Minister.

4. He issues, in agreement with the Prime Minister, the decree appointing the Cabinet and the decrees accepting the resignation of Ministers.
5. He issues, on his own authority, the decrees accepting the resignation of the Cabinet or considering it resigned.
6. He forwards to the Chamber of Deputies Bills that are delivered to him by the Council of Ministers.
7. He accredits ambassadors and accept the credentials of ambassadors.
8. He presides over official functions and grants official decorations by Decree.
9. He grants particular pardons by Decree, but a general amnesty cannot be granted except by a law.
10. He addresses, when necessary, letters to the Chamber of Deputies.
11. He may introduce, from outside the agenda, any urgent matter to the council of Ministers.
12. He may, in agreement with the Prime Minister, call the Council of Ministers to an extraordinary session, whenever he deems this necessary.

Article 54 [Countersignature]

The decisions of the President must be countersigned by the Prime Minister and the Minister or Ministers concerned except the Decree designating a new Prime Minister and the Decree accepting the resignation of the Cabinet or considering it resigned. Decrees issuing laws must be countersigned by the Prime Minister.

Article 55 [Dissolution of Parliament by Decree]

(1) The President of the Republic may, in accordance with the conditions stipulated in Articles 65 and 77 of

this constitution, ask the Council of Ministers to dissolve the Chamber of Deputies before the expiration of its mandate. If the Council, based on this request, decides to dissolve the Chamber of Deputies, the President issues the Decree dissolving it, and in this case, the electoral bodies meets as provided for in

Article 25, and the new Chamber is to be called to convene within fifteen days after the proclamation of the election.

(2) The administrative staff of the Chamber of Deputies continues to function until the election or a new Chamber.

(3) If elections are not held within the time limit specified in Article 25 of the constitution, the Decree dissolving the Chamber is considered null and void, and the Chamber of Deputies continues to exercise its powers according to the stipulations of the constitution.

Article 56 [Promulgation Time Limits]

(1) The President of the Republic promulgates the laws which have been adopted within one month of their transmission to the Government. He must promulgate laws that were declared urgent by a special Decision of the Chamber within five days.

(2) The President issues decrees and requests their promulgation; he has the right to ask the Council of Ministers to review any Decision that the Chamber has taken within fifteen days of the decision's transmission to the Presidency. If the Council of Ministers insists on the Decision or if the time limit passes without the Decree being issued or returned, the Decision or Decree is considered legally operative and must be promulgated.

Article 57 [Presidential Veto]

The President of the Republic, after consultation with the Council of Ministers, has the right to request the reconsideration of a law once during the period prescribed for its promulgation. This request may not be refused. When the President exercises this right, he is not required to

promulgate this law until it has been reconsidered and approved by an absolute majority of all the members legally composing the Chamber. If the time limits pass without the law being issued or returned, the law is considered legally operative and must be promulgated.

Article 58 [Urgent Bills]

Every Bill the Council of Ministers deems urgent and in which this urgency is indicated in the decree of transmission to the Chamber of Deputies may be issued by the President within forty days following its communication to the Chamber, after including it on the agenda of a general meeting, reading it aloud before the Chamber, and after the expiration of the time limit without the Chamber acting on it.

Article 59 [Adjourning the Chamber]

The President of the Republic may adjourn the Chamber for a period not exceeding one month, but he may not do so twice during the same session.

Article 60 [Responsibility]

(1) While performing his functions, the President of the Republic may not be held responsible except when he violates the constitution or in the case of high treason.

(2) However, his responsibility in respect of ordinary crimes is subject to the ordinary laws. For such crimes, as well as for violation of the constitution and for high treason, he may not be impeached except by a majority of two thirds of the total membership of the Chamber of Deputies. He is to be tried by the Supreme Council provided for in Article 80. The functions of Public Prosecutor of the Supreme Council are performed by a judge appointed by the Supreme Council in plenary session.

Article 61 [Suspension after Impeachment]

Should the President of the Republic be impeached, he is suspended from his functions. The presidency remains vacant until the Supreme Council has settled the matter.

Article 62 [Vacancy]

Should the Presidency become vacant for any reason whatsoever, the Council of Ministers exercises the powers of the President by delegation.

Article 63 [Remuneration]

The remuneration of the President of the Republic is determined by a law. It may not be increased or reduced during his term of office.

[Section] 2. The Prime Minister

Article 64 [Responsibility and Powers]

The Prime Minister is the Head of Government and its representative. He speaks in its name and is responsible for executing the general policy that is set by the Council of Ministers. He exercises the following powers: 1. He heads the Council of Ministers and is ex officio Deputy Head of the Supreme Defense Council.

2. He conducts the parliamentary consultations involved in forming a Cabinet. He signs, with the President, the Decree forming the Cabinet. The Cabinet must present its general statement or policy to the Chamber and gain its confidence within thirty days of the date of issuance of the Decree in which the Cabinet was formed. The Cabinet does not exercise its powers before it gains the Chamber's confidence nor after it has resigned or is considered resigned, except in the narrow sense of managing affairs.

3. He presents the Government's general policy statements before the Chamber of Deputies.

4. He signs, along with the President, all decrees, except the Decree which designates him the head of the Government, and the Decree accepting the Cabinet's resignation or considering it resigned.

5. He signs the Decree calling for an extraordinary parliamentary session, decrees issuing laws, and requests for reviewing laws.
6. He calls the Council of Ministers into session and sets its agenda, and he informs the President and the Ministers beforehand of the subjects included on the agenda and of the urgent subjects that will be discussed.
7. He supervises the activities of the public administrations and institutions, coordinates among the Ministers and provides general guidance to ensure the proper progress of affairs.
8. He holds working meetings with the competent authorities in the Government in the presence of the concerned Minister.

[Section] 3. The Council of Ministers

Article 65 [Powers]

Executive authority is vested in the Council of Ministers. It is the authority to which the armed forces are subject. Among the powers that it exercises are the following:

1. It sets the general policy of the Government in all fields, prepares Bills and organizational Decrees and makes the decisions necessary for implementing them.
2. It watches over the execution of laws and regulations and supervises the activities of all the Government's branches including the civil, military, and security administrations and institutions without exception.
3. It appoints Government employees and dismisses them and accepts their resignations according to the law.
4. It dissolves the Chamber of Deputies upon the request of the President of the Republic if the Chamber of Deputies, for no compelling reasons, fails to meet during one of its regular periods and fails to meet throughout two successive extraordinary periods, each longer than one month, or if the Chamber returns an annual budget plan with the aim of paralyzing the Government. This right cannot be exercised a second time if it is for the same reasons which led to the dissolution of the Chamber the first time.
5. The Council of Ministers meets in a locale specifically set aside for it, and the President chairs its meetings when he attends. The legal quorum for a Council meeting is a majority of two thirds of its members. It makes its decisions by consensus. If that is not possible, it makes its decisions by vote of the majority of attending members. Basic national issues require the approval of two thirds of the members of the Council named in the Decree forming the Cabinet. Basic national issues are considered the following: The amendment of the constitution, the declaration of a state of emergency and its termination, war and peace, general mobilization, international agreements and treaties, the annual government budget, comprehensive and longterm development projects, the appointment of Grade One government employees and their equivalents, the review of the administrative map, the dissolution of the Chamber of Deputies, electoral laws, nationality laws, personal status laws, and the dismissal of Ministers.

Article 66 [Ministries, Responsibility]

Only Lebanese who satisfy the conditions for deputization may assume ministerial posts. The Ministers administer the Government's services and assume the responsibility of applying the laws and regulations, each one according to the affairs of his administration and what is specific to them. Ministers are collectively responsible before the Chamber for the general policy of the Government and individually responsible for their personal actions.

Article 67 [Ministers in Parliament]

Ministers may attend the Chamber if they so desire, and they have the right to be heard whenever they request to speak. They may be assisted by whomever they select from among the officials of their Departments.

Article 68 [Vote of No-Confidence]

When the Chamber, in accordance with Article 37, passes a vote of noconfidence in a Minister, that Minister is required to resign.

Article 69 [Government Resignation]

(1) The Government is considered resigned in the following circumstances:

- a. if the Prime Minister resigns;
- b. if it loses more than a third of the members specified in the Decree forming it;
- c. if the Prime Minister dies;
- d. at the beginning of the term of the President of the Republic;
- e. at the beginning of the term of the Chamber of Deputies;
- f. when it loses the confidence of the Chamber of Deputies based on the Chamber's initiative or based on the Council's initiative to gain the Chamber's confidence.

(2) Ministers are to be dismissed by a Decree signed by the President and the Prime Minister in accordance with Article 65 of the constitution.

(3) When the Council resigns or is considered resigned, the Chamber of Deputies is automatically considered in extraordinary session until a new Council has been formed and has gained the Chamber's confidence.

Article 70 [Impeachment]

(1) The Chamber of Deputies has the right to impeach the Prime Minister and Ministers for high treason or for serious neglect of their duties. The Decision to impeach may not be taken except by a majority of two thirds of the total membership of the Chamber.

(2) A special law is to be issued to determine the conditions of the civil responsibility of the Prime Minister and individual Ministers.

Article 71 [Judicial Impeachment Proceedings]

The impeached Prime Minister or Minister are tried by the Supreme Council.

Article 72 [Consequences of Impeachment]

A Prime Minister or Minister leaves office as soon as the Decision of impeachment concerning him is issued. If he resigns, his resignation does not prevent judicial proceedings from being instituted or continued against him.

[Part] C. Procedural Provisions

[Chapter] I. Election of the President of the Republic

Article 73 [Election of the President]

One month at least and two months at most before the expiration of the term of office of the President of the Republic, the Chamber is summoned by its President to elect the new President of the Republic. However, should it not be summoned for this purpose, the Chamber meets of its own accord on the tenth day preceding the expiration of the President's term of office.

Article 74 [Vacancy of Presidency]

Should the Presidency become vacant through the death or resignation of the President or for any other cause, the Chamber meets immediately and by virtue of the law to elect a successor. If the Chamber happens to be dissolved at the time the vacancy occurs, the electoral bodies are convened without delay and, as soon as the elections have taken place, the Chamber meets by virtue of the law.

Article 75

The Chamber meeting to elect the President of the Republic is considered an electoral body and not a legislative assembly. It must proceed immediately, without discussion or any other act, to elect the Head of the State.

[Chapter] II. Amending the Constitution

Article 76 [Proposal]

The constitution may be revised upon the proposal of the President of the Republic. In such a case the Government submits a draft law to the Chamber of Deputies.

Article 77 [Request]

The constitution may also be revised upon the request of the Chamber of Deputies. In this case the following procedures are to be observed:

During an ordinary session and at the request of at least ten of its members, the Chamber of Deputies may recommend, by a majority of two thirds of the total members lawfully composing the Chamber, the revision of the constitution. However, the articles and the questions referred to in the recommendation must be clearly defined and specified. The President of the Chamber then transmits the recommendation to the Government requesting it to prepare a draft law relating thereto. If the Government approves the recommendation of the Chamber by a majority of two thirds, it must prepare the draft amendment and submit it to the Chamber within four months; if it does not agree, it shall return the Decision to the Chamber for reconsideration. If the Chamber insists upon the necessity of the amendment by a majority of three fourths of the total members lawfully composing the Chamber, the President of the Republic has then either to accede to the Chamber's recommendation or to ask the Council of Ministers to dissolve the Chamber and to hold new elections within three months. If the new Chamber insists on the necessity of amending the constitution, the Government must yield and submit the draft amendment within four months.

Article 78 [Priority]

When a draft law dealing with a constitutional amendment is submitted to the Chamber, it must confine itself to its discussion before any other work until a final vote is taken. It may discuss and vote only on articles and questions clearly enumerated and defined in the draft submitted to it.

Article 79 [Majority, Promulgation]

(1) When a draft law dealing with a constitutional amendment is submitted to the Chamber, it cannot discuss it or vote upon it except when a majority of two thirds of the members lawfully composing the Chamber are present. Voting is by the same majority.

(2) The President of the Republic is required to promulgate the law of the constitutional amendment under the same conditions and in the same form as ordinary laws. He has the right, within the period established for the promulgation, to ask the Chamber to reconsider the draft, after consultation with the council of Ministers, in which case the vote is by a majority of two thirds.

[Part] D. Miscellaneous Provisions

[Chapter] I. The Supreme Council

Article 80 [Function, Composition, Organizational Law]

The Supreme Council, whose function is to try Presidents and Ministers, consists of seven deputies elected by the Chamber of Deputies and of eight of the highest Lebanese judges, according to their rank in the judicial hierarchy, or, in case of equal ranks, in the order of seniority. They meet under the presidency of the judge of the highest rank. The Decisions of

condemnation by the Supreme Council is rendered by a majority of ten votes. A special law is to be issued to determine the procedure to be followed by this Council.

[Chapter] II. Finances

Article 81 [Integral Tax Law]

No public taxes may be imposed and no new taxes established or collected in the Lebanese Republic except by a comprehensive law which applies to the entire Lebanese territory without exception.

Article 82 [Rule of Law]

No tax may be modified or abolished except by virtue of law.

Article 83 [Yearly Budget]

Each year at the beginning of the October session, the Government has to submit to the Chamber of Deputies the general budget estimates of state expenditures and revenues for the following year. The budget is voted upon article by article.

Article 84 [Budget Discussion]

During the discussion of the budget and draft laws involving the opening of supplementary or extraordinary credits, the Chamber may not increase the credits proposed in the budget or in the draft laws mentioned above either by way of amendment Or by means of a proposal. The Chamber may, however, adopt, by way of proposal, laws involving further expenditures after the close of this discussion.

Article 85 [Extraordinary Credit]

No extraordinary credit may be opened except by a special law. Nevertheless, should unforeseen circumstances render urgent expenditures necessary, the President of the Republic may issue a Decree, based on a Decision of the Council or Ministers, to open extraordinary or supplementary credits or transfer appropriations in the budget as long as these credits do not exceed a maximum limit specified in the budget law. These measures are to be submitted to the Chamber for approval at the first ensuing session.

Article 86 [Provisional Budget]

If the Chamber of Deputies has not given a final decision on the budget estimates before the expiration of the session devoted to the examination of the budget, the President of the Republic, in coordination with the Prime Minister, immediately convenes the Chamber for an extraordinary session which lasts until the end of January in order to continue the discussion of the budget; if, at the end of this extraordinary session, the budget estimates have not been finally settled, the Council of Ministers may take a decision on the basis of which a decree is issued by the President giving effect to the above estimates in the form in which they were submitted to the Chamber. However, the Council of Ministers may not exercise this right unless the budget estimates were submitted to the Chamber at least fifteen days before the commencement of its session. Nevertheless, during the said extraordinary session, taxes, charges, duties, imposts, and other kinds of revenues continue to be collected as before. The budget of the previous year is adopted as a basis. To this must be added the permanent credits which have been dropped, and the Government fixes the expenditures for the month of January on the basis of the 'provisional twelfth.'

Article 87 [Final Financial Accounts, Auditing Bureau]

The final financial accounts of the administration for each year must be submitted to the Chamber for approval before the promulgation of the budget of the year following. A special law is to be issued for the setting up of an Auditing Bureau.

Article 88 [Public Loan]

No public loan or undertaking involving an expenditure from the treasury funds may be contracted except by virtue of a law.

Article 89 [Contracts, Concessions, Resources, Monopolies]

No contract or concession for the exploitation of the natural resources of the country, or a public utility service, or a monopoly may be granted except by virtue of a law and for a limited period.

[Part] E. Provisions Relating to the Mandatory Power and the League of Nations

Article 90 [...]

{Abolished in 1943}

Article 91 [...]

{Abolished in 1943}

Article 92 [...]

{Abolished in 1943}

Article 93 [...]

{Abolished in 1947}

Article 94 [...]

{Abolished in 1943}

[Part] F. On the Abolition of Political Confessionalism

Article 95 [National Committee]

(1) The first Chamber of Deputies which is elected on the basis of equality between Muslims and Christians takes the appropriate measures to realize the abolition of political confessionalism according to a transitional plan. A National Committee is to be formed, headed by the President of the Republic, including, in addition to the President of the Chamber of Deputies and the Prime Minister, leading political, intellectual, and social figures.

(2) The tasks of this Committee are to study and propose the means to ensure the abolition of confessionalism, propose them to the Chamber of Deputies and the Ministers, and supervise the execution of the transitional plan.

(3) During the transitional phase:

a. The confessional groups are to be represented in a just and equitable fashion in the formation of the Cabinet.

b. The principle of confessional representation in public service jobs, in the judiciary, in the military and security institutions, and in public and mixed agencies are to be cancelled in accordance with the requirements of national reconciliation; they shall be replaced by the principle of expertise and competence. However, Grade One posts and their equivalents are exempt from this rule, and the posts must be distributed equally between Christians and Muslims without reserving any particular job for any confessional group but rather applying the principles of expertise and competence.

[Part] G. Provisions Relating to the Election and Functions of the Senate

Article 96 [...]

{Abolished in 1947}

Article 97 [...]

{Abolished in 1947}

Article 98 [...]

{Abolished in 1947}

Article 99 [...]

{Abolished in 1947}

Article 100 [...]

{Abolished in 1947}

[Part] H. Additional Provisions

Article 101 [Greater Lebanon, The Lebanese Republic]

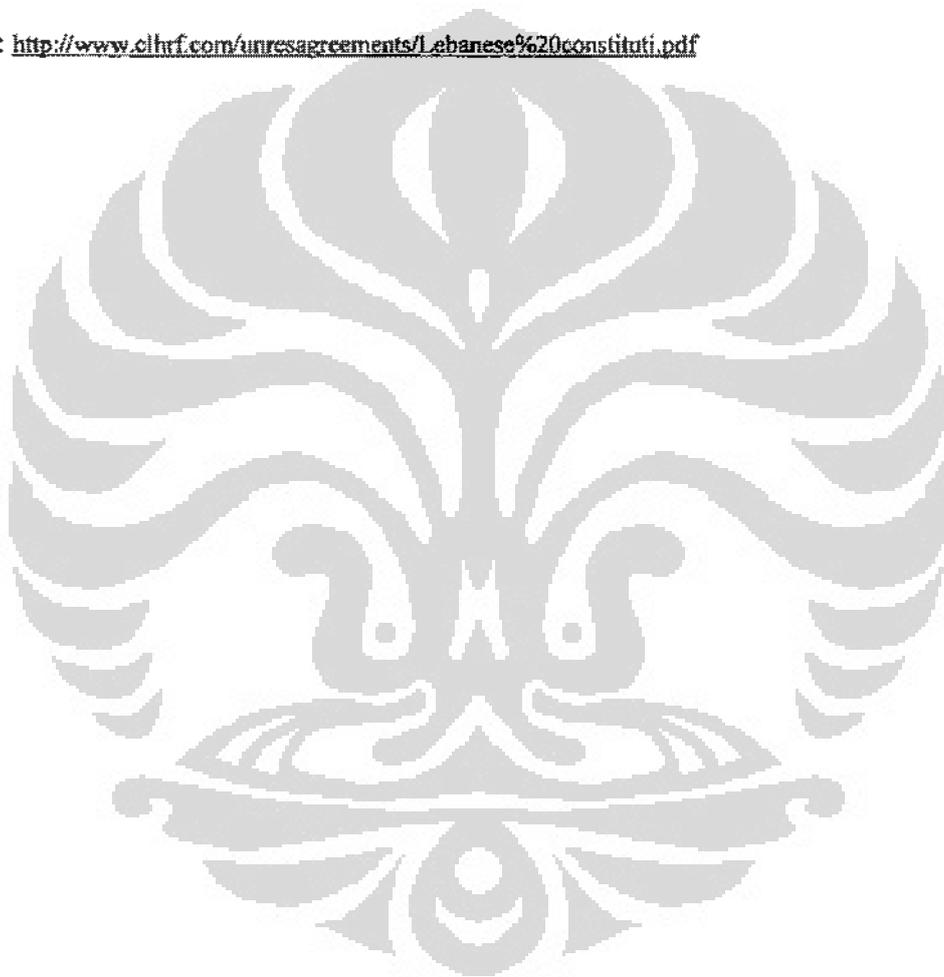
Beginning 1 Sep 1929, the state of 'Greater Lebanon' is to be known as 'The Lebanese Republic' without any

other change or modification.

Article 102 [Abrogation of Old Laws]

All legislative provisions contrary to the present constitution are abrogated.

Referensi : <http://www.cihrf.com/unresagreements/Lebanese%20constituti.pdf>



30/11/2009

Manifesto Politik Hizbullah Tahun 2009

Sumber : <http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=113379&language=en>

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah announced on Monday the Resistance party's new political document that was approved during the party's General Conference that lasted for months.

Sayyed Nasrallah held a press conference through a giant screen at al-Jinan hall on the airport road to declare the new political document. The press conference was attended by prominent Lebanese, Arab and international journalists as well as some Hezbollah leaders and various political figures.

His eminence started the conference by noting that Hezbollah new political document aims to define the political vision of the party and includes its visions, stances, and aspirations. "This political document also comes as a result of the responsibility of sacrifice that we have experienced," his eminence added.

"At an exceptional time filled with transformations, it is no longer possible to address these changes without noting the special position our resistance has reached. We will address these transformations through two paths: the first is the Resistance one that resorts to the military and political victories as well as the expansion of the Resistance while the second focuses on the path of the US-Israeli mastery and hegemony which is witnessing military defeats that showed a failure in administering the developments."

"What strengthens the international hegemony system crisis are the actual collapses in the financial markets and the entry of the US economy in a situation of failure. Therefore, it's possible to say that we are amid historical transformations that signal the retreat of the US role as a predominant power and the demise of the Zionist entity."

"The resistance movements are at the heart of international transformations and emerge as a strategic factor after performing a central role in producing those transformations in our region," Sayyed Nasrallah read out, adding that the Resistance in Lebanon was the first to fight occupation and perceived since the beginning that it will reach victory at the end. "Through its long path and its depicted victories, the Resistance's project has grown from a liberation power to a balance and confrontation one to a defense and deterrence one in addition to its political and internal role as an influencing basis in building the just and capable state. The Resistance in Lebanon has evolved from a Lebanese national value to an Arab and Islamic value and has become today an international value that's taught all over the world."

L-2

"Hezbollah does not underestimate the size of current challenges and threats or the severity of the confrontation path. However, Hezbollah has now clearer choices and more trust in its people. In this context, Hezbollah defines the main headlines that constitutes a political and intellectual framework of its vision and stances towards the challenges," Hezbollah Secretary General read out, concluding the manifesto's introduction.

CHAPTER ONE – DOMINATION AND HEGEMONY

"Following the World War II, the United States became the center of polarity in the world, taking advantage of accomplishments on several levels of knowledge, including education, science and technology that are supported by an economic system that only views the world as markets that have to abide by the American own view. The most dangerous thing in their hegemony is that they consider that they own the world and therefore, the Western expanding strategy turned to be an international one without limits," Hezbollah new manifesto says, according to Sayyed Nasrallah.

"Globalization has reached its most dangerous aspect when it turned to a military one led by those following the Western plan of domination and was reflected in the Middle East in Afghanistan, Iraq, Palestine and Lebanon. This plot found its peak with the neoconservative grip under the administration of George Bush since their project found its way to execution after he was sworn in. It was neither weird nor surprised that what the neoconservative platform focused on the most was rebuilding US capabilities what reflected a strategic vision of US national security through building military strategies not only as a force of deterrence but also as a force of action and intervention. Following the September 11 attacks, the Bush administration found that the opportunity was appropriate to exercise the largest possible influence under the slogan of universal war against terrorism. It has performed many attempts that were considered as successful in the beginning based on militarizing relationships with other countries and on having monopoly over decision-making by taking strategic decisions and rapidly ending war in Afghanistan to have the maximum amount of time for the next step, which is taking over Iraq and the foundation for launching the New Middle East project. Furthermore, the Bush administration sought to establish a conformity between terrorism and Resistance to remove the latter's legitimacy and therefore justify wars against its movements, seeking to remove the fundamental right of the nations of defending their right to live with dignity and national sovereignty."

"The Bush administration gave itself an absolute right to launch destroying wars that don't differentiate between human beings, given that the cost of the US terrorism wars has cost the humanity until now millions of people as well as global destruction. In brief, the Bush administration has transformed the United States into a danger that threatens the whole world."

"Terrorism has turned to be an American pretext for hegemony through many tools such as pursuit, arbitrary detention, unjust trials witnessed in Guantanamo as well as through direct

meddling in the sovereignty of other countries and states in addition to impose sanctions against complete nations. The US terror is the root of all terror in the world."

"The failure and decline of the US strategy does not mean it will easily stop interfering, but will make an effort to protect its strategic interests. Indeed, if the whole world was suffering from the American hegemony, the Arab and Islamic nations seem to suffer even more for many considerations related to history, geographic site, civilization and culture. The Arab and Islamic world has always been subject to endless wild and savage wars. However, its most dangerous steps was reached with the creation of the Zionist entity. The central goal of the American hegemony resides in dominating the nations politically, economically, culturally and through all aspects. To achieve this goal, Washington resorted to different general policies and work strategies including providing the Zionist entity with stability guarantees, create sedition and divisions in the region especially sectarian ones."

"The American arrogance has left no choice to our nation and people but the choice of resistance, at least for a better life, and for a humanitarian future, a future governed by relations of brotherhood, solidarity and diversity at the same time in a world of peace and harmony."

CHAPTER TWO – LEBANON

CHAPTER TWO, SECTION ONE – THE HOMELAND

"Lebanon is our homeland and the homeland of our fathers, ancestors. It's also the homeland of our children, grandchildren, and the coming generations. It is the country to which we have given our most precious sacrifices for its sovereignty and pride, dignity and liberation," Sayyed Nasrallah read out from the political document introduction on Lebanon.

"We want Lebanon for all Lebanese alike, and we want it unified. We reject any kind of segregation or federalism, whether explicit or disguised. We want Lebanon to be sovereign, free, independent, strong and capable. We want it also to be strong, active, and present in the geopolitics of the region. We want it also to be a key contributor in making the present and the future."

"To conclude, it should be mentioned that one of the most important conditions for the establishment of a home of this type is having a fair state, a state which is capable and strong, as well as a political system that truly represents the will of the people and their aspirations for justice, freedom and security, stability and well-being and dignity. This is what all the Lebanese people want and work to achieve and we are a part of them."

CHAPTER TWO, SECTION TWO – THE RESISTANCE

"Israel represents an eternal threat to Lebanon – the State and the entity – and a real danger to the country in terms of its historical ambitions in land and water especially that

Lebanon is considered to be a model of coexistence in a unique formula that contradicts with the idea of the racist state which expresses itself in the Zionist entity. Furthermore, Lebanon's presence at the borders of occupied Palestine obliged it to bear national and pan-Arab responsibilities."

"The Israeli threat to this country began since the laying of the Zionist entity in the land of Palestine, an entity that did not hesitate to disclose its ambitions to occupy some parts of Lebanon and to seize its wealth, particularly its water. Therefore, it sought to achieve these ambitions gradually. This entity started its aggression on Lebanon since 1948 from the border to the depth of the country, from the Hula massacre in 1949 to the aggression on the Beirut International Airport in 1968, including long years of attacks on border areas, their land, population and wealth, as a prelude to seize direct land through repeated invasions, leading to the March 1978 invasion and the occupation of the border area, making its people subject to its authority at all levels, as a prelude to subdue the whole country in the invasion of 1982."

"All of this was taking place with a full support of the United States and ignorance until the level of complicity of the so-called international community and its institutions amid a suspicious Arab official silence and an absence of the Lebanese authority at the time leaving the land and people subject to the Israeli occupation without assuming its responsibilities and national duties."

"Under this great national tragedy, Lebanese who are loyal to their homeland didn't have the choice but to use their right and proceed from their national duty and moral and religious in the defense of their land. Thus, their choice was: the launch of an armed popular resistance to confront the Zionist danger and permanent aggression."

"In such difficult circumstances, the process of restoring the nation through armed resistance started, paving the way for liberating the land and the political decision from the hands of the Israeli occupation as a prelude to the restoration of the State and the building of its constitutional institutions. The Resistance has crowned all these dimensions together through achieving the Liberation in 2000 and the historic victory in July 2006, presenting to the whole world a true experience in defending the homeland, an experience that turned into a school from which nations and states benefit to defend their territory, protect their independent and maintain their sovereignty."

"This national achievement was made real thanks to the support of a loyal nation and a national army, thus frustrating the enemy's goals and causing him a historic defeat, allowing the Resistance to celebrate alongside its fighters and martyrs as well as all of Lebanon through its nation and army the great victory that paved the way for a new phase in the region entitled pivotal role and function of the resistance to deter the enemy and ensure the protection of the country's independence, sovereignty and defend its people and completing the liberation of the rest of the occupied territory."

"The Resistance role is a national necessity as long as the Israeli threats and ambitions continue. Therefore, and in the absence of strategic balance between the state and the enemy, the Israeli threat obliges Lebanon to endorse a defensive strategy that depends on a popular resistance participating in defending the country and an army that preserves the security of the country, in a complementarity process that proved to be successful through the previous phase."

"This formula, developed from within the defensive strategy, constitutes an umbrella of protection for Lebanon, especially after the failure of other speculations on the umbrellas, whether international or Arab, or negotiating with the enemy. The adoption of the Resistance path in Lebanon achieved its role in liberating the land, restoring the State institutions and the protecting the sovereignty. Afterwards, Lebanese are concerned with safeguarding and maintaining this format because the Israeli danger threatens Lebanon in all its components, what requires the widest Lebanese participation in assuming responsibilities of defense."

"Finally, the success of the Resistance experience in fighting the enemy and the failure of all plots and schemes to delete resistance movements or besieging them or even disarming them annexed to the continuation of the Israeli threat in Lebanon obliges the Resistance to do its best to strengthen its abilities and consolidate its strengths to assume its national responsibilities and liberate what remains under the Israeli occupation in the Shebaa farms and Kfarshouba Drills and the Lebanese town of Ghajar as well as liberating the detainees and missing people and martyrs' bodies."

CHAPTER TWO, SECTION THREE – STATE AND POLITICAL SYSTEM

"The main problem in the Lebanese political system, which prevents its reform, development and constant updating is political sectarianism," Hezbollah manifesto clearly states. "The fact that the Lebanese political system was established on a sectarian basis constitutes in itself a strong constraint to the achievement of true democracy where an elected majority can govern and an elected minority can oppose, opening the door for a proper circulation of power between the loyalty and the opposition or the various political coalitions. Thus, abolishing sectarianism is a basic condition for the implementation of the majority-minority rule."

"Yet, and until the Lebanese could reach through their national dialogue this historic and sensitive achievement, which is the abolishment of political sectarianism, and since the political system in Lebanon is based on sectarian foundations, the consensual democracy will remain the fundamental basis for governance in Lebanon, because it is the actual embodiment of the spirit of the constitution and the essence of the Charter of the co-existence."

"From here, any approach to the national issues according to the equation of the majority and minority awaits the achievement of the historic and social conditions for the exercise of effective democracy in which the citizen becomes a value in itself. Meanwhile, the Lebanese will to live together in dignity and equal rights and duties requires a constructive cooperation in order to consolidate the principle of true partnership, which constitutes the most appropriate formula to

protect the full diversity and stability after an era of instability caused by the different policies based on the tendency towards monopoly, cancellation and exclusion." "The consensual democracy constitutes an appropriate political formula to guarantee true partnership and contributes in opening the doors for everyone to enter the phase of building the reassuring state."

"Our vision for the State that we should build together in Lebanon is represented in the State that preserves public freedoms, the State that is keen on national unity, the State that protects its land, people, and sovereignty, the State that has a national, strong and prepared army, the State that is structured under the base of modern, effective and cooperative institutions, the State that is committed to the application of laws on all its citizens without differentiation, the State that guarantees a correct and right parliamentary representation based on a modern election law that allows the voters of choosing their representative away from pressures, the State that depends on qualified people regardless of their religious beliefs and that defines mechanisms to fight corruption in administration, the State that enjoys an independent and non-politicized Justice authority, the State that establishes its economy mainly according to the producing sectors and works on consolidating them especially the agriculture and industry ones, the State that applies the principle of balanced development between all regions, the State that cares for its people and works to provide them with appropriate services, that State that takes care of the youth generation and help young people to develop their energies and talents, the State that works to consolidate the role of women at all levels, the State that care for education and work to strengthen the official schools and university alongside applying the principle of obligatory teaching, the State that adopts a decentralized system, the State that works hard to stop emigration and the State that guards its people all over the world and protects them and benefits from their positions to serve the national causes."

"The establishment of a state based on these specifications and requirements is a goal to us just like it's the goal of every honest and sincere Lebanese. In Hezbollah, we will exert all possible efforts, in cooperation with the popular and political forces, to achieve this noble national goal."

CHAPTER TWO, SECTION FOUR – LEBANESE-PALESTINIAN TIES

"One of the tragic consequences of the emergence of the Zionist entity on the land of Palestine and the displacement of its inhabitants is the problem of Palestinian refugees who moved to Lebanon to live temporarily in its land as guests to their fellow Lebanese until returning to their homes from where they were expelled."

"The original and direct reason of the sufferance of Lebanese and Palestinians was actually the Israeli occupation of Palestine and all the resulting tragedies and calamities in the region. Moreover, the suffering of the Palestinian refugees in Lebanon was not limited to the pain of forced migration but also to the Israeli massacres and atrocities in addition to what

happened in the Nabatiyeh camp that has been fully destroyed. Palestinian refugees are also deprived of all civilian and social rights since the Lebanese governments didn't assume their responsibilities towards them."

"The Lebanese authorities are nowadays called to assume their responsibilities and therefore build the Lebanese-Palestinian relations under right, solid and legal bases that respect the justice, rights and mutual interests' balances to both nations. It is imperative that the Lebanese-Palestinian relationship remains governed by the whims and moods, as well as political calculations and internal interactions and international interventions."

"We believe that succeeding in this mission requires a Lebanese-Palestinian direct dialogue, a permission for Palestinians in Lebanon to agree on a unified reference that represents them, providing Palestinian refugees with their social and civilian rights, committing to the Right of Return and reject settlement."

CHAPTER TWO, SECTION FIVE – LEBANON AND ARAB TIES

"Lebanon is committed to the just and fair Arab causes, at the top of which comes the Palestinian cause as well as the conflict with the Israeli enemy. Even more, there is a definite need for concerted efforts to overcome the conflicts that run through the Arab ranks."

"The contradiction of strategies and the difference of alliances, despite their seriousness and intensity, doesn't justify the policies of targeting or engaging in external projects, based on the deepening discord and inciting sectarianism, leading to the exhaustion of the nation and therefore serving the Zionist enemy in the implementation of the purposes of America."

"The Resistance choice constitutes once again a central need and an objective factor in strengthening the Arab stance and weakening the enemy. In this context, Syria has recorded a distinctive attitude and supported the resistance movements in the region, and stood beside us in the most difficult circumstances, and sought to unify Arab efforts to secure the interests of the region and challenges."

"Hence, we emphasize the need to adhere to the distinguished relations between Lebanon and Syria as a political and security and economic need, dictated by the two countries and two peoples and the imperatives of geopolitics and the requirements for Lebanese stability and common challenges. We also call for an end to all the negative sentiment that have marred bilateral ties in the past few years and urge these relations to return to their normal status as soon as possible."

CHAPTER TWO, SECTION SIX – LEBANON AND ISLAMIC RELATIONS

"The Arab and Islamic world is facing challenges that shouldn't be undermined. Indeed, the sectarian fabricated conflicts, especially between Sunnis and Shiites, are threatening the cohesiveness of our societies. Therefore, and instead of being a source of wealth, the sectarian

diversities seem to be exploited as factors of division and incitement. The situation resulting from this bad use seems to be the result of the intersection of Western deliberate policies, the US in particular."

"Hezbollah emphasizes the necessity to cooperate with Islamic states at different levels to gain strength in confronting hegemony schemes. Such cooperation also serves in facing the cultural invasion of the community and media, and encourages the Islamic states to take advantage of its resources in the exchange of the different benefits between these countries." "In this context, Hezbollah considers Iran as a central state in the Muslim world, since it is the State that dropped through its revolution the Shah's regime and its American-Israeli projects, and it's also the state that supported the resistance movements in our region, and stood with courage and determination at the side of the Arab and Islamic causes and especially the Palestinian one."

CHAPTER TWO, SECTION SEVEN – LEBANON AND INTERNATIONAL RELATIONS

"Hezbollah considers that the unilateral hegemony in the world overthrows the international balance and stability as well as the international peace and security. The unlimited US support for Israeli and its cover for the Israeli occupation of Arab lands annexed to the American domination of international institutions and the American meddling in various states' affairs and adoption of the principle of circulating wars puts the American administration in the position of the aggressor and holds it responsible in producing chaos in the international political system." "The American administration's unlimited support to Israel ... places the American administration in the position of the enemy of our nation and our peoples."

CHAPTER THREE – PALESTINE AND COMPROMISE NEGOTIATIONS

"The history of the Arab-Israeli conflict proves that armed struggle and military resistance is the best way of ending the occupation. The method of negotiations has proven that the Zionist entity becomes more boastful and more belligerent, and that it has no intention of reaching an accord. The resistance has managed to achieve a huge victory over the Zionist entity, provide the homeland with protection, and liberation of the remainder of its land. This function is a lasting necessity before Israel's expansionist threats and ambitions as well as the lack of a strong government in Lebanon. The ongoing Israeli threat forces the resistance to continue to boost its capacity ... in order to fulfill its role in liberating occupied territory." "We categorically reject any compromise with Israel or recognizing its legitimacy," his eminence concluded. "This position is definitive, even if everyone recognizes Israel."

CURRICULUM VITAE

NAMA : FRIANE AURORA
TEMPAT TANGGAL LAHIR : PADANG PANJANG, 17 JUNI 1986
ALAMAT : JL. K. S. Tubun No. 10 Telanaipura
JAMBI
EMAIL : rara.sholihah@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	NAMA SEKOLAH/ UNIVERSITAS	Jurusan/ Bidang Studi
1997	SD	ADHYAKSA I JAMBI	-
2000	SLTP	NEGERI 7 JAMBI	-
2003	SMU	SMU Negeri 1 JAMBI	JURUSAN IPA
2008	S-1	Universitas Gadjah Mada	Hubungan Internasional
2010	S-2	Universitas Indonesia	Politik dan Internasional di Timur Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun	Institusi
2001-2002	Kursus bahasa Inggris dari <i>basic level</i> hingga <i>intermediate level</i> di Lembaga Indonesia Amerika (LIA) cabang Jambi
2005-2007	Santriwati di Pondok Pesantren Mahasiswi Daarush Shalihat Yogyakarta asuhan Ustadz Syathori Abdur Rauf
2008	Kursus Bahasa Arab di <i>Mustawa Awwal</i> di Ma'had 'Aly bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lulus ke jenjang berikutnya dengan predikat <i>Mumtaz</i>
2008	Kursus persiapan TOEFL di Lembaga Bahasa Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor akhir tes 543
2009	Kursus Bahasa Arab di <i>Mustawa Tsaniy</i> dan <i>Mustawa Tsaliis</i> di Ma'had Al Manar Masjid Dewan Dakwah Islamiyah Utan Kayu Jakarta Timur

Lampiran 3

PELATIHAN - PELATIHAN

Tahun	Jabatan	Pelatihan	Penyelenggara
2004	peserta	Training Kepemimpinan Jama'ah Shalahuddin tahap I	Jama'ah Shalahuddin UGM
2004	peserta	Training Kepemimpinan Jama'ah Shalahuddin tahap II	Jama'ah Shalahuddin UGM
2005	peserta	Training Kepemimpinan Jama'ah Shalahuddin tahap III	Jama'ah Shalahuddin UGM
2006	peserta	<i>Training For Trainer Living dan Learning Skill</i>	UGM
2006- 2007	Tim Perumus dan panitia pelaksana	Training Kepemimpinan Jama'ah Shalahuddin UGM tahap I, II, dan III	Jama'ah Shalahuddin UGM

PENGALAMAN KEPANITIAAN DAN ORGANISASI

Jabatan	Institusi	Tahun
Ketua Panitia Dialog Terbuka Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa	Jama'ah Shalahuddin UGM	2005
Anggota Tim Hubungan antar lembaga bidang Lembaga Pergerakan Kemahasiswaan dan LSM	Jama'ah Shalahuddin UGM	2004-2005
Ketua Divisi Lembaga Dakwah Intra Kampus dan Alumni	Jama'ah Shalahuddin UGM	2005-2006
Anggota Biro Khusus Kaderisasi	Jama'ah Shalahuddin UGM	2006-2007
Sekretaris dan bendahara	Gerakan Anti Pornografi dan Pomoaksi Yogyakarta	2007-2008

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
Juni-Juli 2006	Anggota Divisi Pendidikan Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada Program Pendistribusian Bantuan dan Rekonstruksi Pasca

	Gempa DIY dan Klaten di Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah
2008	Anggota Tim Trainer ke sekolah-sekolah dalam training dan penyuluhan yang diadakan Gerakan Anti Pornografi dan Pornoaksi Yogyakarta
2004	Ketua kegiatan cerdas cermat dan takbir keliling dalam rangkaian acara Idul Adha MENTARI dengan tema "Menabur Cinta di Nangsri" yang diadakan Jama'ah Muslim FISIPOL UGM di desa Nangsri Kidul Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta
2005-2007	Pendamping panitia Sajadha (Safari Jama'ah Shalahuddin dalam Idul Adha) di berbagai desa di DIY

